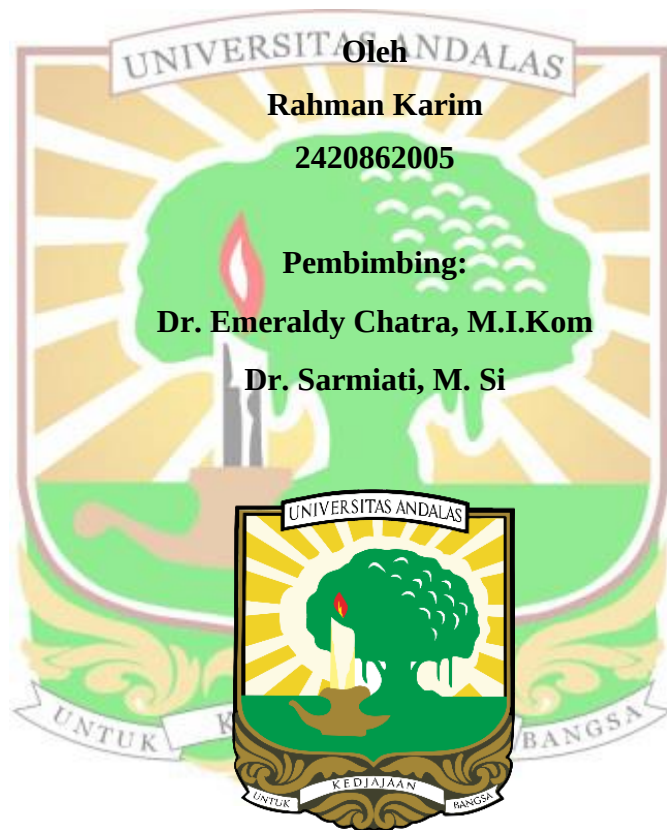


DEKONSTRUKSI PRAKTIK *PUBLIC RELATIONS* PEMERINTAH

(Kajian Komunikasi dengan Pendekatan kritis pada Pembangunan PLTS Terapung
di Danau Singkarak)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas



Oleh

Rahman Karim

2420862005

Pembimbing:

Dr. Emeraldy Chatra, M.I.Kom

Dr. Sarmiati, M. Si

**PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

PERNYATAAN HALAMAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahman Karim

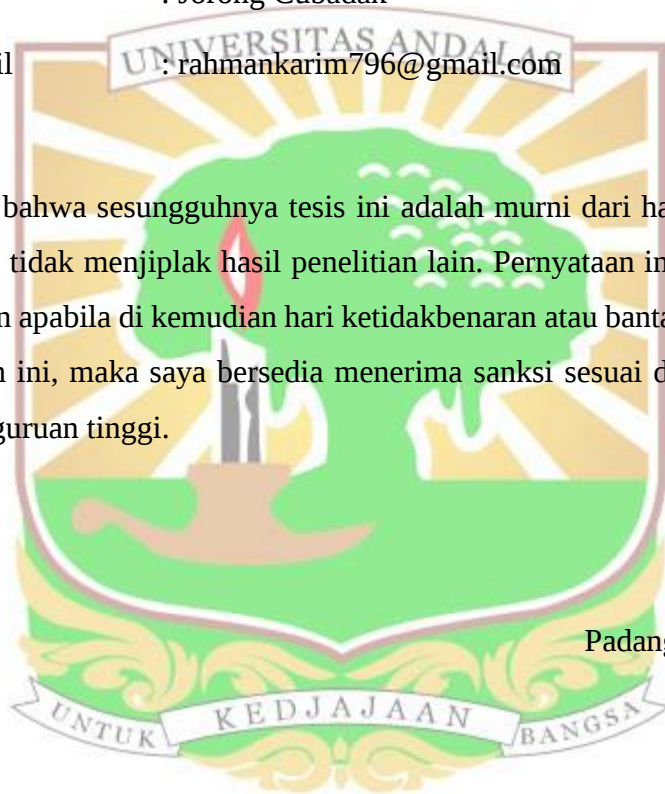
NIM : 2420862005

Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi

Alamat : Jorong Cubadak

Alamat Email : rahmankarim796@gmail.com

Menyatakan bahwa sesungguhnya tesis ini adalah murni dari hasil penelitian yang saya lakukan dan tidak menjiplak hasil penelitian lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ketidakbenaran atau bantahan dari pihak lain dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi.



Padang, 11 Agustus 2026

Rahman Karim

LEMBAR PENGESAHAN

DEKONSTRUKSI PRAKTIK *PUBLIC RELATIONS* PEMERINTAH

(Kajian Komunikasi dengan Pendekatan kritis pada Pembangunan PLTS Terapung
di Dusun Singkaruk)

Nama : Rahman Karim

NIM : 2420362005

*Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Kelulusan Tesis Program Magister
Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Tanggal

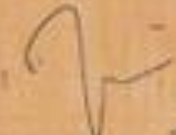
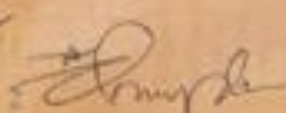
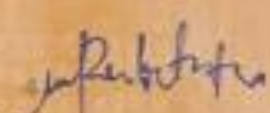
Yulianдре Darwis, Ph.D Penguji

Dr.M.A Dalmeida, M.Si Penguji

Dr. Yuni Puapita, M. Si Penguji

Dr. Emeraldy Chandra, M.I.Kom Pembimbing

Dr. Sarniati, M. Si Pembimbing

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Padang, 11 Agustus 2026

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Nip.196901311994031002

HALAMAN PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas Akademika Universitas Andalas, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rahman Karim
NIM : 2420862005
Program Studi : S-2 Ilmu Komunikasi
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas hak bebas royalti non eksklusif (*non exclusive royalty-free right*) atas karya ilmiah saya dengan judul “DEKONSTRUKSI PRAKTIK *PUBLIC RELATIONS* PEMERINTAH (Kajian Komunikasi dengan Pendekatan kritis pada Pembangunan PLTS Terapung di Danau Singkarak)”.

Dengan hak bebas royalti noneksklusif, Universitas Andalas berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tesis ini untuk kepentingan akademik dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemegang hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padang, 11 Agustus 2026

Saya yang menyatakan

Rahman Karim

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan Tesis ini yang berjudul “DEKONSTRUKSI PRAKTIK *PUBLIC RELATIONS* PEMERINTAH (Kajian Komunikasi dengan Pendekatan kritis pada Pembangunan PLTS Terapung di Danau Singkarak)” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi. Selama proses penelitian ini, penulis memperoleh banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa terima kasih, penulis ingin mengungkapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Jendrius, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
2. Ibu Dr.Tengku Rika Valentina, S.IP., MA. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
3. Ibu Dr.Yevita Nurti, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
4. Ibu Dr. Elva Ronaning Roem, M.Si., Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
5. Ibu Dr. Sarmiati, M.Si, Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
6. Bapak Dr. Emeraldy Chatra, M.I.Kom, sebagai Dosen Pembimbing I, serta Ibu Dr. Sarmiati, M.Si, Dosen Pembimbing II, yang dengan tulus memberikan waktu, bimbingan, masukan, serta arahan yang sangat berharga sepanjang proses penyusunan tesis ini.
7. Bapak Yuliandre Darwis, Ph.D., Dr.M.A Dalmenda, M.Si dan Dr. Yesi Puspita, M. Si, sebagai dosen penguji, terima kasih atas masukan dan saran yang sangat berguna bagi penulis.

8. Bapak/Ibu Dosen, Tenaga Kependidikan, serta seluruh civitas akademika yang telah memberikan ilmu dan dukungan sejak awal kuliah hingga penyelesaian tesis ini.
9. Bapak/Ibu Pegawai dan Staf di Sekretariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas atas kerjasama dan bantuan dalam proses administrasi selama perkuliahan.
10. Bapak Camat Batipuh Selatan, yang telah mendukung dan memfasilitasi kelancaran penelitian ini.
11. Para informan yang telah memberikan waktu, data, serta dokumen yang sangat membantu kelancaran penelitian ini.
12. Orang tua tercinta, Bapak Arjonaidi dan Mama Syafrida, yang telah memberikan perhatian, doa, dan dukungannya yang tiada henti, yang memungkinkan penulis untuk melanjutkan pendidikan di Pascasarjana FISIP Universitas Andalas
13. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2024 dan 2025 yang telah memberikan dukungan moril selama perkuliahan hingga selesainya pendidikan di Ilmu Komunikasi Universitas Andalas.
14. Sico Organizer tim yang saya harap bisa selalu menjaga silaturahmi kita hingga titik sukses masing-masing, Devina yang selalu *back-up* kekurangan kami, Syukri yang selalu ada dengan segala kesibukannya dan Widya si MC kondang yang belum kondangan juga.
15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat penulis hargai. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Padang, 11 Agustus 2026

Penulis,

Rahman Karim

ABSTRAK

Nama : Rahman Karim

Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi

Judul : DEKONSTRUKSI PRAKTIK *PUBLIC RELATIONS* PEMERINTAH (Kajian Komunikasi dengan Pendekatan kritis pada Pembangunan PLTS Terapung di Danau Singkarak).

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Danau Singkarak merupakan bagian dari agenda transisi energi nasional yang memunculkan resistensi masyarakat lokal. Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembangunan, tetapi juga mencerminkan kontestasi makna dalam praktik komunikasi pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik masyarakat lokal terhadap pembangunan PLTS terapung, mengkaji praktik Public Relations PT PLN Indonesia Power sebagai representasi komunikasi pemerintah, serta mendekonstruksi wacana pembangunan untuk mengungkap relasi kuasa, ideologi, dan pengalaman masyarakat yang termarginalkan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan paradigma kritis melalui teori Dekonstruksi Jacques Derrida sebagai teori utama yang didukung Dramaturgi Erving Goffman. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap tiga belas informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Public Relations PT PLN Indonesia Power didominasi pola komunikasi pembangunan yang bersifat top-down konsultatif untuk membangun proyek melalui narasi energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. Namun, narasi tersebut berhadapan dengan pengalaman historis, ruang hidup, dan pengetahuan lokal masyarakat sehingga melahirkan resistensi sebagai bentuk komunikasi kritis. Penelitian ini menemukan bahwa konflik pembangunan terutama dipicu oleh krisis legitimasi komunikasi, bukan semata-mata penolakan terhadap energi terbarukan, sehingga menawarkan perspektif baru dalam kajian Critical Public Relations dan komunikasi pembangunan.

Kata Kunci: *Public Relations*, komunikasi pembangunan, dekonstruksi, *impression management*, PLTS Terapung.

ABSTRACT

Name : Rahman Karim

Major : Master's Program in Communication Science

Title : *Deconstruction of PT PLN Indonesia Power's Public Relations Practices in the Development Communication of the Singkarak Floating Solar Power Plant*

The development of the Floating Solar Power Plant (FSPP) on Lake Singkarak is part of Indonesia's national energy transition agenda, yet it has generated significant resistance from local communities. This conflict extends beyond technical and environmental concerns, reflecting a contestation of meanings within development communication practices. This study aims to analyze the local community's resistance to the Floating Solar Power Plant project, examine the Public Relations practices of PT PLN Indonesia Power as the government's communication representative, and deconstruct the development discourse to reveal the underlying power relations, ideology, and marginalized local experiences. Employing a qualitative method within a critical paradigm, this research applies Jacques Derrida's Deconstruction Theory as its primary analytical framework, supported by Erving Goffman's Dramaturgical Theory, Critical Public Relations, and Critical Development Communication. Data were collected through indepth interviews, observation, documentation, and involving thirteen purposively selected informants. The findings indicate that PT PLN Indonesia Power's Public Relations practices predominantly employed a consultative top-down communication model to establish project legitimacy through narratives of renewable energy and sustainable development. However, these narratives encountered local historical experiences, socio-cultural values, and community knowledge, resulting in resistance as a form of critical communication. This study concludes that the conflict surrounding the Floating Solar Power Plant is fundamentally rooted in a crisis of communication legitimacy rather than opposition to renewable energy itself, thereby offering a theoretical contribution to the fields of Critical Public Relations and Development Communication.

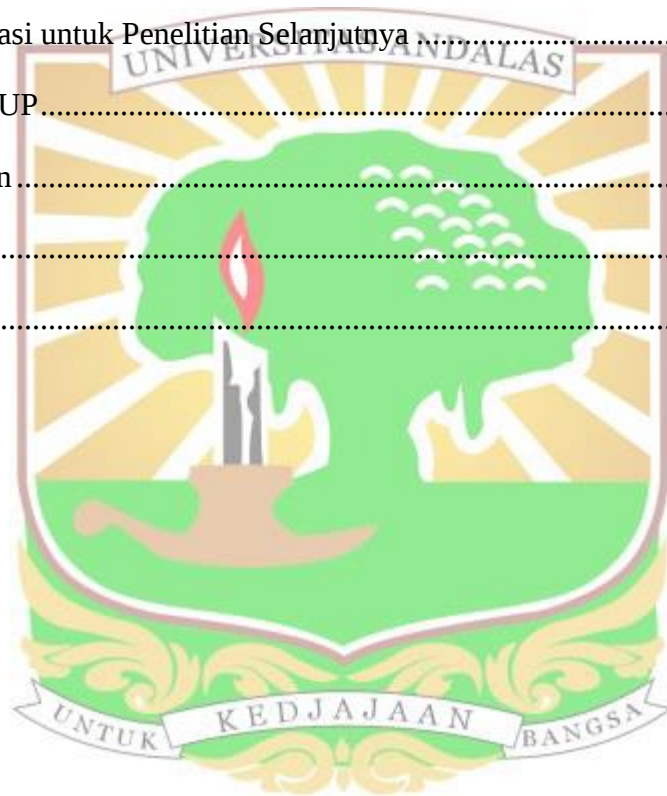
Keywords: Public Relations, development communication, deconstruction, impression management, Floating Solar Power Plant.

Daftar Isi

PERNYATAAN HALAMAN KEASLIAN TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Relevan	9
2.2 Kerangka Konseptual	17
2.2.1 Public Relations.....	17
2.2.2 Dekonstruksi dalam Kajian Komunikasi	18
2.2.3 Komunikasi Pembangunan dalam Perspektif Kritis	19
2.2.4 Resistensi Lokal sebagai Praktik Komunikasi.....	21
2.2.5 Ideologi dalam Praktik <i>Public Relations</i>	22
2.2.6 Hegemoni dalam komunikasi public relations	24

2.2.7 Manajemen Kesan (<i>Impression Management</i>) dalam Praktik Public Relations Pembangunan	25
2.2.8 Sintesis <i>Impression Management</i> , Dramaturgi, dan Dekonstruksi dalam Penelitian	28
2.3 Kerangka Teoritis	32
2.3.1 Dekonstruksi Jacques Derrida	32
2.3.2 Dramaturgi Erving Goffman.....	34
2.4 Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Pendekatan Penelitian.....	38
3.3 Implikasi Metodologis dalam Penelitian Ini.....	40
3.4 Paradigma Penelitian	41
3.6 Informan Penelitian	42
3.7 Sumber Data	43
3.8 Teknik Pengumpulan Data	44
3.9 Teknik Analisis Data Kualitatif.....	45
3.10 Validitas Data	46
3.11 Lokasi Penelitian	48
3.12 Jadwal Penelitian	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Profil Singkat Batipuh Selatan dan PLTS Danau Singkarak.....	51
4.2 Profil Informan	55
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan	60
4.3.1 Analisis Konflik Masyarakat Lokal dalam Penolakan PLTS Terapung	60

4.3.2 Praktik <i>Public Relations</i> Pemerintah dalam Komunikasi Pembangunan PLTS Terapung.....	83
4.4.3 Dekonstruksi Wacana Pembangunan untuk Mengungkapkan Relasi Kuasa Berdasarkan Pengalaman Masyarakat Lokal yang Disingkirkan.....	107
4.4 Sintesis Menuju Komunikasi Pembangunan yang Refleksif.....	112
4.5 Implikasi Praxis	116
4.6 Keterbatasan Penelitian	122
4.7 Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya	122
BAB VI PENUTUP.....	126
5.1 Kesimpulan.....	126
5.2 Saran	127
Daftar Pustaka	128



Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Kerangka berpikir	37
Gambar 4. 1 Salingka Danau Singkarak	51
Gambar 4. 2 Map Batipuh Selatan	52
Gambar 4. 3 Berita lokasi tanah konflik	63
Gambar 4. 4 Website Perusahaan kolaboratif	65



Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3. 1 Contoh dekontruksi makna	39
Tabel 3. 2 Kategori Informan	43
Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian	48
Tabel 4. 1 Data Informan	55
Tabel 4. 2 Dampak pertunjukan terhadap setiap aktor	89
Tabel 4. 3 Temuan Oposisi Biner	107



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Danau Singkarak dipromosikan pemerintah sebagai bentuk kemajuan transisi energi dan keberlanjutan lingkungan. Namun, penolakan masyarakat lokal di Tanah Datar, Kecamatan Batipuh selatan menunjukkan bahwa proyek ini bukan sekadar persoalan teknis dan infrastruktur, tetapi pertarungan makna, kepentingan, dan identitas lokal.

Pembangunan infrastruktur energi kerap diposisikan sebagai solusi rasional atas krisis energi dan perubahan iklim global. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, energi terbarukan dipromosikan sebagai jalan tengah antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa proyek energi terbarukan tidak selalu diterima secara positif oleh masyarakat lokal, terutama ketika pembangunan dilakukan secara top-down dan mengabaikan konteks sosial, ekologis, serta budaya setempat (Brás dkk., 2024).

Transisi energi menuju sumber energi terbarukan telah menjadi diskursus global yang dilembagakan melalui kebijakan negara, perjanjian internasional, serta narasi keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Indonesia, sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), memposisikan energi surya sebagai salah satu solusi strategis dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dalam kerangka ini, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Danau Singkarak diproyeksikan sebagai simbol kemajuan, modernisasi energi, dan komitmen negara terhadap pembangunan berkelanjutan.

Namun, realitas sosial di tingkat lokal menunjukkan dinamika yang berbeda. Alih-alih diterima sebagai solusi hijau, proyek PLTS terapung di Danau Singkarak justru memicu penolakan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Penolakan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari pengalaman historis, kekhawatiran ekologis, serta ketidakpercayaan terhadap praktik komunikasi dan pengambilan keputusan pemerintah. Fenomena ini menandai adanya ketegangan antara narasi pembangunan negara dan realitas kehidupan masyarakat lokal. Masyarakat Danau Singkarak menggantungkan hidup pada danau mengelola ikan Bilih, kebun, sawah,

lanskap budaya, dan pariwisata. Munculnya PLTS terapung dipersepsikan sebagai ancaman ekologis dan ekonomi, serta simbol subordinasi kepentingan lokal oleh agenda nasional. Di sinilah *Public Relations* (PR) pemerintah yang direpresentasikan oleh PT. Indonesia Power sebagai BUMN yang menerima mandat, tampil sebagai aktor kunci yang membingkai pembangunan sebagai kemajuan namun, justru menimbulkan konflik komunikasi. Begitu juga yang disampaikan salah seorang pemangku kepentingan di kecamatan Batipuh Selatan, yang menjelaskan bahwa di dalam perspektifnya belum tentu seluas masyarakat karena mereka lebih memahami permasalahan yang terjadi.

Menariknya, menurunnya kepercayaan terhadap pembangunan PLTS terapung tidak hanya disuarakan oleh masyarakat Batipuh Selatan yang secara langsung berada pada kawasan terdampak pembangunan, tetapi juga memperoleh dukungan dari masyarakat yang berada di 13 nagari di sekitar Danau Singkarak. Temuan ini menunjukkan bahwa penolakan masyarakat tidak semata-mata didasarkan pada kekhawatiran terhadap dampak fisik pembangunan, melainkan juga berkaitan dengan kesadaran kolektif mengenai keberlanjutan ruang hidup danau sebagai sumber ekonomi, budaya, dan identitas masyarakat.

Danau Singkarak dipandang bukan sebagai wilayah yang terpisah berdasarkan batas administratif, melainkan sebagai satu kesatuan ruang sosial-ekologis yang saling terhubung. Oleh karena itu, potensi perubahan ekosistem danau akibat pembangunan PLTS terapung dipersepsikan sebagai ancaman bersama yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh kawasan lingkaran Danau Singkarak.

Logika *Critical Public Relations* mengungkap pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan memproduksi makna, legitimasi, dan kebenaran pembangunan (Holtzhausen dkk. 2015). Melalui retorika pembangunan demi kemajuan, praktik PR pemerintah cenderung bersifat hegemonik memobilisasi dukungan, membingkai keberatan warga sebagai “misinformasi”, dan mengabaikan epistemologi lokal masyarakat pesisir danau.

Praktik *Public Relations* pemerintah tidak dimaknai secara sempit sebagai aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintahan daerah maupun kementerian, melainkan mencakup praktik komunikasi pembangunan yang dijalankan oleh PT PLN Indonesia Power sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memperoleh mandat

negara dalam pelaksanaan proyek strategis energi. Sebagai pelaksana proyek PLTS terapung di Danau Singkarak, PT PLN Indonesia Power berperan sebagai aktor komunikasi yang menghubungkan agenda pembangunan nasional dengan masyarakat lokal melalui berbagai aktivitas sosialisasi, konsultasi publik, dan penyampaian informasi pembangunan. Oleh karena itu, praktik komunikasi yang dilakukan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan negara dalam mewujudkan transisi energi nasional dan agenda pembangunan berkelanjutan (L'Etang, 2008; Edwards, 2018).

Daya tarik konflik yang terjadi adalah secara dekonstruktif bisa menjadi alternatif bahwa tidak ada gugusan makna atau kebenaran tunggal (Faishal, 2022). Menggali makna dari pesan komunikasi yang digunakan hingga dapat menimbulkan sebuah penolakan kuat dari masyarakat bahwa sosialisasi dan pesan yang disampaikan pemerintah memiliki sebuah ketidakjelasan makna.

Pada tahun 1992 terdapat pembangunan PLTA Singkarak yang di jalan oleh PLN Indo, menjadi salah satu efek traumatis bagi masyarakat sekitar. sebagian besar volumenya dialirkan melalui terowongan PLTA Singkarak sepanjang 17 Km ke daerah Asam Pulau untuk menghasilkan energi listrik sebesar 175 MW dan bermuara ke pantai barat Pulau Sumatera di Kabupaten Padang Pariaman (Umam dkk., 2024). Sementara sungai Batang Ombilin yang sebelumnya menjadi outlet utama mulai diatur dengan dipasang pintu air, sehingga menurut keluhan masyarakat mengakibatkan debit air dari danau ke sungai Batang Ombilin menjadi berkurang, terdapat penumpukan sampah dan sedimentasi, dan berkurangnya populasi ikan *Bilih* karena terbawa arus ke terowongan PLTA.

Seharusnya para pemegang kekuasaan dapat belajar dari kasus ini bahkan mengambil pelajaran dan metode dari kajian-kajian sebelumnya seperti kasus yang pernah terjadi di Portugal hingga beberapa titik di Indonesia seperti Gunung Talang dengan wacana PLTP yang juga menimbulkan penolakan bagi masyarakat lokal dengan karakter budaya yang tidak terlalu jauh berbeda.

Dukungan penolakan yang meluas ini memperlihatkan bahwa konflik pembangunan PLTS terapung telah bergerak dari persoalan teknis proyek menjadi persoalan komunikasi publik. Masyarakat tidak hanya mempertanyakan dampak ekologis pembangunan, tetapi juga mempertanyakan proses komunikasi, transparansi informasi, serta keterlibatan

masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi pembangunan yang diproduksi oleh aktor pembangunan dengan pengalaman dan pengetahuan yang di miliki masyarakat lokal mengenai ruang hidup mereka sendiri. Dalam perspektif komunikasi kritis, situasi tersebut mencerminkan terjadinya kontestasi makna antara wacana pembangunan yang dibangun oleh negara dengan realitas sosial yang dialami masyarakat (Fairclough, 1995 & Obregon, 2014).

Undang-Undang (UU) no.30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan telah mengatur bagaimana aturan perizinan, keselamatan, pemanfaatan sumber energi primer, dan kewajiban penyedia tenaga listrik. Izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi memiliki beberapa regulasi izin dimulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota.

Kajian kritis memandang *Public Relations* bukan hanya sebagai penyampain pesan, tetapi instrumen kekuasaan yang membentuk realitas (Motion & Weaver, 2005). Dengan demikian, konflik Singkarak dapat dibaca sebagai perlawanan terhadap produksi wacana pembangunan oleh negara yang mengabaikan pengetahuan lokal. Penelitian ini penting untuk mengungkap bagaimana komunikasi pembangunan membentuk penerimaan, oposisi biner, dan resistensi sosial

Komunikasi tidak hanya menjadi sarana untuk bertukar informasi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk membangun kesepahaman, memperkuat solidaritas kelompok, dan mempertahankan posisi dalam struktur sosial dan politik (Littlejohn et al., 2011). Tidak adanya keterlibatan kaum marginal atau masyarakat menjadi sebuah ketimpangan dalam mengambil sebuah keputusan untuk sebuah kemajuan. (Hebermas, 1984). Objektivitas sebuah inovasi pembaharuan tentunya membutuhkan sebuah sudut pandang yang lebih mendalam dimana sudut pandang ini hanya bisa lahir dari induk pemikiran masyarakat yang terdampak dan juga telah hidup lama berdampingan dengan daerah.

Transisi energi berbasis energi terbarukan menjadi agenda nasional PLN Indonesia Power yang diakui melalui wacana keberlanjutan, efisiensi energi, dan modernisasi pembangunan. Pemerintah mengklaim proyek PLTS terapung sebagai representasi masa depan energi hijau. Namun, pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak justru memunculkan konflik dan penurunan kepercayaan warga Tanah Datar suatu fenomena

yang memperlihatkan adanya ketimpangan komunikasi, ketergelinciran representasi kepentingan, dan marginalisasi pengetahuan lokal.

Seperti dikatakan Habermas (1984) komunikasi modern sering kali terdistorsi karena peran sistem teknokrasi negara mengkolonisasi dunia kehidupan masyarakat, menyebabkan dialog terhambat (Roderick, 1986). Hal ini tampak pada Singkarak proyek diklaim partisipatif, tetapi warga mengeluhkan minimnya konsultasi dan ancaman terhadap ekosistem *Bilih*, ruang ekonomi, spiritualitas danau, serta kedaulatan adat.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa konflik pembangunan bukan sekadar teknis ekologis, tetapi persoalan komunikasi kekuasaan dan produksi makna. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan mendekonstruksi praktik PR pemerintah dalam memaknai dan menerima pembangunan PLTS di Danau Singkarak.

Kasus Serupa bukan hanya terjadi di Tanah Datar saja melainkan sebelumnya sudah terjadi di beberapa daerah yang harusnya sudah menjadi pelajaran dalam transisi kemajuan tenaga surya. Layaknya sebuah kontroversi yang sebelumnya terjadi di desa cercal di Alentejo, Portugal Selatan. Masyarakat berpendapat bahwa transisi energi hegemonik ini menjadi “zona pengorbanan hijau” yang mengesampingkan mata pencarian masyarakat.

Bagian kajian komunikasi kritis, konflik pembangunan tidak dipahami semata sebagai persoalan teknis atau administratif, melainkan sebagai pertarungan wacana dan relasi kuasa (Fairclough, 1995) Negara, melalui aparatus komunikasinya termasuk *public relations*, memiliki kemampuan struktural untuk mendefinisikan apa yang disebut sebagai pembangunan, kepentingan umum, dan kemajuan. Sementara itu, masyarakat lokal sering kali diposisikan sebagai objek pembangunan, bukan subjek yang memiliki otoritas epistemik atas ruang hidupnya sendiri.

Danau Singkarak bukan sekadar badan air yang dapat dipetakan dalam kalkulasi teknis energi. Ini merupakan ruang hidup ekologis, ekonomi, kultural, dan simbolik bagi masyarakat Minangkabau. Kehidupan nelayan ikan *Bilih*, pariwisata lokal, serta nilai adat yang melekat pada danau membentuk lifeworld masyarakat (Habermas, 1984). Ketika proyek PLTS terapung direncanakan tanpa dialog yang setara dan partisipatif, masyarakat memaknai pembangunan tersebut sebagai ancaman terhadap keberlanjutan hidup mereka. Di sinilah praktik *Public Relations* pemerintah menjadi krusial.

Public Relations tidak lagi dapat dipahami sebagai fungsi netral penyampai informasi, melainkan sebagai instrumen ideologis yang memproduksi legitimasi pembangunan (Motion & Weaver, 2005) Melalui bahasa kebijakan, siaran pers, dan framing media, pembangunan PLTS dibingkai sebagai “energi hijau”, “kepentingan nasional”, dan “kemajuan daerah”. Sebaliknya, suara masyarakat yang mempertanyakan dampak ekologis dan sosial sering direduksi sebagai bentuk resistensi irasional atau ketidakpahaman terhadap teknologi.

Gambaran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang telah disosialisasikan kepada masyarakat pada 02 Oktober 2025 masih belum bisa diterima oleh masyarakat disebabkan bukan hanya sekadar mempertimbangkan faktor dari ekologi lokal saja tetapi masyarakat belajar dari kejadian yang sebelumnya terjadi tidak sesuai dengan janji yang diberikan kepada mereka.

Kajian *Critical Public Relations* menegaskan bahwa praktik humas selalu terikat pada relasi kuasa dan kepentingan dominan (L’Etang, 2005) Dalam konteks Singkarak, PR pemerintah beroperasi dalam struktur negara yang menempatkan pembangunan sebagai agenda utama, sementara keberatan masyarakat lokal dianggap sebagai hambatan yang perlu dikelola. Pendekatan komunikasi semacam ini berpotensi melahirkan apa yang disebut Habermas sebagai komunikasi terdistorsi, yakni komunikasi yang tampak dialogis namun sesungguhnya tidak memberikan ruang deliberatif yang setara.

Meskipun hubungan masyarakat mungkin merupakan bagian penting dari budaya kontemporer, kita perlu mendekonstruksinya. Mendekonstruksi berarti melihat ide-ide yang tersembunyi di balik materi yang telah kita hasilkan mengupas lapisan-lapisan yang ada di depan kita tetapi seringkali tersembunyi sampai kita melihatnya (Mikey, 2003). Berdasarkan permasalahan di atas, terlihat sikap penolakan masyarakat terhadap pembangunan PLTS yang merupakan sebuah inovasi baru dalam menghasilkan dan memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia.

Permasalahan inilah yang mendorong dan membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dekonstruksi komunikasi PR pemerintah dalam penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTS tersebut. Penelitian ini saya berikan judul “DEKONSTRUKSI PRAKTIK *PUBLIC RELATIONS*

PEMERINTAH (Kajian Komunikasi dengan Pendekatan kritis pada Pembangunan PLTS Terapung di Danau Singkarak)”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana praktik *Public Relations* pemerintah dalam pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak memicu resistensi dan konflik dengan masyarakat lokal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka ketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut

1. Menganalisis konflik masyarakat lokal dalam penolakan pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak.
2. Mengkaji secara kritis praktik *Public Relations* pemerintah dalam komunikasi pembangunan PLTS terapung.
3. Mendekonstruksi wacana pembangunan untuk mengungkap relasi kuasa berdasarkan pengalaman masyarakat lokal yang disingkirkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan membantu pembaca untuk memahami dekonstruksi praktik public relation pemerintah dalam konflik masyarakat lokal terhadap pembangunan PLTS di Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar

1.4.1 Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi kritis, khususnya dalam bidang *Critical Public Relations* dan komunikasi pembangunan, dengan menempatkan konflik masyarakat lokal sebagai pusat analisis sebagai berikut

1. Memperkuat kajian *Critical Public Relations* dengan menunjukkan bahwa praktik *Public Relations* pemerintah dalam pembangunan bukan sekadar aktivitas informatif, tetapi merupakan praktik komunikasi yang berperan dalam pembentukan legitimasi kebijakan dan relasi kuasa antara negara dan masyarakat lokal.
2. Memperkaya perspektif komunikasi pembangunan kritis dengan menempatkan konflik dan penolakan masyarakat lokal sebagai objek analisis utama, sehingga

komunikasi pembangunan dipahami sebagai arena kontestasi makna, bukan proses komunikasi yang bersifat linear dan teknokratis.

3. Mengembangkan penggunaan pendekatan dekonstruktif dalam penelitian komunikasi, khususnya sebagai kerangka analisis wacana dan praktik komunikasi kebijakan yang tidak berfokus pada aspek linguistik, tetapi pada relasi kuasa, ideologi, dan hegemoni dalam komunikasi publik.
4. Memberikan kontribusi konseptual terhadap studi konflik komunikasi, dengan memaknai resistensi masyarakat lokal sebagai bentuk komunikasi kritis dan ekspresi kegagalan komunikasi dialogis antara pemerintah dan publik.
5. Menjadi rujukan akademik bagi penelitian komunikasi selanjutnya, terutama yang mengkaji peran komunikasi dan *Public Relations* dalam konflik pembangunan, kebijakan energi terbarukan, dan hubungan negara–masyarakat dalam konteks lokal.

1.4.2 Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis yang bersifat transformatif sebagai berikut

1. Mendorong transformasi praktik *Public Relations* pemerintah dari komunikasi yang bersifat top-down menuju komunikasi pembangunan yang dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada keterlibatan masyarakat lokal.
2. Menjadi bahan refleksi kritis bagi pemerintah dan praktisi PR dalam merancang strategi komunikasi pembangunan yang lebih peka terhadap konteks sosial, budaya, dan ekologis masyarakat terdampak.
3. Mendorong pergeseran paradigma komunikasi pembangunan dari sekadar legitimasi kebijakan menuju komunikasi yang menempatkan keadilan sosial dan keberlanjutan sebagai orientasi utama.
4. Memberikan dasar konseptual bagi perbaikan pengelolaan konflik komunikasi, dengan memandang resistensi masyarakat sebagai masukan komunikatif yang konstruktif, bukan hambatan pembangunan.
5. Mendukung terciptanya tata kelola komunikasi kebijakan yang lebih demokratis, transparan, dan berimbang dalam relasi antara negara dan masyarakat lokal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Penelitian sebelumnya penting sebagai rujukan akademik untuk memperkuat Penelitian ini memerlukan referensi dari penelitian terkait di masa lalu dan menggabungkan konsekuensi dari penelitian sebelumnya. Hasil-hasil ini berfungsi sebagai panduan dan referensi untuk penelitian di masa depan. Referensi ini mencakup teori, konsep, objek penelitian, dan subjek, serta temuan yang relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga mendukung penelitian. Selain itu, referensi-referensi ini membantu menghindari kesan kemiripan dengan penelitian sebelumnya (Bungin, 2017).

Beberapa Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi akan kemajuan transisi energi yang sering terjadi perlawanan dari masyarakat lokal. Bagi publik relations ini sebenarnya bisa menjadi sebuah pelajaran dari penelitian yang pernah diambil sebelumnya, terutama dalam penyampain pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar paham dan bisa memberikan solusi yang solusional.

Konteks budaya menjadi kunci utama bagaimana sebuah inovasi dalam transisi teknologi dan energi dapat diterima di masyarakat. Misalnya, dalam tradisi Minangkabau, kata-kata yang harus dipilih bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat atas pertimbangan kebijaksanaan agar tidak dianggap menyinggung harga diri dan juga pertimbangan kebutuhan masyarakat yang dikesampingkan dari apa yang selama ini mereka jaga.

Penelitian tentang praktik public relation memang masih sangat minim terutama di kaitakan dengan relasi kuasa dalam komunikasi. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang sejalan dengan penelitian ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian

1.	Oriana Rainho Bras, Vera Ferreira, Antonio Carvalho Jurnal Energy Research & Social Science Volume 113, July 2024, 103529	People of the sun Local resistance and solar energy (in)justice in southern Portugal	Proyek PLTS memicu ketidakadilan distribusional, prosedural, dan pengakuan; masyarakat lokal tidak dilibatkan secara bermakna dan wilayah dijadikan green sacrifice zone Proyek energi terbarukan dipersepsikan sebagai bentuk green grabbing dan menjadikan wilayah lokal sebagai green sacrifice zones. Proses konsultasi publik dianggap simbolik dan tidak memberikan ruang partisipasi bermakna bagi masyarakat lokal Portugal.	Penelitian ini menggunakan kerangka keadilan energi, sedangkan penelitian penulis secara spesifik mendekonstruksi praktik <i>Public Relations</i> pemerintah dan produksi wacana pembangunan dalam konteks lokal Indonesia
----	--	---	---	---

2.	Ali Ar-Ridho & Ishartono Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Volume 1 nomor 2 Halaman 70-141 ISSN 2655-8823	Konflik Kepentingan Lahan Warga RW 11 Tamansari dengan Pemerintah Kota Bandung	Konflik muncul akibat komunikasi pemerintah yang bersifat sepihak dan relasi kuasa yang timpang, kepentingan warga terpinggirkan dalam kebijakan pembangunan rumah deret Konflik dianalisis sebagai dampak dari relasi kuasa yang timpang antara negara dan warga, dengan pendekatan teori konflik struktural dan kekuasaan.	Penelitian ini menitikberatkan pada konflik lahan dan kebijakan perumahan dengan pendekatan sosiologi konflik, sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik <i>Public Relations</i> pemerintah dengan pendekatan dekonstruksi dan komunikasi kritis
3.	Rosa Gamayanti & Soni Akhmad Nulhaqim Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Volume 1 nomor 1	Konflik PLTU Indramayu II dengan Warga Mekarsari	Konflik disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar warga (keamanan, pengakuan, partisipasi) sehingga memicu	Penelitian ini berorientasi pada resolusi konflik dan pemenuhan kebutuhan manusia, sementara penelitian penulis

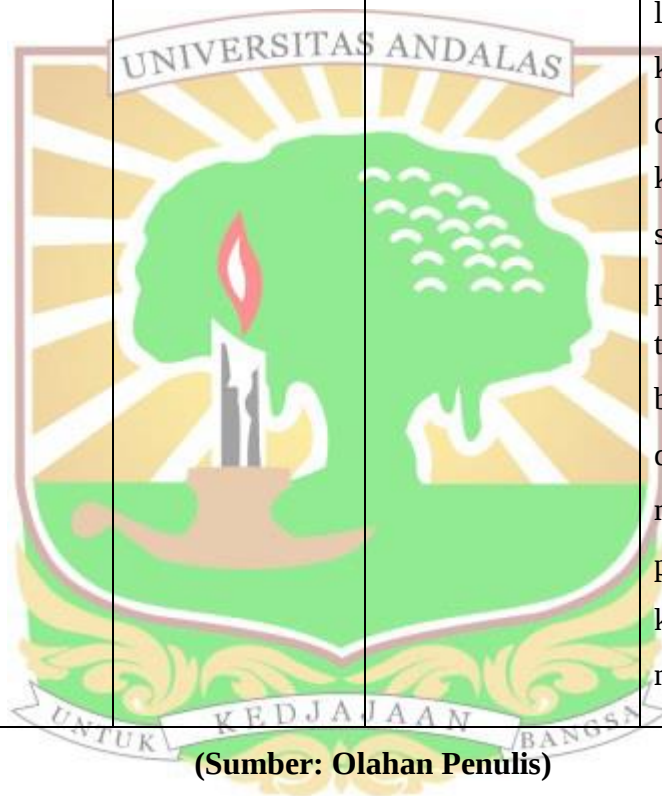
	Halaman 1-70 ISSN 2655-8823		resistensi dan eskalasi konflik. Fokus utama penelitian ini adalah resolusi konflik melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.	mengkaji bagaimana konflik diproduksi melalui praktik komunikasi PR pemerintah dan wacana legitimasi kebijakan
4.	Giovana Sanchez Nieminen & Essi Laitinen Jurnal Energy Research & Sosial Science Volume 122, April 2025, 103995	Understanding Local Opposition to Renewable Energy Projects in the Nordic Countries	Kajian sistematis ini menunjukkan bahwa penolakan masyarakat terhadap proyek energi terbarukan dipicu oleh berbagai faktor, seperti dampak lingkungan, gangguan lanskap, ketidakpercayaan terhadap proses regulasi, minimnya kompensasi, dan ancaman terhadap identitas budaya lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa konflik	Penelitian ini bersifat komparatif dan makro melalui tinjauan literatur sistematis, sedangkan penelitian penulis bersifat kontekstual dan kritis pada satu kasus spesifik, dengan fokus pada praktik komunikasi PR pemerintah sebagai produsen

			energi bersifat multidimensional dan tidak dapat disederhanakan sebagai sikap NIMBY.	
5.	Jorg Radtke & David Löw-Beer Jurnal Energy Strategy Reviews Volume 61, September 2025, 101844	Unpacking Local Energy Conflicts Drivers, Narratives, and Dynamics of Local Resistance in Germany	Penelitian ini menemukan bahwa resistensi masyarakat lokal terhadap proyek energi terbarukan di Jerman lebih banyak dipicu oleh ketidakadilan prosedural dan kegagalan tata kelola, bukan semata-mata agenda populisme kanan. Narasi anti-elit dan tuntutan pengakuan muncul sebagai respons atas praktik perencanaan yang tidak transparan dan tidak partisipatif.	Penelitian ini menyoroti populisme dan tata kelola energi, sedangkan penelitian penulis memusatkan perhatian pada PR pemerintah sebagai aparatus komunikasi kekuasaan dan dekonstruksi wacana pembangunan

6.	Sarah Padyk Thesis Faculty at the University of North Carolina in Hussman School of Journalism and Media	Connecting The Dots An Analysis Of How Localized Renewable Energy Resistance And Industry Communication Strategies Align In The Post- Truth Era	Menempatkan konflik energi surya dalam kerangka partisipasi public dan keadilan yang menganalisis relasi kuasa mengenai ketimpangan pengambilan kebijakan dan masyarakat local yang diposisikan sebagai penerima keputusan	Penelitian ini mengenai analisis konflik sosial mengenai partisipasi publik dengan transisi energi, sedangkan penelitian penulis menempatkan public relation pemerintah sebagai objek
7	Eril Sastra Hadi, Eka Vidya Putra Jurnal Perspektif Jurnal kajian Sosiologi dan Pendidikan Vol. 2 no.3 tahun 2019	Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Gunung Talang Kabupaten Solok	Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, faktor pengetahuan, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat mengenai teknologi geothermal yang disebabkan oleh	fokus konflik pembangunan energi dan penolakan masyarakat lokal. Keduanya sama- sama menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam dinamika konflik serta menggunakan pendekatan

			minimnya sosialisasi dan keterbatasan akses informasi. Kedua, faktor ekonomi, di mana masyarakat memandang pembangunan PLTP berpotensi merugikan mata pencarian mereka sebagai petani akibat ancaman terhadap kesuburan tanah dan sumber air. Ketiga, faktor sosial budaya, terutama terkait dengan sistem kepemilikan tanah ulayat dalam masyarakat Minangkabau yang menempatkan tanah sebagai simbol identitas dan keberlanjutan adat.	kualitatif untuk memahami realitas sosial secara mendalam. Selain itu, kedua penelitian menyoroti minimnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat sebagai faktor krusial yang memicu resistensi. Sebaliknya, penelitian ini memposisikan konflik penolakan masyarakat lokal sebagai masalah komunikasi publik dan praktik Public Relations pemerintah. Penelitian ini tidak hanya bertanya <i>mengapa</i> masyarakat menolak, tetapi
--	--	--	---	---

				lebih jauh mengkaji <i>bagaimana</i> wacana pembangunan diproduksi oleh pemerintah, bagaimana legitimasi kebijakan dibangun melalui komunikasi resmi, serta bagaimana praktik PR tersebut berkontribusi dalam meminggirkan pengalaman dan kepentingan masyarakat lokal.
--	--	--	--	--



(Sumber: Olahan Penulis)

Berdasarkan kajian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa konflik pembangunan dan energi terbarukan umumnya dianalisis melalui perspektif konflik sosial, kebutuhan manusia, keadilan energi, dan tata kelola. Namun, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji praktik *Public Relations* pemerintah sebagai relasi kuasa. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menempatkan dekonstruksi praktik PR pemerintah sebagai pintu masuk utama untuk memahami resistensi masyarakat lokal terhadap pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Public Relations

Public Relations (PR) adalah disiplin komunikasi yang berperan sebagai jembatan strategis antara organisasi dan publiknya, bertugas membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan. Dalam konteks pemerintahan, PR tidak hanya berfungsi sebagai kanal komunikasi informasi, tetapi juga sebagai alat legitimasi kebijakan dan pembentukan persepsi publik terhadap program pembangunan (Hallahan et al., 2001). Beberapa studi terbaru menyoroti kebutuhan kritikal terhadap pendekatan PR tradisional yang terlalu berfokus pada penyampaian pesan *top-down*, tanpa menempatkan masyarakat sebagai partisipan aktif. Misalnya, penelitian yang membahas hubungan PR dengan komunikasi pembangunan menekankan perlunya kolaborasi komunikasi yang memberdayakan komunitas lokal, bukan sekadar manajemen pesan dari pemerintah ke publik (Joshi, 2025).

Selain itu, dinamika PR juga tercermin dalam kajian tentang peran PR dalam kampanye yang menentang dominasi wacana hegemonik. Penelitian kasus kampanye *Poor People's Campaign* menunjukkan PR bisa memainkan peran dalam counter hegemoni, yaitu melawan dominasi naratif utama dengan strategi komunikatif yang dirancang untuk merangkul dan menyatukan kelompok marginal (analisis PR dalam counterhegemony, 2023). Praktik pemerintahan, terutama dalam konteks pembangunan besar, kesalahan dalam strategi PR seringkali muncul berupa kurangnya keterlibatan publik, minimnya transparansi, dan upaya yang lebih banyak mengutamakan kepentingan institusional daripada pengalaman warga. Studi tentang krisis kepercayaan publik di Indonesia misalnya menunjukkan bahwa respons lambat, kurangnya transparansi, dan narasi yang tidak kredibel memperburuk relasi antara pemerintah atau jaringan aktor negara dan masyarakat. Ini menegaskan pentingnya PR yang adaptif, responsif, dan berbasis dialog untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan publik.

Critical Public Relations (CPR) berkembang sebagai kritik terhadap paradigma dominan *Public Relations* yang bersifat fungsionalis dan manajerial. Paradigma tradisional memandang *Public Relations* sebagai instrumen netral untuk membangun hubungan harmonis antara organisasi dan publik. Sebaliknya, CPR menempatkan *Public*

Relations sebagai praktik diskursif yang terikat pada relasi kuasa, ideologi, dan kepentingan politik (Holtzhausen, 2012). Konteks pemerintahan, praktik *Public Relations* berfungsi tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi kebijakan, tetapi juga sebagai mekanisme produksi makna yang menopang legitimasi negara. Wacana yang dibangun melalui PR pemerintah cenderung mempresentasikan pembangunan sebagai keniscayaan rasional, ilmiah, dan demi kepentingan bersama, sekaligus mereduksi atau menyingkirkan pengalaman kelompok yang terdampak secara langsung (Theaker, 2004).

Pendekatan CPR memungkinkan analisis terhadap bagaimana pesan, simbol, dan narasi pembangunan diproduksi untuk mempertahankan dominasi negara serta menormalisasi ketimpangan relasi antara pemerintah dan masyarakat (Lestari, 2024). Oleh karena itu, CPR relevan untuk mengkaji konflik komunikasi dalam proyek pembangunan, khususnya ketika *Public Relations* berfungsi sebagai aparatus ideologis negara.

Dengan demikian, dalam kajian ini PR tidak dipahami sebagai tugas informasi semata, tetapi sebagai praktik komunikasi yang politis, berpotensi menjaga kekuasaan atau sekaligus membuka ruang resistensi sosial. Peran PR dalam konteks pembangunan termasuk PLTS di Danau Singkarak harus dianalisis dari segi struktur kekuasaan komunikasi, bukan hanya efektivitas teknis pesan.

2.2.2 Dekonstruksi dalam Kajian Komunikasi

Dekonstruksi, yang diperkenalkan oleh Jacques Derrida, digunakan dalam kajian komunikasi sebagai pendekatan kritis untuk membongkar klaim makna tunggal dan stabil dalam teks serta wacana (Derrida, 1981). Dekonstruksi menolak anggapan bahwa bahasa bersifat netral, dan sebaliknya menegaskan bahwa makna selalu dibentuk melalui relasi kuasa dan konteks sosial. Dekonstruksi berfungsi untuk mengungkap oposisi biner seperti pembangunan/penolakan, rasional/emosional, nasional/lokal yang sering digunakan dalam wacana resmi untuk mendisiplinkan makna (Barker & Galasinki, 2001). Pendekatan ini memungkinkan peneliti membaca bagaimana wacana pembangunan memusatkan suara negara sebagai kebenaran dominan, sekaligus meminggirkan pengalaman masyarakat lokal.

Konteks wacana pembangunan, dekonstruksi membantu peneliti mengidentifikasi bagaimana istilah-istilah seperti “pembangunan”, “energi terbarukan”, atau “penolakan” tidak berada dalam ruang makna yang bebas mereka diposisikan dalam relasi makna yang memperkuat legitimasi kebijakan negara sementara menyingkirkan atau meremehkan suara lokal. Dekonstruksi menunjukkan bahwa oposisi semacam itu adalah konstruksi wacana yang mencerminkan kepentingan dominan, bukan fakta netral. Pendekatan dekonstruktif semakin penting dalam kajian komunikasi kritis karena memberikan alat analitik untuk membaca makna yang disenyapkan, struktur kekuasaan, dan dominasi ideologi dalam praktik komunikasi pembangunan. Teori kritis komunikasi, misalnya, memandang wacana sebagai arena perebutan makna di mana hubungan kekuasaan direproduksi atau dipertanyakan oleh aktor sosial (Baharuddin et al., 2025).

Dekonstruksi juga memungkinkan penelitian untuk melihat konflik bukan hanya sebagai perbedaan pendapat, tetapi sebagai manifestasi dari ketegangan antara narasi dominan dan narasi yang dijatuhkan *silenced narratives*. Dalam kasus PLTS, argumentasi pembangunan sebagai kemajuan yang rasional bisa dipahami sebagai konstruk wacana yang menolak kompleksitas pengalaman lokal. Meskipun *Public Relations* mungkin merupakan bagian penting dari budaya kontemporer. Mendekonstruksi berarti melihat ide-ide yang tersembunyi di balik materi yang telah kita hasilkan mengupas lapisan-lapisan yang ada di depan kita tetapi seringkali tersembunyi sampai kita melihatnya. (Mikey, 2003).

Dengan demikian, dekonstruksi tidak hanya mempersoalkan isi pesan komunikasi, tetapi juga struktur makna yang menopang legitimasi kekuasaan (Faishal, 2022). Dalam penelitian ini, dekonstruksi digunakan untuk mengurai praktik PR pemerintah sebagai teks ideologis yang memproduksi dan menstabilkan makna pembangunan dalam wacana pemasangan PLTS di Danau Singkarak.

2.2.3 Komunikasi Pembangunan dalam Perspektif Kritis

Pendekatan kritis terhadap komunikasi pembangunan menolak model linear dan top-down yang memposisikan negara sebagai subjek pembangunan dan masyarakat sebagai objek penerima (Servaes & Luu, 2022) Dalam perspektif ini, komunikasi pembangunan dipahami sebagai arena pertarungan wacana antara kepentingan negara, aktor ekonomi,

dan masyarakat lokal. Kajian kritis menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan sering kali berfungsi sebagai alat pengakuan kebijakan, dengan mengedepankan bahasa teknokratis, rasionalitas ekonomi, dan narasi kemajuan. Pendekatan ini cenderung mengabaikan konteks sosial, budaya, dan ekologis masyarakat lokal, sehingga memicu ketegangan dan konflik komunikasi (Melkote & Steeves, 2015).

Oleh karena itu, konflik dalam pembangunan tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya informasi, melainkan oleh ketimpangan relasi kuasa dalam proses komunikasi itu sendiri. Dunia dipandang semakin homogen dunia memiliki lembaga politik, sipil, dan ekonomi yang semakin mirip (Pieczka, 2002). Komunikasi pembangunan tradisional sering dipandang sebagai proses top-down dalam menyampaikan pesan pembangunan dari pemerintah kepada publik, dengan asumsi masyarakat bersifat pasif. Namun evolusi pemikiran komunikasi pembangunan menggeser paradigma ini ke arah partisipatoris, yang menempatkan masyarakat sebagai agen aktif dalam proses pembangunan (Joshi, 2025).

Kajian kontemporer komunikasi pembangunan mencakup paham bahwa komunikasi bukan hanya soal penyampaian informasi, tetapi tentang interaksi sosial, pembuatan makna bersama, dan pembentukan solidaritas masyarakat. Komunikasi pembangunan dipandang sebagai praktik strategis yang harus memenuhi kebutuhan dialogis masyarakat, bukan sekadar memenuhi target teknokratis. Pendekatan kritis dalam komunikasi pembangunan mengakui bahwa pembangunan bersifat politik dan ideologis; ia berkaitan erat dengan relasi kuasa yang menentukan siapa yang berhak berbicara, siapa yang didengar, dan siapa yang dimarginalkan. Studi-studi terbaru dalam komunikasi pembangunan menegaskan pentingnya mengintegrasikan perspektif masyarakat lokal dalam program komunikasi untuk menghindari resistensi dan konflik sosial yang terjadi akibat kurangnya partisipasi bermakna. Kerangka ini, komunikasi pembangunan tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan pembangunan, tetapi juga pada keadilan sosial, representasi suara plural, dan dialog antar aktor sosial yang bertanggung jawab atas masa depan pembangunan.

2.2.4 Resistensi Lokal sebagai Praktik Komunikasi

Resistensi lokal dipahami bukan sebagai sikap irasional atau anti-pembangunan, melainkan sebagai praktik komunikasi dan produksi makna alternatif (Radtke & Löw-Beer, 2025). Resistensi muncul ketika masyarakat lokal mengalami ketidaksesuaian antara wacana pembangunan yang diproduksi negara dan realitas sosial-ekologis yang mereka alami. Penelitian tentang konflik energi terbarukan menunjukkan bahwa resistensi sering dipicu oleh ketidakadilan prosedural, pengabaian pengalaman lokal, serta praktik komunikasi yang bersifat simbolik dan elitis (Sanchez Nieminen & Laitinen, 2025). Dalam konteks ini, resistensi menjadi bentuk artikulasi politik yang menantang pengakuan pembangunan dan membuka ruang bagi wacana tandingan.

Resistensi lokal muncul ketika masyarakat merasa bahwa praktik komunikasi pembangunan tidak mencerminkan pengalaman, nilai, atau kepentingan mereka. Resistensi ini bukan semata reaksi emosional, tetapi merupakan tanggapan strategis terhadap struktur kekuasaan komunikasi yang mendominasi wacana pembangunan. Kasus-kasus resistensi lokal di berbagai daerah, seperti gerakan komunitas di Wadas Village yang menolak proyek pembangunan karena ancaman terhadap ekosistem dan solidaritas identitas kolektif, serta penggunaan media digital sebagai alat aktivisme, menunjukkan bahwa resistensi adalah bentuk komunikasi politik yang terstruktur dan bermakna (Ayu & Yunita, 2025). Penelitian tentang resistensi komunitas tersebut menunjukkan bahwa resistensi muncul dari rasa ketidakadilan, solidaritas kolektif, dan pengalaman marginalisasi, yang kemudian dimobilisasi melalui komunikasi baik offline maupun online untuk membangun jaringan solidaritas yang lebih luas. *Digital activism*, misalnya, memberikan ruang baru bagi komunitas untuk memperluas solidaritas dan menantang narasi resmi pemerintah.

Resistensi lokal dalam praktik komunikasi penting dipahami sebagai fenomena yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi sebagai aksi komunikatif yang memiliki strategi, identitas kolektif, dan tujuan transformasi sosial. Analisis resistensi ini membantu menempatkan konflik komunikasi bukan hanya sebagai gangguan, tetapi sebagai tanda adanya ketidakseimbangan relasi kuasa dalam wacana publik.

Konsep seperti *green grabbing* dan *green sacrifice zones* menjelaskan bagaimana wilayah lokal dijadikan ruang pengorbanan demi agenda energi hijau, sementara masyarakat lokal menanggung dampak sosial dan ekologisnya (Brás dkk., 2024). Resistensi lokal, dengan demikian, merupakan respons terhadap praktik pembangunan yang menormalisasi pengorbanan tersebut melalui wacana PR pemerintah. Dalam penelitian ini, resistensi lokal diposisikan sebagai pintu masuk analitis untuk membaca kegagalan komunikasi pembangunan serta sebagai medium untuk mendekonstruksi makna dominan pembangunan PLTS terapung.

2.2.5 Ideologi dalam Praktik *Public Relations*

Umumnya ideologi dimaknai sebagai seperangkat ide-ide, tetapi sering diberi makna yang lebih sempit, yang membedakannya dari sistem kepercayaan sebagai sekumpulan gagasan yang membenarkan dominasi satu kelompok dengan yang lain. Ideologi merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian komunikasi kritis dan Critical Public Relations karena ia menjelaskan bagaimana makna diproduksi, dipertahankan, dan direproduksi untuk melanggengkan dominasi kelompok tertentu atas kelompok lain. Secara umum, ideologi dimaknai sebagai seperangkat ide-ide atau sekumpulan gagasan yang membenarkan dominasi satu kelompok dengan yang lain (Bruce & Yearley, 2006). Meskipun beberapa penggunaanya menyangkal implikasi ini, istilah ideologi biasanya juga berarti sebagai ketidakbenaran. Ideologi Gender misalnya, di satu sisi ia menunjukkan ide-ide tentang perbedaan antara wanita dan pria, tapi di sisi lain merupakan pembenaran dominasi laki-laki atas perempuan. (Bruce & Yearley, 2006). Menurut Thomson (1984), mempelajari ideologi dalam beberapa hal juga mempelajari bahasa dalam dunia kehidupan. Bahasa yang dipelajari adalah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di antara teman-teman dekat dan anggota keluarga sampai ke forum debat politik yang bergengsi (Hadi & Putra, 2019). Umumnya ideologi dimaknai sebagai seperangkat ide-ide, tetapi sering diberi makna yang lebih sempit yang membedakannya dari sistem kepercayaan sebagai sekumpulan gagasan yang membenarkan dominasi satu kelompok dengan yang lain. Meskipun beberapa penggunaanya menyangkal implikasi ini, istilah ideologi biasanya juga berarti sebagai ketidakbenaran.

Ideologi Gender misalnya, di satu sisi ia menunjukkan ide-ide tentang perbedaan antara wanita dan pria, tapi di sisi lain merupakan pembenaran dominasi laki-laki atas perempuan. Penelitian ini selanjutnya menggunakan konsep “konstruksi ideologi” yaitu struktur bangunan berpikir yang mengandung sejumlah pemikiran yang dapat diurai ke dalam bentuk simbol-simbol yang tercakup dalam proposisi- proposisi atau pernyataan-pernyataan yang dapat dianggap sebagai proposisi (Ningsih, 2020). Hubungan antara proposisi-proposisi itulah yang menghasilkan citra konstruksi ideologi. Setiap proposisi diyakini kebenarannya oleh penganut ideologi dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Praktik Public Relations, ideologi beroperasi sebagai mekanisme produksi makna yang menopang legitimasi organisasi atau institusi. Public Relations tidak sekadar menyampaikan informasi secara netral; ia secara aktif memproduksi wacana yang membentuk cara publik memahami realitas. Sebagaimana ditegaskan oleh Motion dan Weaver (2005).

Ideologi dalam konteks komunikasi merujuk pada sistem nilai, keyakinan, dan asumsi yang membentuk cara kita melihat dunia dan berkomunikasi. Dalam kajian komunikasi kritis, ideologi tidak dipahami sebagai sekadar gagasan abstrak, tetapi sebagai kekuatan struktural yang memengaruhi praktik komunikasi dan produksi wacana. Ideologi dominan sering tampil sebagai narasi yang tampak netral (misalnya pembangunan sebagai kemajuan), padahal ia menyingkirkan pengalaman, nilai, dan pandangan yang berbeda. Ideologi berfungsi untuk memberi makna terhadap realitas sosial secara selektif, menjaga kepentingan kekuasaan, dan mempertahankan status quo. Dalam konteks ini, dekonstruksi wacana membantu mengungkap bagaimana ideologi beroperasi dalam praktik komunikasi pembangunan, dengan membaca apa yang disenyapkan dan apa yang direproduksi melalui wacana resmi (Baharuddin et al., 2025). Penggunaan ideologi ini dapat memantik sebuah konflik dengan mudah karena realitas sosial yang dilewati, layaknya Danau Singkarak dengan praktik komunikasi yang digunakan PR pemerintah hingga resistensi masyarakat saat ini semakin hangat.

2.2.6 Hegemoni dalam komunikasi public relations

Konsep hegemoni digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan atribut yang biasanya melekat kepada budaya tinggi, kelompok dominan atau kelompok yang berkuasa. Konsep ini dipinjam dari Antonio Gramsci, pemikir dan pejuang Marxis dari Italia yang meninggal dalam tahanan rezim fasis Mussolini. Menurut Gramsci, hegemoni adalah penguasaan masyarakat oleh kelompok dominan (berupa sebuah kelompok sosial atas kelompok sosial lainnya yang disebut Gramsci sebagai kelompok subordinat, subaltern, kadang-kadang kelompok instrumental), atau kelas penguasa atas kelas lainnya, terutama kaum Buruh. Hegemoni adalah konsep yang menandai dominasi suatu kelompok sosial atas kelompok lain melalui kombinasi kekuasaan dan persetujuan. Menurut pemikiran Antonio Gramsci, hegemonik bekerja bukan hanya melalui paksaan, tetapi melalui persuasi wacana yang membuat nilai dominan tampak sebagai nilai bersama.

Hegemoni tercermin dalam bagaimana narasi pembangunan dibentuk sedemikian rupa sehingga banyak penerima pesan menganggapnya sebagai kebenaran tunggal, sementara narasi lokal dianggap sebagai minoritas, emosional, atau tidak rasional. Public Relations dapat memainkan peran dalam memperkuat hegemoni ini dengan menyesuaikan narasi resmi sehingga tampak mewakili kepentingan umum padahal ia mempertahankan struktur kekuasaan tertentu analisa PR dalam counterhegemony. Hegemoni bukan berarti tidak ada resistensi sebaliknya, dalam kajian kritis hegemoni dipahami sebagai proses dinamis yang selalu dihadapkan pada perlawanan narasi, counter-publics, dan strategi diskursus alternatif yang muncul. Dengan demikian pengertian hegemoni dapat di tarik mulai dari lingkup lokal dengan populasi terbatas hingga ke tingkat global.

Gramsci (1971) menggariskan bahwa hegemoni mempunyai tiga dimensi yaitu; intelektual, moral dan politik. Kekuasaan atau pikiran- pikiran dari kelas penguasa tampak sebagai ideologi universal. Ia diterima sebagai pikiran yang menguntungkan banyak orang, padahal sebenarnya menguntungkan penguasa atau kelas dominan belaka. Menurut (Gramsci.1971) dimensi intelektual dan moral menentukan apakah pada suatu dominasi terdapat hegemoni atau tidak. Sebab, tanpa adanya kedua dimensi tersebut tidak

terjadi hegemoni. Artinya, dominasi tidak dengan sendirinya menghasilkan hegemoni. Inilah salah satu factor yang menimbulkan sebuah krisis hingga penelitian ini harus segera dilaksanakan difaktorkan dari banyak yang kasus yang sudah terjadi tapi masih belum menjadi acuan atau pembelajaran kedepannya.

2.2.7 Manajemen Kesan (*Impression Management*) dalam Praktik Public Relations Pembangunan

Konsep impression management merupakan salah satu landasan penting dalam kajian komunikasi, sosiologi, dan Public Relations yang menjelaskan bagaimana individu maupun organisasi secara aktif membangun, mempertahankan, serta menegosiasikan citra diri di hadapan khalayak. Berbeda dengan pandangan komunikasi yang menempatkan penyampaian informasi sebagai proses yang bersifat linear, konsep ini memandang komunikasi sebagai praktik sosial yang sarat dengan simbol, interpretasi, dan negosiasi makna. Setiap tindakan komunikasi tidak pernah berlangsung dalam ruang yang netral karena selalu melibatkan upaya aktor sosial untuk mengonstruksi identitas tertentu agar memperoleh penerimaan, kepercayaan, maupun legitimasi dari pihak lain. Dalam konteks organisasi modern, proses tersebut berkembang menjadi bagian dari strategi komunikasi yang digunakan untuk membangun reputasi, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, serta mempertahankan keberlangsungan organisasi di tengah dinamika lingkungan sosial dan politik yang terus berubah (Cornelissen, 2020).

Akar konseptual impression management pertama kali diperkenalkan oleh Erving Goffman melalui karya monumentalnya *The Presentation of Self in Everyday Life* (1959). Dalam perspektif dramaturgi yang dikembangkan Goffman, kehidupan sosial dipahami sebagai sebuah *dramaturgical performance* di mana setiap individu berperan sebagai aktor yang senantiasa mengelola penampilannya di hadapan audiens. Analogi dramaturgis tersebut menempatkan interaksi sosial bukan sebagai tindakan yang spontan, melainkan sebagai proses yang dirancang sedemikian rupa melalui pengelolaan bahasa, ekspresi, simbol, atribut, serta perilaku yang dianggap sesuai dengan ekspektasi lingkungan sosial. Dengan demikian, identitas bukan dipandang sebagai karakter yang bersifat tetap, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui praktik komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus.

Menurut Goffman (1959), keberhasilan suatu pertunjukan sosial tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aktor dalam menyampaikan pesan, tetapi juga oleh kemampuannya mengendalikan definisi situasi. Aktor berusaha menciptakan interpretasi tertentu mengenai dirinya sehingga audiens menerima realitas sebagaimana yang ingin ditampilkan. Dalam proses tersebut, komunikasi tidak lagi dipahami sebagai aktivitas menyampaikan fakta secara objektif, tetapi sebagai mekanisme produksi makna yang memungkinkan seseorang memengaruhi cara orang lain memahami suatu peristiwa. Oleh karena itu, kesan yang terbentuk di benak audiens bukanlah refleksi langsung dari realitas objektif, melainkan hasil dari interaksi simbolik yang dikonstruksi melalui proses komunikasi.

Perspektif dramaturgi Goffman juga memperkenalkan perbedaan antara front stage dan back stage yang kemudian menjadi salah satu konsep paling berpengaruh dalam studi komunikasi organisasi. Front stage merujuk pada ruang ketika aktor menampilkan citra ideal sesuai harapan audiens, sedangkan back stage merupakan ruang di mana berbagai proses persiapan, negosiasi, evaluasi, bahkan kontradiksi berlangsung tanpa diketahui oleh publik. Pemisahan kedua ruang tersebut menunjukkan bahwa setiap representasi yang tampil di ruang publik sesungguhnya merupakan hasil dari proses seleksi, pengaturan, dan penyuntingan informasi. Apa yang diterima oleh masyarakat merupakan realitas yang telah melalui proses konstruksi, sehingga tidak pernah sepenuhnya identik dengan kondisi yang berlangsung di balik layar organisasi.

Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa konsep dramaturgi tidak lagi terbatas pada interaksi antarindividu sebagaimana dijelaskan Goffman, tetapi mengalami perluasan ke dalam studi organisasi. Organisasi dipahami sebagai aktor kolektif yang juga melakukan pertunjukan sosial melalui berbagai bentuk komunikasi institusional. Dalam konteks tersebut, perusahaan, lembaga pemerintah, maupun organisasi publik tidak hanya menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga memproduksi simbol, narasi, serta representasi yang membentuk cara publik memahami identitas organisasi. Identitas korporasi kemudian tidak lahir secara alamiah, melainkan merupakan hasil dari proses komunikasi yang dirancang secara sistematis untuk menghasilkan persepsi tertentu pada berbagai kelompok pemangku kepentingan.

Transformasi konsep tersebut semakin dipertegas oleh Mark R. Leary dan Robin M. Kowalski yang mengembangkan impression management sebagai model psikologi sosial mengenai pengendalian persepsi. Dalam model dua komponen (Two-Component Model of Impression Management), Leary dan Kowalski (1990) menjelaskan bahwa proses pembentukan kesan terdiri atas dua tahapan yang saling berkaitan, yaitu *impression motivation* dan *impression construction*. *Impression motivation* menjelaskan alasan mengapa seseorang atau organisasi merasa perlu mengendalikan persepsi pihak lain. Motivasi tersebut muncul ketika penerimaan sosial, legitimasi, akses terhadap sumber daya, maupun keberhasilan organisasi bergantung pada penilaian publik. Semakin besar konsekuensi sosial dari suatu tindakan, semakin tinggi pula dorongan aktor untuk mengelola citra yang ditampilkan.

Sementara itu, *impression construction* merujuk pada proses penyusunan representasi yang akan ditampilkan kepada audiens. Pada tahap ini, aktor memilih informasi yang dianggap menguntungkan, menyusun narasi tertentu, menentukan simbol yang akan digunakan, serta menyesuaikan gaya komunikasi dengan karakteristik khalayak yang menjadi sasaran. Dengan kata lain, komunikasi bukan sekadar proses menyampaikan seluruh fakta secara apa adanya, melainkan aktivitas strategis yang melibatkan pemilihan realitas *selective representation* sehingga makna yang diterima audiens selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Perspektif ini memperluas pemikiran Goffman karena menunjukkan bahwa pengelolaan kesan tidak hanya berlangsung pada tingkat interaksi interpersonal, tetapi juga dapat diterapkan dalam komunikasi organisasi yang melibatkan perencanaan strategis, pengelolaan isu, dan pembentukan reputasi institusional.

Perluasan tersebut membawa konsep *impression management* memasuki ranah ilmu komunikasi, khususnya komunikasi organisasi dan *Public Relations*. Organisasi modern dipandang tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sistem produksi ekonomi, tetapi juga sebagai institusi yang bergantung pada legitimasi sosial. Keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, efisiensi operasional, atau kemampuan finansial, melainkan juga oleh sejauh mana organisasi mampu membangun kepercayaan, memperoleh dukungan publik, dan mempertahankan hubungan yang harmonis dengan

para pemangku kepentingan. Dalam kondisi demikian, komunikasi menjadi instrumen strategis yang memungkinkan organisasi membentuk persepsi publik mengenai identitas, nilai, kompetensi, serta tanggung jawab sosial yang di milikinya. Dengan demikian, impression management tidak lagi dipahami sebagai perilaku individual, tetapi berkembang menjadi praktik komunikasi institusional yang melekat pada hampir seluruh aktivitas organisasi kontemporer.

Perkembangan ini menjadi titik awal munculnya berbagai kajian yang menempatkan impression management sebagai salah satu fondasi konseptual dalam *Public Relations* modern. Jika pada awalnya Goffman menjelaskan bagaimana individu mempertahankan identitas melalui pertunjukan sosial, maka dalam konteks organisasi konsep tersebut berkembang menjadi penjelasan mengenai bagaimana institusi mengelola representasi dirinya melalui komunikasi strategis. Pergeseran inilah yang kemudian melahirkan pemahaman bahwa citra organisasi bukan merupakan sesuatu yang muncul secara alamiah, melainkan hasil dari proses komunikasi yang dirancang, dipelihara, dan dinegosiasikan secara berkelanjutan bersama berbagai kelompok kepentingan. Pembahasan mengenai transformasi *impression management* dalam perspektif *Public Relations* inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk memahami bagaimana organisasi membangun legitimasi melalui praktik komunikasi pembangunan, khususnya pada proyek-proyek strategis yang berkaitan dengan kepentingan publik seperti pembangunan PLTS Terapung di Danau Singkarak.

2.2.8 Sintesis Impression Management, Dramaturgi, dan Dekonstruksi dalam Penelitian

Perkembangan kajian komunikasi organisasi menunjukkan bahwa representasi yang dibangun melalui praktik *Public Relations* tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses produksi makna yang melibatkan pemilihan simbol, penyusunan narasi, serta negosiasi identitas organisasi di hadapan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian mengenai komunikasi organisasi memerlukan kerangka konseptual yang tidak hanya mampu menjelaskan bagaimana representasi tersebut diproduksi, tetapi juga bagaimana representasi tersebut memperoleh legitimasi sosial sekaligus membuka ruang bagi pembacaan kritis terhadap

makna yang dihadapkannya. Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini mensintesisan perspektif dramaturgi Erving Goffman, konsep impression management, serta pendekatan dekonstruksi Jacques Derrida sebagai satu kesatuan analitis.

Perspektif dramaturgi memberikan fondasi awal untuk memahami bahwa komunikasi merupakan bentuk pertunjukan sosial. Goffman (1959) menjelaskan bahwa setiap aktor sosial selalu menampilkan identitas tertentu melalui serangkaian tindakan simbolik yang disesuaikan dengan harapan audiens. Dalam konteks organisasi, pertunjukan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui perilaku individu, tetapi juga melalui kebij/ komunikasi, pernyataan resmi, aktivitas media relations, konsultasi publik, publikasi digital, hingga berbagai bentuk komunikasi institusional lainnya. Organisasi berupaya menghadirkan citra yang konsisten sehingga memperoleh kepercayaan, dukungan, dan penerimaan dari masyarakat. Dengan demikian, dramaturgi membantu menjelaskan bagaimana organisasi mengelola penampilannya di ruang publik melalui pembagian antara front stage sebagai ruang representasi resmi dan back stage sebagai ruang tempat strategi komunikasi dirancang, dinegosiasikan, dan disiapkan sebelum dipresentasikan kepada khalayak.

Berangkat dari perspektif dramaturgi tersebut, konsep impression management memperluas pembahasan dengan menitikberatkan perhatian pada mekanisme strategis yang digunakan organisasi dalam membentuk persepsi publik. Jika dramaturgi lebih menyoroti bagaimana pertunjukan sosial berlangsung, maka impression management menjelaskan proses komunikasi yang memungkinkan pertunjukan tersebut menghasilkan kesan tertentu pada audiens. Organisasi tidak hanya menentukan apa yang akan disampaikan kepada publik, tetapi juga memilih informasi yang dianggap relevan, menyusun narasi yang mendukung tujuan organisasi, menggunakan simbol-simbol tertentu, serta menyesuaikan bentuk komunikasi dengan karakteristik pemangku kepentingan yang menjadi sasaran. Dalam perspektif ini, komunikasi dipahami sebagai praktik representasi yang secara sadar mengonstruksi realitas sosial sehingga organisasi dipersepsikan sebagai institusi yang profesional, kredibel, bertanggung jawab, dan memiliki legitimasi dalam menjalankan program maupun kebijakan publik.

Praktik *Public Relations*, *impression management* tidak berhenti pada pembentukan citra organisasi semata, melainkan berkembang menjadi strategi memperoleh legitimasi sosial. Legitimasi tersebut dibangun melalui proses komunikasi yang menempatkan kebijakan organisasi sebagai sesuatu yang rasional, bermanfaat, dan selaras dengan kepentingan masyarakat. Dalam konteks pembangunan energi terbarukan, berbagai istilah seperti energi hijau, transisi energi, ketahanan energi nasional, maupun pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfungsi sebagai istilah teknis, tetapi juga sebagai representasi simbolik yang mengonstruksi makna mengenai pentingnya suatu proyek pembangunan. Narasi tersebut menjadi bagian dari praktik *impression management* karena membantu organisasi membentuk pemahaman publik mengenai identitas organisasi sekaligus mengenai makna pembangunan yang sedang dijalankan.

Meskipun demikian, paradigma kritis memandang bahwa setiap representasi yang diproduksi melalui komunikasi organisasi tidak pernah bersifat netral. Representasi selalu mengandung kepentingan tertentu karena setiap proses komunikasi melibatkan pemilihan fakta, penyusunan wacana, dan pengutamaan makna tertentu dibandingkan makna lainnya. Dalam perspektif ini, citra yang dibangun organisasi bukan sekadar hasil dari aktivitas komunikasi yang efektif, tetapi juga merupakan produk relasi kuasa yang menentukan realitas mana yang memperoleh ruang dominan di ruang publik dan realitas mana yang cenderung disisihkan. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai *impression management* belum memadai apabila hanya berhenti pada identifikasi strategi komunikasi tanpa mengkritisi struktur makna yang melandasinya.

Atas dasar tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan dekonstruksi Derrida sebagai lensa analitis untuk membaca secara kritis representasi yang dibangun melalui praktik *impression management*. Berbeda dengan dramaturgi yang menjelaskan bagaimana pertunjukan sosial dikonstruksi, dekonstruksi berupaya membongkar asumsi-asumsi yang dianggap mapan dalam suatu teks, narasi, maupun praktik komunikasi. Derrida (1976) menegaskan bahwa makna tidak pernah bersifat tunggal ataupun final karena selalu terbentuk melalui relasi perbedaan dengan makna-makna lain yang secara bersamaan hadir maupun disembunyikan. Dengan demikian, setiap representasi

komunikasi selalu mengandung kemungkinan interpretasi yang beragam serta membuka ruang bagi hadirnya kontradiksi di balik narasi dominan yang diproduksi organisasi.

Konteks komunikasi pembangunan, pendekatan dekonstruksi memungkinkan peneliti membaca bagaimana narasi mengenai pembangunan energi terbarukan diproduksi sebagai wacana yang tampak alamiah, objektif, dan tidak terbantahkan. Misalnya, istilah energi hijau sering diposisikan sebagai representasi kemajuan teknologi dan keberlanjutan lingkungan. Namun, melalui pembacaan dekonstruktif, istilah tersebut tidak dipahami sebagai makna yang bersifat tetap, melainkan sebagai konstruksi simbolik yang dapat mengandung berbagai kepentingan, kontradiksi, maupun perspektif yang tidak selalu tampak dalam komunikasi resmi organisasi. Dengan demikian, perhatian penelitian tidak hanya diarahkan pada apa yang dikatakan organisasi, tetapi juga pada apa yang tidak dikatakan, suara siapa yang memperoleh ruang dalam komunikasi publik, serta pengalaman sosial mana yang cenderung diabaikan dalam narasi pembangunan.

Pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi terhadap oposisi-oposisi biner yang sering muncul dalam komunikasi pembangunan, seperti modern-tradisional, pembangunan-penolakan, nasional-lokal, atau keberlanjutan-kerusakan lingkungan. Dalam banyak praktik komunikasi organisasi, salah satu unsur dalam oposisi tersebut cenderung memperoleh posisi yang lebih dominan sehingga dipersepsikan sebagai kebenaran yang wajar. Dekonstruksi tidak bertujuan membalikkan dominasi tersebut, melainkan menunjukkan bahwa kedua kutub sesungguhnya saling bergantung dalam membentuk makna. Oleh karena itu, narasi pembangunan tidak dipahami sebagai realitas tunggal, tetapi sebagai hasil negosiasi berbagai kepentingan yang terus diproduksi melalui praktik komunikasi.

Sintesis antara dramaturgi, impression management, dan dekonstruksi memberikan kerangka analitis yang komprehensif bagi penelitian ini. Dramaturgi digunakan untuk menjelaskan bagaimana organisasi mempertunjukkan identitasnya melalui praktik komunikasi publik. Impression management menjelaskan strategi komunikasi yang digunakan untuk membentuk persepsi, memperoleh kepercayaan, dan membangun legitimasi terhadap proyek pembangunan. Selanjutnya, dekonstruksi digunakan untuk mengkritisi representasi tersebut dengan mengungkap kontradiksi, makna yang

terpinggirkan, serta relasi kuasa yang bekerja di balik narasi resmi organisasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi mengenai strategi komunikasi Public Relations, tetapi berupaya memahami bagaimana komunikasi pembangunan berfungsi sebagai arena produksi makna yang terus diperdebatkan oleh berbagai aktor sosial.

Konteks pembangunan PLTS Terapung di Danau Singkarak, sintesis ketiga perspektif tersebut menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana PT PLN Indonesia Power membangun representasi mengenai proyek sebagai bagian dari agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, bagaimana representasi tersebut dipertunjukkan melalui praktik Public Relations, serta bagaimana masyarakat memaknai, menerima, menegosiasikan, atau bahkan mempertanyakan narasi yang dibangun. Dengan kerangka tersebut, penelitian tidak diarahkan untuk menilai benar atau salahnya strategi komunikasi organisasi, melainkan untuk memahami dinamika pembentukan makna, proses legitimasi, serta berbagai relasi kuasa yang bekerja dalam praktik komunikasi pembangunan.

2.3 Kerangka Teoritis

2.3.1 Dekonstruksi Jacques Derrida

Teori dekonstruksi dikembangkan oleh Jacques Derrida (1930–2004) sebagai kritik terhadap cara pemikiran Barat memahami makna, kebenaran, dan bahasa. Melalui karya karyanya seperti *Of Grammatology* dan *Writing and Difference*, Derrida menolak anggapan bahwa makna bersifat tunggal, stabil, dan memiliki pusat kebenaran yang tetap (Derrida, 1997). Ia menegaskan bahwa makna selalu terbentuk dalam relasi sosial dan diskursif yang tidak pernah sepenuhnya final. Dekonstruksi tidak diposisikan sebagai analisis linguistik struktural, melainkan sebagai pendekatan kritis untuk membaca wacana, praktik komunikasi, dan relasi kuasa. Fokus utama dekonstruksi dalam kajian komunikasi adalah membongkar bagaimana makna sosial diproduksi, dilegitimasi, dan dinaturalisasi melalui komunikasi institusional, termasuk komunikasi pemerintah dan praktik Public Relations (L'Etang, 2008; Holtzhausen, 2012).

Derrida mengkritik apa yang ia sebut sebagai *logocentrism*, yaitu kecenderungan untuk menganggap bahwa makna memiliki pusat yang pasti dan objektif (Derrida, 1997). Dalam praktik komunikasi kebijakan, *logocentrism* tercermin dalam narasi yang menampilkan istilah seperti *pembangunan*, *kepentingan nasional*, atau *energi terbarukan* sebagai makna dominan yang tidak perlu diperdebatkan. Dekonstruksi menunjukkan bahwa makna-makna tersebut hanya dapat berdiri dengan menyingkirkan makna lain, seperti pengalaman masyarakat lokal, pengetahuan tradisional, dan dampak sosial-ekologis yang tidak diakomodasi dalam wacana resmi. Salah satu kontribusi utama dekonstruksi dalam kajian komunikasi adalah pembongkaran oposisi biner hierarkis. Oposisi seperti pembangunan versus penolakan, rasional versus emosional, atau negara versus masyarakat lokal sering digunakan dalam wacana publik untuk menegaskan legitimasi kebijakan tertentu. Derrida menunjukkan bahwa oposisi ini bukan struktur alami, melainkan konstruksi diskursif yang menguntungkan pihak dominan dan menempatkan pihak lain dalam posisi subordinat (Derrida, 1978). Dalam perspektif ini, penolakan masyarakat tidak dapat dipahami sebagai irasionalitas, melainkan sebagai makna yang disenyapkan oleh dominasi wacana pembangunan.

Dekonstruksi digunakan untuk membaca PR sebagai praktik diskursif yang sarat dengan relasi kuasa. L'Etang (2008) menegaskan bahwa PR tidak pernah netral karena selalu beroperasi dalam konteks politik dan ideologis tertentu. Dekonstruksi membantu mengungkap bagaimana PR pemerintah membingkai kebijakan pembangunan sebagai kepentingan bersama, sekaligus mengaburkan konflik kepentingan yang dialami masyarakat lokal. Holtzhausen (2012) bahkan memandang PR sebagai arena kontestasi makna, di mana narasi dominan dapat diperkuat atau dilawan melalui praktik komunikasi alternatif. Dekonstruksi berfungsi untuk mempertanyakan asumsi normatif bahwa pembangunan selalu identik dengan kemajuan dan kesejahteraan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma komunikasi partisipatoris yang menekankan dialog, keberagaman makna, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan (Wilkins et al., 2014). Dekonstruksi memungkinkan peneliti untuk melihat pembangunan sebagai arena konflik simbolik, di mana makna pembangunan diperebutkan antara negara dan masyarakat lokal.

Melalui pendekatan dekonstruktif, konflik dalam pembangunan tidak dipahami sebagai kegagalan individu atau kesalahpahaman komunikasi, melainkan sebagai konsekuensi dari dominasi wacana tunggal yang menutup ruang dialog. Penolakan masyarakat lokal dipahami sebagai bentuk komunikasi kritis yang mengungkap ketegangan makna dan relasi kuasa dalam praktik komunikasi pembangunan (Wilkins et al., 2014). Dekonstruksi digunakan sebagai kerangka teoretis komunikasi kritis untuk membaca praktik *Public Relations* pemerintah dalam pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana wacana pembangunan dan energi terbarukan diproduksi dan dilegitimasi melalui komunikasi resmi, serta bagaimana penolakan masyarakat lokal diposisikan dalam narasi tersebut. Dengan demikian, dekonstruksi membantu memahami konflik sebagai fenomena komunikasi struktural yang berkaitan dengan kekuasaan, ideologi, dan legitimasi kebijakan, bukan sekadar perbedaan sikap.

Dengan demikian, penggabungan Teori Kritis klasik dan postmodern memberikan landasan analitis yang lebih komprehensif bagi penelitian ini. Teori Kritis klasik menyediakan kerangka untuk memahami struktur dominasi dan ketimpangan, sementara pendekatan postmodern memperkaya analisis dengan perhatian pada wacana, representasi, dan praktik komunikasi. Kombinasi ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mengkritik kebijakan pembangunan, tetapi juga membongkar bagaimana makna pembangunan diproduksi, dinegosiasikan, dan ditentang dalam konflik masyarakat lokal.

2.3.2 Dramaturgi Erving Goffman

Konsep dramaturgi dikembangkan oleh Erving Goffman melalui karyanya *The Presentation of Self in Everyday Life* yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1959. Goffman memandang kehidupan sosial sebagai sebuah pertunjukan, di mana individu maupun organisasi berupaya menampilkan citra tertentu kepada khalayak untuk memperoleh penerimaan sosial. Dalam perspektif ini, komunikasi tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi sarana pengelolaan kesan (*impression management*) yang memungkinkan aktor mempertahankan legitimasi dan kredibilitas di hadapan publik (Goffman, 1959). Menurut Goffman (1959), setiap aktor sosial

menjalankan perannya melalui dua ruang utama, yaitu *front stage* dan *back stage*. *Front stage* merupakan ruang di mana aktor menampilkan citra ideal yang ingin dilihat publik, sedangkan *back stage* merupakan ruang di balik layar yang sering kali memperlihatkan dinamika, negosiasi, dan realitas yang berbeda dari tampilan resmi. Dalam konteks komunikasi organisasi dan Public Relations, konsep ini digunakan untuk memahami bagaimana institusi membangun citra, menyusun pesan, dan mengelola persepsi publik terhadap suatu kebijakan atau program (Motion & Leitch, 2009).

Penelitian ini dramaturgi digunakan untuk memahami bagaimana pemerintah dan pelaksana teknis pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak menampilkan narasi pembangunan kepada publik. Melalui berbagai bentuk komunikasi resmi seperti sosialisasi, pemberitaan media, forum konsultasi publik, dan pernyataan pejabat, pembangunan PLTS dipresentasikan sebagai proyek energi terbarukan yang mendukung transisi energi nasional, keberlanjutan lingkungan, serta pembangunan daerah. Narasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *front stage*, yaitu pertunjukan komunikasi yang dirancang untuk membangun legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap proyek pembangunan.

Narasi resmi tersebut terdapat berbagai dinamika yang tidak selalu muncul dalam ruang publik. Isu mengenai belum adanya persetujuan penuh dari pemerintah daerah, munculnya penolakan masyarakat lokal, kekhawatiran terhadap dampak sosial dan ekologis, serta perbedaan kepentingan antaraktor menjadi bagian dari *back stage* yang memperlihatkan kompleksitas proses pembangunan. Dalam perspektif dramaturgi, perbedaan antara *front stage* dan *back stage* menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan tidak selalu mencerminkan realitas secara utuh, melainkan merupakan hasil konstruksi yang disusun untuk membentuk persepsi tertentu di hadapan publik.

Penggunaan dramaturgi dalam penelitian ini tidak bertujuan untuk menilai benar atau salahnya komunikasi pemerintah, melainkan untuk memahami bagaimana legitimasi pembangunan dibangun melalui praktik komunikasi. Konsep ini membantu mengidentifikasi bagaimana pemerintah, perusahaan, dan aktor politik mengelola kesan (*impression management*) melalui penggunaan simbol, bahasa, dan narasi pembangunan yang menekankan manfaat proyek bagi masyarakat dan negara.

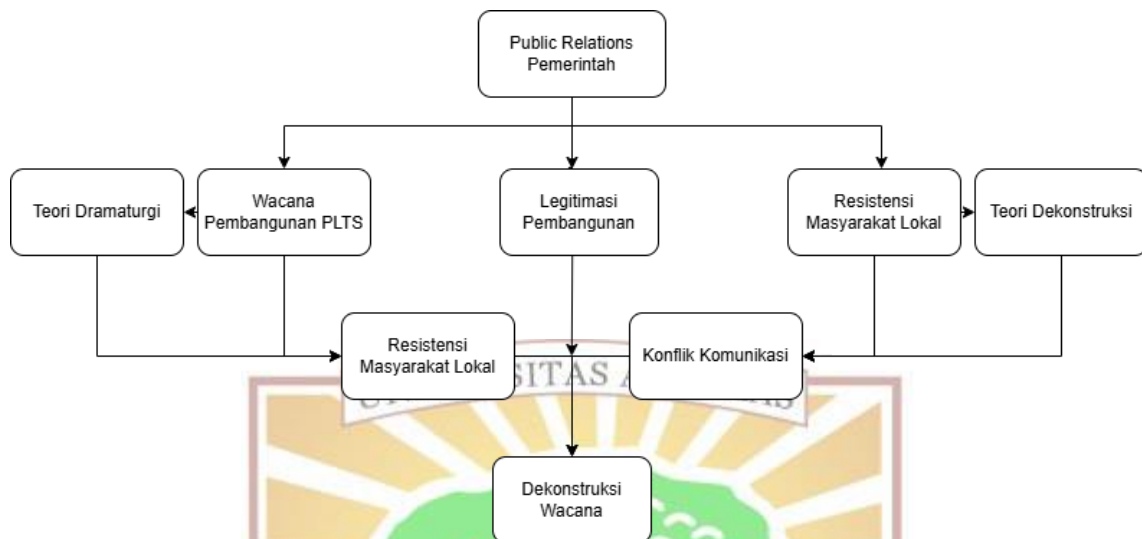
Penelitian ini tidak berhenti pada identifikasi pertunjukan komunikasi semata. Temuan yang diperoleh melalui perspektif dramaturgi selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan dekonstruksi Jacques Derrida. Jika dramaturgi membantu menjelaskan bagaimana narasi pembangunan dipertunjukkan kepada publik, maka dekonstruksi digunakan untuk membongkar makna, kontradiksi, dan relasi kuasa yang tersembunyi di balik pertunjukan tersebut. Dengan demikian, dramaturgi berfungsi sebagai alat untuk membaca representasi komunikasi pembangunan, sedangkan dekonstruksi berfungsi untuk mengkritisi dan mengungkap makna yang disenyapkan dalam representasi tersebut.

Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian memahami konflik pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak secara lebih komprehensif. Dramaturgi membantu mengidentifikasi bagaimana pemerintah dan perusahaan membangun citra pembangunan melalui komunikasi publik, sementara dekonstruksi membantu mengungkap bagaimana narasi tersebut diproduksi, dipertahankan, dan dipersoalkan oleh masyarakat lokal. Melalui pendekatan ini, konflik pembangunan dipahami bukan hanya sebagai perbedaan kepentingan, tetapi juga sebagai kontestasi makna antara narasi resmi pembangunan dan pengalaman masyarakat yang terdampak oleh kebijakan tersebut.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran ini disusun berdasarkan relasi antara praktik *Public Relations* pemerintah yang dilakukan oleh PT PLN Indonesia Power dan PT Acwa, PR pemerintah tidak dipahami sebagai aktivitas netral penyampaian informasi, melainkan sebagai praktik komunikasi yang sarat dengan kepentingan, ideologi, dan relasi kuasa. legitimasi pembangunan, resistensi lokal, dan dekonstruksi makna, Kerangka konseptual penelitian ini dibangun di atas sintesis antara dua teori yaitu Dekonstruksi Jacques Derrida dan Dramaturgi Erving Goffman yang digunakan secara simultan untuk membedah praktik *Public Relations* pemerintah dalam pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak. Kedua teori ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam memberikan pembacaan yang utuh terhadap fenomena konflik komunikasi yang terjadi. Jika dramaturgi berfungsi untuk membaca bagaimana pertunjukan komunikasi pembangunan dijalankan, maka dekonstruksi berfungsi untuk membongkar apa yang tersembunyi di

balik pertunjukan tersebut, makna-makna yang disenyapkan, relasi kuasa yang bekerja, dan ideologi yang melandasi praktik komunikasi. Seperti bagan berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka berpikir
(Sumber: Kerangka berpikir Penulis)

Wacana PR pemerintah memproduksi narasi pembangunan yang berorientasi pada kepentingan nasional dan transisi energi. Narasi ini berfungsi membangun legitimasi simbolik atas proyek PLTS terapung. Namun, ketika wacana tersebut bertabrakan dengan pengalaman dan kepentingan masyarakat lokal, muncul resistensi sebagai bentuk komunikasi tandingan. Melalui pendekatan dekonstruksi, penelitian ini membongkar bagaimana makna pembangunan dibangun, dipertahankan, dan ditantang dalam konflik komunikasi antara negara dan masyarakat lokal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena Peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengkaji secara kritis bagaimana praktik PR pemerintah dalam komunikasi pemasangan PLTS di Danau Singkarak. Menurut (Afrizal, 2014), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian dalam ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (baik lisan atau tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha untuk menghitung data kualitatif. Penelitian kualitatif memungkinkan Peneliti untuk menelusuri lebih dalam terkait seluk beluk upaya komunikasi krisis yang dijalankan dalam sosialisasi hingga realisasinya dalam transisi energi di Danau Singkarak

Penelitian kualitatif, proses pengumpulan data biasanya berupa observasi, wawancara, dan dokumen (Afrizal, 2014). Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen terkait resistensi masyarakat terhadap praktik komunikasi yang terjadi di dalam transisi energi terbarukan PLTS Danau Singkarak. Upaya pengumpulan data tersebut diharapkan dapat menemukan informasi-informasi menarik dan mendalam mengenai proses komunikasi yang terjadi di wacana pemasangan energi terbarukan.

3.2 Pendekatan Penelitian

Peneliti melakukan penelitian menggunakan pendekatan dekonstruktif. Pendekatan dekonstruktif dalam penelitian ini digunakan sebagai strategi analitis untuk membongkar asumsi-asumsi dominan yang bekerja dalam praktik komunikasi pembangunan dan Public Relations pemerintah. Merujuk pada pemikiran Jacques Derrida (1997), dekonstruksi tidak dimaknai sebagai teknik analisis bahasa secara mikro, melainkan sebagai pendekatan kritis untuk mempertanyakan oposisi-oposisi biner yang selama ini dianggap alamiah dan netral dalam wacana sosial.

Pendekatan dekonstruksi yang dikembangkan oleh Jacques Derrida tidak diposisikan sebagai metode teknis yang berlangkah-langkah baku, melainkan sebagai sikap

epistemologis dan strategi analitis dalam membaca teks, wacana dan praktik komunikasi (Derrida, 1976). Derrida secara konsisten menolak formalisasi dekonstruksi sebagai metode tertutup, karena hal tersebut justru mengukuhkannya sebagai sistem makna baru yang bertentangan dengan semangat kritisnya. Sebagai konteks penelitian komunikasi, dekonstruksi dipahami sebagai pendekatan kritis yang memungkinkan peneliti membongkar klaim-klaim makna yang dianggap stabil, natural, dan netral dalam praktik komunikasi publik, khususnya komunikasi kebijakan dan Public Relations pemerintah. Pendekatan ini tidak berupaya menemukan “makna sejati” atau “niat asli” komunikator, melainkan menelusuri bagaimana makna diproduksi, dinormalisasi, dan sekaligus mengandung kontradiksi internal yang membuka ruang bagi resistensi dan pembacaan alternatif.

Penelitian peneliti menegaskan bahwa dekonstruksi sebaiknya tidak diperlakukan setara dengan pendekatan metodologis konvensional seperti Analisis Wacana Kritis (CDA), melainkan sebagai cara berpikir kritis yang dapat meresapi dan memperkaya pendekatan kualitatif kritis. Dalam lanskap penelitian komunikasi, dekonstruksi sering diintegrasikan ke dalam kajian komunikasi kritis, studi budaya, etnografi kritis, dan analisis kebijakan publik (Berger, 2014; Norris, 2002)

3.2.1 Posisi Dekonstruksi dalam Kajian Komunikasi

Berbeda dengan pendekatan linguistik murni, dekonstruksi dalam ilmu komunikasi bekerja pada level relasi kuasa, ideologi, dan hegemoni makna. Ia berfokus pada bagaimana oposisi-oposisi biner dibangun dalam wacana komunikasi, seperti tabel berikut :

Tabel 3. 1 Contoh dekonstruksi makna

<i>pleasure</i>	Vs	<i>reality</i>
<i>Rasional</i>	Vs	<i>Emosional</i>
<i>sickness</i>	Vs	<i>healty</i>
<i>Modern</i>	Vs	<i>Traditional</i>

(Sumber: Buku Derrida, 1978 *writting and difference*)

Oposisi-oposisi tersebut tidak netral, melainkan membentuk hierarki makna yang mengistimewakan satu posisi dan memarjinalkan posisi lain. Dekonstruksi berupaya menunjukkan bahwa posisi yang diistimewakan justru bergantung secara struktural pada yang dimarginalkan, sehingga klaim stabilitas wacana pembangunan menjadi rapuh dan tidak final (Derrida, 1978). Dalam penelitian ini, praktik Public Relations pemerintah dalam pembangunan PLTS terapung Danau Singkarak dibaca sebagai teks komunikasi publik yang memproduksi wacana legitimasi pembangunan berkelanjutan dan energi terbarukan, namun secara bersamaan menekan pengalaman, pengetahuan lokal, dan kepentingan masyarakat sekitar Danau Singkarak. Pendekatan dekonstruksi memungkinkan peneliti menelusuri retakan wacana, kontradiksi naratif, serta makna-makna yang disingkirkan dalam komunikasi resmi pemerintah.

3.2.2 Relevansi Dekonstruksi terhadap Konflik dan Resistensi Lokal

Dekonstruksi relevan digunakan dalam penelitian konflik komunikasi karena pendekatan ini tidak memandang resistensi masyarakat lokal sebagai sekadar hambatan pembangunan atau kegagalan komunikasi teknis. Sebaliknya, resistensi dibaca sebagai bentuk komunikasi kritis yang muncul dari ketidakstabilan wacana dominan pembangunan (Spivak, 1988). Membaca secara dekonstruktif, penolakan masyarakat lokal terhadap PLTS terapung tidak dipahami sebagai irasionalitas publik, melainkan sebagai efek dari proses komunikasi yang mengklaim partisipasi dan keberlanjutan, tetapi mempraktikkan eksklusi dan dominasi simbolik. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menyingkap bagaimana bahasa pembangunan, narasi energi hijau, dan retorika kepentingan nasional berfungsi sebagai alat hegemoni komunikasi.

3.3 Implikasi Metodologis dalam Penelitian Ini

Sebagai pendekatan penelitian, dekonstruksi dalam studi ini digunakan untuk

1. Membaca dokumen kebijakan, pernyataan resmi, dan narasi Public Relations pemerintah sebagai teks yang mengandung oposisi biner dan hierarki makna.
2. Mengidentifikasi kontradiksi internal, ambiguitas, dan aporia dalam wacana pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak.

3. Menunjukkan ketergantungan wacana dominan pada makna-makna yang ditekan, khususnya pengalaman dan suara masyarakat lokal.
4. Membuka ruang pembacaan alternatif terhadap konflik pembangunan sebagai kegagalan komunikasi dialogis dan krisis legitimasi kebijakan.

Dekonstruksi tidak berdiri sebagai metode tunggal, tetapi sebagai kerangka analitis kritis yang memperdalam pembacaan data kualitatif dan memperkuat posisi penelitian ini dalam tradisi ilmu komunikasi kritis dan postmodern. Pemikiran Michel Foucault (1980) tentang relasi pengetahuan dan kekuasaan turut memperkuat analisis dekonstruktif dalam penelitian ini. Foucault menunjukkan bahwa wacana tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga memproduksi apa yang dianggap sebagai kebenaran. Dalam praktik Public Relations pemerintah, wacana pembangunan energi diproduksi sebagai kebutuhan nasional yang rasional dan tak terelakkan, sehingga ruang dialog dengan masyarakat lokal menjadi terbatas.

Kajian Critical Public Relations, pendekatan dekonstruktif digunakan untuk membaca PR sebagai praktik ideologis yang beroperasi dalam relasi kuasa tertentu ((Motion & Weaver, 2005; Holtzhausen dkk., 2015). Dengan demikian, dekonstruksi dalam penelitian ini diarahkan untuk mengungkap makna-makna yang disenyapkan, kepentingan yang tersembunyi, serta mekanisme legitimasi kebijakan yang berkontribusi terhadap munculnya konflik komunikasi.

3.4 Paradigma Penelitian

Penelitian ini berada dalam wadah paradigma kritis memandang realitas sosial bukan sebagai sesuatu yang netral, melainkan sebagai konstruksi yang sarat kepentingan dan ideologi (Griffin dkk., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berupaya memahami realitas konflik, tetapi juga mengkritisi bagaimana komunikasi pembangunan berkontribusi dalam mereproduksi atau justru mereduksi ketimpangan relasi antara aktor dominan dan masyarakat lokal (Rahman, 2009).

Konflik penolakan masyarakat dipahami sebagai bentuk resistensi komunikatif, bukan sekadar hambatan teknis pembangunan. Begitulah keselarasan penelitian ini yang

ingin membongkar makna di dalam pesan komunikasi pemasangan PLTS di Danau Singkarak yang disampaikan PR pemerintah dengan membawa relasi kuasa di dalamnya.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang-orang yang memiliki keterlibatan dalam fokus permasalahan yang diteliti (Hardani, 2020). Informan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan penelitian dibutuhkan untuk memberikan pandangan, sikap, informasi, proses, atau pendapat yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, informan penelitian dipilih oleh Peneliti melalui Teknik *purposive sampling* dimana menurut Creswell akan mencontohkan suatu komunitas masyarakat yang dapat memberikan data atau informasi terbaik kepada peneliti studi kualitatif (Haryoko et al., 2020).

Peneliti menggunteknik *purposive sampling*, dimana sampel secara sengaja dipilih oleh peneliti karena dianggap memiliki karakteristik atau ciri-ciri esensial yang cukup representatif sehingga dapat memperkaya data penelitian (Haryoko et al., 2020). Informan penelitian meliputi

1. Masyarakat lokal yang tinggal dan beraktivitas di sekitar Danau Singkarak serta terdampak langsung oleh rencana pembangunan PLTS terapung.
2. Tokoh masyarakat atau tokoh adat yang memiliki peran dalam pengambilan sikap kolektif masyarakat.
3. Perwakilan pemerintah atau pihak yang terlibat dalam komunikasi dan sosialisasi pembangunan PLTS terapung.

Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam dan memungkinkan pembacaan kritis terhadap relasi komunikasi antara negara dan masyarakat lokal. Total informan 13 orang, terdiri dari masyarakat lokal terdampak dan yang menyuarakan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, PT PLN dan PT. Indonesia Power. Penulisan kajian ini terfokus kepada subjek kategori 1 dan 2 selebihnya diposisikan sebagai pemberi informasi tambahan sekaligus kelompok informan yang digunakan untuk memvalidasi data penelitian.

Tabel 3. 2 Kategori Informan

No	Kategori	Jumlah
1.	Masyarakat Lokal	2
2.	Tokoh Masyarakat	2
3.	Pemerintah Daerah	2
4.	Pemerintah Pusat & Aktor Politik	3
5.	PT. PLN	2
6.	Tim Sosialisasi PT PLN Indonesia Power (BUMN)	2
JUMLAH		13

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti)

3.6 Sumber Data

Melakukan penelitian, dibutuhkan sumber data agar Peneliti mendapatkan informasi secara jelas dan komprehensif. Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

3.6.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang secara langsung diberikan kepada peneliti (Hardani, 2020). Peneliti memperoleh data ini melalui observasi pemberitaan selama konflik, wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan praktik komunikasi hubungan masyarakat yang terjadi, dan studi dokumen berupa laporan yang menghimpun praktik komunikasi dalam konflik ini.

3.6.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung diberikan informasi kepada Peneliti (Hardani, 2020). Data sekunder biasanya diperoleh dari sumber yang lebih mudah diakses dibanding sumber primer, seperti artikel ilmiah, berita dan buku.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Proses mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian, proses pengumpulan data menjadi bagian penting dalam menentukan bagaimana data didapatkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berupa

3.7.1 Observasi

Observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang dapat memaksimalkan kemampuan Peneliti untuk melihat dunia seperti yang dilihat oleh subjek penelitian (Moleong, 2017). Dengan melakukan observasi dalam praktik PR pemerintah dalam realisasi PLTS Singkarak, Peneliti berupaya untuk melihat bagaimana praktik yang terjadi dan tangkapan masyarakat hingga menimbulkan penolakan dari relasi kuasa yang di gunakan. Dalam penelitian ini, Peneliti bertindak sebagai pengamat penuh tanpa ikut serta dalam kegiatan.

3.7.2 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan suatu wawancara tanpa alternatif pilihan jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang informan (Afrizal, 2014). Teknik ini Peneliti gunakan untuk mendapatkan jawaban dan informasi mendalam yang dibutuhkan terkait praktik PR yang terjadi sebenarnya. Melalui wawancara mendalam, Peneliti menggali bagaimana proses yang terjadi selama konflik yang ditolak masyarakat memberikan makna terhadap proses manajemen komunikasi yang dilakukan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, persepsi, dan narasi penolakan masyarakat. Teknik ini memungkinkan peneliti menangkap makna subjektif yang tidak dapat dijangkau melalui instrumen kuantitatif (Raco, 2010). Peneliti ingin mewawancarai dengan system berbaur Bersama masyarakat melalui warung-warung dan juga mencari tokoh yang memahami permasalahan sebenarnya dalam sudut pandang masyarakat.

3.7.3 Dokumentasi

Dokumen atau dokumentasi dalam penelitian memiliki dua makna; pertama, dokumen dimaksudkan sebagai alat bukti tentang suatu data, termasuk di dalamnya catatan, foto, rekaman video, dan apapun yang dihasilkan oleh peneliti dan bukan sebagai data, yang kemudian disebut sebagai dokumentasi kedua, dokumen mengenai peristiwa atau kegiatan yang telah lalu sehingga didapatkan sebuah informasi, fakta, dan data yang diinginkan dalam suatu penelitian (Haryoko et al., 2020). Melalui teknik dokumentasi, Peneliti melampirkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian seperti rilis pers, artikel pemberitaan terkait, dan laporan yang dibuat oleh bagian praktik PR yang ditolak masyarakat.

3.8 Teknik Analisis Data Kualitatif

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara berkelanjutan, reflektif, dan kritis, sejalan dengan karakter penelitian kualitatif dengan model miles dan Huberman yang tidak memisahkan secara kaku antara proses pengumpulan dan pengolahan data. Analisis dimulai sejak peneliti memasuki lapangan, berinteraksi dengan informan, serta mengamati dinamika sosial yang mengiringi konflik penolakan masyarakat lokal. Analisis data dilakukan dengan analisis tematik kritis menggunakan pendekatan dekonstruktif. Data dianalisis secara berulang melalui proses kondensasi, penyajian, dan interpretasi kritis. Pendekatan dekonstruktif digunakan untuk membongkar oposisi-oposisi biner dalam wacana pembangunan, seperti pembangunan versus penolakan dan kepentingan nasional versus kepentingan lokal, yang berfungsi melegitimasi kebijakan negara dan meminggirkan suara masyarakat (Derrida, 1997; Foucault & Gordon, 1980).

Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumen terlebih dahulu ditranskripsikan dan diklasifikasikan berdasarkan konteks, aktor, serta isu utama yang muncul. Proses ini merupakan tahap awal reduksi data, yakni upaya menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait praktik komunikasi pemerintah, respons masyarakat lokal, serta relasi kuasa yang menyertainya (Rahman, 2009). Tahap berikutnya adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi tematik. Penyajian ini tidak dimaksudkan sebagai rangkuman deskriptif semata, melainkan sebagai ruang analitis untuk memperlihatkan pola-pola

komunikasi yang berulang, kontradiksi antar narasi, serta perbedaan cara. Pandang antara aktor dominan dan masyarakat lokal. Pada tahap ini, peneliti mulai mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka teori kritis, terutama dalam membaca bagaimana bahasa pembangunan, legitimasi kebijakan, dan klaim kepentingan publik diproduksi dan diterima secara tidak seimbang.

Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan sementara yang terus diuji dan dipertajam seiring bertambahnya data. Kesimpulan dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai kebenaran final, melainkan sebagai hasil dialog antara data empiris, refleksi peneliti, dan kerangka teoretis yang digunakan. Dengan demikian, analisis data tidak bersifat linier, tetapi bergerak secara siklikal atau dinamis. Kerangka kajian kritis, analisis data diarahkan untuk mengungkap bukan hanya apa yang dikomunikasikan, tetapi juga bagaimana dan untuk kepentingan siapa praktik komunikasi tersebut dijalankan. Fokus analisis diletakkan pada proses marginalisasi suara masyarakat lokal, mekanisme legitimasi kebijakan, serta bagaimana konflik diproduksi sebagai konsekuensi dari komunikasi pembangunan yang cenderung top-down dan teknokratis.

Pendekatan analisis ini memungkinkan penelitian tidak berhenti pada pemetaan konflik, tetapi juga menghadirkan pembacaan reflektif mengenai kegagalan komunikasi publik sebagai bagian dari permasalahan struktural dalam pembangunan.

3.9 Validitas Data

Keabsahan dan validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui prinsip-prinsip rigor penelitian kualitatif yang menekankan pada kedalaman makna, konsistensi temuan, dan keterlacakan proses analisis, bukan pada generalisasi statistik. Validitas dipahami sebagai proses membangun kepercayaan terhadap temuan penelitian melalui transparansi dan ketekunan metodologis (Raco, 2010).

Keabsahan dan validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui penerapan sejumlah strategi yang bertujuan memastikan bahwa data dan temuan penelitian dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam penelitian kualitatif, validitas dipahami sebagai kesesuaian antara data, proses analisis, dan interpretasi peneliti terhadap realitas sosial yang diteliti (Raco, 2010).

3.9.1 Triangulasi Sumber dan Metode

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu masyarakat lokal, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah yang terlibat dalam pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat konsistensi maupun perbedaan perspektif antar aktor, sehingga peneliti dapat memahami konflik komunikasi secara lebih komprehensif. Triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan wawancara mendalam, analisis dokumen kebijakan dan pemberitaan media, serta observasi terbatas. Penggunaan berbagai metode ini memungkinkan peneliti menguji ulang temuan dari satu metode dengan metode lainnya, sehingga mengurangi bias dan memperkuat kredibilitas data (Hardani et al., 2020).

3.9.2 Member Check

Member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil interpretasi awal peneliti kepada informan kunci. Proses ini dilakukan setelah tahap analisis awal, dengan tujuan memastikan bahwa makna yang ditangkap peneliti tidak menyimpang dari pengalaman dan pandangan informan. Member check juga berfungsi sebagai mekanisme etis dalam penelitian kualitatif, karena memberikan ruang bagi informan untuk menanggapi, mengklarifikasi, atau menambahkan informasi yang dianggap perlu. Dengan demikian, interpretasi yang dihasilkan bersifat lebih akurat dan bertanggung jawab (Raco, 2010).

3.9.3 Audit Trail

Audit trail dilakukan dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis, mulai dari pemilihan informan, proses pengumpulan data, tahap reduksi dan analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Dokumentasi ini mencakup catatan lapangan, transkrip wawancara, serta catatan analisis peneliti. Keberadaan audit trail memungkinkan proses penelitian dapat ditelusuri oleh pihak lain dan menunjukkan bahwa temuan penelitian dihasilkan melalui proses metodologis yang jelas dan konsisten, bukan berdasarkan asumsi subjektif peneliti semata (Hardani, 2020).

3.9.4 Refleksivitas Kritis

Penelitian kritis memiliki makna yang lebih dalam dan spesifik yang sering disebut refleksitas kritis. Ini bukan hanya sekadar mengakui bias melainkan, mempertanyakan asumsi dasar yang mendasari pengetahuan, membongkar kuasa dan ketidakadilan serta menghubungkan siri diri dengan struktur sosial (Trundle dkk., 2025)

Penelitian bertempat di Danau Singkarak Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi penelitian ini adalah wilayah masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh rencana dan realisasi pembangunan PLTS terapung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada intensitas konflik dan penolakan masyarakat terhadap pembangunan PLTS terapung, sebagaimana tercermin dalam pemberitaan media, pernyataan masyarakat, serta dinamika komunikasi antara pemerintah dan warga setempat.

Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian

[illegible]

Sidang Kolokium									
Pengumpulan Data									
Penulisan Laporan									
Seminar Hasil									
Sidang Tesis									

(Sumber: Olahan Penulis)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian sekaligus pembahasannya secara terintegrasi. Penyajian dilakukan dengan menautkan setiap temuan empiris pada interpretasi teoretisnya pada saat temuan tersebut dikemukakan. Dengan demikian, pembaca dapat mengikuti alur penalaran dari bukti tekstual dan wawancara menuju penafsiran kritis tanpa harus berpindah antarbab. Struktur penyajian dirancang mengikuti logika analisis yang berlapis: pertama pada masing-masing sumber data secara mendalam, kemudian disintesis secara lintas data dan akhirnya dikontraskan dengan data pembandingan independen.

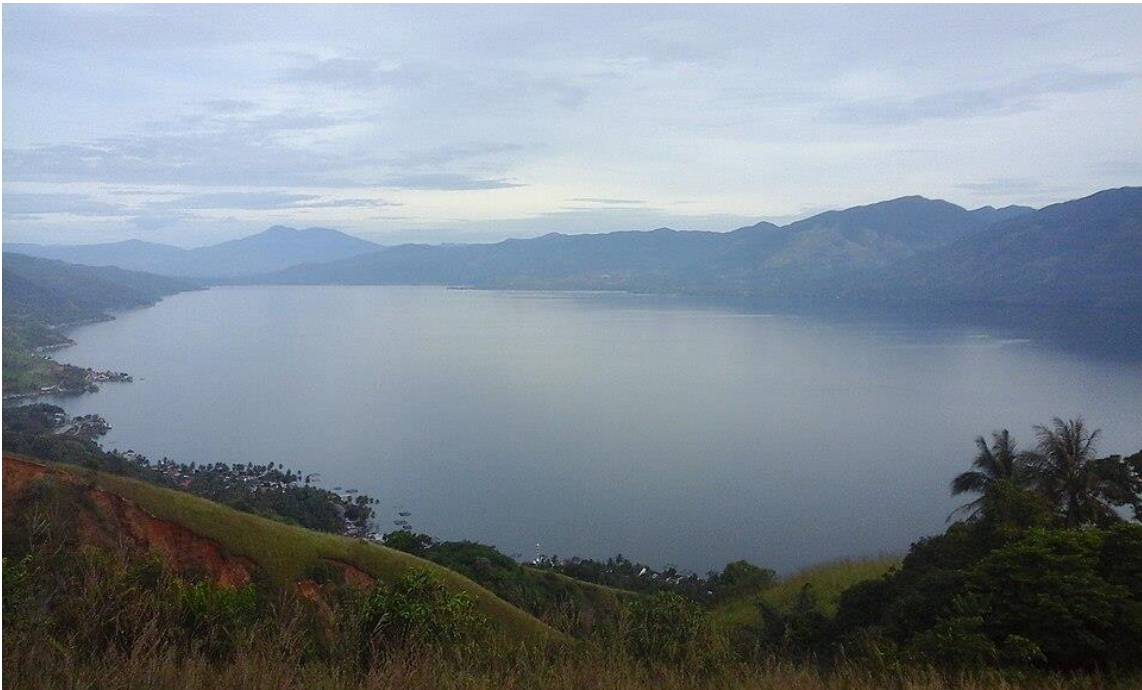
Penegasan metodologis perlu dikemukakan sejak awal. Analisis pada level mikro dalam penelitian ini tidak diarahkan pada pembedahan linguistik, seperti penghitungan kata atau penguraian struktur gramatikal secara terisolasi, melainkan pada cara narasi sebagai unit komunikasi yang utuh mengonstruksi makna, membingkai realitas, dan membangun legitimasi pembangunan. Pendekatan ini sejalan dengan teori dekonstruksi yang memandang teks sebagai praktik sosial, bukan sekadar artefak kebahasaan yang dalam konteks komunikasi dilihat dari pengalaman sosial.(Derrida, 1981). Adapun analisis terhadap praktik komunikasi mengadopsi kerangka dramaturgi Erving Goffman (1959) yang memperlakukan setiap tindakan komunikasi sebagai pertunjukan sosial yang sarat dengan pengelolaan kesan dan negosiasi makna.

Susunan bab ini adalah sebagai berikut. Subbab 4.1 memaparkan profil lokasi penelitian dan konteks struktural yang melatari produksi wacana pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak. Subbab 4.2 mendeskripsikan data serta profil komunikatif informan penelitian. Subbab 4.3 Menyajikan analisis mendalam atas temuan-temuan utama, yang diorganisasikan berdasarkan tiga tujuan penelitian, dengan menautkan setiap temuan pada kerangka teoretis dan data pembandingnya. Subbab 4.4 Mensintesis temuan secara lintas data pada level mikro, meso, dan makro. Subbab 4.5 Menyandingkan narasi korporasi dengan realitas material dari sumber independen sosial masyarakat, subbab 4.6 memperdalam analisis pada tataran sosial kewacanaan secara lintas data, dan

menutup bab dengan pembahasan integratif yang merangkai seluruh temuan ke dalam kerangka legitimasi gap dan implikasi kebijakan.

4.1 Profil Singkat Batipuh Selatan dan PLTS Danau Singkarak

4.1.1 Profil Geografis dan Ekologis Danau Singkarak



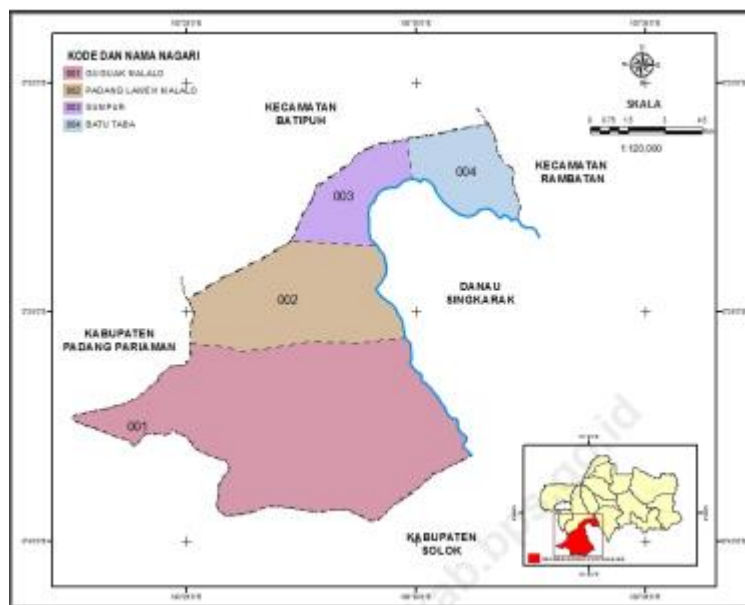
Gambar 4. 1 Salangka Danau Singkarak

(Sumber: <https://id.wikipedia.org>)

Danau Singkarak merupakan danau tektonik terbesar kedua di Pulau Sumatera yang terletak di antara dua kabupaten, yakni Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas permukaan sekitar 107 km² dan kedalaman maksimum mencapai 268 meter, danau ini memiliki signifikansi ekologis, ekonomis, dan kultural yang sangat tinggi bagi masyarakat Minangkabau di sekitarnya. Danau Singkarak tidak sekadar menjadi sumber daya alam, melainkan juga bagian integral dari konstruksi identitas kolektif masyarakat lokal.

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Danau Singkarak dikomunikasikan kepada publik sebagai bagian dari agenda Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang transisi energi terbarukan. Proyek ini melibatkan PT PLN

Indonesia Power sebagai perpanjangan tangan PLN dan bermitra dengan investor swasta, PT ACWA Power Danau Singkarak, yang secara bertahap memasuki tahap sosialisasi kepada masyarakat lokal di Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, yang berbatasan langsung dengan wilayah perencanaan pemasangan panel surya terapung.



Gambar 4. 2 Map Batipuh Selatan

(Sumber: [www. Tanahdatar.go.id](http://www.Tanahdatar.go.id))

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai wilayah yang paling terdampak langsung oleh rencana pembangunan PLTS terapung. Wawancara mendalam dilakukan kepada enam informan utama yang mencakup representasi multiperspektif perwakilan pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat dan lokal, pihak internal PLN, pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah. Keragaman informan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi perspektif dalam membaca praktik komunikasi dan relasi kuasa yang beroperasi dalam konflik pembangunan PLTS terapung.

4.1.2 Ekosistem Danau Singkarak dan Ikan Bilih

Danau Singkarak memiliki ekosistem perairan tawar yang unik dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, terutama ikan Bilih (*Mystacoleucus padangensis*) yang menjadi spesies endemik dan ikon khas Danau Singkarak. Selain ikan Bilih, danau

ini juga dihuni oleh jenis ikan lain seperti Asang (*Osteochilus brachinopterus*), Turiek (*Cyclocheilichthys dezwani*), dan Sasau (Hampala) (Rasyidin dkk., 2010) Namun, sejak beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak pada tahun 1988, kondisi ekosistem danau mengalami perubahan yang signifikan. (Rasyidin dkk., 2010) melaporkan bahwa sebelum adanya PLTA, debit air alami yang mengalir ke Sungai Ombilin rata-rata mencapai 43,9 m³/detik (data 1973-1981) dengan fluktuasi antara 6,9 hingga 111,1 m³/detik. Setelah PLTA beroperasi, sebagian besar volume air dialihkan melalui terowongan sepanjang 17 km ke daerah Asam Pulau untuk menghasilkan energi listrik sebesar 175 MW, dengan debit aliran sebesar 57,3 m³/detik ke DAS Anai (Rasyidin dkk., 2010).

Perubahan ini mengakibatkan terganggunya keseimbangan alami ekosistem danau. Untuk mempertahankan debit air bagi pembangkit listrik, kondisi alami diubah menjadi kondisi buatan. Pada musim hujan, air di Sungai Ombilin ditutup untuk meningkatkan volume air di waduk, menyebabkan permukaan air danau lebih tinggi dari kondisi alami. Sebaliknya, pada musim kemarau, permukaan air danau menjadi lebih rendah (Rasyidin dkk., 2010) Kondisi buatan ini tidak menguntungkan bagi ekosistem danau dan biota di dalamnya. Salah satu dampak paling nyata adalah perubahan pada vegetasi pantai danau. Vegetasi pantai alami yang dalam bahasa lokal disebut dalu-dalu (sejenis mangrove) semakin sulit ditemukan di sepanjang garis pantai dibandingkan dengan kondisi pada tahun 1998 (Rasyidin dkk., 2010) Perubahan ekosistem ini juga berdampak drastis pada kualitas dan kuantitas hasil tangkapan ikan. Peneliti temukan bahwa bahwa pada tahun 1998, ukuran rata-rata ikan Bilih mencapai 19 cm, namun sepuluh tahun kemudian ukuran rata-rata hanya 3-6 cm (Rasyidin dkk., 2010)

4.1.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Salingka Danau Singkarak

Masyarakat di sekitar Danau Singkarak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber daya danau, baik sebagai nelayan penangkap ikan Bilih maupun sebagai petani di lahan sekitar danau. Masyarakat pesisir danau menggunakan sekitar 30% waktunya untuk bertani dan sisanya untuk menangkap ikan di danau.

Penangkapan ikan Bilih di Danau Singkarak dilakukan dengan dua metode utama. Metode tradisional yang disebut alahan banyak ditemukan di bagian barat danau Nagari

Guguak Malalo dan Padang Laweh karena wilayah ini memiliki banyak aliran sungai yang berasal dari daerah pegunungan. Kapasitas alahan untuk menangkap ikan mencapai 50-60 liter per hari atau setara dengan 70-90 kg per hari. Dengan asumsi hari kerja 150 hari per tahun, setiap alahan dapat menghasilkan 11,25-13,5 ton ikan per tahun. Nelayan yang tidak memiliki lahan untuk alahan menggunakan jaring insang untuk menangkap ikan.

Namun, hasil tangkapan nelayan sangat fluktuatif. Nilai terendah bisa mencapai 4,5-7,5 ton per tahun, bahkan terkadang hanya 10-20 kg per hari. Pendapatan nelayan juga bergantung pada kondisi pasar yang cenderung monopoli oleh tengkulak. Nelayan tidak memiliki alternatif lain karena tidak ada teknologi yang memadai untuk menjaga kesegaran ikan atau mengolah ikan agar tidak cepat busuk. Untuk mengatasi masalah ini, tim Sibermas memperkenalkan teknologi pengeringan sederhana menggunakan radiasi matahari yang dapat mengeringkan ikan dalam waktu 3 jam.

Ketergantungan masyarakat pada ekosistem danau ini menjadi latar belakang penting mengapa rencana pembangunan PLTS terapung mendapat resistensi yang kuat. Bagi masyarakat, danau bukan sekadar sumber daya air, melainkan sumber kehidupan yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Setiap ancaman terhadap ekosistem danau dianggap sebagai ancaman terhadap mata pencaharian dan identitas budaya mereka.

4.1.4 Konteks Proyek PLTS Terapung dan Kontestasi Kepentingan

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Danau Singkarak merupakan bagian dari agenda besar Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang transisi energi. Proyek ini diprakarsai oleh PT PLN Indonesia Power (PLN IP) sebagai subholding PLN, yang menggandeng mitra strategis dari Arab Saudi, ACWA Power, perusahaan energi terkemuka global. Untuk merealisasikannya, dibentuklah sebuah badan usaha khusus, PT Indo ACWA Tenaga Singkarak (IAT Singkarak). Skala proyek ini tergolong masif, dengan nilai investasi mencapai Rp855 miliar untuk jangka waktu 25 tahun dan kapasitas terpasang sebesar 50 MW (atau 76 MWp). Jika beroperasi, PLTS ini akan menjadi pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Pulau Sumatera dan diproyeksikan mampu memasok listrik untuk sekitar 40.000 rumah tangga.

Proyek ini dikomunikasikan kepada publik dengan narasi yang kuat dan optimis, yang dibingkai dalam wacana pembangunan berkelanjutan. Direktur Utama PLN IP, Edwin Nugraha Putra, menyatakan bahwa proyek ini adalah bagian dari program Hijaunesia yang diluncurkan pada 2020 untuk mengakselerasi energi baru dan terbarukan (EBT) serta mendukung target net zero emission pada 2060. Narasi ini juga menekankan kontribusi proyek dalam menekan emisi karbon, menciptakan masa depan energi yang lebih hijau, serta menjaga keseimbangan lingkungan karena hanya akan memanfaatkan area seluas 49 hektare, atau sekitar 0,45 persen dari total luas Danau Singkarak.

Namun, di balik narasi besar tentang transisi energi dan modernisasi, realitas di tingkat tapak menunjukkan dinamika yang jauh lebih kompleks. Proyek ini justru memicu resistensi yang meluas dan terorganisasi, tidak hanya dari warga di Kecamatan Batipuh Selatan yang menjadi lokasi utama, tetapi juga dari berbagai nagari di sekitar Danau Singkarak. Penolakan ini bukanlah respons spontan terhadap teknologi baru, melainkan sebuah kontestasi kepentingan yang berakar pada pengalaman historis, kekhawatiran ekologis, dan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap praktik komunikasi dan pengambilan keputusan yang dianggap sentralistik dan tidak berpihak.

4.2 Profil Informan

Penelitian ini, terdapat 13 informan dipilih secara purposif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif atas praktik komunikasi yang berlangsung dalam konflik pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak. Setiap informan merepresentasikan posisi komunikasi yang berbeda dalam relasi kuasa antara negara, perusahaan, dan masyarakat lokal.

Tabel 4. 1 Data Informan

No.	Nama Inisial	Keterangan	Peran dalam Penelitian
1.	MM	Masyarakat Lokal	Warga terdampak langsung
2.	HY	Masyarakat Lokal	Warga terdampak Langsung

3.	DT.B	Masyarakat Lokal	Tokoh Adat
4.	DT.K	Masyarakat Lokal	Tokoh Adat
5.	CM	Pemerintah Daerah	Aparatur pemerintah Kecamatan
6.	MW	Pemerintah Daerah	Aparatur Pemerintah Kabupaten
7.	JP	Pemerintah Daerah	Aparatur Pemerintah Kabupaten
8.	BY	Pemerintah Pusat	Aparatur Pemerintah Provinsi
9.	AB	Aktor Politik	Perwakilan Legislatif Daerah
10.	D	PT. PLN	Induk Perusahaan
11.	IN	PT. PLN	Induk Perusahaan
12.	FR	Aktor Sosialisasi	Dosen Peneliti
13.	AD	Aktor Sosialisasi	Tim internal Indonesia Power dan ACWA

(Sumber: Olahan Penulis)

Demi menjaga kerahasiaan dan melindungi identitas informan, peneliti menggunakan kode informan dalam seluruh proses pelaporan hasil penelitian. Penggunaan kode ini dilakukan sesuai dengan prinsip etika penelitian kualitatif untuk menjaga privasi informan, mengingat isu yang diteliti berkaitan dengan konflik pembangunan dan berbagai kepentingan antaraktor

4.2.1 Informan MM

MM, yang berperan sebagai masyarakat lokal yang terdampak dan terlibat dari awal PLTA hingga rencana pembangunan PLTS saat ini, MM memiliki legitimasi kultural dalam nagari. Sebagai generasi yang hidup dan tumbuh di sekitar Danau Singkarak, MM mewakili suara komunitas lokal yang membawa pengetahuan ekologis tradisional *local*

ecological knowledge mengenai perilaku ikan Bilih, siklus musiman danau, dan dampak PLTA yang telah lalu terhadap ekosistem. Perspektif ini menjadi inti dari analisis resistensi dalam penelitian ini. MM juga merupakan seorang yang masyarakat lokal yang memiliki pengaruh di nagari Guguak Malalo dari cara bersosialisasinya dan latar belakang nya sebagai seorang tukang yang dimana telah banyak membangun rumah turut peradaban di nagari Guguak Malalo. MM memiliki latar belakang hobi yang unik, beliau merupakan seorang pecinta paralayang dan pernah membentuk tim di Bukik malalo yang dibuat landasan turunya di atas danau Singkarak, selain nelayan beliau juga mengetahui sebuah siklus badai di danau Singkarak yang seharusnya memiliki riset ekologis yang lebih dalam. Informan MM Selain sebagai warga yang telah lama menggantungkan kehidupannya pada kawasan Danau Singkarak, MM dikenal memiliki perhatian yang tinggi terhadap isu lingkungan dan pembangunan di kawasan danau. Pengalaman panjangnya dalam mengamati perubahan ekologi Danau Singkarak, termasuk melakukan penelusuran terhadap dampak pembangunan PLTA Singkarak, menjadikan informan ini memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kondisi sosial maupun ekologis kawasan penelitian. Di luar aktivitas tersebut, MM juga aktif mengembangkan potensi wisata melalui olahraga paralayang dengan menggagas lokasi lepas landas di kawasan perbukitan sekitar danau. Posisinya sebagai tokoh masyarakat yang memiliki wawasan luas membuat pandangannya banyak dijadikan rujukan oleh masyarakat setempat.

4.2.2 Informan HY

Merupakan masyarakat lokal yang juga tinggal di kawasan sekitar Danau Singkarak. Sebagai generasi muda yang telah berkeluarga, HY memiliki sudut pandang yang relatif moderat terhadap rencana pembangunan PLTS terapung. Informan ini tidak secara mutlak menolak pembangunan, tetapi menekankan bahwa keberhasilan proyek sangat bergantung pada kemampuan PT PLN Indonesia Power dalam membangun komunikasi, memberikan kepastian manfaat, dan memenuhi komitmen kepada masyarakat. Selain itu, HY memiliki relasi yang baik dengan unsur legislatif sehingga mampu memberikan perspektif mengenai dinamika komunikasi antara masyarakat dan lembaga politik.

4.2.3 Informan DT.B

Informan DT.B merupakan tokoh adat sekaligus Ketua Forum Penolakan PLTS Terapung di kawasan Danau Singkarak. Selain memegang jabatan adat, DT.B juga dipercaya dalam beberapa posisi strategis di tengah masyarakat sehingga memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Dalam proses penelitian, DT.B memberikan informasi mengenai dinamika penolakan, proses konsolidasi masyarakat, serta pertimbangan adat yang melatarbelakangi sikap komunitas terhadap rencana pembangunan.

4.2.4 Informan DT.K

Informan DT.K merupakan tokoh adat yang menjabat sebagai Sekretaris Forum Penolakan PLTS Terapung. Berbeda dengan DT.B yang lebih banyak berperan sebagai representasi kepemimpinan forum, DT.K memiliki peran penting dalam mengoordinasikan komunikasi, dokumentasi, dan penyusunan berbagai bentuk aspirasi masyarakat kepada pemerintah maupun pihak pelaksana proyek. Kombinasi informasi dari DT.B dan DT.K memberikan gambaran yang utuh mengenai proses terbentuknya gerakan penolakan masyarakat.

4.2.5 Informan CM

Informan CM merupakan aparatur pemerintah di tingkat kecamatan yang memiliki tanggung jawab dalam koordinasi pemerintahan di wilayah terdampak. Dalam proses pembangunan PLTS terapung, CM berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pihak PT PLN Indonesia Power maupun mitra pengembang. Pengalaman CM dalam menyelesaikan berbagai persoalan kewilayahan, termasuk konflik batas administrasi, menunjukkan kapasitasnya dalam mengelola komunikasi lintas pihak. Pengalaman tersebut memberikan perspektif mengenai bagaimana komunikasi pembangunan dijalankan pada tingkat lokal.

4.2.6 Informan MW

Informan MW merupakan aparatur sipil negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dalam kapasitasnya, MW terlibat dalam koordinasi administratif, pengelolaan perizinan, serta komunikasi antara pemerintah daerah, investor, dan PT PLN Indonesia Power. Informan ini memberikan informasi

mengenai proses koordinasi kelembagaan, mekanisme investasi, serta hubungan antara pemerintah daerah dan pelaksana proyek.

4.2.7 Informan JP

Informan JP merupakan aparatur pemerintah kabupaten yang memiliki kewenangan dalam bidang perencanaan wilayah. Peneliti mewawancarai JP untuk memperoleh penjelasan mengenai pertimbangan pemilihan lokasi pembangunan, kesesuaian tata ruang, serta kemungkinan alternatif lokasi yang dinilai lebih efektif. Perspektif JP membantu peneliti memahami aspek kebijakan spasial dalam proses komunikasi pembangunan.

4.2.8 Informan BY

Informan BY merupakan aparatur pemerintah tingkat provinsi yang memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan sektor energi. Informasi dari BY digunakan untuk memahami posisi pemerintah provinsi dalam proses koordinasi lintas lembaga serta mekanisme pengambilan keputusan terhadap rencana pembangunan PLTS terapung.

4.2.9 Informan AB

Informan AB merupakan unsur legislatif yang pada saat konflik berlangsung memegang posisi strategis sebagai pimpinan komisi yang membidangi proyek PLTS terapung. Posisi tersebut membuat AB berperan dalam menerima aspirasi masyarakat, melakukan fungsi pengawasan, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat. Informasi yang diberikan memperlihatkan bagaimana dinamika politik memengaruhi komunikasi pembangunan.

4.2.10 Informan D

Informan D merupakan bagian dari unit pembangkitan PT PLN yang diperoleh melalui rekomendasi masyarakat lokal. Informan ini dipilih untuk memberikan penjelasan mengenai aspek teknis operasional sistem ketenagalistrikan serta hubungan antara infrastruktur energi yang telah ada dengan rencana pembangunan PLTS terapung.

4.2.11 Informan IN

Informan IN merupakan anggota tim pengembangan yang bertugas menyusun perencanaan teknis proyek. Dalam proses wawancara, peneliti memperoleh informasi penting bahwa pada saat penelitian dilakukan, belum seluruh tahapan pelaksanaan memperoleh instruksi operasional secara penuh. Temuan tersebut memberikan perspektif mengenai kondisi internal perencanaan proyek yang sebelumnya tidak banyak diketahui oleh masyarakat.

4.2.12 Inform FR

Informan FR merupakan akademisi di bidang antropologi yang secara khusus dilibatkan untuk melakukan kajian sosial-ekologis di kawasan Danau Singkarak. FR mengikuti rangkaian sosialisasi selama dua hari sekaligus melakukan penelitian lapangan mengenai kondisi masyarakat dan lingkungan. Kehadiran informan ini memberikan perspektif akademik yang independen terhadap dinamika komunikasi pembangunan dan potensi dampak sosial-ekologis proyek.

4.2.13 Informan AD

Informan AD merupakan salah satu aktor utama yang sejak awal terlibat dalam proses sosialisasi proyek bersama pihak pengembang, dan pada perkembangan selanjutnya bergabung dengan PT PLN Indonesia Power. Pengalaman tersebut membuat AD memahami secara komprehensif proses komunikasi, perencanaan administrasi, dinamika hubungan dengan masyarakat, hingga berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan sosialisasi. Informan ini menjadi sumber utama dalam menjelaskan strategi komunikasi pembangunan dari perspektif pelaksana proyek.

4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.3.1 Analisis Konflik Masyarakat Lokal dalam Penolakan PLTS Terapung

Untuk memahami konflik PLTS terapung secara mendalam, seseorang tidak dapat mengabaikan konteks sejarah yang melatarbelakanginya. Danau Singkarak bukanlah arena netral: ia menyimpan memori kolektif masyarakat tentang pembangunan PLTA Singkarak pada 1992 yang hingga kini meninggalkan berbagai janji yang tidak terpenuhi. Pembangunan PLTA memberikan manfaat energi secara nasional, namun masyarakat

selingkar danau menyaksikan bagaimana kewajiban sosial perusahaan, yang mencakup pendidikan, pemberdayaan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur, tidak ditunaikan secara memadai.

Fakta ini menjadi akar dari seluruh dinamika komunikasi yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Ketika pemerintah dan PT PLN Indonesia Power memperkenalkan rencana PLTS terapung, mereka tidak masuk ke dalam ruang kosong: mereka masuk ke dalam ekosistem ketidakpercayaan yang telah dibangun selama lebih dari tiga dekade. Dalam kerangka teori dekonstruksi Derrida (1978), inilah yang disebut sebagai jejak *trace*, di mana makna sebuah teks atau tindakan selalu sudah ditentukan oleh apa yang pernah hadir sebelumnya.

4.3.1.1 Tanah Konflik Singkarak sebagai Warisan Sengketa yang Belum Lunas

Danau Singkarak bukan sekadar koordinat geografis dalam peta energi nasional. Ia adalah ruang hidup ekologis, ekonomis, dan simbolik yang selama puluhan tahun menjadi pusat gravitasi bagi berbagai kepentingan yang tidak selalu selaras. Ketika rencana pembangunan PLTS terapung diperkenalkan oleh PT PLN Indonesia Power sebagai perpanjangan tangan negara, yang sesungguhnya terjadi bukanlah sekadar benturan antara negara dan masyarakat, melainkan pengaktifan sebuah arena konflik yang jauh lebih kompleks, sebuah ladang di mana kepentingan berlapis dari berbagai aktor, mulai dari negara, perusahaan, investor asing, elite lokal, tokoh politik, hingga aktor-aktor yang mengklaim mewakili suara masyarakat, beroperasi secara bersamaan namun tidak selalu menuju ke arah yang sama.

Salah satu temuan paling fundamental dari penelitian ini adalah bahwa konflik PLTS terapung terjadi di atas tanah sengketa yang belum pernah benar-benar diselesaikan. Danau Singkarak membawa warisan ketidakadilan dari era PLTA yang tidak pernah dituntaskan secara resmi oleh negara. Ketika proyek baru datang, resistensi bukan sekadar reaksi terhadap proyek baru, melainkan akumulasi dari respons terhadap ketidakadilan historis yang telah lama menumpuk. Informan AD, perwakilan PT PLN Indonesia Power, mengungkapkan:

"Tahun 2023 tiba-tiba BPN kasih kami surat bahwa area switchchart itu merupakan daerah konflik antara Sumpur dan Padanglaweh Malalo. Nah itu konflik sudah berlangsung lama. Dan mereka seperti menutupi kalau lahan itu ada konflik karena tidak dari awal disampaikan." (AD, Wawancara, 2026)

Kutipan ini mengungkap bahwa perusahaan baru mengetahui adanya sengketa tanah pada 2023, tiga tahun setelah proses perencanaan dimulai. Masyarakat sengaja tidak membuka informasi tentang konflik perbatasan karena menyadari bahwa informasi tersebut dapat digunakan untuk melemahkan posisi tawar mereka. Ini adalah bentuk *subjugated knowledge* pengetahuan yang ditekan oleh wacana dominan tetapi tetap hidup dalam praktik sosial masyarakat (Foucault & Gordon, 1980).

Memahami konflik PLTS terapung, seseorang harus terlebih dahulu memahami bahwa Danau Singkarak adalah warisan sengketa yang belum pernah benar-benar diselesaikan. Dimulai dari konflik batas wilayah masyarakat lokal hingga pembangunan PLTA Singkarak pada 1992, danau ini telah menjadi titik simpul di mana kepentingan energi nasional, hak ulayat adat Minangkabau, ekonomi nelayan, dan ambisi investor bertemu tanpa pernah menemukan resolusi yang tepat. Proyek PLTS terapung bukan lahir di atas tanah yang bersih, ia lahir di atas akumulasi ketidakadilan yang belum dituntaskan.

Pasal 10 Penetapan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

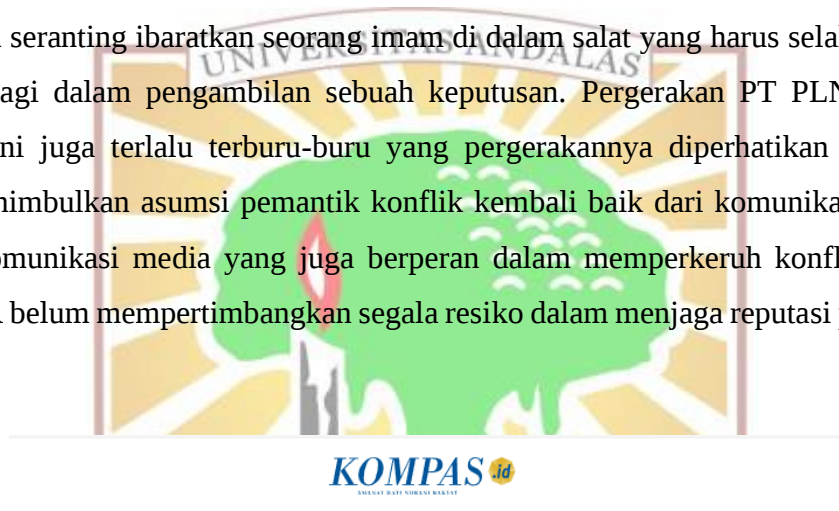
MM dalam wawancaranya juga menyampaikan ada perbedaan karakter ketika disumatra barat yaitu ketika kita ingin memutuskan sesuatu di Sumatra Barat terkhususnya di Batipuah Selatan silahkan libatkan niniak mamak, yang merupakan raja dalam nagari di Minangkabau, disampaikan seperti berikut.

"Baa kok monde tu karano daerah minang ko babeda jo daerah lain, menuruik kami koo sabananyo dalam perencanaan niniak mamak harus di libatkan dalam proses perencanaan tadi, baru niniak mamak jalehan ka kamanakan nyo. Soalnya apo iko masalah disumatra barat yang selalu bamasalah jo masalah daerah wilayah, sedangkan memang dari awal

program pemerintah ko indak pernah meliabtakan niniak mamak” (MM, Wawancara 2026)

(Kenapa seperti itu karena daerah Minang itu berbeda dengan daerah lain, menurut kami seberannya perencanaan ini niniak mamak harus dilibatkan dalam proses perencanaan tadi baru nanti niniak mamak yang menjelaskan ke kemenakannya. Soalnya masalah di Sumatera Barat selalu tentang wilayah sedangkan program pemerintah tidak pernah melibatkan masyarakat.).

Penyelesaian sengketa ataupun perencanaan di Minangkabau harus memiliki regulasi niniak mamak, karena niniak mamak dianggap orang yang harus didahulukan selangkah ditinggikan seranting ibaratkan seorang imam di dalam salat yang harus selalu berada di depan apalagi dalam pengambilan sebuah keputusan. Pergerakan PT PLN Indonesia Power disini juga terlalu terburu-buru yang pergerakannya diperhatikan masyarakat hingga menimbulkan asumsi pemantik konflik kembali baik dari komunikasi langsung ataupun komunikasi media yang juga berperan dalam memperkeruh konflik tersebut. Terlihat PR belum mempertimbangkan segala resiko dalam menjaga reputasi perusahaan.



N...

Pascabentrok, Warga Dua Nagari di Tanah Datar Sepakat Berdamai

Warga Nagari Sumpur dan Nahari Padang Laweh Malalo di Kecamatan Batipuh Selatan, Tanah Datar, Sumatera Barat, sepakat berdamai. Sebelumnya sempat muncul konflik di antara kedua belah pihak akibat sengketa tanah.

Gambar 4. 3 Berita lokasi tanah konflik

(Sumber: Kompas.id)

Berita yang diunggah pada 2020 ini seharusnya sudah menjadi bagian dari tim perencanaan Indonesia Power dan PT ACWA yang disayangkan belum disurvei secara tepat dalam penyelesaian masalah dan perencanaan dalam menjawab tantangan di

lapangan. Narasi "masyarakat bersatu menolak PLTS" yang tampak solid di permukaan ternyata menyembunyikan fragmentasi internal konflik antara Padang Laweh Malalo dan Sumpur yang justru memperumit dinamika konflik. Sebagaimana dijelaskan Barker dan Galasinki (2001) dalam dekonstruksi memungkinkan peneliti membaca bagaimana wacana pembangunan memusatkan suara negara sebagai kebenaran dominan, sekaligus meminggirkan pengalaman masyarakat lokal. Dalam kasus ini, narasi "masyarakat menolak" digunakan untuk menyederhanakan konflik, padahal realitasnya jauh lebih kompleks: ada konflik horizontal antar nagari yang justru menjadi akar persoalan.

Dampak ekologi yang timbul bukan hanya tentang endemik lokal yaitu ikan Bilih, tetapi juga ekologi daerah yang tidak tunggal, terdiri dari 13 nagari yang harus bisa disatukan suaranya. Walaupun Bilih menjadi objek penolakan utama masyarakat akan rasa takutnya kehilangan ekonomi pencarian dan juga ciri khas hewan daerah untuk dijaga. Salah satu kelemahan terbesar dalam pembacaan konflik Singkarak yang beredar luas adalah kecenderungan untuk membelah aktor menjadi dua kubu yang rigid, pemerintah dengan perusahaan di satu sisi, dan masyarakat di sisi lain. Pembacaan biner semacam ini tidak hanya menyederhanakan realitas, tetapi juga secara tidak sengaja memaparkan konflik karena menutup kemungkinan analisis tentang retakan internal dalam masing-masing kubu yang sesungguhnya bisa menjadi ruang untuk solusi.

Impression construction merujuk pada proses penyusunan representasi yang akan ditampilkan kepada audiens. Pada tahap ini, aktor memilih informasi yang dianggap menguntungkan, menyusun narasi tertentu, menentukan simbol yang akan digunakan, serta menyesuaikan gaya komunikasi dengan karakteristik khalayak yang menjadi sasaran (Leary dkk., 1986).

Berikut penulis berikan gambaran website yang telah dibentuk oleh Indonesia Power dan PT Acwa dalam pelaksanaan program tetapi mereka belum mengkomunikasikan rencana pelaksanaan hingga menjadikan timpang tindih kebijakan, keputusan hingga informasi penting.



Gambar 4. 4 Website Perusahaan kolaboratif
(Sumber: plnindonesiapowerrenewables.co.id)

Akun resmi Indonesia Power telah mengunggah PT baru untuk mengurus pengimplementasian proyek PLTS. Sangat disayangkan ini dibentuk di tengah konflik dan di titik belum ada keputusan hingga ini makin memperkeruh keadaan tanda suara masyarakat dimarginalisasikan. Melihat budaya Minangkabau juga terkhususnya di daerah ini menjadi pemicu api penolakan itu semakin besar.

4.3.1.2 Aktor-Aktor dan Ekonomi yang Memanfaatkan Nama Masyarakat

Waktu awal memasuki daerah di awal 2020 ini sangat bertepatan dengan kontestasi politik yang berdampak dalam persepsi masyarakat hingga memandang ini bukanlah sebuah niat baik tapi janji politik yang memasukan kepentingan. AD menyampaikan bahwa waktu perancangan program pun menjadi permasalahannya sebagai berikut:

“Tentu saja kami dari diskusi kepada masyarakat manapun yang diarahkan dari nagari pemerintah daerah telah kami sampaikan di awal masuk 2020 aman saja baru 2023 baru ramai dan itu mungkin juga faktor masa politik waktu sosialisasi akbar itu pagi-pagi spanduk-spanduk sudah dinaikan masyarakat” (AD, Wawancara).

Dimensi yang paling menantang secara analitis dari konflik Singkarak adalah identifikasi aktor-aktor yang hadir dalam arena konflik ini bukan untuk mencari titik tengah yang adil, melainkan untuk menunjukkan pengaruh dan kekuatan mereka dalam

situasi yang sedang panas. Data penelitian mengindikasikan kehadiran aktor-aktor semacam ini dari berbagai sisi. Ketika kepentingan karir politik masuk ke dalam arena konflik yang seharusnya diselesaikan berdasarkan keadilan dan kepentingan masyarakat, proses penyelesaian konflik menjadi jauh lebih rumit karena ada aktor-aktor yang justru berkepentingan untuk memperpanjang ketegangan sebagai modal politik. Fenomena ini dapat dibaca melalui lensa di mana konflik tidak dilihat sebagai masalah yang harus diselesaikan, tetapi sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi.

Aktor politik memiliki insentif untuk mempertahankan ketegangan pada level tertentu tidak terlalu rendah sehingga isu kehilangan relevansi politiknya, dan tidak terlalu tinggi sehingga berubah menjadi kekerasan yang dapat merugikan citra mereka. Konflik yang "hangat" namun tidak "mendidih" adalah kondisi yang paling menguntungkan bagi kalkulasi politik cukup panas untuk menarik perhatian dan menunjukkan keberpihakan, namun cukup terkendali untuk menghindari risiko politik yang lebih besar. Informan AB, perwakilan legislatif daerah, mengkonfirmasi kompleksitas ini:

"Kasus ini sudah sulit untuk diluruskan karena lokasi di tanah konflik daerah dan juga aturan nanti setelah itu bisa dapat keuntungan juga, cuman ya masyarakat lokal punya kajian sendiri yang dan masalah utamanya menurut saya kasusnya udah masuk angin. Sudah terlalu banyak yang ikut campur dan menanam kepentingan juga di dalam nya." (AB, Wawancara 2026).

Penggunaan istilah "masuk angin" oleh seorang politisi untuk menggambarkan konflik ini sangat mengungkap secara analitis. Istilah tersebut menyiratkan bahwa konflik telah menjadi terlalu rumit dan dipenuhi oleh berbagai kepentingan yang saling bertabrakan, sehingga sulit untuk menemukan jalan keluar yang bersih. Ini adalah pengakuan implisit bahwa konflik telah melampaui substansi awalnya dan menjadi arena bagi berbagai kepentingan yang tidak selalu terkait dengan proyek itu sendiri.

Dari sisi yang mengatasmakan dukungan proyek, kehadiran figur-figur yang terhubung ke jaringan kekuasaan nasional dalam forum sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai dukungan simbolik. Informan dari internal PLN mengidentifikasi bahwa keterlibatan tokoh politik nasional dalam sosialisasi proyek ini sesungguhnya tidak lazim dalam mekanisme proyek PLTS serupa di tempat lain:

"Berarti dari yang bg tangkok, dari kawan bg kalau iko untuak program pln, andre rosyade ndk akan terlibat do. Soalnya di mentawai ndk pakai itu do." (D, Wawancara 2026)

(Kesimpulan yang saya tangkap dari informasi teman saya ini, untuk program ini bukan program PLN karena Andre Rosyade terlibat. Berkaca dari PLTS di Mentawai tidak ada keterlibatan seperti itu sebelumnya)

Ini adalah sinyal yang sangat penting keterlibatan aktor politik yang tidak lazim dalam proyek serupa mengindikasikan bahwa ada dimensi kepentingan yang melampaui sekadar kebutuhan sosialisasi teknis. Arena konflik ini tampaknya cukup menarik bagi berbagai aktor politik untuk menjadikannya panggung, baik untuk menunjukkan dukungan kepada agenda pembangunan nasional, maupun untuk menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat lokal. ASN daerah, yang posisinya berada tepat di persimpangan antara sistem dan masyarakat, memberikan gambaran tentang kompleksitas relasi kepentingan ini dengan sangat jujur:

"Kalau nyo balawan lo tu ruginyo beko nyo ka daftar ka DPR lo baliak kan." (CM, Wawancara 2026).

(Kalau seorang politikus turut melawan masyarakat rugi mereka, karena akan tetap menjadi politikus seperti mencalon kembali di DPR)

Kalimat ini, yang disampaikan dalam konteks menjelaskan kalkulasi politik seorang tokoh yang hadir dalam sosialisasi, mengungkap bahwa posisi terhadap konflik ini adalah pertimbangan karir politik yang sangat konkret. Mendukung atau menolak proyek ini memiliki implikasi bagi trajektori politik seseorang, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ketika kepentingan karir politik masuk ke dalam arena konflik yang seharusnya diselesaikan berdasarkan keadilan dan kepentingan masyarakat, proses penyelesaian konflik menjadi jauh lebih rumit karena ada aktor-aktor yang justru berkepentingan untuk memperpanjang ketegangan sebagai modal politik.

Perlu ditekankan dengan sangat kuat dalam pembacaan ini adalah bahwa identifikasi atas kepentingan-kepentingan berlapis ini tidak dimaksudkan sebagai tuduhan terhadap individu-individu tertentu. Dalam kerangka komunikasi kritis, perilaku individu selalu dibentuk oleh struktur insentif dan sistem yang lebih besar. Seorang politisi yang mengkalkulasikan posisinya terhadap konflik ini bukanlah individu yang jahat; ia adalah individu yang beroperasi dalam sistem politik di mana visibilitas dan keberpihakan adalah

modal utama. Yang perlu dikritisi bukanlah individunya, melainkan sistem yang membuat kalkulasi semacam ini menjadi rasional dan bahkan perlu. Salah satu pegangan masyarakat dalam pengimplementasian bentuk koordinasi yang harus dijalankan pemerintah hingga BUMN karena di dalam hak tanah walaupun dimiliki negara tetap terdapat dominasi kepentingan rakyat harus di prioritaskan dalam pengambilan keputusan dan izin tambang daerah.



Gambar 4.1 Dokumentasi rapat stake holder

(Sumber: dokumentasi informan MW)

Gambar di atas memperlihatkan forum diskusi pemerintah daerah dengan pihak Indonesia Power dan PT. ACWA untuk mencapai kesepakatan yang bulat. Rapat ini juga diagendakan karena semakin besarnya gejolak resistensi masyarakat lokal. Kewajiban pemerintah daerah adalah mengikuti instruksi pemerintah pusat. PSN telah ditetapkan dari awal maka tidak ada wewenang pemerintah daerah untuk menolak karena mendorong kepentingan negara.

Data wawancara dengan informan pemerintah daerah mengungkap bahwa pada 2019 ketika PT PLN Indonesia Power mengirimkan surat pertama, penerimaan dokumen

tersebut berlangsung secara pasif tanpa evaluasi mendalam atas konteks historis yang melingkupi kawasan tersebut. Lebih mengungkap lagi adalah cara pemerintah merespons keberatan masyarakat yang menghubungkan trauma PLTA dengan proyek baru:

“Bahwasanya ini PSN terima lah proyek strategis nasional ini dulu nanti masalah PLTA dan perhatian yang kurang, nanti kita masukan” (MW, Wawancara 2026).

Logika terima dulu, masukkan masalah lama belakangan ini secara tidak sengaja mengungkap sebuah asumsi yang sangat bermasalah bahwa masalah yang belum diselesaikan dapat ditangguhkan tanpa batas sementara proyek baru didorong ke depan. Ini bukan sekadar ketidaksensitifan komunikasi ini adalah penolakan untuk mengakui bahwa tanah di mana proyek baru akan berdiri masih membawa beban sejarah yang belum lunas. Ketika beban itu tidak diakui secara resmi oleh pemerintah, ia tidak hilang, ia hanya terakumulasi dan kemudian meledak ketika proyek baru datang mengetuk pintu yang sama.

Fenomena ini dapat dibaca melalui lensa hegemoni Gramsci (1971), yang menjelaskan bagaimana kelompok dominan memperoleh persetujuan dari kelompok subordinat melalui produksi wacana yang tampak mewakili kepentingan bersama (Hoare Quintin & Smith Nowell Geoffrey, 2022). Namun, temuan penelitian ini memperluas konsep hegemoni Gramsci dengan menunjukkan bahwa hegemoni tidak hanya datang dari kelas penguasa (negara dan korporasi), tetapi juga dari elite lokal yang mengklaim sebagai "pembela rakyat" namun sebenarnya memperjuangkan kepentingan pribadi. Inilah yang kemudian peneliti sebut sebagai hegemoni kepentingan berlapis *layered hegemony of interests*.

Informan tokoh masyarakat MM mengartikulasikan dimensi historis ini dengan sangat tepat. Ia tidak hanya berbicara tentang trauma masa lalu sebagai kenangan emosional, melainkan sebagai basis argumentasi rasional yang diperoleh dari pengalaman empiris:

"Yang dulu harapan masyarakat itu kehidupannya semakin wah. Tapi sapanjang waktu berlalu sampai saat ini, kontribusi PLTA tidak se vital namanya. Sekarang hadir dengan nama program strategis nasional masyarakat berpikir yang lama belum sudah selesai sudah hadir juga program

baru yang berdampak dalam satu instansi yang sama." (MM, Wawancara 2026).

Bagian ini merupakan logika induktif yang sangat solid pengalaman empiris dengan proyek sebelumnya menghasilkan prediksi yang sangat beralasan tentang proyek yang baru. Bukan irrasionalitas, bukan ketakutan terhadap modernitas, melainkan pembelajaran berbasis bukti yang menjadi basis penolakan. Pemerintah yang tidak mau mengakui validitas pembelajaran ini tidak hanya gagal secara komunikasi, melainkan gagal secara epistemologis dalam memahami cara masyarakat Singkarak berpikir dan membuat keputusan.

Konsep ini sejalan dengan pemikiran Foucault (1980) tentang relasi kuasa pengetahuan, di mana wacana tidak hanya merepresentasikan realitas tetapi juga memproduksi apa yang dianggap sebagai kebenaran. Dalam konteks ini, narasi "kami menolak" telah diproduksi sebagai kebenaran tunggal yang mengklaim mewakili seluruh masyarakat, padahal di baliknya terdapat fragmentasi kepentingan dan relasi kuasa yang kompleks. Foucault mengingatkan bahwa pengetahuan yang dianggap sah adalah pengetahuan yang diproduksi oleh institusi kekuasaan; dalam kasus ini, narasi resistensi yang dominan telah diproduksi oleh aktor-aktor tertentu yang memiliki kapasitas untuk mendefinisikan "apa yang diinginkan masyarakat".

Data penelitian mengungkap bahwa di dalam pihak pemerintah sendiri terdapat fragmentasi yang sangat signifikan. Percakapan antara dua informan internal PLN memperlihatkan bahwa bahkan institusi yang secara formal paling terkait dengan proyek ini tidak memiliki kesamaan informasi dan persepsi mengenai status proyek:

"Brarti ko program nyo pemerintah, otomatis nyo harus laporan dulu dan harus di sampaikan ke tim pln, brarti lun duduak ko lai ko" (D, wawancara 2026)
Nul ndk ado dapek info do, lun dapek info lai do... kan itu planning nyo
"pemerintah tu ma... bukan, gubernur bantuak nyo" (IN, Wawancara 2026)
 (Berarti program ini milik pemerintah, otomatis programnya harus dilaporkan dahulu ke tim PLN berarti belum diputuskan)
 (Nul tidak dapat infonya, kan itu rencana pemerintah bisa jadi gubernurnya)

Dua orang dari institusi yang sama, sama-sama tidak memiliki informasi yang memadai tentang proyek yang secara publik diklaim sebagai program strategis nasional. Ini bukan sekadar ketidakefisienan birokrasi; ini mengungkap bahwa proyek PLTS Singkarak beroperasi dalam zona ambiguitas kelembagaan yang sangat tinggi: lahir dari

mandat pemerintah pusat, dilaksanakan oleh BUMN yang tidak sepenuhnya sadar perannya, melibatkan investor swasta (PT ACWA Power Danau Singkarak) yang masuk dari jalur tersendiri, dan bermuara pada masyarakat yang tidak pernah benar-benar diajak bicara dari awal.

Pemerintah telah menyiapkan seluruh elemen pertunjukan tempat, pejabat, agenda, bahkan koordinasi keamanan namun gagal mengendalikan definisi situasi karena definisi situasi masyarakat sama sekali berbeda, bukan forum informasi, melainkan momentum penegasan penolakan. ketegangan dan konflik komunikasi' ketika mengabaikan konteks sosial lokal (Melkote & Steeves, 2015)

Di sisi lain, pihak masyarakat pun tidak homogen. Di sinilah letak salah satu temuan paling penting sekaligus paling sensitif dari penelitian ini. Data lapangan mengindikasikan adanya aktor-aktor yang memanfaatkan situasi konflik bukan untuk menyelesaikannya, melainkan untuk memperkuat posisi dan pengaruh mereka sendiri. MM mengungkap dinamika ini dengan cara yang sangat hati-hati namun cukup jelas:

“Pak Bukhari ketua KAN baik anak buah Luhut kesini saya sampaikan itu. Kalau dibawa ke Gubernur ka bupati nyo oke jo nyo. Nyo PSN urang ko la takabek dek undang-undang. Jadi urng tu oke jo nyo” (MM, Wawancara 2026).

(Bapak Bukhari sebagai ketua Kerapatan Adat Nagari bersama anak buahnya Luhut saya sampaikan hal yang sama dalam poin penolakan. Bila dibawa ke Gubernur dan Bupati pasti mereka menyetujui saja. Karena kalau membahas PSN mereka sudah menjadi tanggung jawab untuk mengikuti Undang-Undang).

Pernyataan ini mengungkap dimensi yang sangat penting terdapat aktor-aktor yang memiliki akses ke jaringan kekuasaan yang jauh melampaui batas nagari dan bahkan provinsi, yang hadir dalam konteks konflik ini dengan motif yang tidak sepenuhnya transparan. Ketika seorang tokoh yang anak buah Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan seorang tokoh politik nasional datang dan para pejabat dari gubernur hingga bupati 'oke', maka yang beroperasi bukan sekadar dinamika komunikasi antara rakyat dan negara, melainkan jaringan kepentingan politik dan ekonomi yang melampaui level konflik yang tampak di permukaan.

Gramsci (1971) memahami hegemoni sebagai proses dinamis yang melibatkan produksi persetujuan melalui kombinasi kepemimpinan intelektual, moral, dan politik. Dalam konflik Singkarak, hegemoni tidak beroperasi secara tunggal dari arah pemerintah dan perusahaan. Data penelitian mengungkap bahwa praktik hegemonik juga beroperasi di dalam arena masyarakat sendiri, di mana aktor-aktor yang memiliki akses ke jaringan kekuasaan menggunakan momentum konflik untuk memperkuat posisi mereka sendiri. Layaknya yang disampaikan CM ketika wawancara akan bagaimana hegemoni itu sendiri dibentuk secara jelas.

“Kalau KAN ko ba kantua lai tapi ba ikatan adminstrasi indak, soalnyo di dalamnyo sabana nyo persatuan niniak mamak. Kalau LKAM baru nyo lembaga. Yo pas nanyo ka pak, tu pak arahan nyo. Tamui la ketua KAN, tamuila MM. Kalau jatuahtyo diminang ko bakarajo indak tersuktur jatuahtyo, padahal perencanaan 2019 tapi 2023 baru nyo turun ka lapangan, 5 tahun nyo manggodok. Wak sebagai fasilitator se nyo, kalau diundangnyo wak rapek ka kantua wali nagari wak datang” (CM, Wawancara 2026)

(KAN ‘Kerapatan Adat Nagari’ merupakan kumpulan persatuan niniak mamak yang tidak terikat dalam administrasi negara. LKAM itu baru merupakan lembaga. Pas bertanya ke saya tentu saya arahkan, temuilah ketua KAN, temuilah MM. kalau di Minangkabau kalau tidak menemui niniak mamak dianggap tidak terstruktur komunikasinya, padahal perencanaan 2019 tapi 2023 baru turun ke lapangan, 5 tahun menyusun itu semua. Saya rasa bagian saya hanya sebagai fasilitator kalau di undang rapat ke kantor wali nagari saya datang)

Hegemoni yang dibentuk oleh daerah Minangkabau juga merupakan bentuk inisiasi dan kepercayaan kepada niniak mamak dalam nagari agar dapat dijembatani dan juga menjadi representasi suara lokal terhadap regulasi dan juga apa yang terjadi di daerah. Kalau yang disampaikan MM itu “niniak mamak ko nyo rajo dalam nagari”. Suara merekalah yang seharusnya dibulatkan terlebih dahulu.

Implikasinya sangat penting dalam merancang komunikasi yang lebih dialogis dan adil, tidak cukup hanya memperbaiki cara pemerintah dan perusahaan berkomunikasi dengan masyarakat. Perlu juga ada mekanisme yang memastikan bahwa suara masyarakat yang dikumpulkan dan direpresentasikan dalam proses dialog adalah suara masyarakat

yang sesungguhnya, bukan suara elite lokal yang mengklaim mewakili masyarakat namun sesungguhnya membawa kepentingan mereka sendiri.

Ini memerlukan desain partisipasi yang sangat hati-hati tidak hanya mengundang 'perwakilan masyarakat' ke meja dialog, melainkan memastikan bahwa mekanisme representasi itu sendiri bersifat inklusif dan akuntabel. Dalam konteks Minangkabau, sistem niniak mamak dengan struktur kewajiban adatnya yang sangat jelas kepada kamanakan justru menyediakan mekanisme representasi yang memiliki akuntabilitas kultural yang kuat, yang berbeda dari representasi formal birokrasi yang sering tidak jelas akuntabilitasnya kepada siapa.

4.3.1.3 Paradox CSR yang selalu menjadi pondasi masalah tak terselesaikan

Salah satu persoalan yang paling sering disebutkan masyarakat sebagai bukti kegagalan PLTA adalah minimnya kontribusi nyata bagi kehidupan sekitar danau. Namun analisis yang lebih dalam mengungkap bahwa persoalan ini lebih kompleks dari sekedar perusahaan yang tidak menunaikan kewajibannya. Data penelitian menunjukkan adanya sebuah mekanisme yang dapat disebut sebagai paradoks saluran CSR dana atau kontribusi yang mungkin secara formal dikeluarkan oleh perusahaan tidak selalu sampai kepada penerima yang paling membutuhkan karena melewati rantai perantara yang masing-masing memiliki kepentingan untuk mengklaim peran sebagai perwakilan masyarakat.

Informan tokoh masyarakat mengidentifikasi ketidakhadiran kontribusi PLTA dalam empat domain utama yang seharusnya menjadi kewajiban sosial perusahaan: pendidikan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun yang menarik adalah cara ia mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas absennya kontribusi ini:

“Harusnyo kontribusi PLTA ko, ado kewajibanyo di pendidikan, ado di ekonomi ado di lingkungan ado di sosial. Kini wak baco kasado alahnyo. Masalah pendidikan, apo yg lah pernah nyo lakukan untuk daerah sekitarnyo lah. Tua lai ekonomi, harus ado nan dibina nyo ekonomi ko sampai nyo bisa manampung tenaga kerja sekitar 100 urang. Jadi adolah nan bisa di banggakan nyo, kini kalau di caliak direktur manager PLN tu ndk ado anak nagari do, ado pun jadi satpam nyo” (MM, Wawancara 2026).

(Seharusnya kontribusi PLTA itu ada kewajiban di pendidikan, ekonomi, lingkungan dan sosial. Sekarang kita baca semuanya. Masalah pendidikan apa yang pernah dilakukan untuk daerah sekitar. Lalu ekonomi harusnya ada yang dibina ekonomi hingga bisa menampung tenaga kerja sekitar 100 orang. Jadi ada yang bisa dibanggakan, sekarang kita lihat manajer PLN, tidak ada pemuda daerah, walaupun ada hanya menjadi satpam saja.)

Yang tidak terungkap secara eksplisit dalam narasi informan namun dapat dibaca secara analitis dari konteks adalah kemungkinan bahwa dana CSR yang secara formal dikeluarkan perusahaan terserap dalam lapisan-lapisan birokrasi dan representasi yang mengklaim mewakili masyarakat, namun tidak menyentuh kelompok-kelompok yang paling terdampak. Pola seperti ini bukan hal baru dalam studi konflik sumber daya alam di Indonesia sering terjadi bahwa elite lokal yang memiliki akses ke perusahaan dan pemerintah berhasil memosisikan diri sebagai jembatan' yang mengontrol aliran manfaat, sementara nelayan, petani, dan masyarakat kecil yang langsung menanggung dampak justru tidak menerima kompensasi yang memadai.

Paradoks ini memiliki konsekuensi komunikatif yang sangat serius. Ketika masyarakat mengatakan bahwa 'PLTA tidak memberikan kontribusi', pernyataan ini bisa jadi secara harfiah benar dari perspektif mereka, sementara dari perspektif perusahaan mereka telah mengeluarkan dana CSR yang signifikan. Layaknya yang disampaikan AD.

“Jika tau itu CSR kita dan dana kita semuanya disalurkan, dan tanggung jawabnya diselesaikan, kenapa ada gedung serba guna, masjid dan itu semuanya dari kami mereka cuman ya kita pernah minta PLTA ke siapa saja CSR di berikan dan ya ada beberapa orang yang memanfaatkan itu mungkin” (AD, Wawancara 2026).

Kedua pernyataan ini tidak harus bertentangan mereka bisa keduanya benar secara bersamaan jika dana tersebut tidak sampai kepada penerima yang paling tepat. Konflik persepsi tentang CSR ini adalah konflik komunikasi yang sesungguhnya memiliki solusi teknis sistem pelaporan dan verifikasi yang transparan dan partisipatif. Namun solusi teknis ini tidak dapat diimplementasikan selama tidak ada niat politik yang genuine dari semua pihak untuk membuka proses distribusi manfaat kepada pengawasan publik.

4.3.1.4 Pengetahuan Ekologis Lokal sebagai Aset Pembangunan

Salah satu kontribusi terpenting yang dapat diberikan masyarakat Singkarak kepada proyek energi apapun di kawasan ini adalah pengetahuan ekologis mendalam yang mereka miliki tentang ekosistem danau. Penelitian ini mengargumentasikan bahwa pengetahuan ini bukan hambatan terhadap pembangunan; ia adalah aset yang sangat berharga yang, jika diintegrasikan dengan benar, justru dapat membuat proyek apapun lebih berkelanjutan dan lebih berhasil. Dalam perspektif *Critical Public Relations*, pengakuan atas pengetahuan lokal bukan sekadar tindakan etis, tetapi juga strategi komunikasi yang dapat membangun kepercayaan dan legitimasi yang selama ini gagal diperoleh melalui pendekatan *top-down*.

Sanchez Nieminen dan Laitinen (2025) dalam kajian mereka tentang resistensi terhadap energi terbarukan menemukan bahwa proyek-proyek yang berhasil mendapatkan penerimaan masyarakat adalah proyek-proyek yang menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk memahami dan mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam desain proyek. Pendekatan ini bukan hanya lebih adil secara sosial; ia juga lebih efektif secara teknis karena menghasilkan desain yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal yang spesifik. Temuan ini sejalan dengan perspektif komunikasi pembangunan kritis yang menolak model linear dan *top-down* yang memposisikan negara sebagai subjek pembangunan dan masyarakat sebagai objek penerima (Melkote & Steeves, 2015)

Dalam konteks Singkarak, pengetahuan tentang 11 siklus musim ikan Bilih, tentang pola badai periodik yang terjadi setiap 8-9 tahun, tentang dinamika erosi tepian danau, dan tentang hubungan antara perubahan arus dan siklus hidup ikan, adalah pengetahuan yang secara langsung relevan bagi desain dan penempatan panel surya terapung. Informan MM, yang telah puluhan tahun hidup sebagai nelayan dan pengamat ekologi danau, menjelaskan dengan sangat rinci:

"Penangkapan nelayan la sesuai jo siklus musimnyo. Nan ka sungai pas iko tangkoknyo. Pas nyo ka tengah di tanggok nyo iklim iko. Ado sekitar 11 siklus nan nyo ikuti. Turun temurun tarui tu" (MM, Wawancara, 2026).

(Penangkapan nelayan sudah disesuaikan dengan setiap siklus yang sesuai dengan pengalaman masyarakat. Bila ke sungai ketika siklus ini, ke tengah danau pas siklus ini. Ada sekitar 11 siklus yang dipahami nelayan yang sudah turun temurun.)

Pengetahuan tentang 11 siklus musim ikan Bilih ini bukan sekadar catatan anekdotal, melainkan sistem pengetahuan yang terstruktur dan telah teruji secara empiris selama beberapa generasi. Ini adalah bentuk local ecological knowledge yang setara dengan data ilmiah dalam hal validitas dan relevansi. Namun, dalam wacana pembangunan yang didominasi oleh pengetahuan teknokratis, pengetahuan ini dikesampingkan sebagai subjugated knowledge (Foucault, 1980) pengetahuan yang ditekan oleh wacana dominan karena tidak berbentuk dokumen akademis formal, tetapi tetap hidup dalam praktik sosial masyarakat dan menjadi basis rasional bagi resistensi mereka.

Pengetahuan masyarakat tentang ekosistem danau tidak berhenti pada siklus ikan. Mereka juga memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika fisik danau yang sangat relevan dengan kelayakan teknis PLTS terapung. MM, yang juga seorang pecinta paralayang dan pernah membangun landasan terbang di atas Danau Singkarak, menjelaskan:

“Rasonyo plts indak cocok karno danau Singkarak ko badai. Kalau danau Singkarak kalau tibo badai per 8 tahun tu 3 meter labiah tu. Ko panel terapung goa baa kiro2 dek ombak monde tu du. Ambo pernah buek landing terapung paralayang ko a, pas kanai badai nyo. Hancua nyo. Ko pengalaman ambonyo” (MM, Wawancara, 2026).

(Rasanya PLTS tidak cocok di Danau Singkarak karena badai. Kalau Danau Singkarak biasanya per 8 tahun badai itu bisa mengangkat air 3 meter lebih. Ini panel terapung bagaimana dengan kondisi ombak seperti itu. Saya pernah buat landasan terapung untuk paralayang. Ketika kena badai hancur semuanya dari pengalaman saya)

Pengetahuan tentang badai periodik Danau Singkarak yang terjadi setiap 8-9 tahun ini adalah pengetahuan yang sangat krusial bagi desain teknis PLTS terapung. Jika panel surya terapung tidak dirancang untuk menahan gelombang setinggi 3 meter yang terjadi dalam badai periodik tersebut, maka investasi miliaran rupiah dapat hancur dalam semalam. Sayangnya, pengetahuan ini tidak pernah dipertimbangkan dalam kajian teknis yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana pengetahuan lokal yang seharusnya menjadi masukan berharga bagi perencanaan teknis justru diabaikan karena tidak berasal dari sumber yang dianggap "ilmiah". Pengetahuan masyarakat juga mencakup pemahaman tentang dinamika ekosistem yang lebih luas. MM

menjelaskan bagaimana PLTA telah mengubah ekosistem danau dan memperparah erosi serta penurunan populasi ikan Bilih

"Nyo manampuang aie manjago bulan kemarau tibo. Sabalum kemarau tibo. Jadi elevasi aie ko nyo jago selama mungkin. Musim hujan aie naik. Jadi nyo menjadi erosi nyo mengikis tapian danau ko erosi la namonyo kan kayu2 tumbang dekk nyo. Pasir halus ilang." (MM, Wawancara, 2026).

Dia menampung air untuk jaga-jaga ketika kemarau tiba. Jadi elevasi air ini harus dijaga selama mungkin, ketika musim hujan air nya naik, jadilah erosi yang mengikis tepian danau. Kayu tumbang dan pasir halus bisa hilang (MM, Wawancara 2026.)

Pengetahuan tentang hubungan antara operasi PLTA, erosi tepian danau, dan hilangnya habitat ikan Bilih ini adalah pengetahuan ekologis yang sangat mendalam. Masyarakat memahami bahwa perubahan buatan pada siklus air danau telah menghancurkan ekosistem yang selama ribuan tahun telah terbentuk secara alami. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi kekhawatiran mereka bahwa PLTS akan memperparah kerusakan yang telah terjadi. Informan DT.K, tokoh adat yang juga terlibat dalam diskusi dengan tim sosialisasi, menambahkan bahwa pengabaian pengetahuan lokal bukan hanya masalah teknis tetapi juga masalah penghormatan terhadap masyarakat:

"Cubo nyo libatkan emang urang setempat tu, mungkin indak monde tu" (DT.K, Wawancara, 2026)

Coba libatkan secara serius orang setempat, mungkin bisa diterima jadinya. (DT.K, Wawancara).

Kutipan ini mencerminkan pengalaman masyarakat bahwa pengetahuan mereka tidak dihargai atau dianggap penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dalam perspektif ideologi dalam praktik Public Relations Austin & Pinkleton, 2015). pengabaian ini adalah bentuk dominasi simbolik pengetahuan yang dianggap sah adalah pengetahuan yang diproduksi oleh institusi kekuasaan, sementara pengetahuan alternatif dikesampingkan. Ideologi dominan dalam hal ini, keyakinan bahwa pembangunan harus dipimpin oleh pengetahuan teknokratis berfungsi untuk mempertahankan status quo dan menjaga kepentingan kekuasaan.

Pendekatan yang mengabaikan pengetahuan lokal ini tidak hanya tidak adil secara sosial, tetapi juga berisiko secara teknis. Informan FR, akademisi yang terlibat dalam proses sosialisasi, mengungkapkan bahwa perusahaan sebenarnya memiliki data ilmiah dari IPB yang menyatakan bahwa PLTS justru akan membuat biota danau lebih baik. Namun, masyarakat tidak percaya karena pengalaman mereka sendiri berbicara sebaliknya

“Kajian biologinya itu dari IPB, ada biologinya, justru dengan adanya PLTS itu, bagian bawah danau itu akan ada... dan kemudian itu akan berdampak kepada semakin bagusnya biota danau itu. Tapi kenapa kemudian masyarakat tidak mengerti rusak? Padahal dengan adanya PLTS itu bisa” (FR, Wawancara, 2026)

Kesenjangan antara pengetahuan ilmiah dan pengetahuan lokal ini menunjukkan bahwa konflik bukan hanya tentang kebenaran ilmiah, tetapi tentang kepercayaan dan pengakuan. Masyarakat telah belajar dari pengalaman PLTA bahwa pengetahuan ilmiah yang diproduksi oleh institusi kekuasaan tidak selalu dapat dipercaya. Mereka memiliki bukti empiris penurunan populasi ikan Bilih, erosi tepian danau, dan perubahan ekosistem yang bertentangan dengan klaim-klaim yang disampaikan oleh perusahaan dan pemerintah.

Jika desain PLTS dikembangkan dengan melibatkan pemegang pengetahuan ini sejak awal, hasil akhirnya kemungkinan besar adalah desain yang lebih ramah ekosistem dan yang dapat mendapat dukungan dari masyarakat yang merasakan bahwa kepentingan mereka telah benar-benar dipertimbangkan. Hal ini sejalan dengan konsep komunikasi pembangunan partisipatif (Servaes & Luu, 2022) yang menekankan bahwa komunikasi pembangunan harus menempatkan masyarakat sebagai agen aktif, bukan objek penerima kebijakan.

Integrasi pengetahuan lokal ke dalam perencanaan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah legitimasi komunikasi. Dalam kerangka Critical Public Relations, legitimasi tidak dapat dibangun melalui prosedur birokrasi formal saja; ia harus melalui pengakuan terhadap otoritas epistemik masyarakat. Ketika pemerintah dan perusahaan mengabaikan pengetahuan lokal, mereka tidak hanya kehilangan data berharga untuk

perencanaan teknis, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk membangun kepercayaan dan legitimasi di mata masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan ekologis lokal masyarakat Singkarak adalah aset yang sangat berharga yang sayangnya diabaikan dalam proses perencanaan PLTS. Pengetahuan tentang 11 siklus musim ikan Bilih, pola badai periodik, dinamika erosi, dan dampak PLTA terhadap ekosistem adalah pengetahuan yang secara langsung relevan dengan desain dan kelayakan proyek. Jika pengetahuan ini diintegrasikan ke dalam proses perencanaan sejak awal, hasilnya bukan hanya desain yang lebih adaptif dan ramah ekosistem, tetapi juga fondasi kepercayaan yang diperlukan untuk dialog substantif antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.

4.3.1.5 Monolog ke Dialog Kondisi Minimum Komunikasi yang Bermartabat

Habermas (1984) menyebut kondisi-kondisi minimum untuk komunikasi yang genuinely dialogis sebagai situasi komunikasi ideal semua pihak harus memiliki kesempatan yang setara untuk berbicara, untuk menantang klaim, dan untuk mempengaruhi hasil. Sementara kondisi ideal ini tidak pernah sepenuhnya terwujud dalam praktik, ia dapat berfungsi sebagai standar normatif yang digunakan untuk mengevaluasi praktik komunikasi yang ada dan mengidentifikasi arah perbaikannya.

Data penelitian ini mengidentifikasi beberapa kondisi minimum yang harus dipenuhi agar komunikasi pembangunan di Singkarak dapat bergerak dari monolog yang melelahkan menuju dialog yang produktif. Kondisi pertama adalah penyelesaian agenda yang tertunda *unfinished business* dari PLTA pemerintah dan PLN perlu mengakui secara resmi dan jujur tentang ketidaktuntasan komitmen dari proyek sebelumnya, melakukan audit partisipatif tentang kontribusi CSR yang sudah dikeluarkan dan ke mana perginya, serta merumuskan program pemulihan yang konkret sebagai bagian dari rekonstruksi kepercayaan.

Kondisi kedua adalah pelibatan niniak mamak secara substantif, bukan seremonial, dalam perencanaan. Ini berarti memberikan mereka akses penuh ke seluruh informasi teknis, memberikan waktu yang memadai untuk konsultasi internal dalam struktur adat, dan memberikan mereka hak yang genuine untuk memodifikasi atau menolak aspek-

aspek tertentu dari proyek. Bukan undangan hadir di forum sosialisasi, melainkan posisi sebagai co-planner yang suaranya memiliki bobot nyata dalam keputusan.

Kondisi ketiga adalah integrasi formal *local ecological knowledge* ke dalam AMDAL. Ini memerlukan mekanisme yang belum pernah ada sebelumnya: tim peneliti yang bekerja bersama komunitas nelayan untuk mendokumentasikan dan memvalidasi pengetahuan ekologis mereka, dan prosedur untuk memasukkan temuan ini ke dalam dokumen lingkungan resmi dengan status yang setara dengan data teknis dari laboratorium.

Salah satu pergeseran analitis terpenting yang ditawarkan penelitian ini adalah membaca resistensi masyarakat Batipuh Selatan bukan sebagai penolakan final yang menutup semua kemungkinan, melainkan sebagai komunikasi kritis yang sesungguhnya menawarkan kerangka negosiasi. Ketika masyarakat menolak, mereka tidak sekadar berkata tidak mereka mengartikulasikan dengan sangat jelas apa yang seharusnya berbeda, dalam wawancara yang panjang dan sangat kaya, memberikan peta yang sangat jelas tentang kondisi-kondisi yang jika dipenuhi dapat mengubah situasi:

“Manuruik ambo sesuai jo pengalaman, kalau pemerintah nio buek program plts. Mulai lah panggia niniak mamak pucuk ko sadonyo sampaian la ko perencanaan. Kalau la sepakat niniak mamak tu baru naik ke tingkat serius lai” (MM, Wawancara 2026).

(Menurut saya sesuai dengan pengalaman , kalau pemerintah ingin membuat PLTS. Mulailah dari mengumpulkan niniak mamak pucuk atau petinggi kaum. Sampaikan semuanya dari perencanaan hingga akhir. Kalau niniak mamak sudah sepakat baru ke tingkat yang lebih serius)

Ini bukan penolakan absolut ini adalah proposal prosedural yang sangat konkret. Penuhi kondisi ini, dan dialog dapat berlanjut. Kondisi ini juga secara implisit menetapkan siapa yang harus dilibatkan dan dalam urutan apa. Bagi penelitian komunikasi, ini adalah contoh yang sangat kaya tentang bagaimana resistensi, jika dibaca dengan cermat dan tidak defensif, sesungguhnya mengandung peta jalan menuju dialog. Informan pemerintah daerah pun sesungguhnya telah mencapai kesimpulan yang sama, meskipun setelah konflik terjadi:

"Tetap lewat niniak mamak baliak lu. Apolai ko dek investornyo langsung ko e, kok dapat pemerintah daerah yang dulu yang sosialisasi cari tampek dan lain-lain nyo, kalau iko alah duduak baru dibaok investor kan. Jadi ado pendekatan emosionalnyo ko." (MW, Wawancara 2026).

(Tetap melalui niniak mamak masalah nya ini sudah ada investornya. Dan kalau bisa pemerintah dahulu yang melakukan sosialisasi bukan langsung dari Indonesia Power dan PT. Acwa yang tidak memiliki kedekatan emosional).

Ketika dua aktor dari sisi yang berbeda secara independen mencapai kesimpulan yang sama tentang apa yang seharusnya dilakukan, ini adalah momen yang sangat berharga secara analitis. Ia menunjukkan bahwa ada *ground of agreement* yang sudah ada namun belum pernah dioperasionalkan menjadi tindakan nyata. Tugas utama komunikasi pembangunan ke depan bukan menemukan solusi yang belum ada, melainkan memfasilitasi implementasi dari pemahaman yang sudah ada namun belum pernah dipraktikkan. Hingga munculah pemikiran layaknya informan DT. K

"Ndak do urang makan lamak ndak batambuah do" (DT.K, wawancara 2026)

(tidak ada orang yang sudah merasakan kenikmatan itu tidak akan menambah rasa nikmat itu sendiri)

Begitulah sudut pandang masyarakat dalam negosiasi bahwa Indonesia Power dan acwa juga tidak mau untuk melakukan negosiasi yang menemukan titik tengah dari permasalahan. Data penelitian mengungkap bahwa di dalam pihak pemerintah sendiri terdapat fragmentasi yang sangat signifikan. Percakapan antara dua informan internal PLN memperlihatkan bahwa bahkan institusi yang secara formal paling terkait dengan proyek ini tidak memiliki kesamaan informasi dan persepsi mengenai status proyek:

"Brarti ko program nyo pemerintah, otomatis nyo harus laporan dulu dan harus di sampaikan ke tim pln, brarti lun duduak ko lai ko." (D, wawancara 2026)

"Nul ndk ado dapek info do, lun dapek info lai do... kan itu planning nyo pemerintah tu ma... bukan, gubernur bantuak nyo." (IN, Wawancara 2026)

(Berarti program ini milik pemerintah, otomatis programnya harus dilaporkan dahulu ke (tim PLN berarti belum diputuskan)

Nul tidak dapat infonya, kan itu rencana pemerintah bisa jadi gubernurnya)

Dua orang dari institusi yang sama, sama-sama tidak memiliki informasi yang memadai tentang proyek yang secara publik diklaim sebagai program strategis nasional. Ini bukan sekadar ketidakefisienan birokrasi; ini mengungkap bahwa proyek PLTS Singkarak beroperasi dalam zona ambiguitas kelembagaan yang sangat tinggi: lahir dari mandat pemerintah pusat, dilaksanakan oleh BUMN yang tidak sepenuhnya sadar perannya, melibatkan investor swasta (PT ACWA Power Danau Singkarak) yang masuk dari jalur tersendiri, dan bermuara pada masyarakat yang tidak pernah benar-benar diajak bicara dari awal.

Pemerintah telah menyiapkan seluruh elemen pertunjukan tempat, pejabat, agenda, bahkan koordinasi keamanan namun gagal mengendalikan definisi situasi karena definisi situasi masyarakat sama sekali berbeda, bukan forum informasi, melainkan momentum penegasan penolakan. ketegangan dan konflik komunikasi' ketika mengabaikan konteks sosial lokal (Melkote & Steeves, 2015)

Di sisi lain, pihak masyarakat pun tidak homogen. Di sinilah letak salah satu temuan paling penting sekaligus paling sensitif dari penelitian ini. Data lapangan mengindikasikan adanya aktor-aktor yang memanfaatkan situasi konflik bukan untuk menyelesaikannya, melainkan untuk memperkuat posisi dan pengaruh mereka sendiri. MM mengungkap dinamika ini dengan cara yang sangat hati-hati namun cukup jelas:

"Pak Bukhari ketua KAN baik anak buah Luhut kesini saya sampaikan itu. Kalau dibawa ke Gubernur ka bupati nyo oke jo nyo. Nyo PSN urang ko la takabek dek undang-undang. Jadi urng tu oke jo nyo." (MM, Wawancara 2026).

(Bapak Bukhari sebagai ketua Kerapatan Adat Nagari bersama anak buah nya Luhut saya sampaikan hal yang sama dalam poin penolakan. Bila dibawa ke Gubernur dan Bupati pasti mereka menyetujui saja. Karena kalau membahas PSN mereka sudah menjadi tanggung jawab untuk mengikuti Undang-Undang).

Pernyataan ini mengungkap dimensi yang sangat penting terdapat aktor-aktor yang memiliki akses ke jaringan kekuasaan yang jauh melampaui batas nagari dan bahkan provinsi, yang hadir dalam konteks konflik ini dengan motif yang tidak sepenuhnya transparan. Ketika seorang tokoh datang dan para pejabat dari gubernur hingga bupati 'oke', maka yang beroperasi bukan sekadar dinamika komunikasi antara rakyat dan

negara, melainkan jaringan kepentingan politik dan ekonomi yang melampaui level konflik yang tampak di permukaan.

Kondisi keempat adalah transparansi penuh tentang mekanisme distribusi manfaat. Sebelum proyek apapun dimulai, harus ada kesepakatan yang sangat jelas dan dapat diverifikasi tentang siapa yang mendapat apa, melalui mekanisme apa, dengan pengawasan dari siapa. Ini termasuk komitmen tentang penyerapan tenaga kerja lokal untuk posisi yang bermartabat, bukan hanya posisi pelayanan; tentang kontribusi untuk pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang bersifat langsung dan tidak melewati terlalu banyak perantara; dan tentang mekanisme pengaduan yang efektif jika komitmen tidak dipenuhi.

4.3.2 Praktik *Public Relations* Pemerintah dalam Komunikasi Pembangunan PLTS Terapung

Subbab ini mengkaji secara kritis praktik *Public Relations* pemerintah yang dalam konteks ini diwakili oleh PT PLN Indonesia Power sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memperoleh mandat negara dalam komunikasi pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak. Analisis difokuskan pada bagaimana praktik PR tersebut dijalankan, narasi-narasi apa yang diproduksi, dan bagaimana praktik tersebut memicu resistensi serta konflik dengan masyarakat lokal.

Praktik PR pemerintah dalam pembangunan PLTS terapung tidak dapat dipahami sebagai sekadar aktivitas penyampaian informasi atau sosialisasi teknis. Dalam perspektif Critical Public Relations, PR adalah praktik diskursif yang terikat pada relasi kuasa, ideologi, dan kepentingan politik (Holtzhausen, 2012). Ia bukan sekadar jembatan komunikasi antara organisasi dan publiknya, melainkan mekanisme produksi makna yang menopang legitimasi negara dan kebijakan pembangunan. Wacana yang dibangun melalui PR pemerintah cenderung mempresentasikan pembangunan sebagai keniscayaan rasional, ilmiah, dan demi kepentingan bersama, sekaligus mereduksi atau menyingkirkan pengalaman kelompok yang terdampak secara langsung (Theaker, 2004).

4.3.2.1 Praktik Panggung Pertunjukan yang Melelahkan Semua Pihak

Kerangka dramaturgi Erving Goffman (1959) menjadi salah satu lensa analisis paling produktif untuk membaca dinamika komunikasi dalam konflik PLTS terapung di Danau Singkarak. Goffman memandang kehidupan sosial sebagai sebuah pertunjukan teater di mana setiap aktor baik individu maupun organisasi berupaya menampilkan citra tertentu kepada khalayak untuk memperoleh penerimaan sosial. Dalam perspektif ini, komunikasi tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi sarana pengelolaan kesan (*impression management*) yang memungkinkan aktor mempertahankan legitimasi dan kredibilitas di hadapan publik.

Secara konseptual, dramaturgi menawarkan pemahaman bahwa setiap tindakan komunikasi adalah pertunjukan yang dirancang untuk menciptakan definisi situasi tertentu. Keberhasilan suatu pertunjukan sosial tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aktor dalam menyampaikan pesan, tetapi juga oleh kemampuannya mengendalikan definisi situasi *definition of the situation* yaitu menciptakan interpretasi tertentu mengenai dirinya sehingga audiens menerima realitas sebagaimana yang ingin ditampilkan. Dalam proses tersebut, komunikasi tidak lagi dipahami sebagai aktivitas menyampaikan fakta secara objektif, tetapi sebagai mekanisme produksi makna yang memungkinkan seseorang memengaruhi cara orang lain memahami suatu peristiwa (Goffman, 1956).

Namun, apa yang ditemukan di lapangan melampaui apa yang dibayangkan Goffman: bukan satu pertunjukan dengan aktor yang koheren, melainkan panggung yang kacau di mana banyak aktor memainkan naskah yang berbeda-beda di hadapan penonton yang sama. Panggung ini menjadi ajang pertarungan narasi, di mana setiap aktor berusaha mendefinisikan situasi sesuai dengan kepentingannya masing-masing, sementara masyarakat lokal yang menjadi penonton utama justru kehilangan kejelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang harus mereka percayai. Dalam *praktik Public Relations*, ini adalah kegagalan fundamental dalam *strategic communication coordination* ketidakmampuan untuk mengintegrasikan pesan-pesan yang disampaikan kepada publik sehingga menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan.

Pertunjukan komunikasi PLTS Singkarak menjadi melelahkan bagi semua pihak karena tidak ada aktor yang benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pemerintah dan perusahaan gagal memperoleh legitimasi dan penerimaan masyarakat.

Politisi tidak dapat mengklaim kemenangan karena konflik tetap berlanjut. Masyarakat tidak mendapatkan kepastian dan kejelasan tentang masa depan mereka. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan ketidakpercayaan yang semakin mendalam. ASN batipuh Selatan, CM, yang posisinya berada tepat di persimpangan antara sistem negara dan masyarakat, mendeskripsikan suasana forum sosialisasi yang berakhir dengan kegagalan total dengan sangat gamblang:

“Itu lebih parah lagi, perjanjian dengan bupati di dalam Indo Jolito, tidak ada poster naik, ternyata hari H sebaliknya, bahwa masyarakat menolak. Hampir acara di batalkan. Waktu itu lah bapak laporan ke Bupati bahwa keadaan suasana aman cuman ya posternya naik” (CM, Wawancara, 2026).

Forum yang "hampir acara di batalkan" ini adalah kegagalan pertunjukan yang paling dramatik. Segala persiapan telah dilakukan tempat, pejabat, agenda, bahkan koordinasi keamanan namun ketika hari pelaksanaan tiba, definisi situasi masyarakat ternyata sama sekali berbeda dari apa yang dibayangkan pemerintah. Masyarakat tidak datang untuk mendengarkan penjelasan tentang proyek, melainkan untuk menegaskan penolakan mereka. Pertunjukan yang telah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah dan perusahaan gagal total karena audiens masyarakat lokal menolak untuk memainkan peran yang diharapkan.

Istilah *Public Relations* mengenal ini dengan sebutan *audience analysis* yaitu pemahaman yang keliru tentang karakteristik, nilai, dan ekspektasi publik. Sasaran Pemerintah dan perusahaan gagal membaca panggung mereka mengira masyarakat adalah audiens yang pasif yang akan menerima informasi, padahal masyarakat adalah aktor yang memiliki agensi dan niat untuk menolak. Mereka gagal memahami bahwa masyarakat Singkarak bukanlah *blank slate* yang dapat diisi dengan narasi pembangunan, melainkan komunitas yang memiliki pengalaman historis, pengetahuan lokal, dan kepentingan yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Pada saat yang sama, di dalam masyarakat pun terdapat pertunjukan resistensi yang tidak sepenuhnya tunggal. Informan MM menceritakan bagaimana foto camat dengan pihak proyek yang kemudian beredar di media sosial dengan klaim bahwa camat telah menyetujui proyek:

“Ado foto pak Camat jo urang tu padonyo maluncua jo nyo. Tu posting dikecekan nyo setuju. Tu ka kantua wali. La foto la setuju lo” (MM, Wawancara, 2026).

(Sebuah foto Camat muncul bersama para tim sosialisasi, dalam unggahan tersebut dikatakan bapak Camat telah menyetujui, di kantor Wali juga begitu yang padahal aslinya mereka tidak ada kata setuju di pembicaraan itu.)

Foto yang diambil dalam konteks protokoler namun dikomunikasikan sebagai "persetujuan" adalah contoh bagaimana arena media sosial menghasilkan dramaturgi tersendiri yang memperkuat polarisasi tanpa memberikan informasi yang memadai. Dalam kerangka impression management, ini adalah *multi audience impression management* pengelolaan kesan yang ditujukan kepada berbagai audiens secara simultan, di mana setiap audiens menerima pesan yang berbeda berdasarkan interpretasi mereka terhadap simbol yang sama (Leary dkk., 1986). Foto yang ambigu dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk membangun narasi yang mendukung posisi masing-masing, menciptakan realitas paralel yang semakin memperumit komunikasi.

Pertunjukan komunikasi ini menjadi melelahkan karena substansi apa yang seharusnya menjadi inti dari komunikasi pembangunan telah digantikan oleh pertunjukan itu sendiri. Informan FR, akademisi yang terlibat dalam proses sosialisasi, mengamati kebingungan yang diciptakan oleh pertunjukan ini:

“Ada sebenarnya salah tafsir antara masyarakat dengan perusahaan itu sebenarnya. Dalam bentuk sosialisasi. Padahal, sosialisasi ini kan baru sekedar wacana kalau ada keinginan pemerintah untuk membuat PLTS. Masyarakat merasa bahwa ini sesuatu yang sudah deal. Padahal sebenarnya kan sosialisasi kan belum. Dokumen-dokumen Amdal itu belum” (FR, Wawancara, 2026).

Kesalahan tafsir yang disebut FR ini adalah produk dari pola komunikasi birokrasi yang telah terstruktur sedemikian rupa sehingga sosialisasi dimaknai sebagai pemberitahuan *notification* dan bukan konsultasi *consultation*. Masyarakat merasa bahwa keputusan sudah diambil dan mereka hanya diundang untuk menerima informasi, bukan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka Public Relations, ini

adalah kegagalan *two-way symmetrical communication* model komunikasi yang ideal di mana organisasi dan publik saling mendengarkan, bernegosiasi, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Larissa A. Grunig dkk., 2002). Praktik sosialisasi PLTS Singkarak lebih mencerminkan model *one-way asymmetrical communication* komunikasi satu arah yang bertujuan untuk membujuk publik menerima pesan organisasi tanpa memberikan ruang bagi publik untuk mempengaruhi organisasi. Informan HY, masyarakat lokal yang memiliki sudut pandang moderat, mengungkapkan kelelahan yang dirasakan masyarakat:

"Sebenarnya yang menjadi masalah itu tuntutan masyarakat sudah tidak bisa disosialisasikan lagi karena permintaan masyarakat tidak bisa dipenuhi dan dijawab secara riset oleh Indonesia Power." (HY, Wawancara, 2026)

Kutipan ini mengungkap bahwa masyarakat telah mencapai titik di mana mereka merasa bahwa komunikasi tidak lagi memiliki substansi. Tuntutan mereka tidak dijawab secara substantif, dan mereka melihat bahwa pertunjukan komunikasi hanya berfungsi untuk menciptakan ilusi dialog tanpa menghasilkan perubahan nyata. Pertunjukan komunikasi ini juga dapat dibaca melalui lensa hegemoni Gramsci (1971). Hegemoni bekerja melalui kombinasi kekuasaan dan persetujuan, di mana nilai-nilai dominan dipresentasikan sebagai nilai bersama sehingga diterima secara sukarela oleh kelompok subordinat. Dalam konteks PLTS Singkarak, pertunjukan komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah dan perusahaan berfungsi sebagai mekanisme hegemoni untuk memperoleh persetujuan publik terhadap kebijakan negara.

Narasi "Proyek Strategis Nasional" (PSN) dan "kepentingan nasional" yang ditampilkan di front stage adalah bentuk hegemoni yang halus melalui narasi ini, pemerintah dan perusahaan berupaya membuat masyarakat menerima proyek sebagai keniscayaan yang tidak perlu diperdebatkan. Informan CM menjelaskan bagaimana narasi PSN ini memengaruhi perilaku aparat pemerintah:

"Dulu emang apak larang dulu, dari pado mencari heboh wak beko, kan nyo PSN (proyek strategis nasional) kalau posisi camat saya ikut pimpinan, dan saya pasti mendukung. Tapi kan yang merasakan itu masyarakat karena mereka yang tinggal lama." (CM, Wawancara, 2026).

(Dahulu memang saya melarang penolakan dari pada memancing keributan karena ini PSN juga, kalau posisi Camat saya ikut pimpinan dan saya harus mendukung. Tapi yang lebih merasakan itu masyarakat yang karena mereka penghuni lama nya.)

Narasi PSN berfungsi sebagai mekanisme hegemoni yang menutup ruang dialog karena proyek adalah "kepentingan nasional", aparaturnya merasa wajib mendukungnya, dan masyarakat diharapkan menerimanya tanpa protes. Namun, yang menarik dari pernyataan CM adalah pengakuan bahwa "yang merasakan itu masyarakat karena mereka yang tinggal lama." Ini menunjukkan adanya kesadaran kritis di tingkat aparaturnya bahwa hegemoni negara tidak sepenuhnya berhasil. Aparaturnya berada dalam posisi dilematis secara struktural harus mendukung, namun secara personal memahami keberatan masyarakat.

Istilah ini disebut konflik loyalitas antara kepentingan organisasi (negara) dan kepentingan publik (masyarakat) sebuah dilema etis yang sering dihadapi oleh praktisi PR pemerintahan (L'Etang, 2005). Praktisi PR pemerintahan sering kali berada di posisi yang sulit mereka harus menjalankan mandat organisasi untuk membangun citra positif dan memperoleh legitimasi, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab etis untuk mendengarkan dan menghormati kepentingan publik.

Pertunjukan komunikasi ini menjadi melelahkan bagi semua pihak karena tidak ada aktor yang benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pemerintah dan perusahaan gagal memperoleh legitimasi dan penerimaan masyarakat. Politisi tidak dapat mengklaim kemenangan karena konflik tetap berlanjut. Masyarakat tidak mendapatkan kepastian dan kejelasan tentang masa depan mereka. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan ketidakpercayaan yang semakin mendalam.

Kondisi seperti ini, komunikasi kehilangan fungsi substantifnya dan berubah menjadi sekadar pertunjukan yang melelahkan sebuah siklus yang terus berulang tanpa pernah mencapai resolusi yang memuaskan siapa pun. Dari perspektif *Critical Public Relations*, ini adalah konsekuensi dari praktik PR yang berorientasi pada kepentingan organisasi semata, tanpa memperhatikan kepentingan dan pengalaman publik yang terdampak (Holtzhausen, 2012). PR yang demikian tidak hanya gagal secara komunikatif, tetapi juga

gagal secara etis karena memperlakukan manusia sebagai objek manipulasi, bukan sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar dan dihormati.

"Ndak do urang makan lamak ndak batambuah do." (DT.K, Wawancara, 2026).

(Tidak ada orang yang makan nya enak tidak nambah)

Peribahasa ini "tidak ada orang yang sudah merasakan kenikmatan tidak akan menambah rasa nikmat itu sendiri" mengungkap sikap masyarakat yang telah mencapai titik di mana mereka tidak lagi percaya bahwa ada manfaat yang akan mereka peroleh dari pertunjukan komunikasi ini. Mereka telah merasakan pahitnya pengalaman PLTA, dan mereka tidak percaya bahwa proyek baru akan membawa kebaikan bagi mereka. Kelelahan ini adalah bentuk resistensi yang paling mendalam: ketika masyarakat tidak lagi percaya pada pertunjukan, tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh para aktor untuk membujuk mereka.

Tabel 4. 2 Dampak pertunjukan terhadap setiap aktor

Aktor	Harapan dari Pertunjukan	Realitas yang dialami	Dampak Realitas
Pemerintah Pusat	Memberoleh legitimasi dan dukungan publik	Mendapat Resistensi dan penolakan	Tinggi
PT PLN Indonesia Power	Membangun citra korporasi	Gagal Membangun kepercayaan	Tinggi
Tokoh Politik	Membangun modal politik dan menunjukan pengaruh	Konflik berlanjut	Sedang
Aparat Keamanan	Menjaga ketertiban	Masyarakat tetap menolak	Rendah

Masyarakat Lokal	Mendapat Kepastian	Tidak ada kepastian, tuntutan tak dijawab	Sangat Tinggi
------------------	--------------------	---	---------------

(Sumber: analisis penulis berdasarkan data lapangan)

Praktik panggung pertunjukan PLTS Singkarak adalah contoh nyata dari kegagalan Public Relations dalam membangun komunikasi yang konstruktif dan berkelanjutan. Pertunjukan ini menjadi melelahkan bagi semua pihak karena Tidak ada koordinasi komunikasi strategis setiap aktor menjalankan pertunjukannya sendiri, menciptakan kebingungan dan kontradiksi. Substansi komunikasi telah digantikan oleh pertunjukan sosialisasi menjadi prosedur formal tanpa makna, dan dialog digantikan oleh monolog. Hegemoni dan ideologi mendominasi narasi PSN dan kepentingan nasional digunakan untuk menutup ruang dialog dan membenarkan pengabaian kepentingan lokal. Masyarakat diperlakukan sebagai objek, bukan mitra dialog mereka diundang untuk mendengarkan, bukan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

4.3.2.2 Front Stage yang Penuh Aktor Berbenturan

Goffman (1959) membayangkan *front stage* sebagai ruang di mana seorang aktor menampilkan pertunjukan yang koheren kepada audiens yang terdefinisi dengan jelas. Dalam ruang ini, aktor berupaya mengelola kesan *impression management* melalui pengaturan bahasa, ekspresi, simbol, atribut, serta perilaku yang dianggap sesuai dengan ekspektasi lingkungan sosial. Keberhasilan suatu pertunjukan sosial tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aktor dalam menyampaikan pesan, tetapi juga oleh kemampuannya mengendalikan definisi situasi *definition of the situation* yaitu menciptakan interpretasi tertentu mengenai dirinya sehingga audiens menerima realitas sebagaimana yang ingin ditampilkan. Dalam praktik Public Relations, front stage adalah ruang di mana organisasi menampilkan citra ideal yang ingin dilihat publik, sementara back stage adalah ruang di mana strategi komunikasi dirancang dan kontradiksi dikelola (Goffman, 1956).

Namun, apa yang terjadi dalam sosialisasi PLTS terapung di Danau Singkarak adalah sesuatu yang jauh lebih kacau: front stage tidak diisi oleh satu aktor dengan satu

pertunjukan yang koheren, melainkan oleh banyak aktor yang masing-masing menampilkan pertunjukan yang berbeda, tidak selalu selaras satu sama lain, dan beberapa di antaranya sesungguhnya berkompetisi untuk merebut perhatian dan otoritas interpretasi atas situasi yang sama. Ini adalah fenomena *multiple actors with multiple narratives* yang dalam teori PR disebut sebagai kegagalan *strategic communication coordination* ketidakmampuan organisasi untuk mengintegrasikan pesan-pesan yang disampaikan kepada publik sehingga menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan.

Di satu sisi, ada pertunjukan pemerintah pusat yang membawa narasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kepentingan nasional. Narasi ini dibangun di atas logika bahwa proyek PLTS adalah keniscayaan pembangunan yang tidak dapat ditawar karena telah ditetapkan sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional. Narasi ini disampaikan melalui berbagai saluran: siaran pers, pernyataan pejabat, dan forum-forum resmi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa teknokratis yang menekankan rasionalitas, modernisasi, dan kepentingan bersama. Istilah-istilah seperti "energi hijau", "transisi energi", *net zero emission*, dan "keberlanjutan" menjadi signifier yang mengklaim makna tunggal dan tidak perlu diperdebatkan. Dalam kerangka *impression management*, ini adalah *impression construction* proses penyusunan representasi yang akan ditampilkan kepada audiens dengan memilih informasi yang dianggap menguntungkan dan menyusun narasi tertentu (Leary dkk., 1986). Informan MW, menjelaskan bagaimana narasi PSN ini memengaruhi perilaku aparat pemerintah di tingkat bawah:

“kok dapek kan jan dari investor bacarito dulu kan, dari pemerintah awak dlu nan manyampaikan ide gagasan soalnya kan urang awak ko monde tu, kok di agia investor langsung lo tu babeda pangadanyo” (MW, Wawancara, 2026).

(Kalau bisa jangan investornya dulu yang menyampaikan pesan, dari pemerintah kita dahulu memulai ide dan gagasan. Orang Minangkabau ketika pesan yang disampaikan orang lain juga akan lebih luas dan dalam kajian nya.)

Pernyataan ini mengungkap mekanisme hegemoni yang bekerja melalui apa yang oleh Gramsci (1971) disebut sebagai intelektual organik aparat negara yang secara struktural mendukung kebijakan pemerintah meskipun secara personal memahami keberatan masyarakat. Narasi PSN berfungsi sebagai mekanisme hegemoni yang

menutup ruang dialog: karena proyek adalah "kepentingan nasional", aparaturnegara merasa wajib mendukungnya, dan masyarakat diharapkan menerimanya tanpa protes. Namun, yang menarik dari pernyataan MW adalah pengakuan bahwa komunikasi yang diterapkan salah. Ini menunjukkan adanya kesadaran kritis di tingkat aparaturnegara bahwa hegemoni negara tidak sepenuhnya berhasil. Aparaturnegara berada dalam posisi dilematis secara struktural harus mendukung, namun secara personal memahami keberatan masyarakat. Dalam istilah Public Relations, ini adalah konflik loyalitas antara kepentingan organisasi (negara) dan kepentingan publik (masyarakat) sebuah dilema etis yang sering dihadapi oleh praktisi PR pemerintahan (Grunig dkk., 2002)

Di sisi lain, ada pertunjukan investor PT PLN Indonesia Power dan PT ACWA Power yang membawa narasi bisnis dan kemitraan. Narasi ini menekankan aspek teknis proyek, nilai investasi yang besar (Rp855 miliar), kapasitas terpasang (50 MW atau 76 MWp), dan kontribusi terhadap target energi nasional. Dalam narasi ini, PLTS dipresentasikan sebagai proyek yang akan membawa manfaat ekonomi dan lingkungan, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Pertunjukan ini adalah bentuk *corporate impression management* upaya organisasi untuk membangun citra sebagai entitas yang profesional, kredibel, dan bertanggung jawab sosial (Cornelissen, 2020).

Informan AD, perwakilan PT PLN Indonesia Power yang terlibat langsung dalam proses sosialisasi, menjelaskan bagaimana perusahaan membangun narasi menjaga citra baik perusahaan. Mengikuti regulasi pada umumnya adalah salah satu tanggung jawab utama yang harus dijalankan perusahaan sebagai bukti kongret kalau perusahaan seperti yang disampaikan AD berikut ini:

"Kami sudah usahakan yang terbaik, dimulai dari berizin menyampaikan surat dari pemerintah pusat, kepada gubernur, bupati tanah datar pemerintah daerah, pemerintah kecamatan hingga kantor nagari dan ketika itu diundang seluruh masyarakat. Kita sosialisasi setelah itu termasuk nelayan petani, niniak mamak, pemuda dan masyarakat lainnya kita undang semua." (AD, Wawancara, 2026)

Pernyataan ini mencerminkan upaya perusahaan untuk membangun citra sebagai mitra pembangunan yang profesional, kredibel, dan transparan. Perusahaan mengklaim telah melakukan sosialisasi yang komprehensif, melibatkan berbagai lapisan masyarakat

dari tingkat tertinggi gubernur, bupati hingga tingkat akar rumput nelayan, petani, niniak mamak, pemuda. Namun, klaim ini perlu dibaca secara kritis. Sebagaimana akan dijelaskan dalam analisis back stage, sosialisasi yang diklaim sebagai "komprehensif" ini ternyata tidak sejalan dengan persepsi masyarakat yang merasa tidak dilibatkan secara bermakna. Dalam kerangka impression management, ini adalah *impression construction* perusahaan memilih informasi yang dianggap menguntungkan (bahwa mereka telah melakukan sosialisasi) dan menyusun narasi tertentu (bahwa sosialisasi telah dilakukan secara komprehensif) untuk membentuk persepsi publik yang positif (Leary dkk., 1986)

Namun, strategi impression construction ini menemui hambatan serius ketika masyarakat memiliki pengalaman yang berbeda. Sebagaimana diungkapkan oleh informan DT.B, masyarakat merasa bahwa sosialisasi tidak dilakukan dengan cara yang sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau

“Tidak ada. Undangan dari PT Acwa hanya disampaikan kepada wali nagari, bukan kepada niniak mamak. Padahal masyarakat Salingka Danau memiliki banyak tradisi” (DT.B, Wawancara 2026).

Kesenjangan antara narasi perusahaan dan persepsi masyarakat ini menciptakan kesenjangan antara klaim dan realitas yang dirasakan publik. Dalam teori Public Relations, *credibility gap* adalah salah satu penyebab utama krisis kepercayaan publik terhadap organisasi (Grunig dkk., 2002) Ketika organisasi mengklaim telah melakukan sosialisasi, tetapi masyarakat merasa tidak dilibatkan, maka kepercayaan publik terhadap organisasi menurun drastis. Ini adalah konsekuensi dari praktik PR yang berorientasi pada impression management tanpa didasari oleh komunikasi yang genuine dan dialogis.

Di sisi ketiga, ada pertunjukan tokoh politik yang membawa narasi keberpihakan kepada rakyat namun sekaligus kepada agenda karir politiknya. Kehadiran anggota DPR RI Andre Rosiade dalam forum sosialisasi, misalnya, menciptakan ambiguitas yang membingungkan masyarakat. Di satu sisi, ia hadir sebagai perwakilan rakyat yang mendengarkan aspirasi masyarakat. Di sisi lain, kehadirannya juga berfungsi untuk melegitimasi proyek dan menunjukkan dukungan politik terhadap agenda pembangunan nasional. Informan DT.B dari internal PLN memberikan sinyal yang sangat penting tentang ketidaklaziman keterlibatan tokoh politik dalam proyek sejenis:

“Andre Rosiade baru datang setelah penolakan masyarakat sudah terjadi. Kemungkinan beliau baru mengetahui persoalan ini setelah muncul penolakan” (DT.B, Wawancara 2026)

Keterlibatan aktor politik yang tidak lazim dalam proyek serupa mengindikasikan bahwa ada dimensi kepentingan yang melampaui sekadar kebutuhan sosialisasi teknis. Arena konflik ini tampaknya cukup menarik bagi berbagai aktor politik untuk menjadikannya panggung bagi pertunjukan keberpihakan kepada rakyat, yang sesungguhnya adalah pertunjukan elektoral. HY mengkonfirmasi kalkulasi politik ini dengan sangat lugas dan menimbulkan sebuah kesenjangan bagi peneliti mendapatkan data.

“Nah itu dia kalau mau cepat ya lewat media menurut saya rahman buat aja konten kalau mau diskusi terbuka tentang ini itu bisa lebih cepat. Kejara terus pakai konten itu cara mudah negosiasi” (HY, Wawancara 2026).

Kalimat yang disampaikan dalam konteks menjelaskan kalkulasi politik seorang tokoh yang hadir dalam sosialisasi ini mengungkap bahwa posisi terhadap konflik ini adalah pertimbangan karir politik yang sangat konkret. Mendukung atau menolak proyek ini memiliki implikasi bagi trajektori politik seseorang, baik di tingkat lokal maupun nasional. Masyarakat, dalam dinamika ini, berfungsi sebagai audiens dari pertunjukan politik, bukan sebagai subjek utama yang kepentingannya benar-benar diutamakan. Dalam kerangka *Critical Public Relations*, ini adalah contoh *political public relations*. Praktik yang tidak hanya berfungsi untuk membangun citra organisasi, tetapi juga untuk memenuhi kepentingan politik tertentu (Stromback & Kioussis, 2011).

Di sisi keempat, ada pertunjukan aparat keamanan yang hanya dengan kehadirannya sudah mengirimkan pesan yang sangat kuat tentang batas-batas "dialog" yang diperkenankan. Informan CM menceritakan kehadiran aparat kepolisian dalam forum sosialisasi

"Intel jo polisi je sabalik sabalik. Fatalnyo. Nyo salah manyabuik Batipuah Selatan. Aturan nyo Pauh ta sabuik paus. Disuruah turun dek masyarakat nyo. Warga tu sekita 500 urang ado tu." (CM, Wawancara, 2026).

(Intel dan polisi banyak yang datang, fatalnya lagi ketika pihak Indonesia Power salah menyebut nama daerah yang aturanya pauh menjadi paus,

akhirnya disuruh turun podium oleh masyarakat. Warga yang hadir sekitar 500 orang (CM Wawancara 2026).

Kehadiran aparat keamanan dalam forum sosialisasi bukanlah hal yang netral. Ia mengirimkan pesan simbolik yang sangat kuat: bahwa ada potensi konflik yang memerlukan pengamanan, dan bahwa "dialog" yang dijalankan memiliki batas-batas yang tidak boleh dilampaui. Pesan simbolik ini hadir tanpa harus diucapkan secara eksplisit cukup dengan kehadiran fisik aparat yang berseragam, pesan tentang kekuasaan dan kendali sudah tersampaikan. Dalam perspektif Public Relations, ini adalah bentuk nonverbal communication yang sangat efektif dalam mengelola kesan dan mendefinisikan situasi. Kehadiran aparat keamanan mendefinisikan forum sebagai situasi yang memerlukan pengamanan, yang secara implisit menyiratkan bahwa masyarakat adalah pihak yang "berpotensi mengancam" ketertiban (Cornelissen, 2020).

Di sisi kelima, ada pertunjukan masyarakat lokal yang menampilkan resistensi kolektif melalui spanduk penolakan, pernyataan sikap, dan mobilisasi massa. Informan AD menceritakan bagaimana spanduk-spanduk penolakan muncul pagi-pagi sebelum forum sosialisasi dimulai

"Waktu kita melakukan sosialisasi akbar itu sebanduk-sebanduk pagi-pagi udah dipasang sama masyarakat. Nah ini yang di Batu Taba, mereka masang sebanduk Penolakan PLTS, ini di tahun 2024 juga." (AD, Wawancara, 2026).

Spanduk-spanduk penolakan yang dipasang sebelum forum sosialisasi dimulai adalah pertunjukan resistensi yang sangat terencana dan terorganisasi. Masyarakat tidak datang ke forum untuk mendengarkan, tetapi untuk menegaskan posisi mereka. Mereka menampilkan pertunjukan mereka sendiri di hadapan pemerintah dan perusahaan sebuah pertunjukan yang mendefinisikan situasi secara berbeda dari apa yang diharapkan pemerintah. Dalam kerangka impression management, ini adalah *counte performance* masyarakat menjalankan pertunjukan alternatif yang menantang definisi situasi yang ingin dibangun oleh pemerintah dan perusahaan (Goffman, 1956). Pertunjukan resistensi ini adalah bentuk *counter-publics* ruang publik alternatif yang menantang narasi dominan dan membangun wacana tandingan (Holtz, 2002). Pertunjukan resistensi masyarakat ini

juga terstruktur dan sistematis. Informan MM menjelaskan bagaimana masyarakat mengorganisasi diri:

"Kalau itu kami bersurat, dari DPRD, gubernur, ke bupati pernyataan penolakan secara resmi tu kami munculkan. Penolakan tu ado yang di tanda tangan rumah ke rumah kan ado yang tokoh masyarakat ado pulo. Yang wali nagari bergabung ado juo, niniak mamak menyatakan sikap menolak secara resmi ado juo." (MM, Wawancara, 2026).

(Kalau perizinan kami bersurat dari DPRD, gubernur ke bupati pernyataan penolakan secara resmi itu kami munculkan. Penolakan itu ada yang di tanda tangani rumah ke rumah ada tokoh masyarakat, wali nagari yang bergabung turut membersamai niniak mamak yang menyatakan sikap)

Resistensi masyarakat bukanlah reaksi spontan, melainkan tindakan komunikatif yang terstruktur dan strategis. Masyarakat menggunakan berbagai saluran komunikasi: surat resmi ke pemerintah, pengumpulan tanda tangan rumah ke rumah, pernyataan sikap dari niniak mamak, dan mobilisasi melalui spanduk dan media sosial. Dalam perspektif *Critical Public Relations*, ini adalah bentuk *counter publics* yang menunjukkan bahwa masyarakat bukanlah audiens yang pasif, melainkan aktor yang memiliki agensi dan kemampuan untuk mendefinisikan situasi sesuai dengan kepentingan mereka (Holtzhausen, 2012).

Kehadiran *multiple actors with multiple narratives* ini bukanlah kebetulan ia adalah cerminan dari ambiguitas kelembagaan yang mendasar dalam praktik PR pembangunan. Tidak ada satu pun aktor yang memiliki otoritas tunggal untuk mendefinisikan situasi, sehingga setiap aktor menjalankan pertunjukannya sendiri-sendiri. Akibatnya, publik dalam hal ini masyarakat lokal menerima pesan yang membingungkan dan kontradiktif. Dalam teori Public Relations, ini adalah kegagalan *strategic communication coordination* ketidakmampuan organisasi untuk mengintegrasikan pesan-pesan yang disampaikan kepada publik sehingga menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan.

Informan FR, akademisi yang terlibat dalam proses sosialisasi, mengamati kebingungan ini

"Ada sebenarnya salah tafsir antara masyarakat dengan perusahaan itu sebenarnya. Dalam bentuk sosialisasi. Padahal, sosialisasi ini kan baru sekedar wacana kalau ada keinginan pemerintah untuk membuat PLTS."

Masyarakat merasa bahwa ini sesuatu yang sudah deal. Padahal sebenarnya kan sosialisasi kan belum. Dokumen-dokumen Amdal itu belum." (FR, Wawancara, 2026)

Kesalahan tafsir yang disebut FR ini adalah produk dari pola komunikasi birokrasi yang telah terstruktur sedemikian rupa sehingga sosialisasi dimaknai sebagai pemberitahuan dan bukan konsultasi. Dalam kerangka tangga partisipasi Arnstein (1969), pola ini terletak pada rung paling bawah, yaitu tokenisme dan bahkan manipulasi, bukan pada partisipasi substantif. Masyarakat merasa bahwa keputusan sudah diambil dan mereka hanya diundang untuk menerima informasi, bukan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam teori Public Relations, ini adalah kegagalan *two-way symmetrical communication model* komunikasi yang ideal di mana organisasi dan publik saling mendengarkan, bernegosiasi, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Grunig dkk., 2002).

Bentrokan narasi di front stage ini memiliki konsekuensi serius bagi upaya membangun komunikasi yang konstruktif. Pertama, ia menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat. Mereka menerima pesan yang saling bertentangan dari berbagai aktor: dari pemerintah pusat mereka mendengar tentang PSN, dari perusahaan mereka mendengar tentang investasi dan teknologi, dari politisi mereka mendengar tentang keberpihakan, dan dari aparat keamanan mereka membaca pesan tentang batas-batas dialog. Dalam kebingungan ini, masyarakat cenderung menarik diri dari proses komunikasi atau memperkuat resistensi mereka. Kedua, bentrokan narasi ini memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap semua aktor yang terlibat. Setiap aktor menunjukkan bahwa mereka memiliki kepentingan sendiri, dan tidak ada yang benar-benar mendengarkan dan memahami kepentingan masyarakat.

Informan HY, masyarakat lokal yang memiliki sudut pandang moderat, mengungkapkan:

"Sabananyo nan masalah tu tuntutan masyarakat sudah tidak bisa disosialisasikan lagi karena permintaan masyarakat tidak bisa dipenuhi dan dijawab secara riset oleh Indonesia Power." (HY, Wawancara, 2026).

(Sebenarnya masalah tuntutan masyarakat sudah tidak bisa disosialisasikan lagi karena permintaan masyarakat dan tanggungan jawab yang sudah di riset oleh Indoneisa Power)

Ketika tuntutan masyarakat tidak bisa dijawab secara substantif, dan ketika berbagai aktor hanya menampilkan pertunjukan kepentingan mereka sendiri, maka kepercayaan masyarakat terhadap seluruh proses komunikasi pembangunan runtuh. Ini adalah krisis kepercayaan yang diperparah oleh ketiadaan saluran komunikasi resmi yang kredibel masyarakat tidak lagi mempercayai pernyataan resmi pemerintah dan perusahaan karena pengalaman mereka menunjukkan bahwa apa yang ditampilkan di front stage tidak mencerminkan realitas di *back stage*. Dalam teori *Public Relations*, ini adalah krisis relationship management yaitu kegagalan organisasi dalam membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan dengan publiknya (Grunig dkk., 2002)

Goffman (1959) membayangkan *front stage* sebagai ruang di mana satu aktor menampilkan pertunjukan yang koheren kepada audiens yang terdefinisi. Namun yang terjadi dalam sosialisasi PLTS terapung di Danau Singkarak adalah sesuatu yang jauh lebih kacau front stage diisi oleh banyak aktor yang masing-masing membawa naskah berbeda, yang sering kali bertentangan satu sama lain.

Di satu sisi, ada pertunjukan pemerintah pusat yang membawa narasi PSN dan kepentingan nasional. Di sisi lain, ada pertunjukan investor yang membawa narasi bisnis dan kemitraan. Di sisi ketiga, ada pertunjukan tokoh politik yang membawa narasi keberpihakan kepada rakyat namun sekaligus kepada agenda karir politiknya. Camat Batipuh Selatan, CM, mendeskripsikan kegagalan total forum sosialisasi dengan sangat gamblang:

"Itu lebih parah lagi, perjanjian dengan bupati di dalam Indo Jolito, tidak ada poster naik, ternyata hari H sabalik kiranya, bahwa masyarakat menolak. Hampai tidak jadi acara. Waktu itu lah bapak laporan ke bupati bahwa keadaan suasana aman cuman ya posternya naik." (CM, Wawancara 2026)

Forum yang "sampai tidak jadi acara" ini adalah kegagalan pertunjukan yang paling dramatik. Namun yang lebih menarik secara analitis adalah laporan camat kepada bupati

bahwa "keadaan suasana aman cuman ya posternya naik." Ini adalah komunikasi yang sangat terstruktur antara dua lapis birokrasi di mana informasi negatif dikurangi dan diperhalus sebelum dikirimkan ke atas. Dalam kerangka komunikasi kritis, ini adalah mekanisme penyaringan informasi *information filtering* yang menciptakan ilusi konsensus di tingkat atas sementara konflik terus membara di bawah. Keterlibatan figur politik nasional dalam sosialisasi proyek menambahkan lapisan dramaturgi yang lebih kompleks. Informan D dari internal PLN memberikan sinyal yang sangat penting:

Keterlibatan tokoh politik yang tidak lazim dalam proyek serupa mengindikasikan bahwa ada dimensi kepentingan yang melampaui sekadar kebutuhan sosialisasi teknis. Arena konflik ini tampaknya cukup menarik bagi berbagai aktor politik untuk menjadikannya panggung bagi pertunjukan keberpihakan kepada rakyat, yang sesungguhnya adalah pertunjukan elektoral. CM mengkonfirmasi kalkulasi ini dengan sangat lugas:

"Kalau nyo balawan lo tu ruginyo beko nyo ka daftar ka DPR lo baliak kan." (CM, Wawancara 2026)

(Kalau ikut melawan masyarakat rugilah beliau karena nanti bisa lagi daftar DPR)

Kalimat yang disampaikan dalam konteks menjelaskan kalkulasi politik seorang tokoh dalam sosialisasi ini mengungkap bahwa posisi terhadap konflik adalah pertimbangan karir politik yang sangat konkret. Mendukung atau menolak proyek ini memiliki implikasi bagi trajektori politik seseorang. Masyarakat, dalam dinamika ini, berfungsi sebagai audiens dari pertunjukan politik, bukan sebagai subjek utama yang kepentingannya benar-benar diutamakan.

Media sosial menambahkan dimensi dramaturgi yang bahkan lebih tidak terkendali. Foto camat dengan pihak proyek yang kemudian beredar dengan klaim bahwa camat telah menyetujui proyek adalah contoh bagaimana ekosistem informasi digital menghasilkan dramaturgi tersendiri. MM menceritakan

Foto yang diambil dalam konteks protokoler namun dikomunikasikan sebagai persetujuan adalah contoh bagaimana *impression management* yang ambigu

dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk membangun narasi yang mendukung posisi masing-masing. Tanda dipisahkan dari referennya, dan makna pun mengalami floating tak terkendali.

4.3.2.3 Back Stage yang Dipenuhi Kontradiksi Internal

Jika front stage adalah ruang pertunjukan yang kacau dengan berbagai aktor berbenturan, maka back stage dari konflik PLTS Singkarak menyimpan kontradiksi yang bahkan lebih mendasar. Goffman (1959) mendefinisikan back stage sebagai ruang di balik layar di mana berbagai proses persiapan, negosiasi, evaluasi, dan kontradiksi berlangsung tanpa diketahui oleh publik. Pemisahan kedua ruang ini menunjukkan bahwa setiap representasi yang tampil di ruang publik sesungguhnya merupakan hasil dari proses seleksi, pengaturan, dan penyuntingan informasi. Apa yang diterima oleh masyarakat merupakan realitas yang telah melalui proses konstruksi, sehingga tidak pernah sepenuhnya identik dengan kondisi yang berlangsung di balik layar organisasi (Cornelissen, 2020)

Data penelitian mengungkap beberapa dimensi back stage yang belum pernah masuk dalam narasi publik, namun sangat penting untuk dipahami jika resolusi konflik yang genuine ingin dicapai. Kontradiksi-kontradiksi di back stage ini pada dasarnya adalah kegagalan-kegagalan fundamental dalam praktik Public Relations *kegagalan internal communication*, *kegagalan accountability*, *kegagalan two-way symmetrical communication*, *kegagalan stakeholder engagement*, *kegagalan transparency*, dan *kegagalan cultural sensitivity*.

Kontradiksi pertama adalah antara klaim bahwa PLTS Singkarak adalah program nasional yang matang dengan realitas ketidakjelasan mandatnya bahkan di dalam institusi pelaksana. Penelitian ini menemukan bahwa proyek PLTS Singkarak beroperasi dalam zona ambiguitas kelembagaan yang sangat tinggi: lahir dari mandat pemerintah pusat, dilaksanakan oleh BUMN yang tidak sepenuhnya sadar perannya, melibatkan investor swasta yang masuk dari jalur tersendiri, dan bermuara pada masyarakat yang tidak pernah benar-benar diajak bicara dari awal.

Informan D dan IN, dari internal PLN, mengungkapkan fragmentasi informasi yang sangat signifikan:

Dua orang dari institusi yang sama, sama-sama tidak memiliki informasi yang memadai tentang proyek yang secara publik diklaim sebagai program strategis nasional. Satu informan mengatakan bahwa ini adalah program pemerintah, sementara yang lain mengatakan bahwa ini adalah inisiatif gubernur. Bahkan, salah satu dari mereka tidak mengetahui status terkini proyek sama sekali. Ini bukan sekadar ketidakefisienan birokrasi; ini mengungkap bahwa proyek PLTS Singkarak beroperasi dalam zona ambiguitas kelembagaan yang sangat tinggi. Dalam perspektif Public Relations, ini adalah kegagalan komunikasi internal dalam organisasi yang tidak berjalan dengan efektif, sehingga pesan tidak tersampaikan dengan jelas kepada seluruh anggota organisasi (Cieri & Magalhaes, 2007). Ketika komunikasi internal gagal, maka komunikasi eksternal juga akan terganggu karena organisasi tidak memiliki pesan yang terintegrasi dan konsisten untuk disampaikan kepada publik. Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, ketika ditanya langsung, memberikan respons yang sangat mengungkap.

"Ini lagi kita bahas, itu juga ranahnya pemerintah daerah." (BY, Wawancara, 2026)

Respons singkat ini, yang diberikan oleh otoritas tertinggi di provinsi tempat danau tersebut berada, secara tidak langsung mengungkap sebuah realitas back stage yang sangat signifikan: tidak ada kejelasan tentang siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab dan berwenang atas proyek ini. Pemerintah pusat merasa ini bukan urusannya karena sudah dimandatkan ke bawah. Gubernur merasa ini ranah pemerintah daerah. Pemerintah daerah merasa tidak bisa memutuskan karena itu menyangkut masyarakat. PLN merasa ini program pemerintah, bukan inisiatif mereka. Sementara investor swasta yang sudah mendirikan badan hukum khusus (PT Indo ACWA Tenaga Singkarak) terus mendorong dari sisi bisnis. Dalam teori Public Relations, ini adalah kegagalan accountability ketidakjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab kepada publik atas keputusan dan tindakan yang diambil (L'Etang, 2009). Akuntabilitas adalah salah satu pilar utama praktik PR yang etis dan bertanggung jawab. Tanpa akuntabilitas, hubungan antara organisasi dan publik menjadi tidak seimbang dan tidak adil. Kontradiksi kedua

adalah antara klaim bahwa sosialisasi telah dilakukan secara partisipatif dengan realitas bahwa sosialisasi hanya dilakukan sekali dan dihadiri oleh staf yang tidak memiliki kewenangan. Informan MW, perwakilan pemerintah daerah, mengakui "Sekali sosialisasi yang menghadiri staf lo nyo." (MW, Wawancara, 2026)

Sosialisasi sekali dengan perwakilan yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat komitmen adalah bentuk paling minimal dari komunikasi pembangunan yang dapat secara formal diklaim telah dilakukan. Ini adalah back stage di mana prosedur diisi dengan konten yang paling sedikit menghasilkan komitmen nyata, namun cukup untuk mengklaim kepatuhan prosedural. Informan FR, akademisi yang terlibat dalam proses sosialisasi, memberikan analisis yang lebih mendalam tentang kesalahan ini:

"Ada sebenarnya salah tafsir antara masyarakat dengan perusahaan itu sebenarnya. Dalam bentuk sosialisasi. Padahal, sosialisasi ini kan baru sekedar wacana kalau ada keinginan pemerintah untuk membuat PLTS. Masyarakat merasa bahwa ini sesuatu yang sudah deal. Padahal sebenarnya kan sosialisasi kan belum. Dokumen-dokumen Amdal itu belum." (FR, Wawancara, 2026)

Kesalahan tafsir yang disebut FR ini adalah produk dari pola komunikasi birokrasi yang telah terstruktur sedemikian rupa sehingga sosialisasi dimaknai sebagai pemberitahuan dan bukan konsultasi. Masyarakat merasa bahwa keputusan sudah diambil dan mereka hanya diundang untuk menerima informasi, bukan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka Public Relations, ini adalah kegagalan two-way symmetrical communication model komunikasi yang ideal di mana organisasi dan publik saling mendengarkan, bernegosiasi, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Larissa A. Grunig dkk., 2002) Praktik sosialisasi PLTS Singkarak lebih mencerminkan model one-way asymmetrical communication komunikasi satu arah yang bertujuan untuk membujuk publik menerima pesan organisasi tanpa memberikan ruang bagi publik untuk mempengaruhi organisasi.

Kontradiksi ketiga adalah antara klaim bahwa proyek ini adalah untuk kepentingan masyarakat dengan realitas bahwa mekanisme distribusi manfaatnya tidak pernah dirancang secara transparan dan partisipatif. Informan MW mengungkapkan pendekatan "terima dulu, urusan belakangan" yang digunakan pemerintah daerah:

"Bahwasanya ini PSN terima lah proyek strategis nasional ini dulu beko masalah PLTA dan perhatian yang kurang. Kita masukan beko. Jadi tarimo dulu, umpamo apak jo anakkan tarimo dulu baru beko di minta baliak terkait aspek2 tu, beko kito perjuangkan." (MW, Wawancara, 2026)

Logika "terima dulu, masukkan masalah lama belakangan" ini secara tidak sengaja mengungkap sebuah asumsi yang sangat bermasalah: bahwa masalah yang belum diselesaikan dapat ditangguhkan tanpa batas sementara proyek baru didorong ke depan. Ini bukan sekadar ketidaksensitifan komunikasi; ini adalah penolakan implisit atas kepentingan masyarakat yang menjadikan penyelesaian agenda lama sebagai kondisi sine qua non bagi penerimaan agenda baru. Informan FR juga mengungkapkan bahwa perusahaan sebenarnya telah melakukan negosiasi di balik layar tanpa melibatkan masyarakat secara memadai:

"Saya kritik ke pihak ACWA di pertama kali ketemu. Ketika mereka sudah menghitung atau bertemu dengan pemilik lahan untuk persoalan ganti rugi. Padahal, ini kan sesuatu yang belum jelas dulu. Sama seperti kenapa kemudian mereka mencari investor, kemudian mengambil lahan di Danau Singkarak tanpa pengetahuan masyarakat di sana. Harusnya kan polanya dari bawah." (FR, Wawancara, 2026)

Kritik FR ini mengungkap bahwa perusahaan telah melakukan perhitungan dan negosiasi awal dengan pemilik lahan tanpa melibatkan masyarakat secara luas. Ini adalah praktik yang sangat bermasalah karena menciptakan kesan bahwa keputusan sudah diambil di tingkat atas dan masyarakat hanya diundang untuk menerima informasi. Dalam perspektif Public Relations, ini adalah kegagalan stakeholder engagement—pelibatan pemangku kepentingan yang tidak dilakukan sejak awal, sehingga menciptakan resistensi dan konflik di kemudian hari. Kontradiksi Keempat Paradoks CSR PLTA sebagai Warisan yang Tak Kunjung Usai

Kontradiksi keempat yang sangat signifikan adalah paradoks CSR PLTA yang menjadi warisan ketidakpercayaan yang tak kunjung usai. Masyarakat sering menyebutkan minimnya kontribusi PLTA sebagai bukti kegagalan proyek tersebut. Namun, analisis yang lebih dalam mengungkap bahwa persoalan ini lebih kompleks dari sekadar perusahaan yang tidak menunaikan kewajiban sosialnya., sebagaimana dijelaskan oleh Informan FR menjelaskan:

"Kalau yang saya tahu itu ketika saya ngobrol dengan orang-orang dari PLTA, dana CSR-nya turun, tetapi kemudian diselamatkan oleh masyarakat. Nah, ini yang kemudian membuat konflik antara masyarakat dengan PLTA itu semakin merungcing." (FR, Wawancara, 2026)

Informasi ini menunjukkan bahwa masalah CSR PLTA bukan semata-mata karena perusahaan tidak menyalurkan dana, tetapi karena ada masalah dalam pengelolaan dan penyaluran dana CSR di tingkat lokal. Dana yang seharusnya untuk masyarakat diduga tidak sampai ke tangan yang berhak karena dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Pola seperti ini bukan hal baru dalam studi konflik sumber daya alam di Indonesia: sering terjadi bahwa elite lokal yang memiliki akses ke perusahaan dan pemerintah berhasil memosisikan diri sebagai "jembatan" yang mengontrol aliran manfaat, sementara nelayan, petani, dan masyarakat kecil yang langsung menanggung dampak justru tidak menerima kompensasi yang memadai.

Paradoks ini memiliki konsekuensi komunikatif yang sangat serius. Ketika masyarakat mengatakan bahwa "PLTA tidak memberikan kontribusi", pernyataan ini bisa jadi secara harfiah benar dari perspektif mereka, sementara dari perspektif perusahaan mereka telah mengeluarkan dana CSR yang signifikan. Kedua pernyataan ini tidak harus bertentangan; mereka bisa keduanya benar secara bersamaan jika dana tersebut tidak sampai kepada penerima yang paling tepat. Dalam perspektif Public Relations, ini adalah kegagalan transparency dan stakeholder communication ketidakmampuan organisasi untuk mengomunikasikan secara transparan bagaimana dana CSR disalurkan dan kepada siapa, sehingga menciptakan persepsi negatif di kalangan masyarakat (Rawlins, 2008). Konflik persepsi tentang CSR ini adalah konflik komunikasi yang sesungguhnya memiliki solusi teknis sistem pelaporan dan verifikasi yang transparan dan partisipatif. Namun solusi teknis ini tidak dapat diimplementasikan selama tidak ada niat politik yang genuine dari semua pihak untuk membuka proses distribusi manfaat kepada pengawasan publik. Ketidakesesuaian Pola Komunikasi dengan Struktur Sosial Minangkabau. Kontradiksi kelima adalah ketidakesesuaian pola komunikasi pemerintah dan perusahaan dengan struktur sosial-budaya Minangkabau. Informan MM menjelaskan akar kegagalan komunikasi ini:

"Cara mensosialisasi kan program nasional ko tadi, yang seharusnya barang ko bagus jadi salah. Baa kok mode tu karano daerah Minang ko babeda jo daerah lain, menuruik kami koo sabananyo dalam perencanaan niniak mamak harus di libatkan dalam proses perencanaan tadi, baru niniak mamak jalehan ka kamanakan nyo." (MM, Wawancara, 2026).

Penjelasan ini sangat penting secara analitis karena mengidentifikasi akar kegagalan komunikasi: ketidakpahaman pemerintah terhadap struktur sosial Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau, niniak mamak (pemangku adat) memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan kolektif. Mereka bertindak sebagai jembatan antara nilai-nilai adat dan perubahan sosial. Ketika pemerintah mengabaikan niniak mamak dan langsung berkomunikasi dengan masyarakat umum, proses ini dianggap tidak sesuai dengan adat dan kehilangan legitimasi. Informan DT.K menambahkan:

"Soalnya apo iko masalah di Sumatra Barat yang selalu bamasalah jo masalah daerah wilayah, sedangkan memang dari awal program pemerintah ko indak pernah melibatkan niniak mamak. Di Minangkabau ko indak bisa wak pungkiri kalau kamanakan akan patuah ka mamak." (DT.K, Wawancara, 2026).

(Sebenarnya ini adalah masalah kenapa permasalahan penolakan wilayah di Sumatera Barat selalu bermasalah, sedangkan dari awal, perencanaan program pemerintah tidak pernah melibatkan niniak mamak. Di Minangkabau tidak bisa dipungkiri kemenakan harus mengikuti mamak)

Kutipan ini mengungkap struktur otoritas dalam masyarakat Minangkabau di mana kemenakan (generasi muda) akan mematuhi mamak (paman dari pihak ibu). Pemerintah yang mengabaikan struktur ini akan mengalami hambatan komunikasi karena pesan yang disampaikan tidak melalui saluran yang dianggap sah oleh masyarakat. Informan FR, akademisi yang mengkaji komunikasi pembangunan, memberikan analisis yang lebih mendalam:

"Di masyarakat itu, ada beberapa orang yang memang dia itu ditempatkan sebagai tempat bertanya, tempat orang yang ditinggikan selangkah. Nah pola komunikasi yang paling bagus memang seperti itu. Kita menempatkan setiap orang itu sesuai dengan konteksnya." (FR, Wawancara, 2026)

Analisis ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dalam masyarakat Minangkabau harus menghormati hierarki adat dan menempatkan setiap orang sesuai

dengan konteksnya. Pola komunikasi yang mengabaikan struktur adat akan ditolak oleh masyarakat karena dianggap tidak menghargai budaya lokal. Dalam kerangka Public Relations, ini adalah kegagalan cultural sensitivity ketidakmampuan organisasi untuk memahami dan menghormati nilai-nilai budaya lokal dalam praktik komunikasi mereka. Komunikasi pembangunan yang efektif harus memperhatikan konteks sosial-budaya lokal dan menyesuaikan strategi komunikasi dengan struktur dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

3.4.2.4 Analisis Hubungan Front Stage dan Back Stage Implikasi bagi Praktik Public Relations



Perbedaan antara *front stage* dan *back stage* ini menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan tidak mencerminkan realitas secara utuh, melainkan merupakan hasil konstruksi yang disusun untuk membentuk persepsi tertentu di hadapan publik. *Front stage* adalah ruang di mana narasi resmi tentang partisipasi publik, transparansi, dan manfaat pembangunan ditampilkan. *Back stage* adalah ruang di mana realitas yang kontradiktif sosialisasi prosedural, ambiguitas kelembagaan, pengabaian struktur adat, dan paradoks CSR terjadi. Semakin besar perbedaan antara *front stage* dan *back stage*, semakin besar pula krisis kepercayaan yang terjadi (Cornelissen, 2020).

Implikasi pertama Praktik PR yang berorientasi pada *impression management* tanpa didasari oleh komunikasi yang genuine dan transparan akan selalu menghasilkan krisis kepercayaan. Masyarakat memiliki kemampuan untuk membaca kontradiksi antara *front stage* dan *back stage*, dan ketika mereka menyadari kontradiksi tersebut, kepercayaan mereka terhadap organisasi runtuh. Dalam kasus PLTS Singkarak, masyarakat menyadari bahwa narasi "partisipasi publik" yang ditampilkan di *front stage* tidak mencerminkan realitas sosialisasi prosedural di *back stage*, sehingga mereka kehilangan kepercayaan pada seluruh proses komunikasi.

Implikasi kedua Komunikasi internal yang efektif adalah prasyarat bagi komunikasi eksternal yang efektif. Jika organisasi tidak memiliki kejelasan internal tentang mandat, tanggung jawab, dan pesan yang ingin disampaikan, maka komunikasi eksternal akan menjadi kacau dan kontradiktif. PLTS Singkarak menunjukkan bagaimana ambiguitas kelembagaan menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat dan memperkuat

resistensi. *Internal communication* yang efektif adalah fondasi dari *external communication* yang kredibel (Cieri & Magalhaes, 2007)

Implikasi ketiga Kepekaan budaya (*cultural sensitivity*) adalah elemen yang tidak dapat diabaikan dalam praktik PR pembangunan. Di Sumatera Barat, komunikasi harus melalui saluran adat yang sah niniak mamak dan menghormati hierarki sosial serta nilai-nilai budaya yang berlaku. Pendekatan yang mengabaikan saluran adat akan dianggap tidak menghormati masyarakat dan akan memicu resistensi. *Cultural sensitivity* dalam PR berarti memahami dan menghormati nilai-nilai budaya lokal serta menyesuaikan strategi komunikasi dengan konteks sosial-budaya yang berlaku (sriramesh & vercic, 2009)

Implikasi keempat: Transparansi dalam distribusi manfaat dan pengelolaan CSR adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Jika masyarakat tidak memiliki akses ke informasi tentang bagaimana dana CSR disalurkan dan kepada siapa, maka mereka akan terus mencurigai bahwa ada kepentingan di balik layar yang tidak menguntungkan mereka. *Transparency* adalah salah satu pilar utama praktik PR yang etis dan bertanggung jawab (Rawlins, 2008)

4.3.3 Dekonstruksi Wacana Pembangunan untuk Mengungkapkan Relasi Kuasa Berdasarkan Pengalaman Masyarakat Lokal yang Disingkirkan

4.4.3.1 Oposisi Biner yang Dipelihara oleh Banyak Pihak

Derrida (1978) menunjukkan bahwa oposisi biner dipelihara karena ia menguntungkan posisi yang dominan. Dalam konflik Singkarak, yang menarik adalah bahwa oposisi-oposisi biner yang ada dipelihara bukan hanya oleh pihak pemerintah, melainkan juga oleh berbagai pihak lain yang masing-masing berkepentingan untuk mempertahankan pembacaan yang terpolarisasi.

Tabel 4. 3 Temuan Oposisi Biner

Pembangunan	Vs	Penolakan
-------------	----	-----------

Kepentingan Nasional	Vs	Kepentingan Lokal
----------------------	----	-------------------

(Sumber: Olahan Penulis)

Oposisi paling dominan adalah pembangunan versus penolakan. Dari sisi pemerintah dan perusahaan, oposisi ini digunakan untuk menempatkan penolak sebagai kelompok yang anti kemajuan. Namun yang kurang diperhatikan adalah bahwa oposisi yang sama juga digunakan oleh sebagian aktor resistensi untuk mempertahankan posisi penolakan yang absolut sebagai modal identitas dan pengaruh. Selama oposisi ini dipertahankan sebagai mutually exclusive, tidak ada ruang untuk diskusi tentang kondisi-kondisi apa yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat mendukung proyek, atau aspek-aspek apa dari proyek yang perlu dimodifikasi.

Data menunjukkan bahwa masyarakat sesungguhnya tidak memiliki penolakan yang bersifat ideologis terhadap energi terbarukan. MM menegaskan ini dengan sangat jelas:

"Sabananyo kami masyarakat setuju jo karna inyo energi terbarukan yang ramah lingkungan. Memanfaatkan panel surya. Tapi ya dampaknya yo itu tadi."
(MM, Wawancara 2026).

(Sebenarnya kami masyarakat setuju dengan adanya energi terbarukan yang ramah lingkungan, memanfaatkan panel surya tapi ya tampaknya seperti itu)

Ini adalah celah yang sangat penting namun belum pernah dieksploitasi secara konstruktif: ada basis kesepakatan prinsipil yang dapat menjadi fondasi negosiasi, namun basis ini tidak pernah dibangun menjadi platform dialog karena kedua sisi terlanjur terkunci dalam oposisi biner yang kaku. Dekonstruksi atas oposisi ini tidak berarti membuang keberatan masyarakat; ia berarti membedakan antara penolakan terhadap proyek seperti yang direncanakan saat ini dan penolakan terhadap prinsip energi terbarukan itu sendiri. Perbedaan ini adalah jembatan yang belum pernah benar-benar dibangun.

Oposisi kedua yang perlu didekonstruksi adalah antara kepentingan nasional dan kepentingan lokal. Narasi pemerintah menempatkan PSN sebagai representasi kepentingan nasional yang harus didahulukan. Namun pembacaan ini mengabaikan fakta bahwa ekosistem Danau Singkarak adalah bagian dari warisan ekologis nasional yang

sama, bahwa keberlanjutan ikan Bilih adalah bagian dari kedaulatan pangan nasional yang sama, dan bahwa kesejahteraan komunitas nelayan Singkarak adalah bagian dari kesejahteraan nasional yang sama.

MM mengungkap logika adat yang sesungguhnya merupakan versi lokal dari prinsip keberlanjutan:

"Tanah wilayah ko a. Lum ado negara lai la ado Minang ko ma." (MM, Wawancara 2026).

(Tanah wilayah ini ada sebelum indonesia itu ada di Minangkabau)

Pernyataan 'sebelum ada negara, Minangkabau sudah ada' bukan klaim separatisme ini adalah pengingat bahwa sistem tata kelola yang telah terbukti menjaga ekosistem selama berabad-abad memiliki legitimasi epistemologis yang tidak seharusnya diabaikan oleh narasi kepentingan nasional yang baru terbentuk. Dekonstruksi atas oposisi nasional versus lokal membuka kemungkinan untuk memahami sistem adat Minangkabau bukan sebagai hambatan bagi kepentingan nasional, melainkan sebagai mitra tata kelola yang memiliki rekam jejak panjang dalam menjaga keberlanjutan ekologis kawasan.

4.3.3.2 Logosentrisme Kemajuan dan Paradoks Energi Hijau

(Derrida, 1981) mengkritik logosentrisme sebagai kecenderungan untuk menganggap bahwa makna memiliki pusat yang pasti dan objektif. Dalam wacana pembangunan PLTS Singkarak, logosentrisme tampil melalui penggunaan istilah-istilah seperti 'kemajuan', 'energi hijau', dan 'masa depan' sebagai signifier yang mengklaim makna tunggal dan tidak perlu diperdebatkan. Siapa yang dapat menolak kemajuan? Siapa yang dapat menolak masa depan?

Namun data lapangan memperlihatkan paradoks yang sangat serius dalam klaim 'energi hijau' ini. Pengetahuan ekologis lokal yang dikumpulkan masyarakat selama generasi menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di dalam ekosistem danau, tanpa pemahaman mendalam tentang dinamika ekosistem tersebut, justru dapat menghasilkan kerusakan yang jauh dari 'hijau'. MM mendeskripsikan mekanisme kerusakan ekosistem akibat operasi PLTA yang relevan untuk mengevaluasi dampak PLTS:

"Kami la teliti a anak Bilih ndk bisa iduik kalau kanai paneh salamo 10 menit matiiii ee. Nan baru manateh tua. Labiah dari 15 menit. Jdi nyo butuh kayu ntuak bataduah. Kayu tu la ndk do lai la tumbang. Anak ikan Bilih ndk bisa iduik di tangah danau dho." (MM, Wawancara 2026).

(kami sudah teliti anak ikan Bilih tidak bisa hidup kalau kena panas selama 10 menit, untuk yang baru menetas. Lebih dari 15 menit mereka butuh tumbuhan untuk berteduh. Kayu itu sudah tumbang sekarang sedangkan anak ikan Bilih tidak bisa hidup di Tengah danau.)

Pengetahuan tentang sensitivitas termal anak ikan Bilih ini bukan pengetahuan yang dapat diabaikan begitu saja ketika merencanakan pemasangan ribuan panel surya terapung yang akan mengubah distribusi cahaya dan suhu permukaan danau. Paradoks energi hijau menjadi sangat nyata: proyek yang diklaim ramah lingkungan berpotensi menghasilkan dampak ekologis yang sangat signifikan terhadap spesies endemik yang menjadi basis ekonomi masyarakat lokal.

Paradoks ini tidak hanya relevan secara ekologis; ia sangat relevan secara komunikatif. Ketika klaim 'hijau' tidak dapat diverifikasi secara independen karena AMDAL belum selesai, ketika pengetahuan ekologis lokal yang dapat melengkapi AMDAL tidak diintegrasikan ke dalam proses, dan ketika masyarakat yang paling tahu tentang ekosistem ini tidak dilibatkan dalam konsultasi yang genuine, maka label 'energi hijau' berfungsi lebih sebagai alat legitimasi simbolik daripada sebagai komitmen nyata terhadap keberlanjutan lingkungan.

Dekonstruksi atas klaim 'energi hijau' ini bukan dimaksudkan untuk menolak energi terbarukan sebagai agenda global yang penting. Sebaliknya, ia dimaksudkan untuk menegaskan bahwa klaim 'hijau' yang genuine mensyaratkan proses yang juga 'hijau': melibatkan masyarakat yang memiliki pengetahuan ekologis mendalam, mengintegrasikan *local ecological knowledge* ke dalam penilaian dampak lingkungan, dan memastikan bahwa keberlanjutan ekosistem lokal benar-benar dijamin sebelum proyek dimulai.

4.4.3.4 Wacana yang Disenyapkan Suara yang Perlu Didengar untuk Resolusi

(Foucault & Gordon, 1980) menunjukkan bahwa setiap rezim kebenaran tidak hanya memproduksi wacana yang dominan; ia juga secara aktif menyingkirkan wacana-wacana yang dianggap mengancam stabilitasnya. Dalam konflik Singkarak, identifikasi wacana

yang disenyapkan bukan sekadar kritik terhadap kekuasaan, melainkan panduan praktis tentang suara-suara mana yang perlu didengar jika resolusi yang berkelanjutan ingin dicapai.

Wacana yang paling kritis untuk didengar adalah pengetahuan ekologis komunitas nelayan yang selama ini tidak pernah mendapat status resmi dalam proses perencanaan. MM mengidentifikasi sekitar 11 siklus musim ikan Bilih yang diikuti nelayan secara turun-temurun, sebuah sistem pengetahuan yang sangat relevan bagi penilaian dampak lingkungan:

"Penangkapan nelayan la sesuai jo siklus musimnyo. Nan ka sungai pas iko tangkoknyo. Pas nyo ka tengah di tangkok nyo. Ado sekitar 11 siklus nan nya ikuti. Turun temurun tarui tu." (MM, Wawancara 2026).

(Penangkapan nelayan sesuai dengan siklus musimnya. Ada yang kesungai tangkapnya dan tengah itu ada siklusnya. Ada sekitar 11 siklus yang di ikuti secara turun temurun.)

Sistem pengetahuan yang terstruktur tentang 11 siklus ini adalah data ekologis yang sangat berharga yang seharusnya menjadi bagian integral dari AMDAL, bukan informasi yang diabaikan karena tidak berbentuk dokumen akademis formal. Jika proses perencanaan didesain ulang untuk mengintegrasikan pengetahuan ini dari awal, hasil AMDAL akan jauh lebih akurat dan kemungkinan besar akan menghasilkan desain proyek yang lebih sensitif terhadap ekosistem.

Wacana kedua yang perlu didengar adalah narasi tentang ketidaktuntasan PLTA yang menjadi akar dari seluruh konflik ini. Selama persoalan-persoalan PLTA yang belum diselesaikan, dari minimnya kontribusi ekonomi, dari pengelolaan CSR yang tidak transparan, hingga dari dampak ekologis yang belum dikompensasi secara memadai, tidak ditangani secara resmi dan jujur oleh pemerintah, tidak ada proyek baru yang dapat datang ke kawasan ini dengan harapan mendapat penerimaan yang baik.

Wacana ketiga adalah narasi tentang potensi: bagaimana masyarakat Singkarak sesungguhnya membayangkan masa depan yang mereka inginkan untuk danau ini. Data penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki visi yang sangat konkret tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan yang memanfaatkan danau mereka. MM mengidentifikasi beberapa program yang sesungguhnya sangat realistis jika ada niat yang

genuine, program beasiswa pendidikan, pembinaan UMKM nelayan, pengelolaan sampah yang menampung tenaga kerja lokal, dan rekrutmen tenaga kerja dari anak nagari untuk posisi yang bermartabat, bukan hanya satpam.

Ini adalah visi pembangunan yang sangat konstruktif. Jika pemerintah dan perusahaan dapat masuk ke Singkarak dengan terlebih dahulu merespons visi ini secara konkret, sebelum membicarakan PLTS apapun, maka fondasi kepercayaan yang diperlukan untuk dialog substantif tentang proyek baru dapat mulai dibangun.

4.4 Sintesis Menuju Komunikasi Pembangunan yang Refleksif

Keseluruhan analisis yang telah dilakukan dalam bab ini mengarah pada sebuah argumen sentral yang menjadi kontribusi utama penelitian ini konflik pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak bukan hanya konflik antara negara dan masyarakat, melainkan konflik yang diperparah oleh kepentingan berlapis di mana hampir setiap aktor, dari pemerintah pusat hingga elite lokal, dari investor hingga politisi yang mengatasnamakan rakyat, membawa kepentingannya sendiri ke dalam arena yang sesungguhnya membutuhkan dialog yang jujur dan tidak berpretensi.

Narasi yang selama ini dominan, baik narasi pemerintah tentang kepentingan nasional maupun narasi resistensi tentang keberpihakan kepada rakyat, keduanya mengandung kebenaran parsial namun juga menutup kebenaran yang lain. Yang dibutuhkan bukan narasi yang semakin keras, melainkan narasi yang semakin jujur tentang kompleksitas kepentingan yang ada dan tentang kondisi-kondisi konkret yang harus dipenuhi agar semua pihak dapat bertindak dengan integritas.

Proposisi teoritis utama yang dihasilkan penelitian ini adalah bahwa dalam konflik pembangunan yang melibatkan komunitas dengan sistem adat yang kuat dan warisan ketidakadilan yang belum terselesaikan, komunikasi yang efektif tidak dapat dimulai dari sosialisasi proyek. Ia harus dimulai dari rekonstruksi kepercayaan yang dibangun melalui pengakuan jujur atas kesalahan masa lalu, penyelesaian agenda yang tertunda, dan pelibatan otoritas yang diakui masyarakat *gateway* adat sebagai mitra perencanaan, bukan sebagai audiens sosialisasi.

Ini adalah agenda yang jauh lebih panjang dan lebih mahal dari sekadar menyelenggarakan sosialisasi yang lebih baik. Namun inilah satu-satunya jalan yang dapat menghasilkan pembangunan yang benar-benar berkelanjutan bukan hanya berkelanjutan secara ekologis dalam jangka panjang, melainkan berkelanjutan secara sosial karena dibangun di atas dasar kepercayaan dan penghormatan yang genuine antara semua pihak yang terlibat.

Fenomena ini dapat dibaca melalui lensa dekonstruksi Jacques Derrida (1976, 1978) yang telah diuraikan dalam Bab II. Sebagaimana dijelaskan Derrida dalam *Of Grammatology* (1976), makna tidak pernah bersifat tunggal atau final karena selalu terbentuk melalui relasi perbedaan (*différance*) dengan makna-makna lain yang secara bersamaan hadir maupun disembunyikan. Dalam konteks ini, narasi "masyarakat bersatu menolak PLTS" yang tampak solid di permukaan ternyata menyembunyikan fragmentasi internal konflik antara Padang Laweh Malalo dan Sumpur yang justru memperumit dinamika konflik.

Seperti yang dijelaskan Barker dan Galasinki (2001), dekonstruksi berfungsi untuk mengungkap oposisi-oposisi biner seperti pembangunan/penolakan, rasional/emosional, atau nasional/lokal yang sering digunakan dalam wacana resmi untuk mendisiplinkan makna. Oposisi "masyarakat vs negara" yang dibangun dalam wacana resmi ternyata menyembunyikan realitas yang jauh lebih kompleks: ada konflik horizontal antar nagari yang menjadi akar persoalan. Dekonstruksi menunjukkan bahwa oposisi semacam itu adalah konstruksi wacana yang mencerminkan kepentingan dominan, bukan fakta netral.

Derrida (1978) dalam *Writing and Difference* menekankan bahwa dekonstruksi berupaya menunjukkan bahwa posisi yang diistimewakan justru bergantung secara struktural pada yang dimarginalkan, sehingga klaim stabilitas wacana pembangunan menjadi rapuh dan tidak final. Narasi "masyarakat menolak" digunakan untuk menyederhanakan konflik, padahal realitasnya jauh lebih kompleks: ada konflik horizontal antar nagari yang justru menjadi akar persoalan.

Temuan ini juga dapat dibaca melalui konsep kuasa pengetahuan (Foucault & Gordon, 1980) Foucault menunjukkan bahwa wacana tidak hanya merepresentasikan realitas tetapi juga memproduksi apa yang dianggap sebagai kebenaran. Pengetahuan

masyarakat tentang konflik perbatasan yang sengaja tidak diungkapkan adalah bentuk *subjugated knowledge* pengetahuan yang ditekan oleh wacana dominan (dalam hal ini, narasi resistensi kolektif) tetapi tetap hidup dalam praktik sosial masyarakat.

(Foucault & Gordon, 1980) menegaskan bahwa setiap rezim kebenaran tidak hanya memproduksi wacana yang dominan; ia juga secara aktif menyingkirkan wacana-wacana yang dianggap mengancam stabilitasnya. Pengetahuan tentang konflik perbatasan antara Sumpur dan Padang Laweh Malalo adalah pengetahuan yang "disingkirkan" karena jika diungkap, ia akan mengganggu narasi bahwa penolakan PLTS adalah sikap kolektif yang murni dan otentik. Masyarakat memilih untuk "menutupi" konflik perbatasan karena membuka informasi tersebut berarti mengakui adanya fragmentasi internal yang dapat melemahkan posisi tawar mereka terhadap perusahaan.

pengetahuan tentang dampak PLTA adalah *subjugated knowledge* pengetahuan yang ditekan oleh wacana dominan (yang mengklaim PLTA sebagai proyek vital nasional) tetapi tetap hidup dalam praktik sosial masyarakat. Foucault menunjukkan bahwa pengetahuan yang dianggap sah adalah pengetahuan yang diproduksi oleh institusi kekuasaan. Dalam kasus ini, narasi PLTA sebagai "proyek vital nasional" diproduksi sebagai kebenaran yang sah, sementara pengetahuan masyarakat tentang dampak negatifnya dikesampingkan sebagai subjektif dan tidak relevan.

Pemerintah yang tidak mau mengakui validitas pembelajaran ini tidak hanya gagal secara komunikasi, melainkan gagal secara epistemologis dalam memahami cara masyarakat Singkarak berpikir dan membuat keputusan. dekonstruksi membantu mengungkap bagaimana PR pemerintah membingkai kebijakan pembangunan sebagai kepentingan bersama, sekaligus mengaburkan konflik kepentingan yang dialami masyarakat lokal (L'Etang, 2008; Holtzhausen, 2012).

Critical Public Relations (CPR) menempatkan Public Relations sebagai praktik diskursif yang terikat pada relasi kuasa, ideologi, dan kepentingan politik (Holtzhausen, 2012). Dalam konteks Singkarak, PR pemerintah beroperasi dalam struktur negara yang menempatkan pembangunan sebagai agenda utama, sementara keberatan masyarakat lokal dianggap sebagai hambatan yang perlu dikelola. Pendekatan komunikasi semacam ini berpotensi melahirkan apa yang disebut Habermas sebagai komunikasi terdistorsi—

komunikasi yang tampak dialogis namun sesungguhnya tidak memberikan ruang deliberatif yang setara.

Distribusi tanggung jawab yang sangat difus ini bukan hanya kegagalan administratif ia adalah kegagalan tata kelola yang fundamental. Theaker (2004) menunjukkan bahwa dalam konteks pemerintahan, praktik Public Relations berfungsi tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi kebijakan, tetapi juga sebagai mekanisme produksi makna yang menopang legitimasi negara. komunikasi yang tampak dialogis namun sesungguhnya tidak memberikan ruang deliberatif yang setara. komunikasi modern sering kali terdistorsi karena peran sistem teknokrasi negara mengkolonisasi dunia kehidupan masyarakat, menyebabkan dialog terhambat (Roderick, 1986).

Derrida (1978) menunjukkan bahwa oposisi biner dipelihara karena ia menguntungkan posisi yang dominan. Dalam konflik Singkarak, oposisi pembangunan versus penolakan dipelihara bukan hanya oleh pihak pemerintah, melainkan juga oleh berbagai pihak lain yang masing-masing berkepentingan untuk mempertahankan pembacaan yang terpolarisasi.

Ini adalah celah yang sangat penting namun belum pernah dieksploitasi secara konstruktif: ada basis kesepakatan prinsipil yang dapat menjadi fondasi negosiasi, namun basis ini tidak pernah dibangun menjadi platform dialog karena kedua sisi terlanjur terkunci dalam oposisi biner yang kaku. Sebagaimana ditegaskan dalam Bab II, dekonstruksi atas oposisi ini tidak berarti membuang keberatan masyarakat; ia berarti membedakan antara penolakan terhadap proyek seperti yang direncanakan saat ini dan penolakan terhadap prinsip energi terbarukan itu sendiri. Perbedaan ini adalah jembatan yang belum pernah benar-benar dibangun.

Derrida (1976) menekankan bahwa makna tidak pernah bersifat tunggal ataupun final karena selalu terbentuk melalui relasi perbedaan dengan makna-makna lain yang secara bersamaan hadir maupun disembunyikan. Dengan demikian, setiap representasi komunikasi selalu mengandung kemungkinan interpretasi yang beragam serta membuka ruang bagi hadirnya kontradiksi di balik narasi dominan.

4.5 Implikasi Praxis

Penelitian ini tidak berhenti pada pengungkapan fenomena. Sesuai dengan tradisi ilmu komunikasi kritis, kerja analisis hanya bermakna apabila ia menghasilkan orientasi transformatif sebuah peta jalan menuju perubahan yang dapat dioperasionalkan. Konflik pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak bukan sekadar kasus yang menarik untuk dianalisis secara akademis ia adalah cermin dari masalah struktural yang berulang dalam praktik komunikasi pembangunan di Indonesia, dan yang akan terus berulang selama pola komunikasinya tidak ditransformasi secara mendasar.

Apa yang telah penulis sampaikan dalam penelitian ini, karena keterbatasan akses terhadap pihak PT PLN Indonesia Power dan PT ACWA Power secara langsung serta karena penelitian dilakukan pada fase konflik yang masih aktif dan sangat dinamis, tentu belum dapat mengungkap seluruh bagian dari realitas komunikasi yang melingkupi konflik ini. Sebagaimana lazimnya penelitian kualitatif kritis, penulis membatasi analisis pada level meso (komunitas dan kelembagaan) dan makro (relasi kuasa negara-kapital-masyarakat), dengan konsekuensi dinamika komunikasi antarpribadi di dalam keluarga nelayan dan di dalam nagari tidak mendapat porsi elaborasi yang sama besarnya. Pembatasan tersebut dilakukan agar potret dekonstruksi praktik PR pemerintah dan perusahaan dapat dioptimalisasi sebagai kontribusi utama penelitian.

Sesuai dengan pemikiran dalam tradisi kritis, setelah fenomena terungkap peneliti masih mempunyai tanggung jawab memikirkan jalan keluar dan merumuskan strategi-strategi praxis. Strategi praxis yang hendak penulis kemukakan adalah strategi yang berkaitan langsung dengan tindakan komunikasi kolektif yang dapat segera dioperasionalkan oleh para aktor dalam konflik ini. Strategi ini penulis namakan Strategi Komunikasi Berlapis-Bertahap, yang dibangun berdasarkan prinsip deliberasi Habermas (1984) namun dikontekstualisasikan pada sistem tata kelola adat Minangkabau. Penulis memulai ini dari analisis tiga implikasi utama.

4.5.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama kepada perkembangan kajian ilmu komunikasi kritis di Indonesia dan secara lebih luas kepada kajian Critical Public Relations global. Pertama, penelitian ini mengembangkan konsep ekologi konflik kepentingan sebagai kerangka analitis untuk memahami konflik pembangunan yang

melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berlapis dan tidak tunggal. Berbeda dari pendekatan bipolar yang membagi aktor menjadi dua kubu, konsep ini mengakui bahwa dalam setiap konflik pembangunan yang kompleks, kepentingan beroperasi secara gradual dan kontekstual aktor yang sama dapat memiliki kepentingan yang berbeda-beda tergantung pada konteks dan momen tertentu dalam siklus konflik. Kerangka ini lebih akurat secara empiris dan lebih produktif secara analitis untuk mengidentifikasi peluang-peluang resolusi yang tidak terlihat dalam pembacaan.

Kedua, penelitian ini memperluas dan memperdalam konsep *gateway* adat yang diperkenalkan sebagai kontribusi orisinal penelitian ini dalam masyarakat yang memiliki sistem tata kelola adat yang kuat seperti Minangkabau, legitimasi komunikasi pembangunan tidak dapat dibangun melalui prosedur birokrasi formal saja. Ia harus melewati sistem otoritas kultural yang paling diakui masyarakat, yang dalam kasus Minangkabau adalah *niniak mamak* dengan seluruh sistem kewajiban adatnya kepada kamanakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa *gateway* adat bukan hambatan terhadap pembangunan, melainkan mekanisme tata kelola yang memiliki akuntabilitas kultural yang justru dapat menjamin keberlanjutan kesepakatan yang dihasilkan.

Ketiga, penelitian ini menghasilkan proposisi yang memperluas Critical PR dari sekadar kritik terhadap praktik PR dominan menuju pengembangan model alternatif yang bersifat konstruktif. Tidak cukup hanya mendekonstruksi apa yang salah dalam praktik komunikasi pemerintah kajian Critical PR yang dewasa harus mampu menunjukkan kondisi-kondisi konkret yang memungkinkan komunikasi yang lebih adil dan lebih efektif. Penelitian ini menawarkan empat kondisi minimum tersebut sebagai kontribusi praktis yang dapat diuji dan dikembangkan lebih lanjut.

4.5.2 Implikasi Praktis

Bagi pemerintah dan PT PLN Indonesia Power, implikasi paling mendesak dari penelitian ini adalah perlunya simbolis sebelum langkah komunikasi apapun dilanjutkan, ini bukan berarti proyek dihentikan secara permanen, melainkan periode refleksi dan rekonstruksi kepercayaan di mana pemerintah secara resmi mengakui ketidaktuntasan komitmen PLTA, mengundang audit partisipatif yang independen atas penggunaan dana CSR PLTA, dan merumuskan program pemulihan yang konkret sebelum membicarakan

proyek baru. Langkah kedua yang konkret adalah menugaskan tim fasilitator dialog yang memiliki kompetensi kultural Minangkabau, bukan tim sosialisasi proyek, untuk memulai engagement dengan niniak mamak di seluruh nagari yang terdampak. Tim ini bertugas bukan untuk menyampaikan informasi tentang PLTS, melainkan untuk mendengarkan dan mendokumentasikan visi masyarakat tentang masa depan danau yang mereka inginkan. Dari pendengaran ini, baru dapat dikembangkan rancangan proyek yang responsif terhadap visi tersebut.

Bagi organisasi masyarakat dan tokoh-tokoh yang mewakili suara penolakan, implikasinya adalah undangan untuk refleksi kritis tentang siapa sesungguhnya yang mendapat manfaat dari berlanjutnya konflik dan siapa yang paling menanggung beban konflik tersebut. Nelayan yang tidak bisa menangkap ikan, anak-anak yang tumbuh di komunitas yang penuh ketegangan, dan ekosistem yang terus terdegradasi tanpa ada resolusi adalah pihak-pihak yang paling menanggung biaya dari konflik yang berkepanjangan. Perlawanan yang bermartabat adalah perlawanan yang menemukan titik di mana ia harus bertransisi menjadi negosiasi yang menghasilkan perubahan nyata.

4.5.3 Implikasi Kebijakan

Penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan yang mendesak untuk reformasi regulasi dalam tiga area yang saling berkaitan. Area pertama adalah regulasi konsultasi publik untuk proyek strategis nasional yang melibatkan komunitas adat. Regulasi yang ada saat ini tidak secara memadai mensyaratkan konsultasi yang 'bebas, terdahulu, dan terinformasi' *Free, Prior, and Informed Consent* atau FPIC sebagaimana diakui dalam standar internasional. Reformasi regulasi yang mengadopsi prinsip FPIC untuk proyek-proyek yang berdampak pada komunitas adat akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi praktik komunikasi yang lebih adil. Area kedua adalah regulasi tentang transparansi CSR di kawasan proyek strategis nasional. Perlu ada kewajiban pelaporan publik yang dapat diakses oleh masyarakat tentang berapa besar dana CSR yang dikeluarkan, kepada siapa disalurkan, melalui mekanisme apa, dan bagaimana dampaknya diverifikasi. Tanpa transparansi semacam ini, CSR akan terus menjadi arena perebutan elite yang tidak menyentuh masyarakat yang paling terdampak.

Area ketiga adalah kebijakan untuk mengintegrasikan *local ecological knowledge* ke dalam proses AMDAL. Ini memerlukan panduan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup tentang bagaimana mendokumentasikan, memvalidasi, dan mengintegrasikan pengetahuan ekologis komunitas ke dalam analisis dampak lingkungan. Kebijakan semacam ini akan tidak hanya menghasilkan AMDAL yang lebih akurat, tetapi juga memberikan insentif bagi komunitas untuk berbagi pengetahuan mereka dengan proses perencanaan resmi.

4.5.4 Strategi Komunikasi Berlapis dan Bertahap

Kegagalan komunikasi pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak merupakan tema praxis yang penulis munculkan berdasarkan temuan-temuan penelitian. Tanpa mentransformasi pola komunikasi yang memproduksi kegagalan tersebut secara struktural, upaya menyelesaikan konflik ini dipastikan akan berjalan di tempat atau gagal sama sekali. Sosialisasi yang lebih sering, CSR yang lebih besar, atau narasi yang lebih menarik tidak akan mencapai resolusi selama arsitektur komunikasi yang mendasarinya tidak diubah.

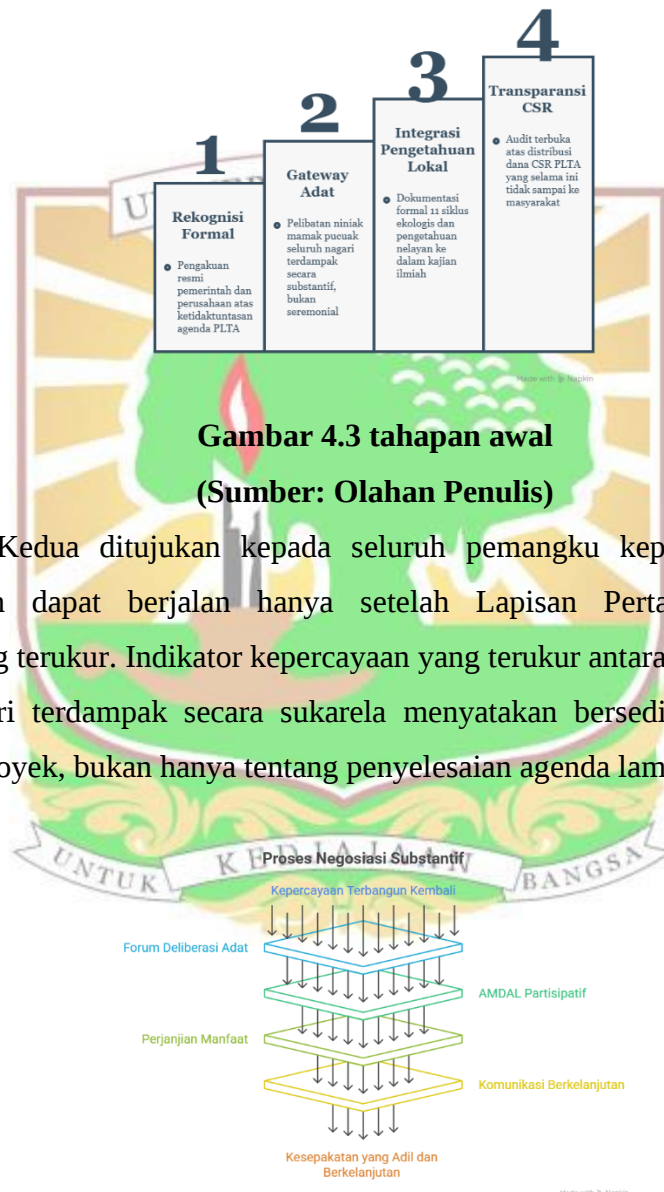
Namun konsep "transformasi" harus dapat dielaborasi menjadi sebuah sistem tindakan kolektif yang konkret dan bertahap, tidak hanya berupa rekomendasi normatif yang berhenti pada tataran abstrak. Pelibatan niniak mamak, misalnya, tidak cukup hanya disebutkan sebagai "perlu dilakukan" ia membutuhkan protokol yang menjelaskan siapa yang memulai, kapan, melalui mekanisme apa, dan bagaimana hasilnya diintegrasikan ke dalam proses formal.

Penulis optimis bahwa sebagian dari strategi ini dapat segera diinisiasi oleh pemerintah daerah, yang berdasarkan data penelitian sesungguhnya sudah mencapai kesadaran yang sama tentang apa yang seharusnya dilakukan, namun belum memiliki keberanian kelembagaan untuk memulainya tanpa dorongan dari atas. Strategi Komunikasi Berlapis dan Bertahap terdiri dari dua lapisan yang harus dijalani secara berurutan, bukan simultan

Lapisan Pertama ditujukan kepada seluruh aktor institusional pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT PLN Indonesia Power, dan PT ACWA Power dan harus diselesaikan sebelum pembicaraan tentang proyek apapun dilanjutkan. Ini bukan

penundaan: ini adalah investasi yang menentukan apakah proyek nantinya dapat berjalan dengan dukungan sosial yang genuine atau akan terus menghadapi resistensi yang menguras energi semua pihak.

LAPISAN PERTAMA: Rekonstruksi Kepercayaan



Gambar 4.4 negosiasi substantif
(Sumber: Olahan Penulis)

Untuk Lapisan Pertama, penulis mengidentifikasi bahwa komponen yang paling mendesak adalah rekognisi formal atas ketidaktuntasan PLTA. Data penelitian menunjukkan bahwa hampir semua informan, dari berbagai posisi yang berbeda, merujuk pada warisan PLTA sebagai sumber utama ketidakpercayaan. Informan MM menyampaikannya sebagai basis argumentasi yang sangat solid:

"Andaikan di rehab nyo dulu dek pemerintah, harus di perbaiki dlu PLTA ko. harusnyo di tekan PLTA bia badampak dlu ka masyarakat baru bisa masyarakat bersudut pandang beda." (MM, Wawancara 2026).

(Andaikan pemerintah mengambil tindakan rehabilitasi PLTA. Seharusnya PLTA ini ditekan untuk berdampak dahulu kepada masyarakat baru bisa bersudut pandang beda)

Pernyataan ini secara eksplisit menyatakan bahwa perubahan sudut pandang masyarakat yang merupakan syarat bagi penerimaan proyek baru hanya mungkin terjadi jika agenda yang tertunda diselesaikan terlebih dahulu. Ini adalah roadmap yang sudah diberikan oleh masyarakat sendiri yang diperlukan adalah kemauan institusional untuk mengikutinya. Membangun forum delibrasi adat memiliki usaha yang tidak mudah juga terutama dalam melibatkan niniak mamak di Sumatera Barat yaitu dengan melakukan kunjungan secara personal terlebih dahulu untuk melakukan pendekatan emosional dan bentuk menghargai posisi yang di pangku dalam Nagari.

Untuk Lapisan Kedua, komponen yang paling inovatif adalah AMDAL Partisipatif. Berbeda dari AMDAL konvensional yang disusun oleh tim ahli dari luar dan kemudian "dikonsultasikan" kepada masyarakat, AMDAL Partisipatif yang penulis usulkan menempatkan masyarakat sebagai ko-produsen data ekologis sejak awal proses. Tim peneliti bekerja bersama komunitas nelayan untuk mendokumentasikan, memvalidasi, dan menerjemahkan pengetahuan ekologis lokal ke dalam format yang dapat diintegrasikan ke dalam dokumen teknis resmi. Hasilnya bukan hanya AMDAL yang lebih akurat, tetapi juga proses yang membangun kepemilikan (ownership) masyarakat atas kajian tersebut sehingga hasilnya, apapun kesimpulannya, lebih mungkin diterima sebagai legitimate.

Tugas yang tidak kurang pentingnya adalah membangun komunikasi yang lebih demokratis dan setara di semua lapisan dari nagari, kecamatan, kabupaten, hingga pusat yang tidak mengalami distorsi ketika mengalir ke atas hierarki. Dengan kata lain,

membangun apa yang oleh Habermas (1984) disebut sebagai *communicative rationality* keputusan yang berdasarkan argumen rasional dan konsensus, bukan berbagai bentuk tekanan dari atas ke bawah maupun manipulasi dari bawah ke atas.

4.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menghadapi beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, akses terhadap pihak PT PLN Indonesia Power dan PT ACWA Power Danau Singkarak sebagai investor sangat terbatas, sehingga perspektif dari sisi perusahaan dalam analisis ini lebih banyak direkonstruksi dari data sekunder dan dari persepsi aktor lain. Perspektif langsung dari aktor perusahaan tentang proses pengambilan keputusan internal mereka, tentang evaluasi mereka sendiri atas kegagalan komunikasi, dan tentang apa yang mereka yakini sebagai kondisi untuk melanjutkan proyek, akan sangat memperkaya kedalaman analisis.

Kedua, penelitian ini dilakukan pada fase konflik yang masih aktif dan sangat dinamis. Beberapa dinamika penting, termasuk perkembangan posisi berbagai aktor dan kemungkinan perubahan strategi komunikasi yang mungkin sedang dalam proses, tidak sempat terekam dalam penelitian ini. Ini adalah keterbatasan yang inheren dalam penelitian tentang konflik yang sedang berlangsung dan perlu diperhitungkan dalam pembacaan temuan.

Ketiga, klaim tentang penyenyapan penelitian akademis yang mengarah pada tanggung jawab PLN atas kelangkaan ikan Bilih adalah klaim yang sangat serius namun memerlukan investigasi independen yang lebih sistematis untuk dapat dikonfirmasi atau disanggah. Penelitian ini memperlakukannya sebagai indikasi yang perlu diteliti lebih lanjut, bukan sebagai fakta yang telah terverifikasi.

4.7 Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, terdapat beberapa gap penelitian yang sangat mendesak untuk dijawab oleh penelitian selanjutnya. Gap pertama adalah penelitian tentang kepentingan dalam konflik pembangunan energi di Indonesia, keterbatasan penulis adalah mencari informan yang berkenan dalam penelitian ini,

kelanjutan penelitian ini bisa menggunakan pendekatan analisis jaringan aktor *Actor Network Theory* dari Bruno Latour untuk memetakan secara sistematis bagaimana kepentingan-kepentingan yang berbeda berinteraksi, bersaing, dan saling memanfaatkan dalam arena konflik. Pendekatan ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih terstruktur tentang siapa sesungguhnya yang mendapat manfaat dari berlanjutnya konflik dan siapa yang mendapat manfaat dari resolusinya.

Gap kedua adalah penelitian tentang efektivitas berbagai mekanisme konsultasi partisipatif dalam konteks komunitas adat Indonesia. Penelitian komparatif yang mengkaji kasus-kasus di mana proyek pembangunan berhasil mendapatkan dukungan masyarakat adat melalui proses yang respektif akan memberikan panduan praktis yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan perusahaan karena minimnya literatur solusi dalam konflik budaya.

Gap ketiga adalah penelitian interdisipliner antara ilmu komunikasi dan ekologi untuk mengembangkan metodologi standar bagi integrasi *local ecological knowledge* ke dalam proses AMDAL. Penelitian semacam ini memiliki nilai ilmiah yang tinggi sekaligus nilai kebijakan yang sangat konkret.

Penelitian ini ditutup dengan refleksi bahwa Danau Singkarak dan seluruh kompleksitas konflik yang berlangsung di perairannya adalah cermin dari tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam perjalanannya menuju transisi energi yang adil bagaimana memodernisasi infrastruktur energi tanpa memodernisasi ketidakadilan bagaimana mengklaim keberlanjutan lingkungan tanpa mengorbankan keberlanjutan sosial dan bagaimana menjadikan kepentingan nasional bukan sebagai wacana yang menenggelamkan suara lokal, melainkan sebagai sintesis yang *genuine* dari kepentingan semua warga bangsa, termasuk mereka yang paling tidak memiliki kekuatan untuk memaksa dunia mendengar mereka.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Konflik pembangunan PLTS Terapung di Danau Singkarak menunjukkan bahwa penolakan masyarakat bukan ditujukan terhadap konsep energi terbarukan, melainkan terhadap praktik komunikasi pembangunan yang belum mampu mengakomodasi pengalaman, pengetahuan, dan ruang hidup masyarakat lokal. Temuan penelitian mengungkap bahwa masyarakat memaknai pembangunan melalui pengalaman historis terhadap proyek-proyek sebelumnya, sehingga narasi pembangunan yang dibangun oleh negara tidak diterima sebagai kebenaran yang bersifat tunggal. Dengan demikian, konflik yang terjadi merupakan bentuk kontestasi makna antara kepentingan pembangunan nasional dengan realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat.
2. Praktik Public Relations PT PLN Indonesia Power sebagai representasi komunikasi pemerintah lebih didominasi oleh pola komunikasi pembangunan yang bersifat top-down konsultatif dalam membangun legitimasi proyek melalui narasi energi terbarukan, pembangunan berkelanjutan, dan kepentingan nasional. Meskipun telah dilakukan berbagai bentuk sosialisasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan, penelitian ini menemukan bahwa proses komunikasi masih lebih berorientasi pada penyampaian informasi dan pembentukan legitimasi dibandingkan membangun dialog yang setara. Akibatnya, komunikasi belum sepenuhnya mampu menciptakan kepercayaan, rasa memiliki, dan penerimaan masyarakat terhadap rencana pembangunan.
3. Melalui perspektif dekonstruksi, penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi masyarakat merupakan bentuk komunikasi kritis yang mengungkap adanya relasi kuasa, ideologi, dan krisis legitimasi dalam komunikasi pembangunan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Critical Public Relations dan komunikasi pembangunan dengan menempatkan pembangunan sebagai arena negosiasi makna antara negara dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan komunikasi pembangunan tidak hanya diukur dari tersampainya informasi atau terlaksananya sosialisasi, tetapi juga dari kemampuan membangun ruang dialog yang partisipatif, adil, dan menghargai pengetahuan lokal sebagai bagian dari proses pembangunan.

5.2 Saran

1. Bagi PT PLN Indonesia Power dan pemerintah, praktik komunikasi pembangunan perlu ditransformasikan dari pendekatan yang berorientasi pada penyampaian informasi menuju komunikasi yang lebih dialogis, partisipatif, dan kolaboratif. Masyarakat perlu dilibatkan secara bermakna dari perencanaan termasuk dengan metode komunikasi bersama *niniak mamak* di Minangkabau etika nya memang *batanyo ka mamak* dengan teknik mengunjungi satu persatu untuk membulatkan pemikiran sejak tahap perencanaan, bukan hanya pada tahap sosialisasi, sehingga proses pembangunan memperoleh legitimasi sosial yang lahir dari kepercayaan, transparansi, dan kesepahaman bersama.
2. Bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor serta mekanisme komunikasi dan praktik PR yang lebih adaptif terhadap karakteristik sosial dan budaya masyarakat lokal. Pelibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan lembaga legislatif sejak awal proses perencanaan diharapkan mampu meminimalkan konflik, memperkuat pengambilan keputusan yang partisipatif, serta menciptakan komunikasi pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan yang turut bertanggung jawab dalam mengambil peran yang jelas dalam memposisikan diri.
3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian komunikasi pembangunan kritis pada proyek-proyek strategis nasional lainnya dengan memperluas perspektif teoritis maupun metodologis, seperti analisis wacana kritis, etnografi komunikasi, atau studi partisipatif. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas strategi Public Relations dalam membangun legitimasi sosial pada proyek pembangunan berkelanjutan, sehingga dapat memperkaya pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang *Critical Public Relations*, komunikasi pembangunan, dan komunikasi kebijakan.

Daftar Pustaka

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (1 ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (1 ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Barker, C., & Galasinski, D. (2001). *Cultural Studies and Discourse Analysis*. SAGE Publications.
- Berger, A. A. (2014). *Media and Communication Research Methods* (Fourth Edition). SAGE Publications.
- Brás, O. R., Ferreira, V., & Carvalho, A. (2024). People of the sun: Local resistance and solar energy (in)justice in southern Portugal. *Energy Research and Social Science*, 113. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2024.103529>
- Burhan Bungin. (2017). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif komunikasi, ekonomi dan kebijakan publik, serta ilmu ilmu sosial lainnya*. Rajawali Pers.
- Cahya Ningsih, N. (2020). Persepsi Masyarakat Nagari Batu Bajaranjang Terhadap Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Gunung Talang. Dalam *Journal of Civic Education* (Vol. 3, Nomor 3).
- Cieri, E., & Magalhaes, A. L. (2007). *Communication Management in Organizations*.
- Cornelissen, J. (2020). *Corporate Communication A Guide to Theory & Practice* (6 ed.). sage publications.
- Derrida, Jacques. (1981). *Writing and Difference*. Taylor & Francis Group.
- Derrida, Jacques. (1981). *Writing and Difference*. Taylor & Francis Group.
- Em Griffin, Andrew Ledbetter, & Glenn Spark. (2023). *first look at communication theory*. McGraw Hill LLC, 1325 Avenue of the Americas, New York, NY 10019.
- Erica Weintraub Austin, & Pinkleton, B. E. (2015). *Strategic Public Relations Management_ Planning and Managing Effective Communication Campaigns-Routledge* (2015).
- Fairclough. (1995). *Critical Discourse Analysis: the critical study of language*. longman Publishing, New york.

- Faishal, A. (2022). Dekonstruksi dalam Naskah Lakon RE Karya Akhudiat. *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 4(1), 34–46. <https://doi.org/10.15642/suluk.2022.4.1.34-46>
- Foucault, Michel., & Gordon, Colin. (1980). *Power/knowledge : selected interviews and other writings 1972-1977*. Pantheon Books.
- Goffman, E. (1956). *THE PRESENTATION OF SELF EVERYDAY LIFE* (1 ed.). University of Edinburgh Social Sciences Research Centre.
- Hardani. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF & KUANTITATIF*. CV.Pustaka Ilmu.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep,Teknik, & Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep,Teknik, & Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Hoare Quintin, & Smith Nowell Geoffrey. (2022). *Antonio Gramsci Selections from the prison Notebooks*. <https://archive.org/details/selectionsfrompr0000gram>
- Holtz, Shel. (2002). *Public relations on the Net : winning strategies to inform and influence the media, the investment community, the government, the public, and more!* AMACOM.
- Holtzhausen, D. (2012). *Public Relations As Activism Postmodern Approaches*. Routledge.
- Holtzhausen, Derina, Zerfass, & Ansgar. (t.t.). *The Routledge Handbook of Strategic Communication*.
- Holtzhausen, Derina, Zerfass, & Ansgar. (2015). *The Routledge Handbook of Strategic Communication*. Routledge.

- Larissa A. Grunig, James E. Grunig, & David M. Dozier. (2002). *EXCELLENT PUBLIC RELATIONS AND EFFECTIVE ORGANIZATIONS A Study of Communication Management in Three Countries*. www.erlbaum.com.
- Leary, M. R., Kowalski, R. M., & Leary, R. (1986). Impression Management: A Literature Review and Two-Component Model. Dalam *Psychological Bulletin* ! (Vol. 990, Nomor I). Schlenker.
- Lestari, A. (t.t.). *JIS (Jurnal Ilmu Siber) Dekonstruksi Pemaknaan Poligami Dalam Film Komedi Madu Murni*.
- L'Etang, J. (2005). Critical public relations: Some reflections. *Public Relations Review*, 31(4), 521–526. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2005.08.011>
- L'Etang, J. (2009). *Public Relations Concepts, Practice and Critique*.
- Melkote, S., & Steeves, L. (2015). *Communication for Development: Theory and Practice for Empowerment and Social Justice*.
- Mikey, T. (2003). *DECONSTRUCTING PUBLIC RELATIONS Public Relations Criticism*. www.erlbaum.com
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif (Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Motion, J., & Weaver, C. K. (2005). *A Discourse Perspective for Critical Public Relations Research: Life Sciences Network and the Battle for Truth*.
- Motion, J., & Weaver, C. K. (2005). *A Discourse Perspective for Critical Public Relations Research: Life Sciences Network and the Battle for Truth*.
- Norris, C. (2002). *Deconstruction “An inspiring and dazzling tour de force that revolutionised my thinking” Gary Day, Times Higher Education Supplement (third edition)*. Routledge.
- Pieczka, M. (2002). *Public relations expertise deconstructed*.
- Raco, J. r. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, jenis, karakteristik dan keunggulan*. PT Grasindo.

- Radtke, J., & Löw-Beer, D. (2025). Unpacking local energy conflicts: Drivers, narratives, and dynamics of right-wing populism and local resistance to energy transitions in Germany. *Energy Strategy Reviews*, 61. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2025.101844>
- Rahman, A. (2009). *Kritik Ideologi, Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*. <https://doi.org/10.24235/orasi.v7i2.1074>
- Rasyidin, A., Saidi, A., Eka Putra, E., & dan Sri Wahyuni, F. (2010). *THE SOCIETY EMPOWERMENT OF TANAH DATAR DISTRICT AT SINGKARAK LACUSTRINE AREAS USING THE INTEGRATED FARMING SYSTEM, AGROFORESTRY AND AGROECOTOURISM*. UNIVERSITAS ANDALAS
- Rawlins, B. L. (2008). Measuring the relationship between organizational transparency and employee trust. *Public Relations Society of America*.
- Rick Roderick. (1986). *Habermas and the Foundations of Critical Theory*. Macmillan Education. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-18149-0>
- Sanchez Nieminen, G., & Laitinen, E. (2025). Understanding local opposition to renewable energy projects in the nordic countries: A systematic literature review. Dalam *Energy Research and Social Science* (Vol. 122). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.103995>
- Sastra Hadi, E., & Vidya Putra, E. (2019). Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Di Gunung Talang Kabupaten Solok. *Jurnal JAA Perspektif*, 2(3), 236. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i3.95>
- Servaes, J., & Luu, S. (2022). *Moving targets Mapping the paths between communication, technology and social change in communities*. <https://archive.org/details/movingtargetsOO000unse>
- Spivak, G. (1988). *Can the subaltern speak?* In C. Nelson & L. Grossberg (Eds. University of Illinois Press.

sriramesh, & vercic. (2009). *THE GLOBAL PUBLIC RELATIONS HANDBOOK THEORY, RESEARCH, AND PRACTICE EXPANDED AND REVISED EDITION* (2 ed.). Routledge.

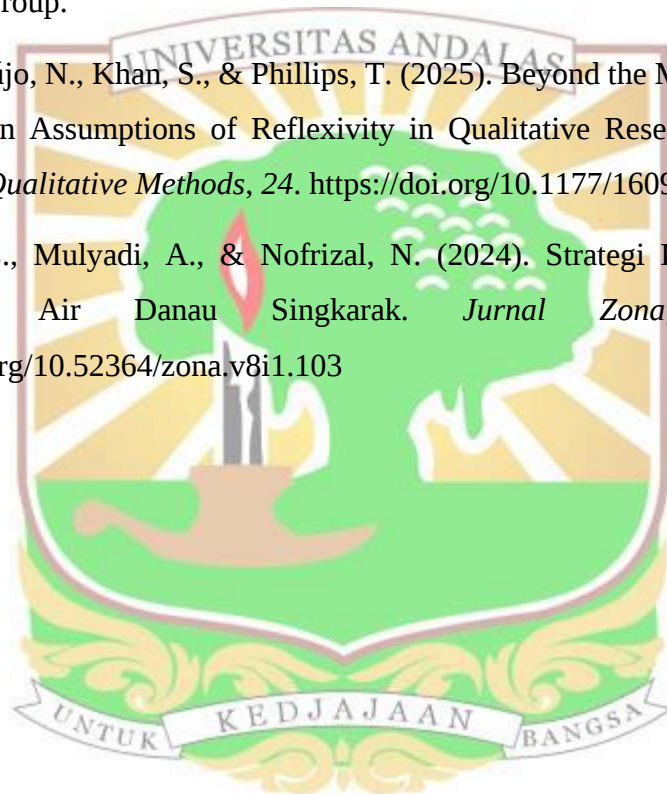
Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, & John G. Oetzel. (2011). *THEORIES OF HUMAN COMMUNICATION Eleventh Edition* (11 ed.).

Stromback, & Kioussis. (2011). *POLITICAL PUBLIC RELATIONS*. Taylor & Francis.

Theaker, A. (2004). *The Public Relations Handbook* (second edition). Routledge taylor & Francis Group.

Trundle, C., Araújo, N., Khan, S., & Phillips, T. (2025). Beyond the Mirror: Challenging the Common Assumptions of Reflexivity in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 24. <https://doi.org/10.1177/16094069251369311>

Umam, M. F. Z., Mulyadi, A., & Nofrizal, N. (2024). Strategi Konservasi Daerah Tangkapan Air Danau Singkarak. *Jurnal Zona*, 8(1), 8–15. <https://doi.org/10.52364/zona.v8i1.103>



Lampiran 1 transkrip wawancara

Wawancara CM

1. Salamo nyo tibo pak layani ngopi se nyo
Salamo ko, banyak tibonyo langsung bakaba lewat telpon atau chat se nyo, “dima pak camat izin berkunjung pak camat. Kalau awak nan maagia keputusan man, taniayo wak beko. Kapalo wilayah yo awak cuman kalau yang punyo wilayah itu yo nagari. Kalau camat ko wak strukturalnyo kalau lah tuka kecek diateh ma, amuah kanai tuka wak kok nagari kan beda.
2. KAN ko baa posisinya pak?
Kalau KAN ko ba kantua lai tapi ba ikatan adminstrasi indak, soalnyo di dalamnyo sabana no persatuan niniak mamak. Kalau LKAM baru nyo lembaga. Yo pas nanyo ka pak, tu pak arahan nyo. Tamui la ketua kan, tamuila malin makau. Kalau jatuaahnyo di minang ko bakarajo indak tersuktur jatuaahnyo, padahal perencanaan 2019 tapi 2023 baru nyo turun ka lapangan, 5 tahun nyo manggodok. Wak sebagai fasilitator se nyo, kalau diundangnyo wak rapek ka kantua wali nagari wak datang.
3. waktu bupati dan andre datang ada bapak disana?
Itu lebih parah lagi, perjanjian dengan bupati di dalam Indo Jolito, tidak ada poster naik, ternyata hari H sabalik kironyo, bahwa masyarakat menolak. Hampai indak jadi acara. Waktu itu lah bapak laporan ke bupati bahwa keadaan suasana aman cuman ya poster nya naik. Waktu bapak tanya ke masyarakat ternyata ya niniak mamak indak talok manahan do pak camat masyarakat nan kami Lawan. Alun IKMAL (Ikatan Keluarga Malalo) menolak pembangunan PLTS.
4. Kalau andre rosyade apo sangkuik pauiknyo,pak?
Ado kalau beliau tibonya perwakilan pemerintahan pusat yang mewakili untuk sosialisasi. Nyo ka maju ma. Kalau nyo balawan lo tu ruginyo beko nyo ka daftar ka DPR lo baliak kan, Kalau mancaliak info masyarakat jo intel ntah bara banyak rombongan ba tarompa japik, polres dkk “Heboh”

5. Susunan bicara dalam sosialisasi baa pak?

Dimulai dari penjelasan dulu dari tim sosialisasi mereka, habis itu memeinta perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dimulai dari jorong dulu, sudah tu ka KAN, wali nagari jo tokoh masyarakat kan, dari masyarakat lai bla bla bla awalnya ending nyo tu kami menolak. Kompak lo sadonyo. Diminta lah konfensasi dan feedback apa yang masyarakat dapat. Yang katanya 100jt. Dikalian sadonyo dek masyarakat nyo dapek Bilih 3kg minimal sahari harago 60k - 70k per kilo diituang nyo banyak jo per keluarga dapek lai sebagai nelayan pado 100jt tu ba bagi lo 13 nagari Anciah kami manjalo lai pada dapek piti ank, kecuali 1M kami pertimbangkan. Intel jo polisi je sabalik- sabalik. Fatalnyo. Nyo salah manyabuik Batipuhah selatan . Aturan nyo pauh ta sabuik paus. Disuruah turun dek masyarakat nyo. Warga tu sekita 500 urang ado tu. Kata bupati, sampai kita ambo lun pernah ttd samo sekali lai. Acok nyo ka kantua apak tu, tapi indak pernah masuk an surek do, malam nyo WA kami di padang panjang izin merapat ka kantua camat. Kalau urng nanyo surek indak do rasonyo. Kecuali surat undangan sosialisasi tembusan adonya. Tambahnyo jarang sosialisasi ka urng pemda. Dulu emng apak larang dulu, dari pado mencari heboh wak beko, kan nyo PSN (proyek strategis nasional) kalau posisi camat saya ikut pimpinan, dan saya pasti mendukung. Tapi kan yang meraskan itu masyarakat karena mereka yang tinggal lama.

WAWANCARA MM

1. Apa masalah utama hingga terjadi penolakan dalam masyarakat?

Jadi awak lah pernah menyimpulkan pado seluruh nan batanyo. Pado umumnyo masyarakat sadonyo manarimo, program energi baru terbarukan, supoyo kito ko indak tergantung kepada energi fosil la kan, a jadi bagus program tu. tapi karano lokasinya di danau Singkarak. Panel surya ko di pasang di tengah danau disiko muncul masalah Jadi yang partamo tu Munculnyo isu PLTS di tahun yang salah. 2023, nah itu mulai munculnyo la salah, masuk 2024 aa ko salah, nan mambuek program ko makin runyam Bisa di sabuik masyarakat ko trauma dengan prgram masa lalu terutamo PLTA, karno baa. PLTA ko adalah proyek terbesar dizaman nyo katiko dulu. Yang dulu haraoan masyarakat tu kehidupan nyo makin wah, DULU. Tapi sapanjang waktu berlalu sampai

kini ko, kontribusi PLTA ndak se vital namonyo do, yang padonyo kan tertulis jelas tu proyek vital nasional. Yang kini hadir dengan namo program startegis nasional masyarakat berpikir nan lamo belum sudah kini la hadir lo program baru yang ado dampak negatifnyo. Apo. cara sosialisasi program menurut kami caranya tidak tepat Cara mensosialisasi kan prgram nasional ko tadi, yang seharunyo barang ko bagus jadi salah. Baa kok monde tu karano daerah minang ko babeda jo daerah lain, menuruik kami koo sabananyo dalam perencanaan niniak mamak harus di libatkan dalam proses perencanaan tadi, baru niniak mamak jalehan ka kamanakan nyo. Soalnyo apo iko masalah disumatra barat yang selalu bamasalah jo masalah daerah wilayah, sedangkan memang dari awal program pemerintah ko indak pernah meliabtakan niniak mamak. Di Minangkabau ko indak bisa wak pungkiri kalau kamanakan akan patuah ka mamak, nan seharusnya kamanakan ko bisa maimbiak untuang di dalam e cuman indak ta siolisasikan dengan baik jadi taambek jadi e. Apakah PLTS ko pernah sampai ka Masyaratakat dampak negatif dan posistif e, iko resiko yang ado dan iko yang beko dampak positif keuntungan nyo ka masyarakat

Soalnyo kalu terjasdi dampak buruk kan masyaeakat yang akan paliang banyak marasokan. Disitupulo yang harusnyo niniak mamak disitu mambentengi program tadi cuman nyo ikuik malawan jadi e. Karano nyo indak tau apo2 ndak pernah di baok dari awal kok. Aa jadi sosialisasi itu indak namuah, dari gubernur ka sekda, sekda ka bupati, bupati ka camat. Nak amuah do sampai di situ sajo do Itulah yang menjadi penghalang, sabananya seluruh masalah program program startegis nasional la. Pokok e hampir seluruh program nasional yang menyangkut pembebasan lahan la, gitu tarui du, yo harusnyo negara merencakan sesuatu tolong libatkan niniak mamak. Jadi program ko nyo indak berjalan sajauh tu bana beko do walaupun akan ado konflik jadinya indak akan talampau jauh do.

Mungkin seperti di daerah jambi, lampung atau dimano lah bisa bantuak itu tapi diminang indak bisa kito ado niniak mamak. Karano kito cultur kito sabagai urang minang masih kuat, urang-urang Akan lebh taat kapado aturan adatnyo dari pado aturan negara. Contohnya kalau negara melarang berkendara indak manggunoan helm misalkan, urang masih banyak indak mandanga. Cubo di ikek di adaik bantuak niniak mamak

mambuek aturan niniak mamak mambuek aturan indak buliah kalua rumah untuk nan padusi tanpa jilbab, caliak la bajalan semourna nyo. Itu buktinyo masyarakat sumatra barat masih mamandang harago diri adat dari cultur kito.

2. kalau sosialisasi ko masuaknyo dari ma da, dari Indonesia Power, investor atau siapa?

Yang jaleh program, program ko ado tim, tim sosialisasi tim perencanaan, jadi ado timnyo nan tibo. Tapi yo masuak nyo bantuak itu ka kantua walinagari tantu yo ditolak langsung dek uarang nyo. Disinan la pribahasa **“Manukiak balam tu nyo ndak jo balam do”** nyo jaleh ka manukiak balam tapi jo baruak nyo manukiak, tu lari balam tu dek ee Cubo nyo libatkan emng urang setempat tu, ungkin indak monde tu. Bakumpuan sadonyo, manuruik awak kurang mantap.

3. dalam berkumpul kan ada dialog, apakah solusi atau dampak apa gitu kan.

Amdal nyo lun salasai lai dho. Emng urang tu katokan amdal ko lun salasai lai, andaikan salasai bana dari masyarakat lun tarimo samo jo nyo. syarat amdal Harunyo kontribusi PLTA ko, ado kewajibanyo di pendidikan, ado di ekonomi ado di lingkungan ado di sosial. Kini wak baco kasado alahnyo Masalah pendidikan , apo yg lah pernah nyo la kukan untk daerah sekitarnyo lah, nan seharusnya kok bisa inyo ko lah ado memberikan biaya pendidikan kok bisa gratis sadonyoTua lai ekonomi, harus ado nan dibina nyo ekonomi ko sampai nyo bisa manampung tenaga kerja sekian 100 urang, banamo lah nyo, umkm binaan PLN itu kebangga bagi masyarakat kalau dibinna, caliak lah kaliliang danau kok ado Untuk sosial sabalik danau tu masih ado guru TPA yang indak bahonor, aa kan sosial tu Lingkungan caliak la sambpah berserakan kontribusi untuk lingkungan apo, sampah batumpuak Nyo buek lah pengelolaan sampah, bisa lo menampung tenaga kerja kan, ado buek bang sampah ngk di olah samo jo indak guno, Jadi adolah nan bisa di banggakan nyo, kini kalau di caliak direktur manager pln tu indak ado anak nagari do, ado pun jadi satpam nyo. Satpam 3jt nyo gaji sabulan. Jadi kok diutuang jadi tukang jo 150k sahari gadang lo gaji tukang lai, PLTA ko kok ndak jalan indak ba lampu urng riau tu do

4. baa kok Batipuhah selatan se nan manolak, kan lapang danau Singkarak tu

Oo bisa jdi solok ado lo kemungkinan, tapi indak taulah
5. kalau di caliak apakah trauma ko se faktor utamanyo
Kalau manuruik ambo ko e, andaikan di rehab nyo dulu dek pemerintah, harus di perbaiki dlu PLTA ko. harusnyo di tekan PLTA bia badampak dlu ka masyarakat baru bisa masyarakat bersudut pandang beda Apo yang bisa di jatkan manfaat bagi masyarakat Air tanah udara milik negara, tpi indak ada kemakmuran bagi masyarat
6. perusahaan ko ado CSR apo nan dirasokan masyarakat?
Sepengetahuan wak indak do la, ma yang la di kuliahkan ma nan di sekolahkan. Jadi ngak salah sudut pandang masyarakat.
7. Sosialisasi patang tu indak ba banang merah baa sudanya da?
Kalau menuruik awak ko sabagai generasi muda, kalau untuk PLTA dulu kami bayia listrik 7000k sabulan, kini ko la 300k sabulan. Dirumah ambo koo a, bara peningkatan nyo tu Kontribusi PLTA ko ado PAP namonyo (pajak air permukaan) sgadang 90 jt, kadang 100jt. Sabanyak itu jo sampai kini nyo. Harusnyao kwh maningkek tu naik lo. Ko nan biaya masyarakat ko nan naik lo
8. dampak yang dirasakan masyarakat ko apo jo?
Nan jaleh kurangnyo ruang penangkapan ikan Bilih deh panel ko a. Ikan Bilih ko la, indak ado pertimbangan nyo apokah ikan Bilih ko akan mati deknyo Tapi kalau di karajoan nyo dek PLTA a, memang sejahtera masyarakat caliak la ma mintak nan ka lai masyarakat ma.
9. dampak posistif nyo apo tu da?
Dek awak waktu sosialisasi kok indak salah skitar 100jt tu. aa u sakabupaten tu. 100jt ka kami bagi tua jalehnyo 13 nagari nan ado tu a. Ma ka talok deknyo tu Jdi kontribusi nyo ko kendalanya. Sabananyo kami masyarakat sejutu jo karna inyo energi terbarukan yang ramah lingkungan. Memanfaatkan panel surya. Tapi ya dampaknya yo itu tadi.

10.	sosialisasi ko sejak bilo da,
	Kalau sebelum penolakan la dari awal ka camatb dkk tu la sampai tyu apolai pas masuak kantua wali tu la mulai beredarnyo ka masyarakat kini capek kan, muluik ka muluik apolai ka media kan
11.	kalau penolakan dari masyarakat baa bantuak nyo da?
	Kalau itu kami bersurat, dari dprd, gubernur, ka bupati pernyataan penolakan secara resmi tu kami munculkan, Penolakan tu ado yang di ttd rumah ke rumah kan ado yang tokoh masyarakat ado pulo Yang wali nagari bergabung ado juo, niniak mamak menyatakan sikap mnolak secara resmi ado juo. Ko di kantua pak camat ko. “Kami menolak” Cuman yo iti Pak camaik”: bisuak mintak nomor pak malin aa kok ka ngopi gai man beko. Pak malin ko inyo penguasa daerah ma, apak camaik maa awak di bawah bayang2 nyo kini ma. Nyo dakek jo pak eka.
12.	dari surek nan dimasuak an nyo ado tanggapan?
	Sampai kini lun tau baa nyo lai, lun ado wak tau lai. Ambo yakin dan picayo pemerintah jo indak ngarati bana jo iko do, baa dampak nyo terhadap lingkungan dan apo dampaknya ka masyarakat baa, yo surek masyarakat menolak jo nyo. Sepanduk tu mulai di naik an dek ado sosialisasi nyo ka dibuek jo pejabat tingginyo. Dek itu mulai nyo di nampak an dek masyarakat. Tapi baa caro manasehati indak tau wak lai kan. Baa caronyo menasehati pemerintahko untuk memberikan caro yang bagus. Tando nyo indak barubah ko, la banyak nyo kasus tapi baulang jo tarui kan, manuruik ampo sesuai jo pengalaman, kalau pemerintah nio buek program plts. Mulai lah panggia niniak mamak pucuak ko sadonyo sampaian la ko perencanaan. Kalau la sepakat niniak mamak tu baru naik ke tingkat serius lai. Contoh sekian ratus nelayan yang terdampak langsung ko, a kontribusinyoo bahwa ekonominyo harus di alihkan, ado indak di pikian nyo. Pengalaman ambo di danau koa Rasonyo plts indak cciok karno danau Singkarak ko badai. Kalau danau Singkarak kalau tibo badai per 8 tahun tu 3 meter labiah tu. Ko panel terapung goa baa kiro2 dek ombak monde tu du Bantuak danau cirasa kan baa dari pengalaman nyo Pengalaman ambo ka danau goa, ancua panel suryo ko di badai ma, badai danau Singkarak ko per 8/9 tahun. Ambo pernah buek landing terapung paralayang ko a,

pas kanai badai nyo. Hancua nyo. Ko pengalaman ambonyo Kalau masuak 20% ka daerah a, kantua polsek camaik indak ka bantuak iko gai kini do. PLTA.

13. Andre rosyade kemarin peran nya apa pak?

Suoro masyarakat sebekum itu masih alun didanga, inisiatif datang jo inyo sdneyo dek ingin menunjukan penolakan. Kalau ambo pqdo dasarnya setuju. Tapi kalau memangka marugikan masyarakat untuk apo la kan.

14. apakah pusat tanggung jawab

Caro aponyo bumh yang mengelola. Energi di bawah Indonesia Power. Jadi baru tahap sosialisasi. Bisa jadi daei Indonesia Power, dari ACWA ado dari pemerintah. Yg sampai dek awak tim sosialisasi sajo namonyo. Andaikan tapakai sistem niniak mamak, Apakah PLTA ko la d perbaiki. Dampak Lingkungan dan kontribusi nyo. Kalau kini diam jo kabanyo. Ado lo kabarnya dialihkan 176mega watt daya yang dikeluarkan perusahaan. Plta Caliak la di google gai. 175 mega waat Brarti 4 tubin Contohnya Hampir seluruh penelitian ko yang mengarah pada pemerintah dihilangkan. Jadi sabanaya makonyo ampo sabuik dosen ko. Yang mambuek an dosen penelitian jalan tu adalah universitas karna takuik iko takuik itu. Contoh inkan Bilih penelitian ttg ikan bili yang mengarah ka dampak ikan Bilih ko langka kalau mengarah ka pln dijilangkan. Jadi yang disalahkan apo nelayan. Akhirnya masyarakat yg semakin disalahkan terjadi penertiban. Yang melanggar di tangkok. Ambo kapalo dusun koa. Tatangkok warga ambo ba 2. Di buang sentrum nyo. Dimusnahkan. Manyentrum ko kan angok ttgan nyo koa Kalau ka inyo painyo mati nyo a, dek tuntutan sekolah anaknyo pagi. Nah wak buek lo kajian bahwa nan merusak plta ko nan merusak ikan Bilih ko. Nan partoma sakali kan Bilihnkonikan musiman. Hijupnyo mengikuti arus. Menentang arus Nyo bergantung sangaik ka arus. Arusnyo bagantuang ka suhu udaro Kalau hujannyo monde ko kalau paneh kamari Jadi aa nampak karusakannyo. Arus dibawah perusahaan tu diubahnyo dek plta jadi kacau nyo dek plts. Dulu ciek nyo goa. Kiji 2 a tu barubah nyo Kehidupan bili barubah lo. Contoh batalua nyo bamusim. Remaja nuo ba musim tuo nyo ba musim. Musimnyo ado nan banjir harago murah (standar nyo normal)

Katiko minim setalah ba talua nyo (maha) Muncul anak bilh tu nan gadang nyo mulai usak. Masonyo musim tadi tu hampir 3 bulan, banjirnya, musimnyo biaso hampia lo 3 bulan. Penangkapan nelayan la sesuai jo siklus musimnyo. Nan ka sungai pas iko tangkoknyo. Pas nyo ka tengah di tanggok nyo ikilo. Ado sekitar 11 siklus nan nya ikuti. Turun temurun tarui tu Jadi la sesuai penanggkapan tu Baliak ka masalah ekonomi? Kalau dlu marato seluruh urng iduik tapi danau manangkok ikan Bilih sabalum ado nyo penertipan. Ado pergub tentang alat tangkap, sentrum racun. Jaring rapek dkk Alanyo menjaga kelesatarian ikan. Samanjak 2013 aturan itu kalau indak salah. Apokah ikan ko banyak malah bakurangnyo Kalau indak salah 100x lipek banyaj nyo pqdo kini Bom ikan amua malatui 80x sahari. Kini sabulqn indak do lai. Sentrum tiok rumah ado. Dari tahun 80 tu. Aturan tahun 90 la abihnyo tu. Kami menyatakan pengurangan ikan bili ko bukan dek itu. Tpi dek plta. Karano habitanyo di rusaka Ka 2 . Erosi yg dibueknyo dek plta Karano nyo manahan air Nyo manampuang aie manjago bulan kemarau tibo. Sabalum kemarau tibo. Jadi elevasi aie ko nyo jago selama mungkin. Musim hujan aie naik. Jadi nyo menjadi erosi nyo mengikis tapian danau ko erosi la namonyo kan kayu2 tumbang dekk nyo. Pasir halus ilang. Dulu danau sabalah barat ko pasir halus nan ntuak main dek kami. Dulu katiko ketek koa. Waktu mambagun rumah ba ampbiak pakai karuang jo dlu nyo Kami buek lo riset lokal. Baa dlu ado lauk manggaleseh di tapi tu. Luponyo Bilih ko pantiang manggesek badan tu dari pado makan terutamo ketiko kawin, batulu, katiko remaja diri nuu. Jadi kasiak ilang terumbu ilang kayu2 tadi ntuak bataduaj anak ikan bili. Kami la teliko a anak Bilih indak Bisa iduik kalau kanai paneh salamo 10 menit matiiee ee Nan baru manateh tua . Labiah dari 15 bminik. Jdi nyo butuah kayu ntuak bataduah . Kayu tu la indak do lai la tumbang. Anak ikan biliah indak bisa iduik d tabgah danau dho. Dlu ketek ko a bajyak kayu nan ka danau tampek kami maambua dulu. Sobek ureknyo di girek aie. Jdi danau ko tambah laweh. Sasuai nyo program plta. Samakin lueh nyo samakin bahyak aie nyo banyak kubikasinyo. Hitungan ekonomi pln ko per sekian kwh sekian kubik aie e, kayu yang tumbuah di aie marapuqng koq mode rumpuik lauiknyo, dek kami kalayau dek wak namo e. Nan mangabek kaki cek urang tu a. Nyo ado kantong di tumbuhan tu itu mengurangi aie danau Nah urek nan kabawah koa itu ..itu sangat dbutuhkan olehnanak ikan Bilih dek tumbuhan itu mamakana plangton disitu Nan urek tu sangat nyo butuqhkan bana tu. Kayu ko pas masuak dalam dari itu yang d dlukan Sebat

tumbuhan itu tu mamakan iae sangek kancang ee. Kayu ko, ado akarnyo mode serabut aa itu nan bantuak trumbu. Kemarau, baringin, sidingin, banyak di sekitar danau tu dulu tu. Kalau manuruik pemahaman kami anak bili tu katikonyo lahia tu nyo hidup jo suhu, sampai matonyo ado muluik nyo ado. La adomuluiknyo barunyo makan plangton Pernahkah itu dibahas indak da? Selagi nyo mangarah ka PLTA di cut nyo dek urang de. Ujuang2 e berita. Cuman dek awak tetep memperjuangkan itu.

15. menurut uda sia ancak man tanyo lai go.

Kalau Bilih bisa tanyo jo sakaliliang nagari, kalau plts ka ketua KAN tau du. Pak bukhari ketua kadin sumbar nyo baik anak buah luhut kamari ambau sampain tu. Kalau di baok ka gubernur ka bupati nyo OKe jo nyo. Nyo SNI urng ko la takabek dek undang2. Jadi urng ru oke jo nyo. Makonyo ka niniak mamak dulu, nyo indak ado kanai sumbah dho bantuak pemerintah nyo d sumpah tu yo nyo urng tu harus mandukuang. Yo Mamak ambo kalau la diminta ma, yo ambo maunjua jo nyo. Cubo buek oerencanaan l, cubo lah perencanaan jo niniak mamak dlu. Sampai kini masih bamasalah jo lai. Fly over contoh e. Nyo lun bisa di mulai lai. Nyo mulai karajo daei masyakat mulai lo manolak. Kini la runyam. La kasado manolak jadinya. Sugiono jo no jo namonyo. Jdi a gunu lembaga di buek di minang ko sampai LKAM. Manfaatkan a inyo Ado nan mangecek paya pembnagunqn di sumatra barat ko. makanyo payah urang minang ko taimpik nak diateh takuruang na di lua. Jadi ngk bisa di alua2. Nyo ka mambuek itu ka di alua2 jo jadi ngk bisa. Tanah wilayah ko a. Lum ado negara lai la ado minang ko ma. Tanpa wak sadari nan awak ko tetap sist4m kerajaan aa tu nan niniak mamak a Ndk gaya jawa nien nan wak pakai nye. Kalau di bawah pak camaik ado. KALAU LAM CAMAIK KO NYO sumpah jabatan kan. Kalau niniak mamak aa nyo Kok tabaliak.nyl baiyo ju gubernur, jadi awal masuak bana indak lolos do.

Sdangkan bupati ambo lawan tanyo pak camat ko a Partamo masuak di tahun yang salah Trauma yg lalu Dampak kontribusi indak do Maslah niniak mamak tadi Dsniko ado dtuak pucuaq namo do. Harusjyi iko nan dibaok baiyo jadi pantia namonyo atau jadi sipangka la kok dik awak minang jadi kok ado masalah inyo la manyalasaan beko nyo Kama siman lai. Ka datauk bukhari tu katua kan Ambo mangabaan bisa ko Kok indak datuak panduko naro dt kanedi.

Akrab nyo jo pak camat ma Ambo sabananyo sabuik luruij a, setuju jo nyo. Cuman indak manguntuang kan ntuak masyarakat Namo jo opjek vital nasional tu. Pak camaik jo lalu indak muek dho Ado foto pqk camat jo urng tu padonyo maluncua jo nyo. Tu posting dkecekan nyo setuju. Tu ka kantua wali. Lq foto la setuju lo.

Wawancara DT. B

1. Bagaimana awalnya Mak Datuak bersedia menjadi ketua forum penolakan pembangunan PLTS Terapung?

Sebenarnya bukan karena saya yang menginginkan posisi itu. Saya dipanggil dan diminta oleh para niniak mamak di kawasan Salingka Danau. Kebetulan saya termasuk salah satu orang yang cukup vokal di tengah masyarakat. Karena dianggap mampu mewakili aspirasi masyarakat, akhirnya atas kesepakatan para niniak mamak saya dipercaya menjadi ketua forum tersebut.

2. Bagaimana tanggapan Mak Datuak terhadap rencana pembangunan PLTS Terapung di Danau Singkarak?

Informasi pertama yang kami terima berasal dari kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor Camat Batipuah Selatan. Peserta yang hadir berasal dari nagari-nagari sekitar, seperti Batu Taba dan Padang Laweh, termasuk unsur lembaga adat, ulama, dan cadiak pandai. Namun, dalam adat Minangkabau berlaku prinsip bahwa tanah nan sabingkah, rumpuik nan sahalai berada di bawah kewenangan niniak mamak. Persoalannya, para niniak mamak tidak benar-benar dilibatkan sejak awal dalam proses penyampaian informasi tersebut. Akibatnya terjadi ketimpangan. Sosialisasi hanya melibatkan sebagian lembaga, sementara pihak yang memiliki otoritas adat justru tidak diberikan ruang yang layak. Karena itulah sejak awal kami menyatakan penolakan.

3. Apakah Mak Datuak mengetahui rencana pembangunan itu sebelum sosialisasi dilaksanakan?

Tidak. Kami baru mengetahui ketika kegiatan sosialisasi itu berlangsung. Memang saya hadir sebagai Ketua KAN, tetapi yang menjadi persoalan adalah cara penyampaian informasi dari PLN dan PT ACWA. Sosialisasi seharusnya hanya menjadi penyampaian informasi, bukan forum untuk mengambil persetujuan. Namun kenyataannya, berita acara yang dibuat seolah-olah menunjukkan bahwa peserta sudah menyetujui pembangunan tersebut. Tujuan kegiatan dengan isi berita acaranya berbeda. Karena itulah masyarakat yang sebelumnya hanya belum setuju akhirnya berubah menjadi menolak.

4. Bagaimana terbentuknya Forum Penolakan PLTS Terapung?

Forum itu muncul setelah kami menghubungi para Ketua KAN di seluruh kawasan Salingka Danau Singkarak. Saat itu kami mendengar bahwa masyarakat Malalo sudah

didatangi terlebih dahulu. Timbul pertanyaan mengapa hanya Malalo yang seolah-olah mendapatkan keuntungan. Masyarakat kemudian mengingat kembali pengalaman pembangunan PLTA Singkarak. Dulu ketika PLTA dibangun, masyarakat juga dijanjikan berbagai manfaat. Namun kenyataannya justru banyak sawah dan lahan masyarakat yang terendam karena naiknya permukaan air. Pengalaman itulah yang membuat masyarakat sekarang menjadi sangat sensitif terhadap setiap proyek baru di Danau Singkarak. Selain itu, kami mempertanyakan bagaimana keberlangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar danau. Sampai hari ini kami tidak melihat adanya perhatian yang serius terhadap kualitas air dan lingkungan. Penyaringan air saja tidak dilakukan dengan baik. Kami tidak menolak pembangunan, tetapi pembangunan itu harus benar-benar memberikan manfaat tanpa merugikan masyarakat. Dulu ketika PLTA dibangun, masyarakat juga dijanjikan kesejahteraan. Katanya akan ada pembinaan UMKM, bantuan pendidikan bagi anak-anak sekitar danau, bahkan pernah dijanjikan tarif listrik yang lebih murah bagi masyarakat sekitar. Namun sampai sekarang semua itu tidak pernah benar-benar terwujud. Karena pengalaman itulah masyarakat mengatakan, "Bahkan keledai saja tidak mau jatuh ke lubang yang sama dua kali."

5. Apakah penolakan ini berkaitan dengan kedatangan Andre Rosiade?

Tidak. Andre Rosiade baru datang setelah penolakan masyarakat sudah terjadi. Kemungkinan beliau baru mengetahui persoalan ini setelah muncul penolakan. Yang kami pertanyakan sebenarnya sederhana. Mengapa harus dipaksakan di Danau Singkarak, padahal kondisi danau ini sudah sangat rentan. Permasalahan kualitas air, sedimentasi, dan berbagai persoalan lingkungan lainnya saja belum selesai. Padahal ada alternatif lain seperti Danau Koto Panjang yang merupakan danau buatan sehingga dampaknya terhadap masyarakat jauh lebih kecil.

6. Bagaimana tahapan penolakan yang dilakukan masyarakat setelah sosialisasi?

Kami melakukan audiensi ke Kantor Bupati, DPRD, hingga mengirim surat kepada Gubernur Sumatera Barat. Namun Gubernur tidak pernah menemui kami. Bahkan surat yang diantarkan langsung oleh Shadiq juga tidak pernah mendapatkan balasan. Karena Danau Singkarak berada di dua kabupaten, kewenangan utama memang berada pada Pemerintah Provinsi. Oleh sebab itu kami sangat berharap Gubernur memberikan tanggapan, tetapi sampai sekarang belum ada. Akhirnya masyarakat berasumsi bahwa pemerintah provinsi lebih memprioritaskan proyek energi terbarukan daripada mendengarkan aspirasi masyarakat.

7. Bagaimana kelanjutan proyek tersebut menurut Mak Datuak?

Kami sendiri tidak mengetahui secara pasti. Mungkin pemerintah sedang melakukan kajian, tetapi kami tidak pernah mendapatkan informasi lanjutan.

8. Mengapa masyarakat Batipuah Selatan menolak pembangunan PLTS Terapung?

Karena lokasi pembangunan berada di wilayah Batipuah Selatan. Kami tidak ingin masyarakat kembali mengalami dampak seperti ketika pembangunan PLTA. Kami khawatir nanti masyarakat kembali menjadi pihak yang dirugikan. PLTA sudah memberikan pengalaman yang berat, sekarang muncul lagi PLTS. Wajar jika masyarakat merasa khawatir. Saya sendiri sudah berkeliling menemui masyarakat dan hampir semuanya menyampaikan kekhawatiran yang sama.

9. Bagaimana bentuk surat audiensi yang diajukan masyarakat?

Surat tersebut dibuat atas nama Forum Masyarakat Salingka Danau Singkarak dan ditandatangani oleh seluruh Ketua KAN serta Ketua BPRN dari nagari-nagari sekitar danau. Kami juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 yang menetapkan Danau Singkarak sebagai salah satu danau prioritas yang harus diselamatkan. Namun sampai sekarang upaya penyelamatan itu sendiri belum terlihat nyata.

10. Menurut masyarakat, proyek ini merupakan program siapa?

Informasi yang kami terima menyebutkan bahwa proyek ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bekerja sama dengan perusahaan dari Arab, yaitu PT ACWA. Karena merupakan program pemerintah pusat, masyarakat beranggapan proyek tersebut akan sulit ditolak.

11. Apakah benar ada informasi bahwa lokasi PLTS akan dipindahkan?

Kami hanya mendengar informasi itu dari YouTube. Katanya pembangunan akan dipindahkan ke Sijunjung, tetapi kami tidak pernah menerima informasi resmi. Ketika sosialisasi dilakukan, narasi yang disampaikan sama seperti saat pembangunan PLTA dulu. Katanya pembangunan ini akan menyejahterakan masyarakat, membuka ruang hijau, dan membawa manfaat ekonomi. Namun pengalaman masa lalu membuat masyarakat sulit mempercayai janji-janji tersebut.

12. Mengapa tidak membangun di Danau Maninjau?

Kalau berbicara energi, menurut saya panas bumi justru lebih baik karena potensinya lebih sesuai. Sementara Danau Singkarak memiliki fungsi ekologis yang sangat penting. Danau ini menjadi sumber mata pencaharian masyarakat dan habitat ikan bilih yang merupakan spesies endemik dan satu-satunya di dunia.

13. Apakah ada dokumen atau surat penolakan yang dapat dijadikan data penelitian?

Ada. Surat itu berada di Ketua Forum. Di dalamnya dijelaskan alasan-alasan masyarakat menolak pembangunan PLTS Terapung.

14. Apakah saat sosialisasi terdapat undangan resmi kepada para niniak mamak?

Tidak ada. Undangan dari PT Acwa hanya disampaikan kepada wali nagari, bukan kepada niniak mamak. Padahal masyarakat Salingka Danau memiliki banyak tradisi adat seperti turun mandi dan balimau yang sangat berkaitan dengan keberadaan Danau Singkarak. Karena itu masyarakat merasa pemerintah seolah-olah hanya berusaha membujuk masyarakat agar menerima proyek tersebut, bukan benar-benar melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.

WAWANCARA D

1. apa sebagai tim apo bg?
Tim pembangkit fokusnyo lebih ke PLTU masuk pembangkit cuman beda divisi. Jadikan pln ko divisi banyaj ko, kalau distribusi berhubungan langsung jo masyarakat kalau trasminsi penyalur dari pembangkit ka distribusi tower sutet Kalau sidonk tiang2 listrik tu ma, Kalau abg pembangkit, kawan abg tadi ko nyo Pusharlis proyek kantua nyo di banduang. Aa itu masalahnyo waktu pas plts di mentawai bangun nyo samo inyo tu ma pai. Kalau indak salah di pulau siberut.
Kalau emng pernah cobo se caliak itu tu ma, Soalnya yang iko ko, la bara kali lo sosialisasi. Samo andre rosyade gai tibo ma. Berarti dari yang bg tangkok, dari kawan bg kalau iko untuak program pln, andre rosyade indak akan terlibat do. Soalnya di mentawai indak pakai itu do. Brarti ko program nyo pemerintah, otomatis nyo harus laporan dulu dan harus di sampaikan ke tim pln, brarti lun duduk ko lai ko. Indonesia Power ko anaknya PLN soalnya narasi di media, dari mentei psdm di mandatkan ke pln . Yang menolak tu kan Batipuhah selatan 100 tahun kan gadang tu, oalah ketek dek masyarakat. Soalnya beko kalau dibangun plts tu nyo kan solar screen kan, jadi payah. Pln kan ado tim media nyo kan bg, Sabanyo itu kalau mencari informasi monde tu ma, nyo payah soalnya ko go kan rahasia kan . Jadi payah untuk manggali info ka internal perusahaan.

WAWANCARA N

1. Bisa wak tanyo plts gagal di danau Singkarak ado dapek info bg
Indak ado dapek info do, lun dapek info lai do. Plts yabg mentawai Pusharlis kan, kalau danau Singkarak ko bukan nyo samo nak?. kan itu planning nyo pemerintah tu ma
2. Brarti bukan canangan pln ko nak bang?

bukan, gubernur bantuak nyo. Karno ado pencetusnyo mendiriaka plts terapung mode cirata kan, kalau emng nyo jadi pasti la masuak kabanyo kan. Apolai kalau pemerintah emng ka Pusharlis. Masih planning bantuak nyo ma. Pemerintah daerah iyo lo tu Patang ko kabanyo cino ma, nyo manggandeng investornyo langsung kan. A yolah mokasi banyak dinul.

WAWANCARA BY

1. Izin buya ingin menanyakan tentang proyek plts danau Singkarak, bagaimana kelanjutannya?

Ini lagi kita bahas, itu juga ranahnya pemerintah daerah.

WAWANCARA MW

1. Sikap Resmi Bagaimana posisi pemerintah daerah terhadap rencana pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak?

2019 bersurat perdana Atas nama bumh Indonesia namonyo urang minta informasi tarimo se nyo. Jadi dari Indonesia Power dulu baru cari investor dapek pt ajcwa ko. Barulah didirikan perusahaan barunya pt ACWA power danau Singkarak

2. Apakah pemerintah daerah telah memberikan persetujuan terhadap rencana pembangunan tersebut?

Tergabtubg masyarakat kalau dari pemda, makonyo disilahkan lah untuk sosialisasi ka masyarakat tapi ternyata la di daerah itu la kendalanya kan, dipertanyakan dari masyarakat. Aslinyi kan 3 nagari, malalo sumpu. munculah komplain dari nelayan, masyarakat dkk karna mancaliak dari sketsa yang nyo buek tu

3. Bagaimana proses komunikasi antara pemerintah pusat, perusahaan, dan pemerintah daerah terkait proyek ini?

Pusat tu hanya memberikan mandatory ke bawah se nyo, sampai ka tingkat konflik nyo indak tau baa pemikiran masyarakat ko do, kok dapek kan jan dari investor bacarito dulu kan. Dari pemerintah awak dlu nan manyampaikan ide gagasan soalnya kan urang

awak ko monde tu, kok di agia investor langsung lo tu babeda pangadanyo. Sekali sosialisasi yang menghadiri staf lo nyo
4. Apakah pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat?
Sudah cuman kurang optimal karna dibalik traumatis ini pasti orng luar jadi masalah lagi, kalau pemerintah daerah kan hanya bisa membantu penyqluran informasi tidak bisa memutuskan juga apalagi menyangkut masyarat. Yo kalau dari masyarakat kan kalau dapek kan ado dapek timba baliak lah dari sosialisasi baik itu csr atau apolah kan
5. Bagaimana pemerintah merespons penolakan atau kekhawatiran masyarakat? Jadi dikumpulkan lah oleh pak bupati dari audiensi permintaan masyarakat.
Bahwasanya ini PSN terima lah proyek strategis nasional ini dulu beko masalah PLTA dan perhatian yang kurang. Kita masukan beko. Jadi tarimo dulu, umpamo apak jo anakkan tarimo dulu baru beko di minta baliak terkait aspek2 tu, beko kito perjuangkan
6. Hambatan Komunikasi: Apa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam komunikasi proyek ini?
Ya ketika sosialisasi kan ngk semua bisa hadir juga yang akhirnya banyak narasi2 yang memantik kadang pertanyaan nya kurang tepat, seperti kena sentrum dkk padahal aslinya itulah tujuan sosialisasi nya. Memang keras penolakan masyarakat dari masuk dan aspek mana pun berpikinya sudah tulak sudah Asal jangan salah masuk ke niniak mamak dan masyarakat dari polanya.
7. Bagaimana menurut pemerintah model komunikasi pembangunan yang ideal?
Tetap lewat niniak mamak baliak lu. Apolai ko dek investornyo langsung ko e, kok dapat pemerintah daerah yn dulu yang sosialisasi cari tampek dan lain2 nyo klu iko alah duduak baru dibaok investor kan . Jadi ado pendakatsn emosional nya ko.

WAWANCARA DT.K

1. bagaimana masuk sosialisasi awal ke bapak
--

Awal masuknyo dulu ka pak wali nagari padang laweh, jadi sobok la dek kudian kami taukan, jadi kami diskusikan monde ko kaba nan dapek. Jadi ka wak tarimo atau ka kito tulak. Jadi ketiko la kito etong kironya lebih banyak mudaraiknyo dari pado untung nyo. Kok investorkan nyo pasti untungkan. Ciek mambantangan se jadi energi listrik kan. Bagi awak nagari sakuliliang musibah nan ka dapeknyo Nan jaleh danau akan rutak, biota ikan di danau wak akan ado dampaknya, la wak tanyo lo ka nan paham ado urang awak di jakarta, Nan partamo iko kalau proyek jangka pendek bisa la kan, pi iko kok menguntungkan pasti batambahnyo baliak,

“Ndak do urang makan lamak ndak batambah do” yo kan. Logiganyo la ndak ka mungkin di permukaan danau kanan disitu tampek masyarakat mencari ikan nyo tutuik kan, jadi untuang nyo bagi masyarakat awak ndak sebanding jo pengorbanan nyo do. Awak yakin kok la tabantang dan menguntungkan sampai kiamat ndak ka di bangkiknyo do. Pernah ambo dakek turbin nan di pulau maota jo tim PLTA tu kecekyo ndak kurang 1 miliar per hari . Tapi nan ka awak ndak do do. Minimal kan pendidikan la, kesehatan, lingkungan. Kini jan kan la itu musajik awak si sampiang nyo ndak kebagian do Jadi dulu tu urang sekitar kan ba sawah tu, samanjak ado PLTA ko aie nyo naik tarandam la salingga pulau sawah2 urang ko. Jadi bukan malalo salingka danau Singkarak tu anti investasi, ndak monde do. Tapi awak la marasoii kan, tambah ikan Bilih ko lai kan.

PLTA tu paliang parah dampaknya, nyo kan aie kalua tu di dakek jembatan tu ma, kini nyo tinggikan aie permukaan untuk manjago suply aie, jadi apo nan tajadi sagalo sedimen aie tu mengendapnyo ka bawah jadinya. Dulu waktu apak sd la, aie tu janiah nampak samai ka bawah, jadi la banyak . dulu pernah li pak sampaian mungkin danau ko ndak do beko lai, endapan yang manumpuak tu beko nyo naik tarui kan, tu lumuik se isi lai. Tampah plts ko beko dibangun kan tambah hancua ekonomi masyarakat sakaliaang lai tu, tu pikian la dek plta lai. Bayia pajak tu kan ka pemerinyah sumbar larinyo, tapi nan tibo ka masyarakat malalo lai kan, Sabalum rayo ado lo waktu tu, jadi kami diminta datang lu kan, tu kami sampaikanlah tapi sabalum itu ambo minta sorang dari masyarakat panyampaian kan. Datang lo byo ka babarapo nagari ntuak mamastian lai bulek atau indak suaro masyarakat ko manolak juo. Pas ramdahan nyo datang nyo la batanyo jadi baa sosialisasi kami bia pas lai kecekyo, yo tamui niniak mamak, pas dtamui nyo kami yo

samo jua, tpi yo kami balandsan manolak bukan asal manolak kami la belajar banyak dan la marasoan dampak nan luas lo. Jadi kato ambo, kalau d teruskan urusan ini bapak akan boros jo nyo, alun duit habis waktu dan banyak yang terbuang baik nyari tempat baru pak, jadi lebih efektif, atau di darat. Tapi memang tak segratis ini bapak, yang tinggal bentang. Kami bukan orang anarkis yang anti pemerintah tapi kami melindungi masyarakat kami.

2. bagaimana dengan pola komunikasi yang dilakukan pemerintah

Menuruik awak itu kurang adil rasonyo, pemerintah pusat ko ndak pernah sekalipun turun andil buya tu kami surati minta kami waktu untuk audiensi, kalau ado maslah ko andaknyo hadapi. Salah satunyo sosialisasi trakir tu kan, Luçu lo waktu ma antaan surek ka kantua gubernur tu kami tibo di tanyo nyo,

Dari ma pak?

Kami dari salingka danau Singkarak pak, tu a kecek nyo

Aaa baa pak la setuju?? Tu setuju manolak kami nyooo berartinyo la tau ko cuman ndak ado dindakannyo do Tu ado lo diago jo nasi bungkuai kami, kami sampaikan jo maaf kami ndak bisa diumbuak jo nasi sakotak jo amplop nan ndak sabaratu tapi ibo ka masyarakat kami. Nan punyo nagari ko niniak mamak kan kalau di minang ko, jadi bantuak yang wak sampain ka investor tu, jangan di usik lah masyarakat kami terutama yang di usik adalah mata pencarian masyarakat makanya penolakan nya kuat. Kalau ini pak belanda dlu menjajah indonesia niniak mamak kami sudah ada di sni dulu. Kami menolak adalah karna kami melindungi Masyarakat kami. Sampai situ lah pulang nyo lai

Tambah ciek lai dari pemerintah pusat kalau nyo jantan ya sampaikan, iko sampai kini audiensi kami ndk di jawek e do.

3. ini data banyak tanda tangan nya pak, diminta 1 satu kah?

Jadi kan di kumpulkan dek wak kan, jadi tanyo kalau iyo ka ma nolak tando tangan la.

4. andre rosyade bagaimana kedatangan nya

Jadi nyo dianggap punyo power tu di baok la dek urang ko kan, kiro nyo pas dilokasi kanai tolak bana la kan, tu nyo lai manangah se nyo. La samo kito danga masyarakat manolak jadi PLN kalau bisa coba kita cari alternatif lain nantinya lai monde tu kecek nyo. Kabanyo di beberapa bumi pun proyek ko ditolak lu di singgalang kanai tolak lo, ndak tau lah kan apakah proyek nyo bamasalah ntah berbahaya natah baa kan,

5. jadi menurut bapak apa komunikasi yang paling realistis untuk digunakan dikasus ini.

Nan jaleh di danau contohnyo, kalau ndak seimbang dampak jo apo nan di dapekkan pasti ndak dapek solusinyo kan, ciek lai urang awak ko baradaik ba taratik emang pendekatan nyo mungkin harus pas dlu bagaimana cara pemahaman masyarakat awak tu.

WAWANCARA HY

1. jadi bagaimana pesan sosialisasi ini direncanakan

Sabananyo nan masalah tu tuntutan masyarakat sudah tidak bisa disosialisasikan lagi karena permintaan masyarakat dtidak bisa dipenuhi dan dijawab secara riset oleh indoneasi power. Pernah saya coba bertanya berapa sebenarnya buget paling akhir dalam negosiasi yang bisa di usahakan pada masyarakat katanya 150jt itu sudah tidak ada tambahan lagi, atau apakah bisa kita buat per termin sistemnya. Jadi kita bisa melihat perkembangan dan efektifitas nya juga. Tidak bisa jawabnya. Karna kan kita negosiasi dengan masyarakat tentu wak harus tau batasanyo kan dan wak bisa berjas jelas dengan masyarakat untuk jaminan nyo. Jangan sampai masyarakat tu memandang kita sebagai penyambung lidah pak.

2. bagaimana kita bisa capai komunikasi partisipatif ?

Nah itu dia kalau mau cepat ya lewat media menurut saya rahman buat aja konten kalau mau diskusi terbuka tentang ini itu bisa lebih cepat. Kejar terus pakai konten itu cara mudah negosiasi.

3. bagaimana komunikasi yang efektif menurut anda?

Ya sumatra barat ini tidak bisa disamakan dengan berbagai daerah di indonesia seperti sulawesi kalimantan itu jauh berbeda dengan indonesia yang dia punya pola yang sendiri salah satunya ya niniak mamak sama masyarakat tadi.

WAWANCARA AB

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap rencana pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak?

Susah kalau menurut saya sebenarnya merugikan masyarakat karna banyak sebenarnya aspek yang menguntungkan masyarakat, awalnya 300 juta untuk nagari selingkar danau yang mana ada 13 nagari disana jadi keuntungan masing2 nagari yang masih belum bisa diterima adalah hanya sekitar 25 juta setahun, dan kasus ini sudah sulit untuk diluruskan karna lokasi di tanah konflik daerah dan juga aturan nanti setelah itu bisa dapat keuntungan juga, cuman ya masyarakat lokal punya kajian sendiri yang dan masalah utamanya menurut saya kasusnya udah masuk angin. Sudah terlalu banyak yang ikut campur dan menanam kepentingan juga di dalam nya.

2. Apakah isu pembangunan ini pernah dibahas dalam forum legislatif

Sudah susah untuk dikaji karna isi ini sudah salah dari cara masuknya hingga pasti harus melakukan pendekatan yang berbeda sebenarnya bisa saja karena kan itu hak pemerintah juga dengan lahan yang ada. Cuman selalu banyak aspek dan memang butuh komunikasi yang kompleks hingga menemukan titik tengah

3. Bagaimana respons masyarakat yang Anda temui terkait proyek ini?

Saya bertanya ke pak wali kenapa menolak dan juga beberapa masyarakat yang sebenarnya ini adalah masalah negosiasi antara Indonesia Power dan masyarakat, masyarakat tidak melihat celah keuntungan mungkin karna belum mengkaji terlalu jauh terutama alur hukum dan lain-lain nya.

4. Bagaimana seharusnya komunikasi pembangunan dilakukan dalam proyek seperti ini?

Untuk sekarang harusnya kita bisanya komunikasi bertahap memahami siapa yang layak dikomunikasikan karna ada kepala di setiap penolakanya , cuman yang namanya waktu ya itu tergantung ke seberapa optimal komunikasi ini diusahakan, susah nya sudah pasti pertama daerahnya saja sudah daerah konflik

5. Adakah contoh di mana masyarakat justru menolak kehadiran politikus dalam acara adat karena dianggap tidak pantas atau tidak tulus?"

Undangan itu masuk dalam kasus ini juga cuman ya saya sudah tau dari awal mengenai penolakan nya dan tau hasilnya juga akan sama, jadi cukup rumit mencari titik tengah masalahnya, ditambah sebenarnya PLN cukup berusaha dan tuntutan masyarakat itu sebenarnya juga sudah diberikan CSR PLN tapi ya PLN tidak tepat saja dalam memberi CSR nya ke siapa hingga itu bisa dimanfaatkan oleh beberapa pihak penerima, gampang nya mungkin ya tinggal berikan data CSR yang dikeluarkan oleh siapa nya.

WAWANCARA AD

1. Bagaimana latar belakang pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak?

Mulai ide proyek plts ini sebenarnya waktu mempersiapkan G20 yang dibali kalau tidak salah ya termasuk sumatra barat dalam energi baru terbarukan. Jadi isi PLTS di sumatra barat langsung di launching awalnya masyarakat menerima semua, dari tahun 2020 awal kita sudah memulai studi. Saya sendiri belum bergabung di indonesiaa pwer ya tapi saya dari perusahaan arab nya, dari ACWA power yang bertanggung jawab tentang proyek ini Jadi kan proyek ini ada bidding atau apa namanya lealng jadi Indonesia Power ini yang dapat tendernya proyek PLTS Singkarak. Kalau dari sisi PLN ada proyek yang kerja sama ada proyek minor equit jadi investorny itu 49% Indonesia Power 51% Iya, Rahman. Sebenarnya untuk proyek ini mulai muncul permukaan memang G20 ya di Bali. Kita launching pertama kali.

Energi ini baru, kan. Termasuk misi penerbangan. Sebenarnya banyak problem EBT di Indonesia. Misalnya satu yang diangkat isu dan dari Arab juga datang. Jadi isu di PLTS untuk pembangunan di Sumatera Barat itu langsung di launching. Jadi awalnya masyarakat dengan isu itu mereka menerima. Bukan kami, maksudnya PLN dan juga

mitranya yang akan menjadi investor yang dalam proyek ini sudah melakukan studi, sebenarnya mulai dari studi dari tahun 2020 awal. Tapi puncak untuk intens kemasyarakatannya itu mulai di 2022. Tapi kalau saya sendiri, saya belum bergabung di Indonesia Power ya. Jadi kalau saya bergabung itu di tahun 2024. Saya bergabung di perusahaan Arabnya sebenarnya. Jadi historisnya kalau saya sendiri di perusahaan Arabnya itu Acewa Power ya.

2024 saya bergabung di situ. Dan kebetulan mengurusin proyek PLTS Enggara. Bermitra dengan PLN Indonesia Power dari pusat. Nah semenjak itu di 2022 sebenarnya awal pengenalannya sudah dilakukan secara stakeholder. Baik itu dari tingkat yang paling tinggi ya, dari gubernur. Jadi hirarkinya kita sudah melakukan semacam sosialisasi tentang perencanaan proyek kepada baik itu gubernur, bupati tenaga data, kecamatan, dan juga termasuk grassroots masyarakat negari. Nah di situ kita undang untuk melakukan hanya sosialisasi rencana pembangunan proyek itu secara umum ya menyeluruh dilakukan waktu itu di kantor camat Batipuh. Camat Batipuh waktu itu diundang semuanya karena yang terdampak itu dua kecamatan. Yang untuk penempatan PLTS-nya, Batipuh Selatan dan Batipuh.

Batipuh itu masuknya bumur tanjung kalau nggak salah ada nagari. Kalau Batipuh Selatan itu kita akomodir tiga nagari Padanglaweh Malalu, Sumpur, dan Batu Tapa. Nah kemudian hal itu berjalan sosialisasi dengan stakeholder kecamatan kemudian lanjut ke tingkat masyarakat termasuk nelayan, petani, bundo kandung, nenek mama ya kalau nggak salah. Nenek mama itu kan ya? Dan juga beberapa masyarakat terdampak kelompok-kelompok kecil. Termasuk pemuda karantarna. Nah waktu itu sudah berjalan di 2022 dan lahannya sudah setuju floating, kita sebut floating panel ya, floating panel itu kayak panel PLTS yang akan ditaruh itu penempatan dan masyarakat sudah setuju awalnya. Dan juga untuk perkantoran, switchchart. Switchchart itu kayak areal perkantoran dan juga kayak pembangkitnya.

Nah pembangkitnya itu terletak di Sumpur awalnya, di nagari Sumpur. Nah ketika masuk di 2023, tiba-tiba keluar surat, eh bukan keluar, tiba-tiba BPN kasih kami surat kayak pemberitahuan bahwa areal switchchart itu areal konflik antara Sumpur dan Padanglaweh melalui. Nah dan itu terletak di batas wilayah adat mereka. Nah itu konflik

sudah berlangsung lama katanya. Jadi surat dari BPN itu menyatakan di areal tersebut tidak boleh dikeluarkan sertifikat. Nah kita kan untuk mengakuisisi lahan itu kan harus dipindahkan ke pemilikannya, dari masyarakat ke PLN. Nah waktu itu nggak bisa, nah disitu muncul awalnya. Kemudian kita komunikasikan dengan wali negari dan wali negari mengiakan. Nah kita juga kenapa nggak dari awal dibilang disitu ada konflik.

Nah mereka selama ini seperti menutupi tapi lalu berjalannya 2023 itu semakin banyak ya penolakan. Terutama posisi panel kita dan lokasi pembangkit perkantoran kita terletak di antara perbatasan 2 negari Padanglaweh dan Sumpur. Itu kalau posisinya di dekat Hotel Sumpur ya di atasnya itu. Kalau BPN udah pernah disitu kan? Emang lahan konflik itu yang dijelasin ya kan? Iya. Dan masyarakat juga meminta sosialisasi ulang waktu itu. Nah karena mereka ingin posisi panel itu dijelaskan kembali dan bisa nggak digeser-geser untuk aksesibilitas masyarakat dan juga tidak melewati antara 2 negari tersebut.

Jadi mereka minta sosialisasi ulang di tahun 2024 semuanya. Itu full sosialisasi di tahun 2024 kepada masyarakat Batu Taba, Sumpur, Padanglaweh, Malalo. Dan itu tidak sekali dua kali ramahan. Jadi coba saya lihat. Ini saya masih punya cerita dulu waktu ini. Jadi ini beberapa yang kita lakukan sosialisasi pertama kali di Sumpur. Terkait dengan Sumpur itu terdampaknya pipi floating. Ini kayak panel suriannya. Light-on itu kayak untuk lahan sementara untuk naruh barang-barang kita. Jadi light-on. Nah mereka terdampak dua ini. Dan kita juga sudah mengundang beberapa wali negari, BPRN.

Kalau di situ BPRN ya Badan Perwakilan Rakyat Negari kalau nggak salah BPRN itu. Kemudian ada kayak ketuakannya, ada kayak publik figurnya di situ. Terus ada juga orang yang cukup kaya kalau kenal-kenal Haji Rusti. Nah itu orang yang berpengaruh juga di situ. Kemudian beberapa kepala jorong. Nah kita mengundang untuk melakukan sosialisasi ulang terkait dengan ini.

Batas-batas antar negari, konflik yang selama ini mereka tidak terbuka kepada kita. Terus aktivitas nelayan. Nah dan akhirnya di 2024 ini, semua negari yang kita lakukan sosialisasi yang terdampak termasuk warang lawe malalu, mereka juga terdampak floating juga. Nah kemudian batu tabak, mereka menolak pembangunan ini akhirnya.

Dengan alasan pertama, terkait ikan bilik. Nah kemudian ada beberapa aktivitas wisata di situ.

Kemudian yang paling konflik antar dua negari itu, Sumpur dan Perang Laweh. Karena konflik batas adat ya kalau nggak salah saya kan di situ. Nah di situlah memuncaknya perolakan-perolakan masyarakat. Nah kemudian sosialisasi itu terus berlanjut ya. Kita coba lihat beberapa kalau orang aman ingin lihat beberapa sosialisasi yang kita lakukan itu. Ini beberapa sosialisasi yang kita lakukan semenjak tahun 2024 itu. Kegiatan dengan gubernur terkait pembangunan energi terbarukan di Singkarak ya. Kita lakukan sosialisasi ini di tingkatnya provinsi. Kemudian beralih ke tingkat kabupaten/datar. Ini audiensi juga dengan Pak Bupati, itu masih Pak Eka dulu. Kemudian lanjut ke sosialisasi dengan masyarakat negari. Negari masyarakat utama ada yang 13 April. Kemudian di negari Sumpur ada 8 Juni. Ini aktivitas-aktivitas kita sosialisasi memperkenalkannya.

Ini belum sosialisasi akhbarnya. Kemudian ini kegiatan sosialisasi publik ya di tingkat kecamatan. Kita mengundang beberapa negari, beberapa nelayan, tokoh masyarakat. Di situ kita lakukan seperti rancangan jawab, diskusi terkait dengan rencana pembangunan PLTS. Dan ini beberapa hal-hal yang administrasi seperti ya. Ini bukti mereka hadir itu. Kemudian ini kecamatan Batipuh ya. Batipuh ini kan terdampak, kecamatan Batipuh kebanyakan terdampak untuk transmisi lain, artinya kayak tower-tower listriknya itu. Kita juga melakukan sosialisasi terhadap beberapa desa yang terdampak. Kemudian ini sosialisasi intent khusus per negari. Ini di negari Padang laweh. Ini sosialisasi intent khusus untuk negari Padang laweh. Semua stakeholder-nya kita undang. Kemudian ini yang di Batu Taba pada 7 Maret 2024. Sebenarnya banyak hal yang disampaikan masyarakat. Ini yang di beberapa daerah yang terdampak transmisi ya. Ini yang di Paninjawan, Penyalayan, Negari Sumpur. Nah ini juga kita melakukan seperti, bukan CSR, tapi seperti bantuan sosial pada saat bulan puasa.

Jadi setiap bulan puasa kami, Ajoa Power dan PLN melakukan bantuan sosial kepada masyarakat yang ada di tiga negari terutama yang terdampak ya, Paranglawe dan Sumpur. Kita melakukan seperti bantuan. Kemudian ini negari Sumpur. Ini yang di Bungu Tanjung. Ini yang di Batu Taba. Nah kemudian ada juga seperti bantuan sosial terhadap

beberapa masyarakat yang berprestasi ya, anak-anaknya. Nah kemudian ini sosialisasi terakhir kita sebenarnya di Negari Sumpur tanggal 3 Juli 2024. Bahwa di dalam sosialisasi terakhir ini kita ingin masyarakat Sumpur memberikan pernyataan. Pernyataan bahwa kita dapat proses lebih lanjut untuk melakukan pembangunan PLTS di Kecamatan Batipuh Selatan.

Terutama di Negari Sumpur. Nah pada awalnya di BA ini kita bisa melihat masyarakat itu sebenarnya menyetujui untuk proses lebih lanjut terkait pembangunan ini. Tapi ada beberapa hal yang menjadi konser masyarakat termasuk nelayan, area tangkap ikan, kemudian juga area pariwisata. Mereka harus mempertimbangkan dengan layout solar PV kita yang ada di daerah mereka. Kemudian ini dengan Pak Camat, dulu ini sama Pak Ngasih, Pak Ujang, Pak Odensi. Ini dengan Batu Taba, ini dengan yang di bawah ini.

Dan ini dengan Komunitas Masyarakat Nelayan Jaring Angkat yang bagan. Ini di Batu Taba mereka yang terdampak seluruh pemilik bagan kita undang untuk melakukan negosiasi. Nah mereka setuju. Mereka pengen kalau misalkan harus digeser bagannya, mereka enggak apa-apa. Jadi sudah ada kesepakatan di sini. Tetapi yang menolak di Batu Taba itu sebenarnya dari masyarakat nelayan tradisional. Mereka tidak setuju sebenarnya. Nah ini dengan BPRN-nya, ini dengan Masyarakat Malalu. Untuk sosialisasi sebenarnya kita sudah indense dari 2023 sampai 2024. Dan puncaknya itu sosialisasi akhbarnya di 2025 tanggal 15 Januari. Itu yang didatangi oleh Aguntat DPR RI Andre rosiade, gubernur, kementerian, PLN, termasuk dengan bupati, dan semua stakeholder. Nah di situ puncaknya mereka menyatakan penolakan sebenarnya.

karena kita berkewajiban untuk melaporkan setiap bulan progres terkepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi kita laporan itu setiap bulan. Nah inilah contoh penolakan-penolakan yang dilakukan masyarakat ya. Mulai dari tahun 2024 akhir, waktu BKDA memang benar, ini waktu BKDA. Ini waktu sosialisasi akbar ini yang ini. Jadi kita melakukan sosialisasi akbar itu di SMP, di Bandung Laweh Malalu ada sebuah SMP. Nah waktu kita melakukan sosialisasi akbar itu sepagi-pagi udah dipasang sama masyarakat. Nah ini yang di Batu Taba, mereka masang sepagi-pagi. Penolakan PLTS, ini di tahun 2024 juga. Nah dan ini beberapa pernyataan sikap mereka untuk menolak PLTS. Ini dari negara Batu Taba menyatakan menolak PLTS. Ini kan

penolakan PLTS di negara Batu Taba. Mereka udah menyampaikan surat juga di tahun 2024. Kemudian ini yang dari BPKDS Badan Badan Pengawasan Danau Singkarak gitu lah.

Seperti komunitas mungkin coba cari. Mereka ada komunitas tentang Badan Peduli Danau Singkarak, BPKDS namanya. Nah mereka juga dari awal sudah menyatakan menolak. Kemudian dari forum Anak Negeri Batipuh Selatan, nah mereka juga sudah menyatakan penolakan terhadap PLTS. Kemudian satu lagi, ini memang BPKDS. Nah mungkin di situ. Jadi penolakan-penolakan bermunculan dan sosialisasi terakhir kita di 2025 Januari. Setelah itu kita nggak ada komunikasi lagi. Karena secara sikap antara PLN dan pemerintah juga setelah sosialisasi akbar di tanggal 15 Januari untuk menghentikan sementara progres di PLTS Singkarak.

2. Apa tujuan utama proyek ini dalam pengembangan energi nasional?

Psn sebenarnya awalnya dari proje UPN nya pln ya itu rancangan tenaga listrik jalan panjang PLN. PLTS itu kuota tersebar sumatra nama projectnya. Dan kita bagi tim akhiyan terpilih danau paling cocok itu Singkarak. PSN itu di bentuk tahun 2022 sebenarnya jadi psn, pertama ini kuota pertama dan nilai investasi nya cukup tinggi. ACWA power ini BUMN nya arab saudi sebenarnya.

3. Bagaimana strategi komunikasi perusahaan dalam menyampaikan proyek kepada publik?

Kami sudah usahakan yang terbaik, dimulai dari berizin menyampaikan surat dari pemerintah pusat, kepada gubernur, bupati tanah datar pemerintah daerah, pemerintah kecamatan hingga kantor nagari dan ketika itu diundang seluruh masyarakat, karna yang terlibat 2 kecamatan plotting ny, Batipuh selatan dan Batipuh, kalau Batipuh selatan kita akomodir 3 nagari termasuk padang lawehmalalo, batu taba sama sumpur. Kita sosialisasi setelah itu termasuk nelayan petani, niniak mamak, pemuda dan masyarakat lainnya kita undang semua, berjalan di tahun 2022 kita sebut plotting panel masyarakat sudah setuju pada awalnya. Tahun 2023 tiba-tiba BPN kasih kami surat bahwa area switchchart itu merupakan daerah konflik antar sumpur dan padang laweh malalo. Nah itu konflik sudah berlaku lama. Disitu suratnya juga tanah nya tidak bisa dibuat sertifikat.

Dan mereka seperti menutupi kalau lahan itu ada konflik karna tidak dari awal disampaikan ya terutama posisi panel kita dan kantor kita diperbatasan nya. Dan masyarakat meminta sosialisasi ulang ketika itu, mereka ingin posisi panel itu dipindahkan lagi.
Ditahun 2024 waktu itu full sosialisasi batu taba, padang laweh malalo dan sumpur. Itu juga tidak 1x 2x rahman, ini sudah berapa kali ya di sumpur itu ini kaya panel surya nya. Mereka terdampak 2 ini. Dan kita sudah undang nya BPRN masyarakat, tokoh ada masyarakat dan semuanya kita undang lah. Akhirnya di 2024 ini semuanya terdampak mereka tiba-tiba menolok, terutama penolakannya adalah, masalah ikan Bilih, ada aktifitas pariwisata disitu dan juga masalah konflik medan itu yang memuncuknya. Disitulah mulai nya dan kami tetap berlanjut.
Nah ini gambar2 nya. Ini semnejak tahun2024 itu dari kegiatan dari gubernur, dari tingkat provinsi kemudian lanjut bupati hingga paling bawah hingga masyarakat. Ini beberapa administrasinya. Kecamatan Batipuh lebih ke transmisi line yang terdampak ya. Banyak hal sebenarnya yang disampaikan di daerah terdampak transmisi ya. Kami juga lakukan seperti bantuan sosial di bulan puasa kemarin, Indonesia Power dan ACWA power memberikan bantuan gitu. Ini juga ada ke anak ber prestasi ya.
Nah ini sosialisasi trakir kita sebenarnya di sumpur 3 juli 2024 kita ingin sumpur memberikan pernyataan menerima PLST. di awal masyarakat itu menyetujui tapi ada beberapa konsenya tentang layout solar panel kita. Seluruh pemilik bagan juga kita undang bahkan mereka setuju bagan nya di geser tidak masalah. Yang menolak itu sebenarnya masyarakat tradisionalnya. Untuk sosialisai kita udah intnes sebanrnya 2023-2024 dan punyaanya di 2025 15 januari. Itu yang kedatangan anggota DPRRI andre rosyade, gubernur sen=muanya lah. Mereka menyatakan penolakan cukup keras la.
4. Apakah telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat lokal?
Tentu saja kami dari diskusi kepada masyarakat manapun yang diarahkan dari nagari pemerintah daerah telah kami sampaikan di awal masuk 2020 aman saja baru 2023 baru ramai dan itu mungkin juga faktor masa politik waktu sosialisasi akbar itu pagi-pagi spanduk-spanduk sudah dinaikan masyarakat. Mereka akan sampaikan juga surat

penolakanya di tahun 2024. Mereka juga ada komunitas badan peduli danau Singkarak namanya. Kemudian forum anak nagari Batipuh selatan juga. Trakir 15 januari itu kita ngk ada komunikasi lagi. Jadi semua stakeholder menghentikan sementara dulu proyek PLTS ini. Karna kita undang semua dan kita mintan masing2 nagari menyamoakan itu.

Penolakan tentang PLTA itu juga kami bawa tim BRINN juga dalam menjelaskan risertnya hasil brin itu adalah berkurangnya karna boom ikan dan pengambilan yang tidak berhenti, tapi masyarakat tetap menolak karna katanya faktor PLTA itu merusak habitatnya. Kemudian masalah sampah yang di batang ombilin yang ditutup untuk menjaga debit air, nah itu di tutup, jadi kan sampah2 ini dari sumani dari batupuah itu masuk sampahnya. Jadi asumsinya bila PLTA memberikan kontribusi buruk pada kami ini kami yakin PLTS juga sama. Amdal juga udah jadi tapi memang oublish mash. Forum penolakan pemuda

5. Bagaimana perusahaan merespons penolakan masyarakat?

Kami bahkan memberikan bantuan hingga menanggapi kemauan masyarakat kita sudah menawarkan 300 juga untuk daerah terdampak, kita juga menyesuaikan pembangunan solar PV kita dari nelayan, tapi mereka tetap menolak terutama dari malalo tigo jurai, batu tapa dan sumpur juga menolak yang menerima itu hanya bungo tajo. tapi tidak mungkin juga semuanya kami berikan apalagi proyek ini belum dimulai juga.

Sebenrnya sudah di bantu PT IATS (indonesia acwha tenanga Singkarak) itu bentuk kolaborasi tapi trukralnya belum terbentuk. Berjalan waktu. 2025 saya pindah ke PLN setelah sosialisasi 2025 di hold jadi saya pindah ke Indonesia Power. Kita dari awal hanya penyampai lisan kemudian spanduk kemudian ke bersurat secara resmi, kalau dari kami menerima karna dilihat juga dari PSN ini juga banyak yang bermasalah jadi dari kami kalau mau komunikasi kami sangat terbuka. Proyek ini harus terbangun 2026 tapi kita ngk tau sampai kapan prosesnya, sebenarnya aggrement dengan perusahaann arab ini kita sudah keluar dan susah untuk mudur lagi. Kita kan sudah studi untuk danau ya, karna PLTS rasia yang paling baguss itu Singkarak dari Batipuhah selatan, dan melihat cuaca juga.

6. Apa upaya perusahaan untuk membangun komunikasi yang lebih dialogis dengan masyarakat?
Kami usahakan semuanya layoutnya juga terlihat berjarak2 ya agar tidak mengganggu aktifitas masyarakat. Tapi tetap isunya merek tidak ingin di ganggu sebenarnya. Kita juga bawa 2 orang dalam format nagari. Walauoun mereka menolak tapi dalam menyusun nya kita harus rapih, kalau menanya kontribusi nya pemerintah daerah dari posisi saya sekarang saya ngk bisa sampaikan, nah kalau diliat sebearnya menarik ditanyakan ke wali nagari kenapa menolak gitu.
7. Bagaimana menurut perusahaan komunikasi pembangunan yang ideal?
Sejauh ini kami belum menemukan lagi komunikasi yang tepat, kami sudah gunakan semua teknik. Tapi memang kalau saya kasih tau data pemegang dana CSR kami dari permasalahan PLSA dan tanggung jawabnya mungkin tidak baik juga untuk masyarakat malah bisa jadikan pertikaian masyarakat lokal nanti . memang adalah salah mungkin dalam komunikasi itu, karna kita sudah ajak semua. Dan kami tidak tau harus komunikasi bagaimana lagi.
8. Melihat konflik yang sudah terjadi apakah PLTS danau Singkarak ini akan dilanjutkan?
Kalau dalam pindah sijnjung itu juga masih wacana yang dan ri PT Acwa dan PLN itu sudah bekerja sama.kita masalahnya juga sudah samapai PPA nya yang harus lengkap administrasi. Jadi ini menjadi kendala juga apalgi harus menguba bh banyak hal karna sudahtanda tangan nya di Singkarak. Kalau di pindah akan banyak untuk dilakukan dan dampaknya besar juga. Sampai sekrang masih ada di RUPTL maknanya tidak akan di hentikan ya, akan berlanjut tapi sampai sekarang saya tidak tau ini bagaimna nanti nya dan kapan dimulainya
9. Bagaimana dukungan untuk konflik PLTS dari pemerintah daerah dan pusat
Karna ini PSN jadi merek juga sudah mendukung. Perntayaan sejauh in cuman yang seperti itu. Stake holder kita undang semuanya, spsri tidak hadir kemarin pak muslim

kasim ya waktu itu. Tapi memang gubernur kita hadir memang ada yang mewakili cuman sejauh ini belum dabar dari mereka

10. Apakah ada surat resmi dari pemerintah pusat

Ada sebenarnya bisaa diakes aja nanti, ini RUPTL nya yang sesuai dengan mentri psdm, kemudian tahun 2022 surat dari kemenkuekon menyatakan bahwa program tenaga listrikan merupakan proyek strategis nasional. Nah inin awalnya jadi PSN. kemudia baru dari mentri SDM buat perizinan ya. Dan kita buat laporan ra[ih karna lapor ke pemerintah daerah

11. Bagaimana penolakan kolektif itu dapat dikumpulkan

Door to door mereka itu, kami tau ada masyarakat dipaksa malah lebih dalam lagi, di padang laweh malalo itu ada di jorong tengah 20 namanya semua masyarakat menolak menandatangani, karna ada paksaan juga dan merek setuju dengan proyek ini, kan mereka mengatakan, kalau kami bersuara takutnya kami membentuk konflik disini jadi baiknya ya dalam tanda tangan ketika di paksa mereka memilih tidak mau .

12. Bagaimana peran PLTA di inisiasi?

Jika tau itu CSR kita dan dana kita semuanya disalurkan, dan tanggung jawab nya diselesaikan, kenapa ada gedung serba guna, masjid dan itu semuanya dari kami mereka cuman ya kita pernah minta PLTA ke siapa saja CSR di berikan dan ya ada beberapa orang yang memanfaatkan itu mungkin.

WAWANCARA JP

1. Bagaimana posisi pemerintah daerah terhadap rencana pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak?

Sudah pernah saya tawarkan juga sebelumnya untuk dipindah ke daerah solok cuman kan hitungan nya tetap salingka nagari dan juga panas bumi nya tidak sesuai.

2. Apakah pemerintah daerah telah memberikan persetujuan terhadap rencana pembangunan tersebut?

Disumatra barat itu intinya adalah masyarakat kalau dari suara masyarakat masih menolak kami pun turut mempertimbangkan yang terbaik
3. Bagaimana proses komunikasi antara pemerintah pusat, perusahaan, dan pemerintah daerah terkait proyek ini?
Kalau kami dari daerah solok mengetahui tapi memang tidak banyak terlibat karena daerah utama nya adalah kabupaten tanah datar
4. Apakah pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat?
Pasti kalau dari pemerintah daerah selalu mengusahakan yang terbaik untuk sebuah pembaharuan yang baik
5. Bagaimana pemerintah merespons penolakan atau kekhawatiran masyarakat?
Kami hanya bisa menjaga reputasi opini masyarakat dan membantu menyuarakan ya begitulah tugas kami
6. Apa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam komunikasi proyek ini?
Yang paling pasti adalah masyarakat kita itu sudah pintar dan punya nilai budaya yang mereka pertimbangkan dan dititik itulah buat kita sulit untuk memberikan pemahaman instan harus berproses
7. Bagaimana menurut pemerintah model komunikasi pembangunan yang ideal?
Pola komunikasi kita aturan nya berbeda karena daerah kita menjunjung tinggi nilai musyawarah begitu juga pendekatannya harus sesuai karena disini kita punya regulasi kebijakan sendiri seperti fungsional niniak mamak.

WAWANCARA FR

1. bagaimana sosialisasi ini dapat dilakukan sepengetahuan bapak?
sejujurnya saya tidak cukup tau dari keseluruhan karena saya diminta khusus untuk mengkaji ekologis lingkungan nya yang itu bisa dilakukan setelah disepakati itu aturan dari Indonesia Power nya, saya pernah kebersamaan dalam sosialisasi Indonesia Power di lokasi yang saya perhatikan kesalahan nya adalah karena Indonesia Power ini pernah

berhasil dalam pemasangan PLTS ini di Jawa Barat ini juga pernah saya nasehati juga itu tepatnya di Saguling jadi mereka menggunakan pola yang sama sedangkan di Minangkabau itu tidak bisa di samakan. Nah, polanya itu dia buat sama dengan di Sumatera Barat. Nah, padahal saya sudah kasih tahu bahwa polanya berbeda. Dia sudah melakukan sosialisasi oke. Nah, sosialisasi itu... Kenapa ya? Ada sebenarnya salah tafsir antara masyarakat dengan perusahaan itu sebenarnya. Dalam bentuk sosialisasi. Padahal, sosialisasi ini kan baru sekedar wacana kalau ada keinginan pemerintah untuk membuat PLTS.

Masyarakat merasa bahwa ini sesuatu yang sudah deal. Padahal sebenarnya kan sosialisasi kan belum. Belum, iya. Dokumen-dokumen Amdal Asia itu belum. Belum. Nah, kesalahan tafsirnya di sana karena memang selama ini pemerintah kita kan polanya seperti itu. Iya, iya. Nah, itu yang kemudian diikuti oleh kebanyakan organ-organ atau unit-unit yang dibawa dengan pemerintah. Padahal Sumatera Barat itu bukan... Ya, polanya harusnya berbeda.

2. bagaimana hambatan dalam komunikasi yang terjadi?

jadi kendala yang saya liat itu secara hambatan yang pertama memori kolektif masyarakat disana itu dengan trauma tentang konflik PLTA disana tu Fokus terhadap dana CSR nya itu yang simpang siur keberadaan nya. Masyarakat itu seluruhnya di anggap PLN semua, aslinya itu berbeda. Jadi yang PLTS dengan acwa ini dianggap sama dengan sebelumnya yang aslinya beda bagian dan tanggung jawab Betul, betul. Nah, kemudian yang membuat hambatan paling besar itu termasuk juga memori kolektif masyarakat di sana itu. Mereka itu memiliki semacam trauma dengan keberadaan PLTA Singkarak. Dan itu konfliknya keluar biasa. Konflik-konflik yang terjadi antara PLTA Singkara dengan masyarakat di sekitar Danau Singkara. Terutama terkait keselamatan air dan keberadaan CSR yang simpang-siur beradanya. Nah, ini di masyarakat itu seluruhnya itu dianggap PLN semua. Nah, padahal kalau yang saya tahu itu ketika saya ngobrol dengan orang-orang dari PLTA, dana CSR-nya turun, tetapi kemudian diselamatkan oleh masyarakat. Nah, ini yang kemudian membuat konflik antara masyarakat dengan PLTA itu semakin merungcing.

Terutama persoalan terkait dengan regulasi dan penyaluran dana CSR. Nah, keberadaan PLTS yang mau diusung oleh Ajuwangi itu saya kenakan itu adalah program PLN. Nah, ini yang kemudian membuat pengenalan pertamanya itu tidak harmonis langsung. Ya, kisahnya itu langsung di dalam sosialisasi itu serotek PLN yang tidak bertanggung jawab segala macam itu hadir ketika sosialisasi. Jadi, ini yang kemudian yang saya ikuti ya di hari itu. Tetapi, ketika saya kan juga ambil peran disenakkan pemerintah untuk, sampai ketika masyarakat itu tidak mau menandatangani kisah acaranya, ketika sudah diminta seperti itu. Saya kan cuma ngobrol saja dengan masyarakat, sampai kemudian mendapatkan beberapa informasi, mencoba mencari tahu beberapa informasi apa sebenarnya kendaliannya. Padahal, saya kasih informasi juga, ini kan baru sosialisasi. Tahap awal sosialisasi baru nanti akan dilakukan kajian ekologiannya dan sosialnya.

Jadi, itu terkait dengan dampak, dampak terkait dengan biotermasyarakat. Kalau itu dilakukan, kajian sosialnya dilakukan, baru akan dikasih informasi, apa diinformasikan ini layak atau tidak dilakukan. Fakte itu kan perlu dilakukan, harusnya kan tidak ada narasi penolakan terhadap pembangunan dan protes tersebut. Nah, selama ini yang justru masyarakat prangi itu, saya kenakan tidak pernah dilakukan permintaan, tidak pernah dilakukan kajian semacam. Padahal, setelah saya, saya cuma ada sekali sosialisasi tersebut, kemudian adik dan kawan-kawan itu kan melakukan semacam sosialisasi. Nah, harusnya penolakan itu belum booming lah dalam tanda kutip, selagi mekanismenya tidak dijalankan seutuhnya. Karena dalam sebuah program itu kan harus ada pertahapan-tahapan dan semacam, dikarekomendasinya secara fisik, secara sosial, kemudian baru ditangkap ini bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, yang selama ini terjadi penolakan itu hanya si pihak dari masyarakat. Kalau saya lihat argumentasi dari pihak ACWA itu, ketika saya diskusikan dengan masyarakat, ya masyarakat menerima aja. Jika saya ketemu dengan beberapa kelompok nelayan dan juga kelompok masyarakat, ACWA kasih masukan kalau PLTS-nya tidak akan menutupi permukaan danau. Nanti akan ada jalur tempat perahu, mereka tidak akan kena sentrum lah. Karena bayangin mereka PLTS-nya sentrum, kira-kira seperti itu ya.

Padahal tidak. Nah, kemudian kajian biologinya itu dari IPB, ada biologinan, justru dengan adanya PLTS itu, bagian bawah danau itu akan ada. Dan kemudian itu akan berdampak kepada semakin bagus biota danau itu. Nah, yang selama ini itu rusak di beberapa kawasan, di sana itu kan sudah mulai ada kerambah api, itu kan sangat rusak. Tapi kenapa kemudian masyarakat tidak mengerti rusak? Padahal dengan adanya PLTS itu bisa. Kemudian juga ada beberapa skema yang ditawarkan oleh ACWA itu, sampai kemudian dia sisa sampai ke Harapan. Nah, ACWA itu kan ngomong-ngomongnya, kata-kata rakyat-rakyat itu, sampai kemudian ada penawaran seperti itu. Nah, masyarakat kan, saya sampai hari ini tidak menemukan secara spesifik alasan penolakan dari masyarakat tersebut. Karena kalau yang saya baca ceritanya itu termasuk juga beberapa misi, kayak Pak pintu yang menolak, alasan penolakannya apa coba? Saya tidak melihat secara spesifik.

Terganggu misalnya terkait dengan mulaiat, mulaiat apa yang terganggu? Karena itu kan belum dilakukan kajian secara lebih detail. Jadi memang ada dua aktor yang berbeda sebenarnya terkait dengan kesini, aktor dari pemerintahan lokal, termasuk juga aktor dari masyarakat lokal. Saya tidak tahu kepentingannya apa, tapi mereka yang kemudian menularkan terkait dengan isu penolakan itu. Nah, itu kan nanti bisa kamu telusuri, itu mereka yang kemudian mencoba membuat narasi terkait dengan. Tapi saya tidak melihat apa poinnya coba misalnya. Ada yang mungkin punya data terkait dengan butir-butir penolakannya.

Itu mungkin kalau yang saya diskusikan dengan pihak ACWA, seluruh butir penolakan dari masyarakat itu sudah dijawab oleh pihak ACWA dan masyarakat tidak keberatan. Tetapi ke apa perbedaan terlaku? Saya tidak tahu. Logik lokal itu kan juga kuat. Nah itu, saya rasa itu yang sepengetahuan saya, karena tidak terlibat secara detail terkait dengan protektorsi. Sangat membantu sih Pak datanya. Tapi kalau bilang PLTA tadi, sebenarnya ada dana yang telah diturunkan, tapi kan memang dimanfaatkan banget.

3. Kenapa tidak itu menjadi solusinya, menjadi titik tengah dari komunikasi yang sudah terbangun dan keterbukaan penerimaan CSR?

Kalau saya kan tidak terlibat. Justru kalau itu dilakukan oleh mereka, saya akan menolak itu. Kalau itu dilakukan. Karena kalau itu dilakukan, itu sama saja kamu

membentuk masyarakat setempat. Justru kalau itu dihadirkan ketika pihak PLTA harusnya yang kemudian mengasih jawaban kepada masyarakat, kalau setiap tahun itu dana CSR-nya berapa, itu disalurkan ke mana. Karena saya baca datanya tuh. Ada datanya. Setiap tahun PLTA itu mengeluarkan dana CSR kepada masyarakat disurangkan dana segera. Itu ada datanya. Nah itu kemudian harusnya dipublish oleh PLTA. Karena isi itu kan tahun 2009, dari beberapa sebelas sampai kemudian terjadi korban yang dua juga kan. Di sana itu. Kalau itu dilakukan ya, enggak tepat juga kalau pihak jualan yang melakukan. Maksud juga kalau pihak IP yang melakukan. Yang berhak melakukan itu justru institusi PLTA-nya atau pemerintahnya. Yang lain kan rumah. Ya ada yang rumah juga. Kita enggak tahu. Sedangkan memang ada optimum juga di PLTA-nya, di masyarakatnya. Tapi saya baca datanya, ada dananya terus buat masyarakat. Itu dari PLN-nya. Mas Ade juga sempat sampaikan gitu kan. Tapi kami tidak punya kuasa sama tidak mau juga untuk menyebarkan itu. Tidak bisa, susah itu.

4. Menurut bapak bagaimana solusi komunikasi yang bisa kita optimalkan baik sebelum ataupun paska

Kelihatan dari berbagai ada bulu mulai kemudian. Dijadikan sebagai perumahan yang tidak mau kata mendaki, kata merek, kata menurun, semua macam. Di dunia Mamak, di daerah Selangka, di dunia Selangka, ada penghargaan hal-hal seperti itu. Nah polanya itu akan kelihatan. Di masyarakat itu, ada beberapa orang yang memang dia itu ditempatkan sebagai tempat bertanya tempat orang. Orang yang di tinggikan Selangka. Nah pola komunikasi yang paling bagus memang seperti itu. Kita menempatkan setiap orang itu sesuai dengan konteksnya. Nah pola itu yang kemudian harus hadir. Termasuk juga hal-hal yang paling fundamental itu adalah bagaimana boleh menempatkan posisi perempuan di sana. Karena selama ini kalau yang saya lihat pola sosialisasi itu cenderung didominasi oleh laki-laki yang kemudian. Padahal kalau kita bicara secara komunal, kalau nanti berkaitan dengan hak umum lain semua macam, pemegang kuasa itu adalah perempuan. Nah selama ini kelemahannya itu saya jarang melakukan ketika ada sosialisasi, ada rapat segala macam, perempuan itu tidak dilibatkan. Ini polanya agak berbeda. Misalnya saya pernah terlibat di pembangunan VOTA Musang. Nah di sana itu

ada dua skema sosialisasi yang dilakukan. Pertama itu memang dilakukan secara umum. Yang kedua itu memang khusus menyasar kepada ibu-ibu. Nah itu wajib dilakukan.

Karena kalau itu dilakukan ke dalam satu tempat, satu forum adalah kelahiran perempuan, itu juga tidak tepat. Karena biasanya ketika ada perempuan mau menyampaikan sesuatu dan itu dilihat oleh banyak laki-laki, apa yang dia sampaikan juga kemudian tidak keluar. Nah hal-hal seperti ini yang kemudian menurut saya perlu dipertimbangkan oleh berbagai pihak ketika melakukan sosialisasi.

Oke. Nah mungkin kamu bisa lihat juga tuh kenapa persoalan tol misalnya. Itu belum juga selesai. Coba tulusuri misalnya yang dikasus di 50 kota. Apa yang membuat masyarakat itu menolak?. Persoalan ini bukan kepada uang gantung. Ada satu kasus yang itu saya tidak tahu apakah masih ada beritanya atau tidak. Kasus terkait dengan cara pemerintah melakukan sosialisasi. Saya lupa namanya. Sampai kemudian masyarakat itu diburu oleh masyarakat. Ketika dia itu masuk ke masjid, masih menggunakan sepatu cuma. Oh pernah-pernah dengan berita ya? Sampai kemudian hal-hal spele itu yang kemudian membuat masyarakat itu menolak keberadaan dalam forum. Itu kan persoalan bagaimana dia tidak menempatkan dengan konteksnya.

Itu sempat heboh gitu dulu, sempat viral di social media. Saya tidak tahu apakah ada berita, cuma waktu itu di Facebook. Sempat ada rekamannya juga. Ada ya? Ada yang merekam. Itu sempat heboh. Dan yang jadi basis penolakan itu justru hal-hal yang kebetulan seperti ini. Sehingga kemudian orang Minah ini karakternya kan agak berbeda. Jika dia sudah merasa tidak dihargai, seberapa pun misalnya uangnya, dia tidak akan. Karena ada ego Minah yang kemudian agak kena.

Ya itu membuat itu tidak bisa dibahas. Karena menurut saya hal-hal seperti ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Makanya keterlibatan orang-orang yang sebenarnya sesuai dengan ilmuwan. Misalnya kalau di bagian ini kan penting misalnya ada para antropolog, ada sosiolog, ada komunikasi yang berbasis budaya. Kemudian dilibatkan dalam hal-hal. Bukan sesuatu yang seperti ini BSN, ini ya. Nah ini kan aneh sama hal-hal di Ayubaleng sampai kemudian terjadi di Mulu-Mulur. Sehingga penekanan itu kan cenderung sifatnya. Dong? Halo Ibu. Jadi itu yang menurut saya itu yang perlu

diperhatikan. Kecenderungan pemerintah itu termasuk juga beberapa organ di dalam itu, kayak BUMN itu melakukan itu percaya atau tidak. Dan seakan-akan ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Padahal itu belum tentu. Pembangunan itu belum tentu sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah basisnya ini yang kemudian tidak pernah dilakukan secara, secara polistik oleh pemerintah, bagaimana mereka mengindikifikasikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tiba-tiba datang bahwa ini adalah pembangunan, nanti ini berdampak 12-19 tahun. Padahal menurut saya itu adalah sebuah langkah yang menurut saya itu sangat-sangat penting. Nah itu yang sangat penting. Tapi itu dilakukan oleh pemerintah. Berapa banyak proyek yang berpengaruh ke PSN? Iya, tolak di semua terwaran. Bukan hanya di semua terwaran, tapi di Indonesia yang kemudian itu berkonflik dengan masyarakat.

Kalau di Batam, terakhir yang di Pulau Komo itu semuanya, yang di PSN, di Jakarta, di Toba juga. Itu kan ditolak oleh pemerintah. Karena memang mindset pemerintah itu hanya untuk melugi. Nanti untungnya seperti ini. Tapi keuntungan itu hanya kepada orang yang terlibat di sana, bukan kepada masyarakat yang terdampak di sana. Nah itu yang saya. Nah, kegiatan paling fatal yang dilakukan oleh pemerintah sampai... Kalau melihat kasus PLTS ini kan sudah kepalang.

Saya kritik ke pihak Ajuwa di pertama kali ketemu. Ketika mereka sudah menghitung atau bertemu dengan pemilik lahan untuk persoalan ganti ugi. Padahal, ini kan sesuatu yang belum jelas dulu. Sama seperti kenapa kemudian PPA itu mencari investor, kemudian mengambil lahan di Dandosingkara tanpa pengetahuan masyarakat di sana. Harusnya kan polanya dari bawah. Kedepannya ya, ini kan sesuatu yang harus dijelaskan secara lebih detail kepada masyarakat.

Untuk meruginya seperti apa. Masyarakat nanti kan harus secara fair mengkalkulasikan apakah ketika kegiatan ini dilakukan atau proyek ini dibuat di sana, kalkulasinya seperti apa. Nah, ini menurut saya itu harus didudukkan secara bersama-sama.

Bukan kepada orang yang kemudian tidak apa ya, kebanyakan orang luar yang tidak mendapatkan untung di sana tetapi kemudian mau terlibat. Nah, itu agak berbeda. Kan banyak tuh para perantau atau beberapa masyarakat yang sebenarnya tidak masuk ke dalam kawasan tersebut tapi dia justru yang mudah menjadi vokal untuk melakukan penolakan atau yang pro.
Itu kan agak aneh tuh, orang-orang yang tidak terdampak, tidak terlibat tetapi merasa berhak untuk bersuara. Itu menurut saya itu perlu dikurangi. Jadi, ini yang saya pernah ditawarkan oleh ACWA itu untuk mencoba memetakan ini.
Tapi dijudulannya kurang jadi sehingga itu tidak bisa saya lakukan. Karena saya diminta sama Prof. Ridzal juga. Iya, Prof. Afridzal. Pernah diikat sama saya, Prof. Afridzal, untuk baik identifikasi penolakan tersebut sampai kemudian menunjukkan masyarakat kami menolak dalam artian kami tidak mau melakukan itu. Yang kami mau itu kami melakukan riset. Tapi pihak ACWA tidak mau.
Pihak ACWA itu maunya sosialisasi. Nanti mereka datang, saya hanya sekedar apa itu, memfasilitasi. Padahal mau. Tapi kalau dilemahin di... Karena saya dikontaknya. Mas Teguh itu tahu, untuk mengidentifikasi itu. Tapi kalau dia deal, kalau saya melakukan riset mungkin bisa lebih dapat data yang lebih kompleks. Apa alasan siapa aktornya kemudian. Kenapa kemudian Bupatinya, ya... Bupatinya juga tahu itu. Alasan penolakan, dia minta dana berapa, kamu kalau cari tahu itu dapat.
Dapat sebenarnya Pak. Udah dapat sebenarnya dana. Itu kan sesuatu yang bermain di balik itu sebenarnya. Dia minta berapa, nanti bisa diberikan berapa. Berarti penolakan itu bukan sesuatu yang pure berbasis kepada cara mereka melindungi aset masyarakat itu. Kepentingannya aja Pak. Kepentingannya bermain. Jadi kalau pertanyaan Bupat gitu, bagaimana ke depannya, ya itu pasti tetap akan bisa. Sehingga pihak IPE hadir, masyarakat yang murni terdampak itu hadir, sehingga nanti akan lihat kalkulasinya seperti apa.
Pihak IPE itu punya data secara fisiknya, dampak alam, lingkungan termasuk juga bidang sekat itu seperti apa, dampak sosialnya nanti juga mereka punya datanya, kan tinggal dipaparkan itu aja. Masyarakat nanti merasanya seperti apa, nah itu yang

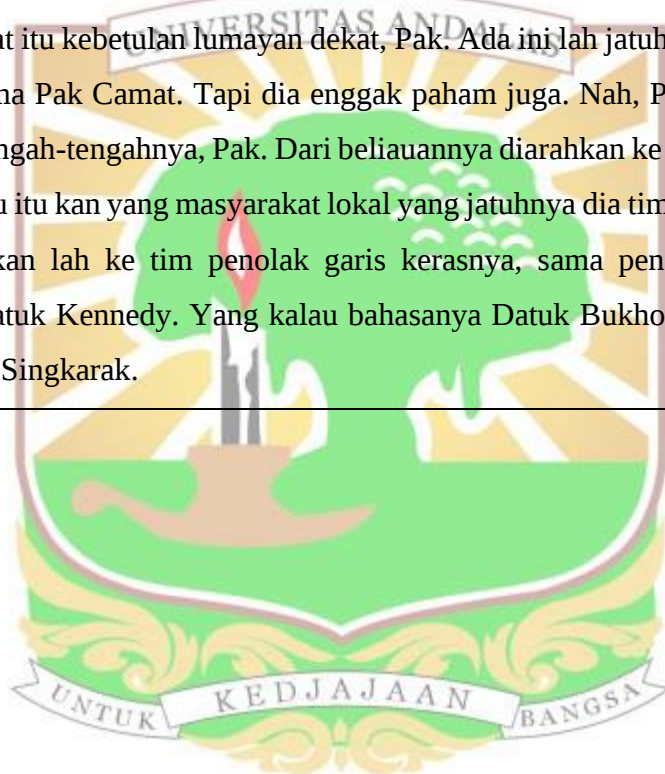
kemudian harus dipertemukan. Nah kalau itu dipertemukan, kan bisa dihitung kalkulasinya seperti apa. Ini memuntungkan atau tidak? Masyarakat itu kan itu mau lihat itu. Selagi memuntungkan ya, nggak ada sesuatu ini yang sebetulnya statis di tengah masyarakat. Ya, karena ini pasti akan menjadi keuntungan bagi mereka. Kalau mereka menjaga lingkungan, saya nggak yakin tuh. Karena berapa banyak kerampahnya di sana. Kerampah itu justru lebih parah dan besar lingkungannya. Kalau itu dibiarkan saja, ya sama kayak dalam lingjau nanti. Terus kamu lihat di daerah bagian ke Malalu sampai ke Ananggan, itu berapa banyak yang kemudian menggunakan bom ikan. Jadi kalau mereka isunya pelisarian lingkungan itu bom tuh.

Mereka aja justru menggunakan bom, semacam. Jadi ada sesuatu yang harusnya dikalkulasikan, keuntungan secara ekonomi, keuntungan secara sosial itu seperti apa. Berarti kerampah itu masuk merugikan ke dalam lingjau. Coba biarkan kerampah itu. Itu menguntungkan merugikan. Kalau dibiarkan, nanti kerampah itu semakin banyak. Itu akan merusak biota danau. Soalnya kan awalnya Rahman cuma berpandangan sepihak, Pak. Karena pelitiannya kan kajiannya kritis. Jadi memang diizinkan sama Pak M. Pak M pakai apa? AWK? Enggak. Rahman pakai dekontruksi, Pak. Kalau dekontruksi itu, kamu harus baca

Iya, pakai Verklau. Pakai analisis bacana kritis itu. Kalau metodenya enggak seperti itu, itu enggak bisa. Cuman yang ini kan dia dikajinya dalam konteksnya komunikasi, Pak. Bukan kajian linguistik, kan, Pak. Jadi dekontruksi deridanya, Rahman padukan sama dramaturgi. Nah, dramaturgi itu adalah naratif kepentingan yang depan dan belakang tadi itu, Pak. Jadi kan terlihat, Pak, semakin banyak informasi Rahman ini sebenarnya dituntut waktu harus selesai bulan ini, Pak. Kalau enggak kan kena di bulan depan, kan, Pak. Cuman makin lama makin menarik itu, Pak. Informasinya semakin terlihat kayak awalnya Rahman cuma dari masyarakat bawah saja, kan. Memang di masyarakat bawah itu beberapa masyarakat bahkan ada yang enggak tahu sebenarnya.

Dengan informasi walaupun besar isu penolakannya, tapi ada beberapa masyarakat, ya, baguslah sebenarnya kalau dipasang gini-gini. Ada juga yang cuma ngikut-ngikut. Kalau ditanya ke masyarakat itu poin per poin isu penolakan itu ya enggak tahu semua.

Penulis: bagaimana sistem komunikasi in sehingga penolakan ini jadi besar?
Kita lihat balik balik penolakan itu luar biasa. Itu sesuatu yang sifatnya sistematis. Itu dibuat secara sistematis isu penolakan itu. Nah, itu jelas. Ada upaya untuk menyistematiskan gerakan ini. Nah, coba kamu cari aja siapa beberapa orang yang sudah terima penolakan itu.
Mereka yang sudah paham apa motifnya. Bukan hanya Bupati Tenaga Dasar juga? Iya, Pak. Kemarin sudah sempat, Pak. Cuma memang Bupati menyerahkan kebawahannya. Kayak yang tanggung jawab dinas infrastasi daerah terus sama Pak Camat. Pak Camat itu kebetulan lumayan dekat, Pak. Ada ini lah jatuhnya. Sama Minbat-Minton kalau sama Pak Camat. Tapi dia enggak paham juga. Nah, Pak Camat memang dia orang yang tengah-tengahnya, Pak. Dari beliauannya diarahkan ke Malin Makau, Pak. Dan Malin Makau itu kan yang masyarakat lokal yang jatuhnya dia tim netral lah jatuhnya ini. Nah, diarahkan lah ke tim penolak garis kerasnya, sama pendengah. Ke Datuk Bukhori sama Datuk Kennedy. Yang kalau bahasanya Datuk Bukhori itu Ketua Forum Penolakan PLTS Singkarak.



Lampiran 2: Domumentasi Informan



Sosialisasi investor



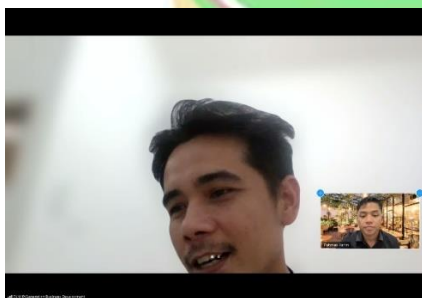
Informan MM



Informan JP



Informan AB



Informan AD



Informan MW



Informan D dan N



Informan HY



Informan DT.K



Informan FR



Informan DT.B



Informan CM

Lampiran 3: Rekapitulasi Sosialisasi PT. Indo Acwa ke masyarakat dan daerah

Rekapitulasi Kegiatan PT. Indo Acwa Tenaga Singkarak Dalam Rangka Pembangunan PLTS Terapung Singkarak						
No.	Uraian	Hari	Tanggal	Tempat	Peserta	Keterangan
1	Sosialisasi dengan Nagari Batu Taba	Kamis	13 April 2023	Kantor Wali Nagari Batu Taba	WN Batu Taba dan unsur	Perkenalan awal
2	Sosial Ramadhan dengan Nagari Padang Laweh Malalo	Kamis	13 April 2023	Nagari Padang Laweh Malalo	Unsur nagari, tokoh masyarakat, anak yatim dan fakir miskin	Pembagian sembako dan buka bersama
3	Sosial Ramadhan dengan Nagari Sumpur	Jum'at	14 April 2023	Nagari Sumpur	Unsur nagari, tokoh masyarakat, anak yatim dan fakir miskin	Pembagian sembako dan buka bersama
4	Sosialisasi di Nagari Gunung Rajo	Kamis	8 Juni 2023	Kantor Wali Nagari Gunung Rajo		
5	Sosialisasi dengan pemilik Lahan di Nagari Sumpur	Kamis	8 Juni 2023	Nagari Sumpur	Pemilik lahan	
6	Sosialisasi Publik di Kecamatan Batipuh Selatan	Selasa	1 Agustus 2023	Kantor Camat Batipuh Selatan	Perwakilan Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, Camat Batipuh Selatan, perangkat nagari, tokoh masyarakat dari 4 nagari Batsel	Sosialisasi awal untuk menjelaskan kegiatan PLTS Terapung Singkarak
7	Sosialisasi Publik di Kecamatan Batipuh	Rabu	2 Agustus 2023	Kantor Camat Batipuh	Perwakilan Dinas Kabupaten, Kota Padang Panjang, Camat Batipuh, Camat Padang Panjang Barat, Forkopimca, Walinagari yang dilalui transmisi, tokoh masyarakat dan pemilik lahan	Sosialisasi awal untuk menjelaskan kegiatan PLTS Terapung Singkarak
8	Sosialisasi di Nagari Padang Laweh Malalo	Kamis	23 November 2023	Aula Kantor Wali Nagari Padang Laweh Malalo		
9	Rapat progres PLTS Terapung Singkarak	Senin	4 Desember 2023	Aula Eksekutif	Perwakilan PT. PLN Indonesia Power, PT. Indo Acwa Tenaga Singkarak, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perencanaan dan Pembangunan dan Kepala OPD serta Kepala Bagian yang terkait	Kesimpulan rapat sebagai berikut: a. Pembangunan PLTS Terapung Singkarak adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mencapai target nasional bauran energi 23% Pembangkit Energi Baru dan Terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan pada tahun 2025 b. PT. Indo Acwa Tenaga Singkarak perlu meningkatkan intensitas dan cakupan sosialisasi sehingga kegiatan ini dapat diterima masyarakat dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari c. Status lahan yang digunakan untuk kegiatan Pembangunan PLTS Terapung Singkarak harus clean and clear d. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendukung kegiatan PLTS Terapung Singkarak sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, memperhatikan kelestarian lingkungan dan sudah melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat



No.	Uraian	Hari	Tanggal	Tempat	Peserta	Keterangan
10	Sosialisasi di Nagari Tanjung Barulak	Jum'at	8 Desember 2023	Nagari Tanjung Barulak		
11	Audensi Bupati dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	Selasa	16 Januari 2024	Gedung Indojolito	Kemenko Marves, Bupati dan jajaran, BPN	a. Multiplier effect dari pembangunan belum tergambar dengan jelas, jadi perlu kajian yang lebih mendalam dari PT. PLN Indonesia Power, karena dengan adanya PLTS Terapung ini, tentu nantinya akan memberikan dampak atau pun perubahan-perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung. b. Perlu sosialisasi lebih lanjut sampai ke nagari dan penyamaan persepsi dengan masyarakat di Kecamatan Batipuh Selatan, Kecamatan Batipuh dan Kecamatan X Koto. c. Secara prinsip, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Bupati mendukung proyek PLTS Terapung ini, namun secara tertulis dukungan akan berikan setelah seluruh persoalan ini selesai, sehingga tidak menimbulkan permasalahan. d. Sepakat PT. PLN Indonesia Power dan PT ACWA Power dalam menetapkan lokasi switchyard dan jalur transmisi akan menghindari area konflik agar tidak muncul konflik baru
12	Sosialisasi di Nagari Paninjauan	Rabu	17 Januari 2024	Nagari Paninjauan	Unsur nagari, bundo kanduang, pemuda dan pemilik lahan	Sosialisasi terkait rencana jalur transmisi
13	Sosialisasi di Nagari Batu Taba	Kamis	7 Maret 2024	Kantor Wali Nagari Batutaba	WN Batu Taba dan unsur, tokoh masyarakat, bundo kanduang, kelompok nelayan dan pemuda	Sosialisasi lanjutan, diminta pihak PLTS melakukan sosialisasi tambahan yang menghadirkan para ahli untuk menyampaikan dampak dan manfaat PLTS
14	Sosialisasi Warga di Nagari Panyalaian	Jumat	8 Maret 2024	Nagari Panyalaian	Unsur nagari, perwakilan KAN, bundo kanduang, dan pemilik lahan	Sosialisasi terkait rencana jalur transmisi
15	Koordinasi dengan Nagari Sumpur	Jumat	8 Maret 2024	Kantor Wali Nagari Sumpur	Walinagari dan Sekretaris Nagari	Koordinasi penentuan jadwal sosialisasi lanjutan
16	Audensi dengan Gubernur Sumatera Barat	Minggu	24 Maret 2024	Padang	Gubernur dan jajaran	Penyampaian progres dan sudah mendapat surat dukungan Gubernur Sumbar
17	Sosialisasi dan Baksos di Nagari Bungo Tanjung	Selasa	26 Maret 2024	Nagari Bungo Tanjung	Unsur nagari, tokoh masyarakat, anak yatim dan fakir miskin	Pembagian sembako dan buka bersama
18	Sosialisasi dan Baksos Nagari Batu Taba	Rabu	27 Maret 2024	Aula Kantor Wali Nagari Batu Taba	Unsur nagari, tokoh masyarakat, anak yatim dan fakir miskin	Pembagian sembako dan buka bersama
19	Sosialisasi dan Baksos Nagari Sumpur	Rabu	27 Maret 2024	Nagari Sumpur	Unsur nagari, tokoh masyarakat, anak yatim dan fakir miskin	Pembagian sembako dan buka bersama
20	Sosialisasi dengan Nagari Sumpur	Rabu	3 Juli 2024	SMPN 1 Sumpur	BRIN, Dinas PMPTSP, Camat Batsel, Forkompinca, Wali Nagari Sumpur, KAN, BPRN, tokoh masyarakat, nelayan, pemuda	Pemaparan dari BRIN terkait penelitian Danau Singkarak dan Ikan Bilih, diseminasi dan menerima masukan, tanggapan tentang PLTS terapung
21	Audensi dengan Kecamatan Batipuh Selatan	Rabu	24 Juli 2024	Kantor Camat Batipuh Selatan	Camat Batipuh Selatan	Update progres kegiatan PLTS Terapung Singkarak yang telah dilakukan di nagari-nagari terdampak
22	Sosialisasi dengan Masyarakat Nagari Batu Taba	Rabu	24 Juli 2024	Nagari Batu Taba	Nelayan bagan dan nelayan tradisional	Diskusi rencana layout rencana PLTS Terapung untuk Nagari Batu Taba

No.	Uraian	Hari	Tanggal	Tempat	Peserta	Keterangan
23	Sosialisasi dan Diskusi Nagari Sumpur	Kamis	25 Juli 2024	Nagari Sumpur	Perwakilan masyarakat	Diskusi rencana layout rencana PLTS Terapung untuk Nagari Sumpur
24	Sosialisasi dan Diskusi Nagari Padang Laweh Malalo	Kamis	25 Juli 2024	Kantor Nagari Padang Laweh Malalo	Walinagari dan unsur nagari serta Ketua Nelayan Bagan	Diskusi rencana layout rencana PLTS Terapung untuk Nagari Padang Laweh Malalo
25	Sosialisasi dan Diskusi Nagari Padang Laweh Malalo	Rabu	7 Agustus 2024	Kantor Nagari Padang Laweh Malalo		
26	Rapat Koordinasi Infrastruktur Ketengalistrikan Proyek PLTS terapung Singkarak	Jum'at	9 Agustus 2024	Aula Eksekutif	Kemenko Marves, PT. PLN IP, PT ACWA, Bupati diwakili Asisten Ekobang dan perangkat daerah terkait	1. Akan dibentuk tim teknis yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemkab tanah Datar, PT. PLN IP, PT. ACWA Power dan PT. Indo ACWA Tenaga Singkarak 2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sepakat akan memberikan surat dukungan Bupati Tanah Datar atas rencana pembangunan PLTS Terapung Singkarak apabila segala hal yang dipersyaratkan sudah dipenuhi oleh pihak pemrakarsa 3. Semua pihak akan menindaklanjuti hasil rapat ini dengan mengacu pada target dan tenggang waktu yang tercantum dalam risalah rapat ini
27	Sosialisasi dan Diskusi dengan masyarakat Nagari Batu Taba dan Nagari Padang Laweh Malalo	Rabu	14 Agustus 2024			
28	Sosialisasi di Nagari Padang Laweh Malalo	Selasa	3 September 2024	Kantor Nagari Padang Laweh Malalo	Walinagari beserta segenap unsur perangkat dan tokoh masyarakat	BA Sosialisasi sudah ditandatangani (akan dilakukan musyawarah nagari lagi) dan dilanjutkan sosialisasi berikutnya oleh PT. IATS. Dalam rapat dinyatakan bahwa PT. IATS dalam melanjutkan ke tahap berikutnya
29	Sosialisasi di Nagari Sumpur	Rabu	25 September 2024	SMP 1 Sumpur	Walinagari beserta segenap unsur perangkat dan tokoh masyarakat	BA Sosialisasi tidak ditandatangani oleh nagari dan perwakilan masyarakat, semua menyatakan memperbahakan PT. IATS lanjut ke tahap berikutnya namun ada perubahan sikap
30	Sosialisasi di Nagari Batu Taba	Kamis	26 September 2024	Kantor Walinagari batu Taba	Walinagari beserta segenap unsur perangkat dan tokoh masyarakat	BA Sosialisasi tidak ditandatangani oleh nagari dan perwakilan masyarakat, dan masyarakat menolak kegiatan PLTS untuk Batu Taba

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Lampiran 4: Berkas Penolakan Masyarakat

Tim Peduli Ulayat Nagari Guguak Malalo

Review Perjanjian PLN dengan Masyarakat Nagari Guguak Malalo
yang dilakukan pada Sabtu, 23 Juli 202

TPUN ONLY

Doc /Secrets/23 /VII/2023

Sekretariat TPUN GM

Mansyahril

DOKUMEN

**PENOLAKAN FORUM ANAK NAGARI BATIPUH
SELATAN**

**TERHADAP PEMBANGUNAN PLTS (PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA SURYA) TERAPUNG DIWILAYAH
DANAU SINGKARAK**

(Sumber: Data yang diberikan oleh Masyarakat)